



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



**PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

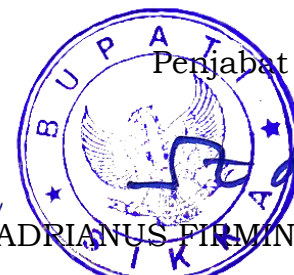
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 terdiri dari tujuh (7) bagian yang terdiri dari (1) pendahuluan; (2) gambaran umum kondisi daerah; (3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah; (4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; (5) Rencana kerja dan pendanaan; (6) kinerja penyelenggaran pemerintah; dan (7) Penutup.

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang akan memberikan masukan dan saran yang konstruktif, untuk penyempurnaan dokumen ini guna penyusunan dokumen pada tahap berikutnya.

Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.

Maumere, Juli 2024

Penjabat Bupati Sikka,



ADRIANUS FIRMINUS PARERA, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistimatika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-11
2.3. Aspek Daya Saing	II-19
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-21
2.5. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka	II-72
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Pendapatan Daerah	III-7
3.3. Belanja Daerah	III-19
3.4. Pembiayaan Daerah	III-27
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025	IV-4
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025	IV-10
4.4. Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025	IV-11
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
5.1. Rencana Pendanaan Berdasarkan Urusan dan PD	V-1
5.1. Rencana Pendanaan Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan.	V-4
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VI-2
BAB VII PENUTUP	VII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 disusun dengan berpedoman DPPMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar dan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yaitu :

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan Rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan Rancangan Akhir RKPD;
- f. penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka secara teknokratik. Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan baik perencanaan regular (Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Musrenbang Nasional) yang dipadukan dengan perencanaan politik dan Renja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun kedua pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan tetap mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Bupati dengan Tema RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah **“Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan serta Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas”**.

Keterkaitan Tema Pembangunan pada RKP, RKPD Provinsi NTT dan RKPD Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025		
RKP Nasional	RKPD Provinsi	RKPD Kabupaten
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan	Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang Berkualitas”	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Berkbasis Lingkungan serta Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sikka tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

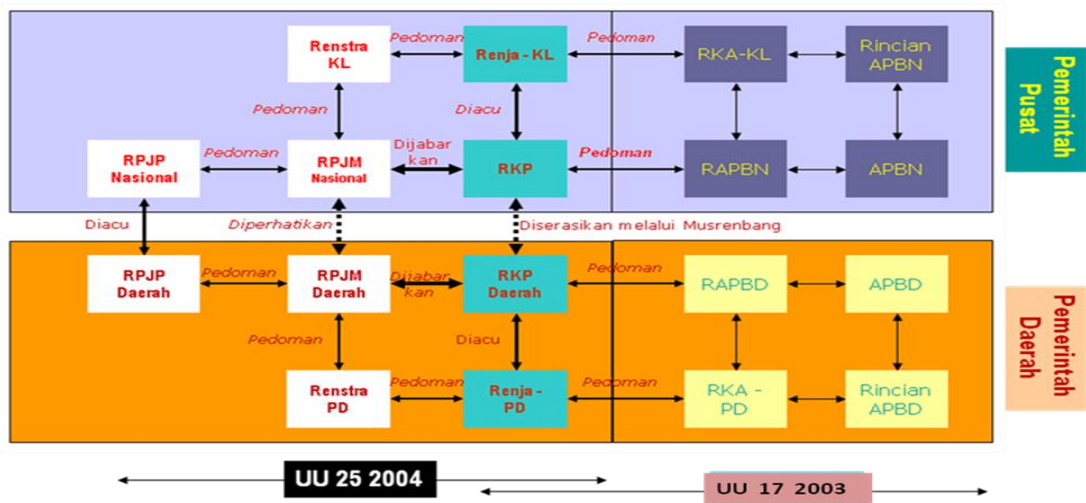
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 139);
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2).
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara normatif, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari DPPMD.

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sikka Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I **Pendahuluan**,** yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.
- Bab II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**,** yang menguraikan gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, Evaluasi Capaian pelaksanaan pembangunan dan Permasalahan pembangunan daerah.
- Bab III **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**,** yang menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan kinerja keuangan daerah.
- Bab IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**,** yang menguraikan tentang Arah kebijakan Pembangunan Nasional, Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTT, Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi dan Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Program dan target kinerja pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- Bab V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**,** yang menguraikan tentang perencanaan Per Urusan, Per Perangkat Daerah, Per Program, Per Kegiatan, Per Sub Kegiatan beserta dengan target kinerja, besaran anggaran dan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- Bab VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**,** yang menguraikan tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- Bab VII **Penutup****

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografis

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Sikka terletak di Pulau Flores, memiliki luas wilayah 1.731,91 Km² atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Secara geografis Kabupaten Sikka terletak antara 80 22' LS sampai dengan 80 50' LS dan 121° 55' 40" BT sampai 122° 41' 30" BT

Gambar 2.1
Peta Geografis Kabupaten Sikka



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara sebanyak 4 desa dan Kecamatan Alok Barat sebanyak 4 kelurahan.

Nama kecamatan dan ibukota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
1	Paga	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	Wolofeo	79,78	4,61
3	Mego	Lekebai	111,26	6,42
4	Lela	Lela	31,33	1,81
5	Bola	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	Edat	30,41	1,76
7	Mapitara	Hebing	81,02	4,61
8	Talibura	Talibura	260,11	15,02
9	Waiblama	Tanarawa	144,36	8,34

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
10	Waigete	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	Baowunut	17,58	1,02
13	Kangae	Waipare	38,43	2,22
14	Nelle	Nelle Urung	14,65	0,85
15	Koting	Koting B	23,56	1,36
16	PaluE	Uwa	41	2,37
17	Nita	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	Kota Uneng	14,64	0,85
20	Alok Barat	Wailiti	62,75	3,62
21	Alok Timur	Waioti	92,34	5,33
	JUMLAH		1.731,91	100

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km² atau 15,02%, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km² atau 0,85%.

B. Topografi

Topografi adalah keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Berdasarkan peta ketinggian lahan di atas dapat dijelaskan bahwa topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas ketinggian dengan uraian sebagai berikut:

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24%;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03%;
3. Topografi dengan ketinggian 100-500 m dpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81%;
4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54%;
5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37%

Gambar 2.2.
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: RTRW Kabupaten Sikka, 2012–2032

C. Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembapan udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara (C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22.20	27.44	33.40	56.00	81.10	99.00
Februari	23.00	26.63	31.60	70.00	88.07	99.00
Maret	23.10	27.54	34.70	57.00	82.35	97.00
April	22.40	27.69	34.40	56.00	80.47	98.00
Mei	22.20	27.66	34.00	46.00	71.06	88.00
Juni	21.80	27.00	34.00	47.00	73.97	99.00
Juli	22.00	27.00	33.10	44.00	72.45	98.00
Agustus	19.60	26.84	35.10	31.00	64.52	87.00
September	19.60	27.23	35.30	24.00	62.63	89.00
Oktober	22.80	28.47	35.40	51.00	68.81	81.00
November	23.20	29.69	36.80	46.00	69.37	97.00
Desember	23.70	29.44	36.80	48.00	73.74	93.00

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten memiliki suhu yang cenderung panas. Dari stasiun meteorologi Maumere tercatat suhu maksimum pada tahun 2023 adalah pada bulan November dan Desember 36,80°C dan suhu minimum pada bulan Agustus dan September 19,60°C. Kelembaban udara minimum terjadi pada bulan September sebesar 24%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari sampai Februari dan Juni dengan besaran 99%. Sedangkan secara umum rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	126.20	16	96.8
Februari	385.30	24	91.0
Maret	43.00	13	96.8
April	104.20	18	95.9
Mei	1.00	4	100.0
Juni	77.10	5	96.7
Juli	7.70	5	100.0
Agustus	0.20	1	97.3
September	0.00	1	100.0
Oktober	1.00	3	100.0
November	38.80	12	100.0
Desember	79.70	18	100.0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Curah hujan terendah terjadi pada Bulan September karena tidak ada hujan, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari 385,30 mm. sedangkan Penyinaran matahari terendah pada bulan Februari sebesar 91 jam dan tertinggi pada bulan Mei, Juli, September, Oktober, November dan Desember sebesar 100 Jam.

Kecepatan angin dan tekanan udara di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	1.28	2.19	8.23	1.003,90	1.006,42	1.009,70
Februari	1.28	2.16	7.71	1.004,10	1.006,10	1.008,20
Maret	1.49	1.91	6.17	1.006,00	1.008,36	1.011,50
April	1.64	2.22	7.20	1.006,20	1.007,60	1.010,40
Mei	1.69	3.13	7.20	1.006,20	1.010,32	1.013,60
Juni	1.54	2.59	7.20	1.007,90	1.010,14	1.011,60
Juli	2.05	3.11	7.20	1.009,40	1.011,01	1.013,10
Agustus	1.23	2.48	8.74	1.010,70	1.012,20	1.014,50
September	1.80	2.29	7.71	1.010,50	1.011,49	1.012,50
Oktober	1.69	2.27	8.23	1.009,50	1.011,37	1.012,50
November	1.54	2.35	7.71	1.006,70	1.008,74	1.010,30
Desember	1.64	2.34	7.71	1.005,10	1.007,63	1.010,50

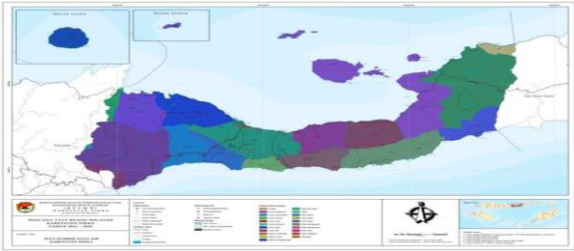
Sumber : BMKG Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar 1014,50 mb dan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2023 sebesar 1008,20 mb. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar 8,74 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Maret tahun 2023 sebesar 6,17 knot.

D. Hidrologi

Kondisi Hidrologi adalah keadaan yang menggambarkan tentang air di bawah tanah, ketersediaannya, peredaran dan sebarannya, sifat kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan termasuk hubungannya dengan makhluk hidup di suatu wilayah. Kondisi hidrologi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4.
Peta Hidrologi Kabupaten Sikka



Sumber : RTRW Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan Peta Hidrologi tersebut dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari tiga sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan;

1) Sumber Air Hujan dan Air Hujan

Sumber air hujan di wilayah Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh iklim dan curah hujan. Pada umumnya kondisi iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan kering, dengan musim hujan yang pendek yang jatuh pada sekitar bulan November hingga Mei. Akibat rendahnya curah hujan dan sedikitnya hari hujan sangat mempengaruhi keadaan air tanah dan keadaan debit air sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sikka. Data curah hujan pertahun dari 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Data Curah Hujan Kabupaten Sikka

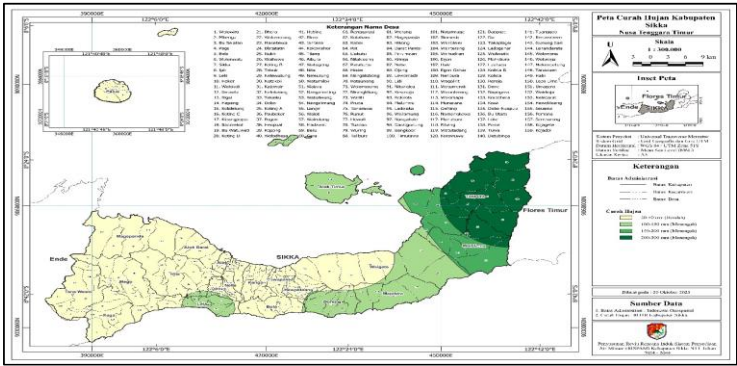
Bulan	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)	Curah hujan (mm)	Hari hujan (hh)
Januari	166,7	23	311,3	20	80,9	18	181	17	126,20	16
Februari	225,3	16	219,3	14	99	20	409,8	24	385,30	24
Maret	65,6	8	115,2	16	81,5	19	154,3	15	43,00	13
April	16,3	3	42,8	9	102,7	10	94,3	9	104,20	18
Mei	-	-	15	2	116,4	12	-	-	1,00	4
Juni	-	-	4	1	24,1	5	22,8	5	77,10	5
Juli	-	-	-	-	-	1	-	-	7,70	5
Agustus	12,9	3	-	-	0,4	3	9,3	4	0,20	1
September	0,5	1	TTU	1	1,5	3	27,6	5	-	1
Oktober	21,6	1	12,5	2	18,4	9	28	3	1,00	3
November	76,2	15	18	4	54,5	15	287,2	17	38,80	12
Desember	288,4	18	93,6	10	381,9	24	210,5	16	79,70	18

TTU : hujan tidak terukur

(Sumber : BPS Sikka dalam Angka, 2019-2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan peta curah hujan berdasarkan RDTR Kabupaten Sikka. Didalam peta terlihat bahwa daerah dengan curah hujan yang paling tinggi yaitu sekitar 200-300 mm meliputi wilayah Talibura. Data curah hujan sekitar 150 – 200 mm meliputi Sebagian wilayah Waiblama. Kemudian data curah hujan 100 -150 mm meliputi daerah Mapitara, Doreng, dan sebagian wilayah Lela. Selain wilayah yang disebutkan sebelumnya, merupakan daerah dengan catatan curah hujan rendah.

Gambar 2. 5
Peta curah hujan kabupaten sikka



Sumber : Dokumen RISPAM 2024-2044

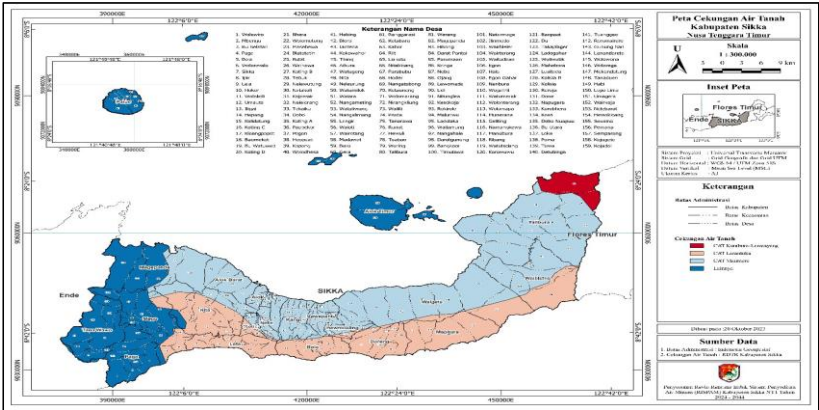
2) Air Tanah

Struktur batuan geologi wilayah Kabupaten Sikka sangat mempengaruhi terhadap potensi air tanah, batuan yang terdapat di wilayah ini, yaitu batuan gunung api kuarter dan alluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrogeologi wilayah ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan celah batuan keras, aliran melalui celah, retakan dan saluran. Sumber air tanah ini sangat dipengaruhi oleh produktifitas aquifernya. Menurut (Jone, 2018) diketahui bahwa kedalaman muka air tanah sangat dalam dibagian Tenggara daerah penelitian yaitu wilayah Kopong, Kecamatan kewapante dan dangkal dibagian Barat Laut daerah penelitian yaitu wilayah Kolisia sampai wilayah Magepanda. Kedalaman muka air tanah ini mengikuti keadaan topografi daerah setempat. wilayah potensi air tanah sedang - tinggi dengan debit aliran berkisar 8.47 – 17.05 liter/detik meliputi wilayah Kecamatan Magepanda dan Bagian Barat Kecamatan Alok Barat dan wilayah potensi air tanah kecil – sedang dengan debit aliran berkisar 1.59 – 8.31 liter/detik meliputi wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Bagian Utara Kecamatan Nita, Nele dan Koting.

Tabel 2. 6
Wilayah potensi air tanah di CAT Maumere

Potensi	Wilayah
Tinggi	Kecamatan Magepanda dan Bagian Barat Kecamatan Alok Barat
Rendah	Bagian Barat Magepanda,Barat – Barat Laut Magepanda dan Bagian Utara Magepanda
Tinggi	Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Bagian Utara AlokTimur, Kangae, Bagian Utara Kangae, Kewapante, Waigete, Hewokloang
Rendah	Bagian Utara Kecamatan Nita, Nele, Koting, Bagian Selatan Kecamatan Kangae, dan Selatan KecamatanKewapante

Gambar 2. 6
Peta Cekungan Air tanah Kabupaten Sikka

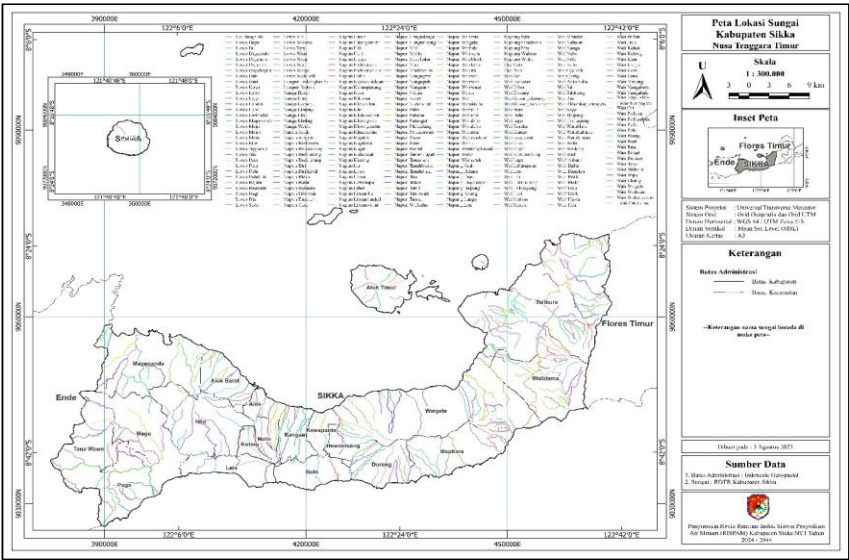


Sumber : Dokumen RISPAM 2024-2044

Selain potensi air tanah yang ditunjukkan pada data cekungan air tanah, Kabupaten Sikka juga tersebar sumur-sumur sebagai sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan air baku.

- 3) Air Permukaan
- Air permukaan berasal dari air sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Sikka dalam skala kecil dan sedang. Iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Berdasarkan data yang ada, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi pada umumnya hanya mengalir pada musim hujan. (Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten Sikka, 2021). Visualiasi dari letak sungai yang tersebar di Kabupaten Sikka dengan total panjang sungai sekitar 4,342.56 km dari data natural RDTR dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 7
Peta aliran sungai Kabupaten Sikka

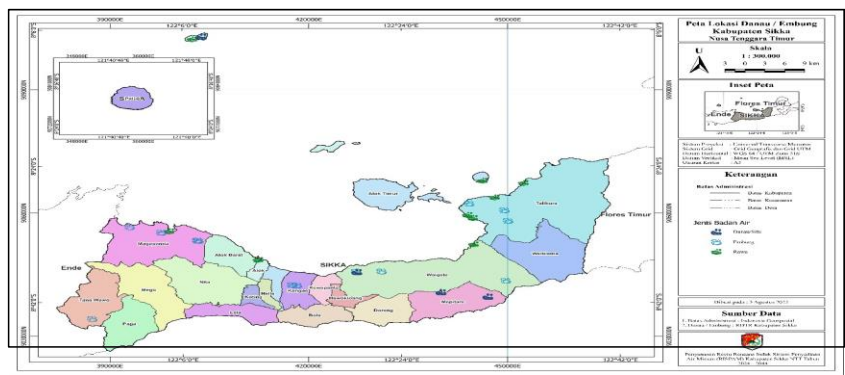


Sumber : Dokumen RISPAM 2024-2044

Selain Sungai, Kabupaten Sikka memiliki danau dan rawa. Kabupaten Sikka memiliki 4 danau di Desa Hale, Egon Gahar, Wair Bleler, Semparong. Pada beberapa daerah juga memiliki rawa yang berpotensi untuk dimanfaatkan, yaitu berjumlah 7 yang berlokasi di Desa Wolomarang, Runut, Magepanda, Darat Pantai, Wailamung, Parumaan, Semparong. Dan juga memiliki 12 embung yang tersebar di Kabupaten Sikka. Tetapi untuk air rawa yada pada umumnya memiliki kualitas air yang sulit diolah maka menurut Kemenkes-Permenkes no.492 tahun 2010, mengolah air rawa menjadi air bersih harus melalui saringan secara fisik dan pengolahan secara kimia dan biologi agar air yang menjadi hasil olahan bisa digunakan untuk air minum. Pengolahan air

rawa menjadi air bersih bisa dilakukan dengan cara saringan secara fisik yang terdiri dari pasir, krikil halus, krikil kasar, ijuk serta arang. Tetapi untuk mengolah air rawa menjadi air minum tidak dapat hanya memenuhi syarat fisik, namun harus memenuhi secara kimia dan biologi (menambahkan tawas sebagai koagulant dan kaporit sebagai zat pembunuh bakteri) agar air tersebut bisa digunakan arang serta memenuhi persyaratan untuk air minum. Untuk menghilangkan bau bisa digunakan arang beserta ijuk yang bisa berfungsi untuk menyerap aroma yang terdapat didalam air.

Gambar 2. 8 Lokasi danau, embung rawa di Kabupaten Sikka



E. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sikka termasuk kabupaten rawan bencana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam RTRWN, Kabupaten Sikka termasuk dalam wilayah sebaran gunung berapi di Indonesia. Selain itu Kabupaten Sikka juga termasuk wilayah episenter gempa di Indonesia selama Tahun 1990-2000. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Sikka, wilayah Kabupaten Sikka rawan terhadap bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, angin topan, gempa dan gerakan tanah, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, diidentifikasi beberapa jenis bencana yang dapat mengancam Kabupaten Sikka, yakni :

- 1. Risiko Bencana Banjir
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko bencana banjir berada di bagian tengah dan sebagian pantai utara Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur dan Kewapante.
- 2. Risiko Cuaca Ekstrim
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko cuaca ekstrim berada di wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kewapante, Paga, Tanawawo, Mego, Doreng dan Mapitara.
- 3. Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gelombang ekstrim dan abrasi pantai berada di pantai selatan dan utara Kabupaten Sikka, dengan

tingkat risiko sedang sampai tinggi. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Kangae, Kewapante, Doreng, Bola, Lela, Talibura, dan Paga.

- 4. Risiko Letusan Gunung Api
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko letusan gunung api berada di sekitar Gunung Rokatenda dan Gunung Egon. Di wilayah sekitar Gunung Egon risiko bencana berada di tingkat rendah sampai tinggi. Wilayah yang terkena risiko ini berada di Kecamatan Mapitara dan Waigete. Sedangkan di wilayah sekitar Gunung Rokatenda risiko bencana pada tingkat sedang sampai tinggi, dan berada di Kecamatan Palue.
- 5. Risiko Tanah Longsor
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tanah longsor tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Kecamatan dengan resiko tinggi di bagian barat berada di Kecamatan Magepanda, Mego, Tanawawo dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur berada di Kecamatan Mapitara, Bola, Waigete dan Waiblama.
- 6. Risiko Tsunami
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tsunami berada di pantai utara dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Daerah tersebut meliputi wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, dan Talibura.
- 7. Risiko Gempa Bumi
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gempa bumi di wilayah ini dengan risiko rendah sampai sedang. Di bagian barat terlihat sebagian mempunyai tingkat risiko tinggi. Wilayah ini adalah Kecamatan Magepanda, Nita, Alok Barat, dan Alok.
- 8. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kebakaran hutan dan lahan berada di hampir seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Risiko kebakaran hutan dan lahan di bagian barat terjadi di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama.
- 9. Risiko Kekeringan
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kekeringan berada di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego dan Alok Barat, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama dan Kecamatan Alok Timur.
- 10. Bencana ROB
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko mengalami bencana banjir ROB atau Pasang Besar ang menyebabkan luapan air laut yaitu kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Palue dan Kecamatan Kewapante

2.1.2 Aspek Demografi

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2023 sebanyak 337.011 Jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sikka Tahun 2023

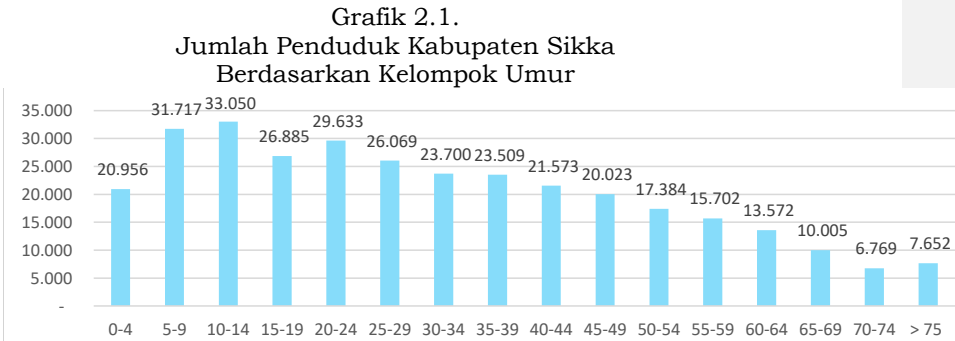
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per
1	Paga	82,85	17.308	5,14	80
2	Mego	111,26	13.816	4,10	167
3	Tanawawo	79,78	9.572	2,84	86
4	Lela	31,33	11.949	3,55	150
5	Bola	56,83	10.893	3,23	348
6	Doreng	30,41	12.382	3,67	218
7	Mapitara	81,02	7.022	2,08	231
8	Talibura	260,11	24.436	7,25	302
9	Waigete	217,65	26.998	8,01	104
10	Waiblama	144,36	8.536	2,53	59
11	Kewapante	24,14	15.334	4,55	635
12	Hewokloang	17,58	9.691	2,88	551
13	Kangae	38,43	19.039	5,65	495
14	Palue	41,00	9.874	2,93	241
15	Koting	23,56	6.751	2,00	287
16	Nelle	14,65	6.331	1,88	432
17	Nita	141,07	22.796	6,76	162
18	Magepanda	166,15	14.152	4,20	85
19	Alok	14,64	32.673	9,69	2.232
20	Alok Barat	62,75	23.890	7,09	381
21	Alok Timur	92,34	33.568	9,96	364
	Jumlah	1.731,91	337.011	94,03	195

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka yaitu 195 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Alok sebanyak 2.232 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Waiblama sebanyak 59 jiwa/km².

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data olahan Bapperida, 2024

*data sementara Agregat Semester I, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 10-14 tahun diikuti 5-9 tahun dan 20-24 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 218,250 jiwa atau 66,43% dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 24,426 jiwa atau 7,44%. Dari uraian diatas dapat diketahui rasio ketergantungan Tahun 2021 sebesar 84.3%.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi antara lain Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB perkapita dan Indeks Gini serta Ratio Penduduk Miskin. Capaian indikator-indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

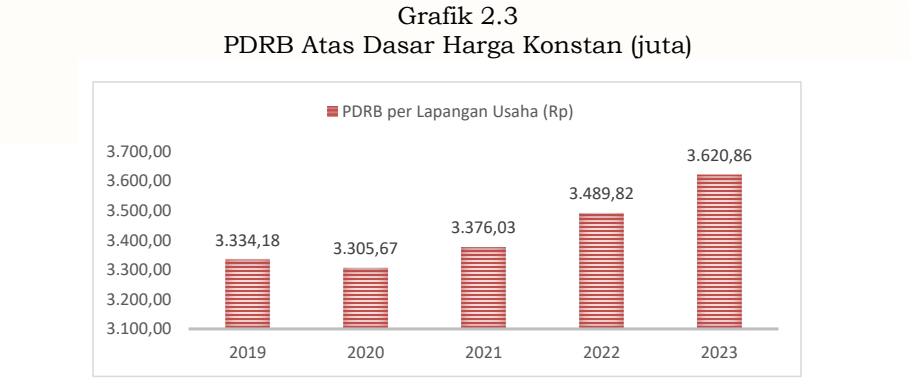


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun Tahun 2019 sebesar Rp5.121.99, Tahun 2020 turun menjadi Rp5.114.23, Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.317,68, Tahun 2022 meningkat menjadi Rp5.703,29 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp6.194,67.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 38,53% sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08%.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar Rp3.334,18, pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp3.305,67, pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp3.376,03, pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3.489,82 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.620,86.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Distribusi PDRB per Lapangan Usaha

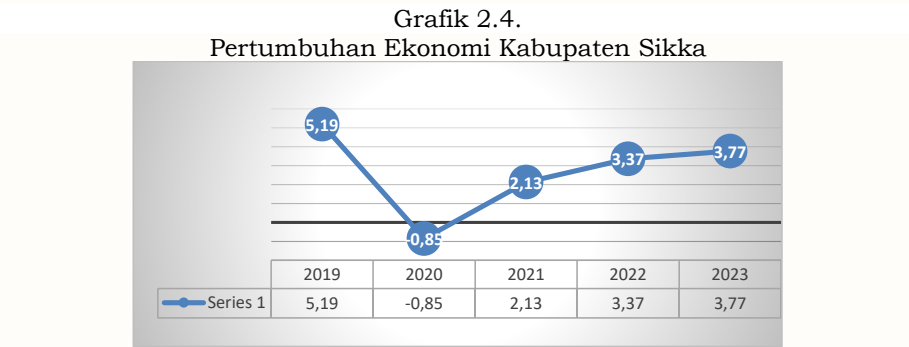
No	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.816,24	1.816,34	1.990,48	2.176,91	2.386,89
2	Pertambangan dan Penggalian	57,02	58,08	59,52	62,13	64,72
3	Industri Pengolahan	89,52	89,33	90,46	97,65	113,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,78	6,30	6,80	7,27	8,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,25	4,50	4,90	4,97	5,10
6	Konstruksi	265,79	242,07	252,93	268,55	300,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	549,93	535,61	551,09	615,43	688,85
8	Transportasi dan Pergudangan	337,53	263,36	269,16	307,66	344,89
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	37,54	31,77	32,87	35,09	38,61
10	Informasi dan Komunikasi	299,77	319,75	334,87	353,02	369,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	184,15	197,12	208,69	225,29	232,56
12	Real Estate	102,65	99,21	101,50	113,80	127,30
13	Jasa Perusahaan	14,50	10,31	9,34	10,01	10,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	657,20	676,02	683,59	688,68	715,51
15	Jasa Pendidikan	527,49	543,19	540,60	550,63	582,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,78	110,78	119,20	121,98	135,48
17	Jasa Lainnya	70,88	63,59	61,68	64,22	68,86
PDRB			5121,99	5112,02	5317,68	6194,67

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar Rp2.386.000.000,89 sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp5.000.000,10.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 5,19%, Tahun 2020 turun menjadi -0,85%, Tahun 2021 meningkat menjadi 2,13%, Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 3,37% dan Tahun 2023 menjadi sebesar 3,77%. Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka

NO	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4	0,8	3,58	4,29	4,32
2	Pertambangan dan Penggalian	3,82	1,29	2,16	2,24	2,10
3	Industri Pengolahan	6,43	-3,26	0,95	6,54	7,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	8,73	6,12	1,73	11,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,69	4,18	7,71	0,83	1,73
6	Konstruksi	4,38	-8,71	2,54	0,85	7,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	-5,18	1,42	7,03	5,71
8	Transportasi dan Pergudangan	6,99	-17,35	2,11	4,55	2,33
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	5,19	-15,24	3,63	5,35	6,19
10	Informasi dan Komunikasi	6,72	7,21	4,46	4,93	4,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	7,44	1,77	0,78	0,79
12	Real Estate	0,09	-2,32	-10,12	2,87	3,41
13	Jasa Perusahaan	4,16	-31,07	-10,12	2,87	6,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,71	4,14	-0,11	0,20	0,13
15	Jasa Pendidikan	3,88	0,72	-1,61	-0,17	2,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	2,90	4,57	1,74	2,04
17	Jasa Lainnya	5,11	-11,52	-4,35	1,4	4,87
PDRB		5,19	-0,85	2,13	3,37	3,77

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

2. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2019 sebesar Rp301.994 terus meningkat menjadi Rp389.455 pada tahun 2023. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yang dirilis BPS dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk miskin	44.320	42.180	43.090	40.870	40.810
2	Persentase penduduk miskin (%)	13,53	13,12	13,35	12,61	12,56
3	Indeks kedalaman kemiskinan	2,11	1,89	1,26	1,80	1,58
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,47	0,38	0,21	0,40	0,29
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	301.994	324.775	354.234	389.455	428.352

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 12,56% turun 0,05% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 12,61%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan Kabupaten Sikka berada pada urutan keempat terendah setelah Kabupaten Nagekeo. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2019-2023

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	28.29	28.17	28.39	27.47	27,17
Sumba Timur	30.02	29.65	29.68	28.22	28,08
Kupang	23.03	22.77	22.98	21.70	21,78
Timor Tengah Selatan	27.87	27.49	26.64	25.45	25,18
Timor Tengah Utara	22.45	22.28	22.62	21.50	21,85
Belu	15.54	15.37	15.68	14.84	14,30
Alor	21.59	21.09	21.09	20.25	19,97
Lembata	26.30	26.14	26.21	25.18	24,78
Flores Timur	10.90	10.84	10.19	10.75	11,77
Sikka	13.53	13.12	13.35	12.61	12,56
Ende	23.18	23.76	24.13	23.00	22,86
Ngada	12.48	12.51	12.58	11.93	12,06
Manggarai	20.55	20.34	20.48	19.84	19,69
Rote Ndao	27.95	27.54	28.08	27.45	27,05
Manggarai Barat	18.01	17.71	17.92	17.15	16,82
Sumba Tengah	34.62	34.49	34.27	32.51	31,78
Sumba Barat Daya	28.06	28.00	28.08	27.16	27,48
Nagekeo	12.85	12.61	12.91	12.05	12,33

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Manggarai Timur	26.49	26.52	26.50	25.35	
Sabu Raijua	30.52	30.18	30.13	28.73	25,06
Malaka	16.12	16.04	16.33	15.26	28,37
Kota Kupang	9.22	8.96	9.17	8.61	14,42
Nusa Tenggara Timur	21.09	20.90	20.99	20.05	19,96

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan. sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian. sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

3. Laju Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Tabel 2.12.

Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional

No	Wilayah	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Sikka	1,84	2,24	0,34	1,08	3,57
2.	Provinsi NTT	0,67	0,61	1,67	6,65	2,42
3.	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi NTT Dalam Angka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 inflasi sebesar 1,84 persen, pada tahun 2020 sebesar 2,24 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,34 persen, dan naik pada tahun 2022 sebesar 1,08 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen.

Indeks Harga Konsumen Kabupaten Sikka menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2023 (Per Desember)

No	Kelompok pengeluaran	Indeks Harga Konsumen			
		2020	2021	2022	2023
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	109,85	109,85	114,06	123,52
2.	Pakaian dan alas kaki	108,46	107,83	108,76	110,30
3.	Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga	100,63	102,11	102,81	104,35
4.	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	102,94	104,26	109,68	111,72

No	Kelompok pengeluaran	Indeks Harga Konsumen			
		2020	2021	2022	2023
5.	Kesehatan	109,47	109,83	111,21	114,71
6.	Transportasi	105,48	103,52	132,21	138,76
7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	97,03	98,45	98,24	97,19
8.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	109,89	115,03	120,93	114,65
9.	Pendidikan	102,49	103,41	103,41	104,99
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	108,48	110,51	116,04	118,63
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,48	115,01	123,17	127,96

Sumber : Sikka Dalam Angka, 2021-2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa data indeks harga konsumen di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki tugas rumah untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kenaikan harga pada sektor-sektor yang dianggap cukup krusial.

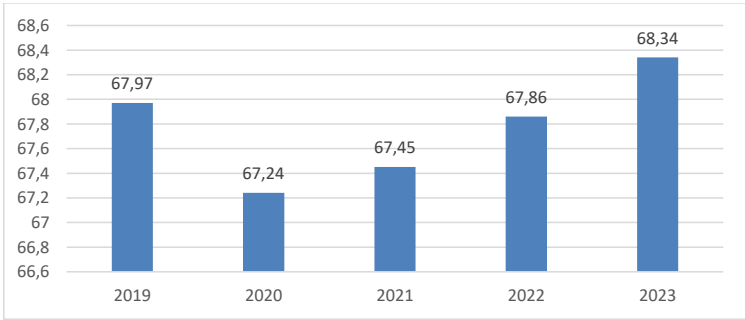
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

a. Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik. UHH masyarakat Kabupaten Sikka tahun 2019 adalah 67,07 tahun, pada tahun 2020 menjadi 67,42 tahun, pada tahun 2021 menjadi 67,45 tahun, pada tahun 2022 menjadi 67,86 tahun dan pada tahun 2023 menjadi 68,34 tahun. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. UHH Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut

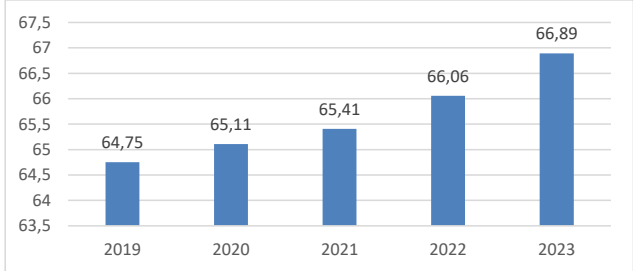
Grafik 2.4
UHH Kabupaten Sikka Tahun 2019- 2023



Sumber : Sikka Dalam Angka, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend IPM Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Sikka



Sumber : Sikka Dalam Angka, 2024

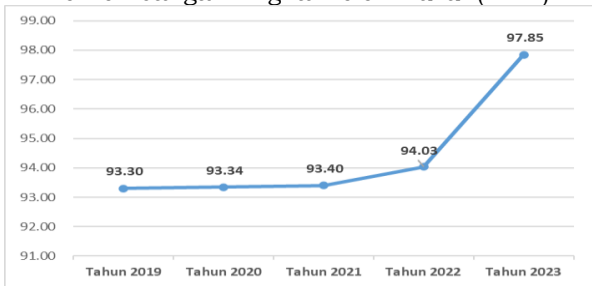
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Sikka mencapai 66,89. Hal ini menunjukkan peningkatan IPM sebesar 0,83 dari Tahun 2022 sebesar 66,06.

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Sikka selama periode tahun 2019-2023 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)

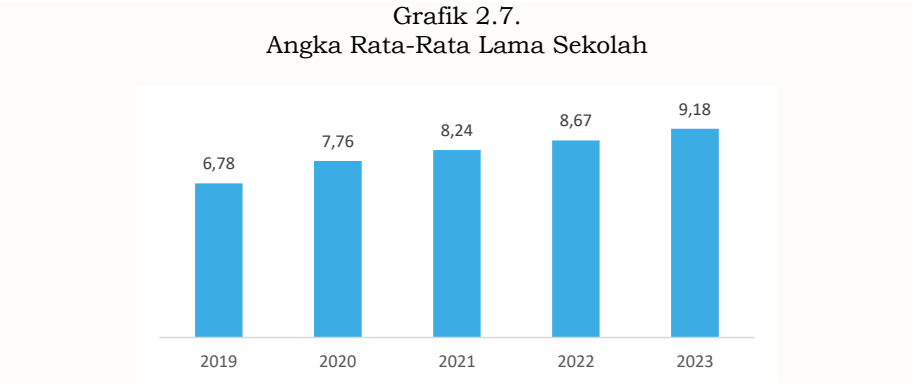


Sumber: Data Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2024

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 sebesar 93,3, pada Tahun 2020 sebesar 93,34, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 93,40, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 94,03 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 97,85.

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 2019 6,78, Tahun 2020 naik menjadi 7,76, Tahun 2021 naik menjadi sebesar 8,24 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 8,67 sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 9,18.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih) yang masih sekolah. mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Gambaran TPAK Kabupaten Sikka pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	101.625	82.818	184.443
1 Bekerja	99.686	80.115	179.801
2 Pengangguran Terbuka	1.939	2.703	4.642
Bukan Angkatan Kerja	18.923	42.291	61.214
1 Sekolah	10.006	10.839	20.845
2 Mengurus Rumah Tangga	2.889	27.001	29.890
3 Lainnya	6.028	4.451	10.479
Jumlah	120.548	125.109	245.657

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 74,35% dan tingkat pengangguran terbuka 2,62%.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dan desa dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perencanaan wilayah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa sejatinya dapat dilakukan melalui pengukuran indeks desa membangun.

Tabel 2.15.
Jumlah Desa berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Sikka
Tahun 2019-2023

No	Klasifikasi Desa	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Desa Mandiri	0	0	0	0	3
2.	Desa Maju	6	8	14	21	26
3.	Desa Berkembang	40	45	57	79	95
3.	Desa Tertinggal	75	73	63	45	47
4.	Desa Sangat Tertinggal	26	21	13	36	10
	Jumlah Desa	147	147	147	181	181

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa desa yang berada di Kabupaten Sikka didominasi Desa Berkembang. Namun, masih ada Desa Sangat Tertinggal sejumlah 10 Desa. Untuk Desa mandiri mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yang semula berjumlah 0 menjadi 3 Desa mandiri pada Tahun 2023.

Tabel 2.16
Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 169
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	3741	3741	3741	3741	3741
3.	Jumlah LSM	4	4	4	4	4
4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5.	PKK aktif	169	169	169	169	169
6.	Posyandu aktif	628	628	650	650	650

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2024

Data capaian pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sikka dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa indikator yang mencerminkan perkembangan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan diri. Pertama, rata-rata jumlah kelompok binaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cukup stabil dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap dorongan dan dukungan dari LPM untuk membina dan mengaktifkan lebih banyak kelompok masyarakat, yang mungkin memiliki peran penting dalam menggerakkan inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat. Kedua, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga cukup stabil dan menunjukkan adanya konsistensi dan kekuatan keterlibatan dari PKK dalam pemberdayaan keluarga dan menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi aktif dari kelompok PKK serta peningkatan partisipasi dalam dua tahun terakhir dari Posyandu yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Ekonomi Makro Regional

Perekonomian Kabupaten Sikka pada 2023 tumbuh sebesar 3,77%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi NTT yang tumbuh sebesar 3,52%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ini didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur hari raya keagamaan turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Sikka.

Kinerja ekonomi Kabupaten Sikka pada tahun 2023 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka. Program pemerintah seperti Pembangunan Infrastruktur dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.3.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan pada tahun 2023 mencapai Rp1.183.986.324.425,83 atau sebesar 96,68% dari total pagu sebesar Rp1.224.627.500.000,00, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai realisasi 91,82% atau sebesar Rp1.075.772.304.642,58.

Di sisi lain, realisasi belanja APBD Kabupaten Sikka pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.168.555.359.415,00. Atau sebesar 89,55% dari total pagu sebesar Rp1.304.979.359.282,00, lebih tinggi 5,99% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai realisasi 83,56% dari total pagu sebesar Rp Rp1.392.308.960.033,00. Jenis belanja APBD Kabupaten Sikka yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional sebesar 89,02% diikuti belanja transfer sebesar 99,99%, lalu belanja modal sebesar 82,84% dan belanja tidak terduga 9,92%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Sikka, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

2.3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada Desember 2023 tercatat sebesar 184.443 orang, turun 2,73% dibandingkan dengan keadaan yang sama di Tahun 2022 sebesar 172.333 orang. Jumlah tersebut terdiri atas yang Bekerja sebanyak 179.801 dan Pengangguran Terbuka sebanyak 4.642. Jumlah Bukan Angkatan Kerja sebanyak 61.214 orang terdiri atas Sekolah sebesar 20.845 orang, Mengurus Rumah Tangga sebesar 29.890 orang dan lainnya sebesar 10.479 orang.

Selama Desember 2022-Desember 2023, persentase bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 97,38%, angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 74,34%.

Status pekerjaan utama dengan jumlah terbesar ada pada pekerja keluarga sebanyak 172.801 orang, diikuti oleh berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 46.391, berusaha sendiri sebanyak 33.038 orang, pekerja bebas sebanyak 29.071, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebanyak 2.638 orang dan yang terakhir buruh/karyawan/pegawai sebanyak 2.054 orang.

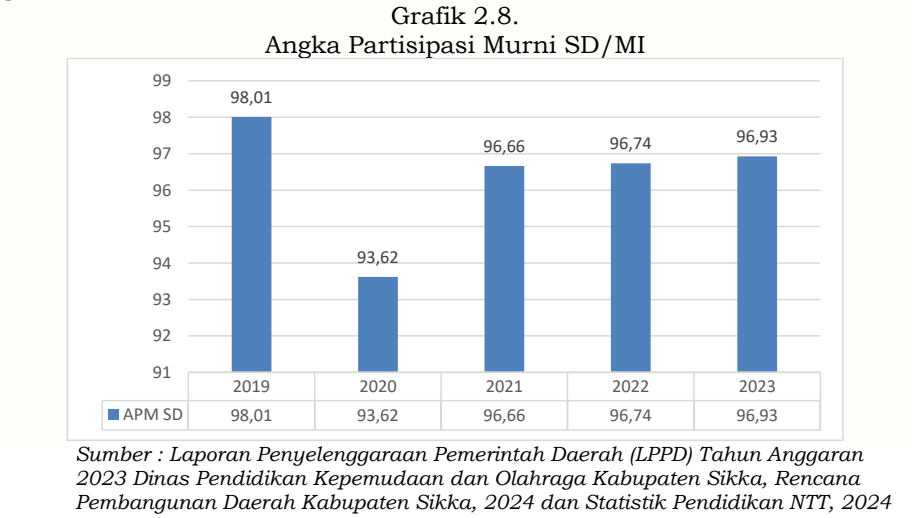
Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja di Kabupaten Sikka dengan PDRB sebesar 2.386,89 diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 715,51, lalu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 688,85, jasa pendidikan sebesar 582,91 diikuti oleh jasa informasi dan komunikasi sebesar 369,41 dan selanjutnya transportasi dan pergudangan sebesar 344,89 lalu paling terkecil adalah pengadaan air/pengelolaan sampah sebesar 5,10.

2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan Pendidikan
a. Angka Partisipasi Murni

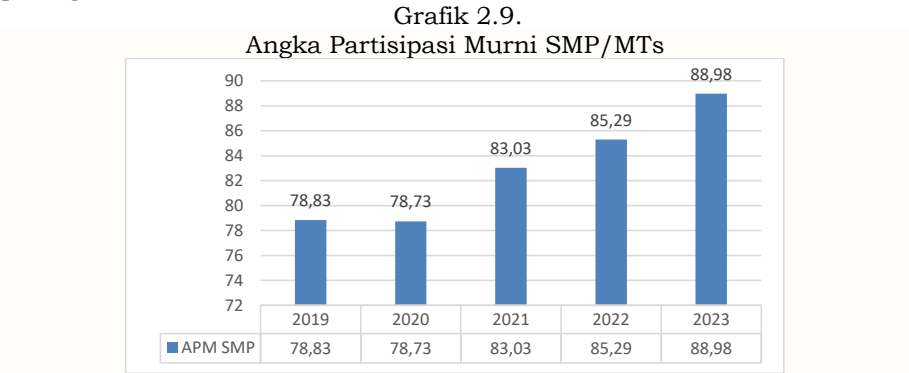
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

1) APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023
APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 2.8.



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 98,01%, pada Tahun 2020 menjadi 93,62%, pada Tahun 2021 naik menjadi 96,66%, pada Tahun 2022 naik menjadi 96,74% dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 96,93%.

b) APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023
APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

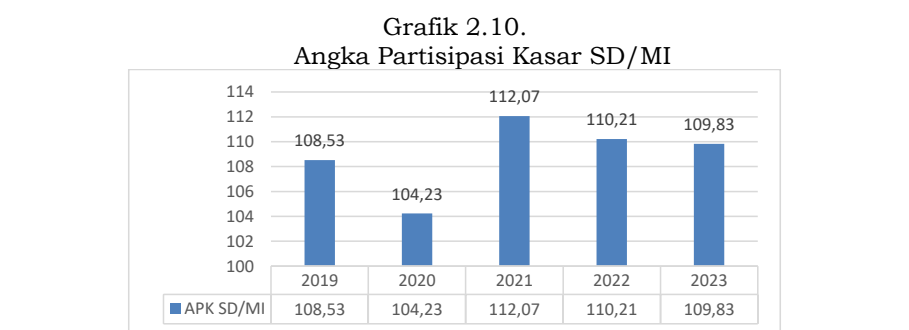


Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 78,83%, Tahun 2020 menjadi 78,73%, pada Tahun 2021 naik menjadi 83,03%, pada Tahun 2022 naik menjadi 85,29% dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 88,98%.

c) Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

1) APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023
APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

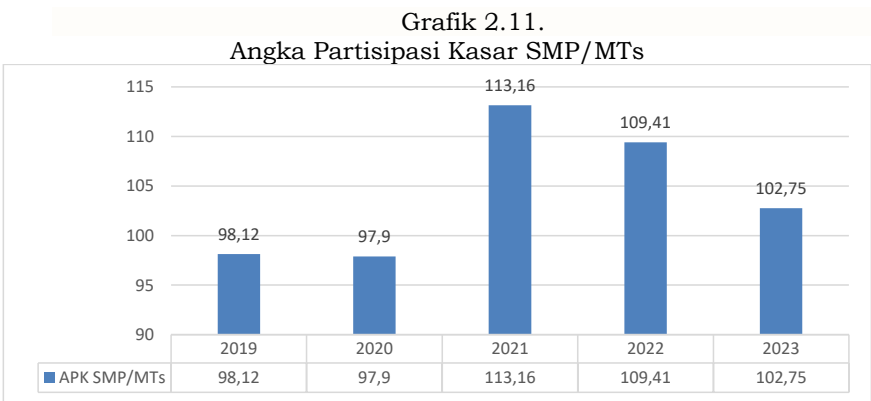


Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APK SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 108,53, pada Tahun 2020 menjadi 104,23, pada Tahun 2021 menjadi sebesar 112,07, pada Tahun 2022 menjadi sebesar 110,21 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 109,83.

2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



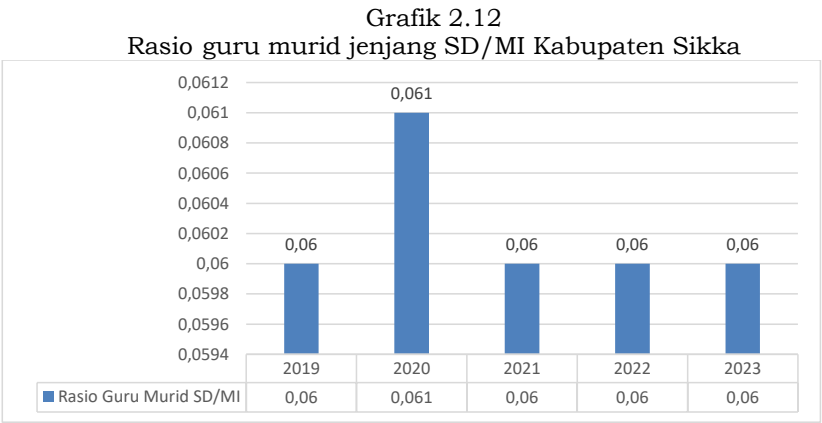
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024 dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 98,12%, pada Tahun 2020 menjadi 97,90%, Tahun 2021 menjadi 113,16%, Tahun 2022 menjadi 109,41% dan pada Tahun 2023 menjadi 102,75%.

3) Rasio Guru/Murid

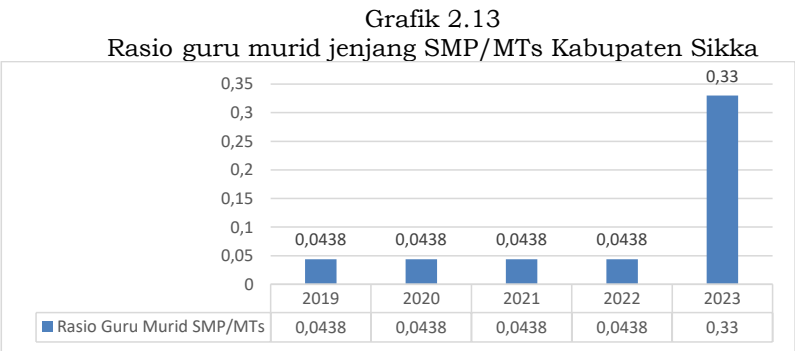
Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Selain itu, untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

1. Perkembangan rasio guru murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2024

2. Perkembangan rasio guru murid jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

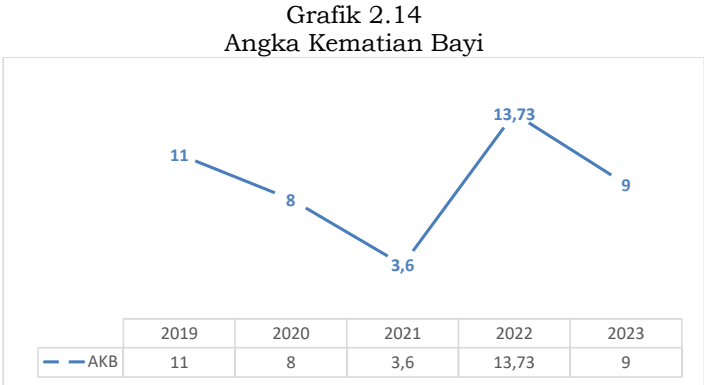


Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2024

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada Tahun 2019 sebanyak 11 per 1000 kelahiran, pada tahun 2020 menurun menjadi 8,6 per 1000 kelahiran, pada tahun 2021 menurun menjadi 3,6 per 1000 kelahiran, pada Tahun 2022 menjadi 13,73 per 1000 kelahiran dan pada Tahun 2023 menjadi 9 per 1000 kelahiran. Gambaran kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut.

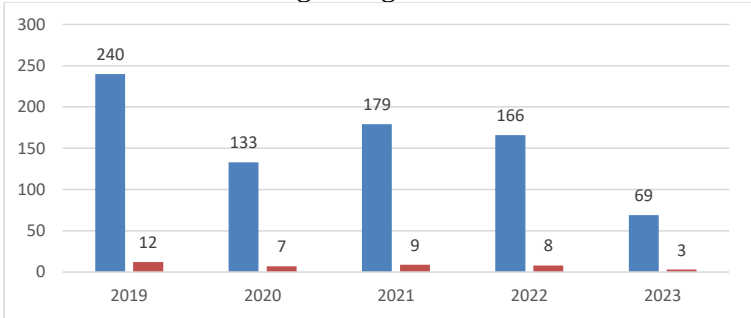


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Kematian Ibu



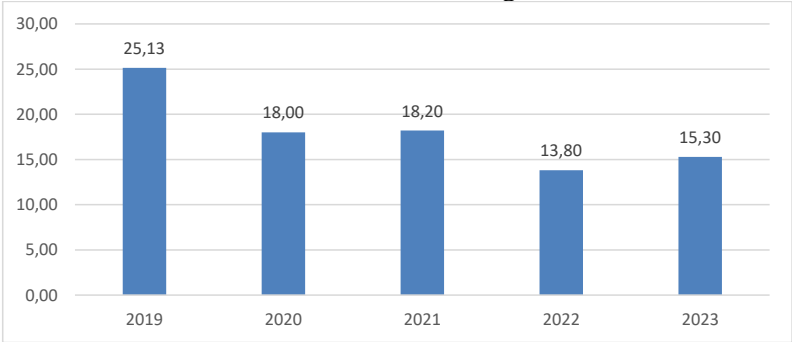
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Dilihat dari grafik kematian ibu di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Walaupun masih dibawah target Nasional. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebanyak 240 per 100.000 KH (12 kasus), Tahun 2020 turun menjadi sebanyak 133 per 100.000 KH (7 kasus), pada Tahun 2021 sebesar 179 per 100.000 KH (9 kasus), pada Tahun 2022 sebesar 166 per 100.000 KH (8 kasus) dan pada Tahun 2023 sebesar 69 per 100.000 KH (3 kasus).

c. Prevalensi *Stunting*

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16.
Prevalensi *Stunting*

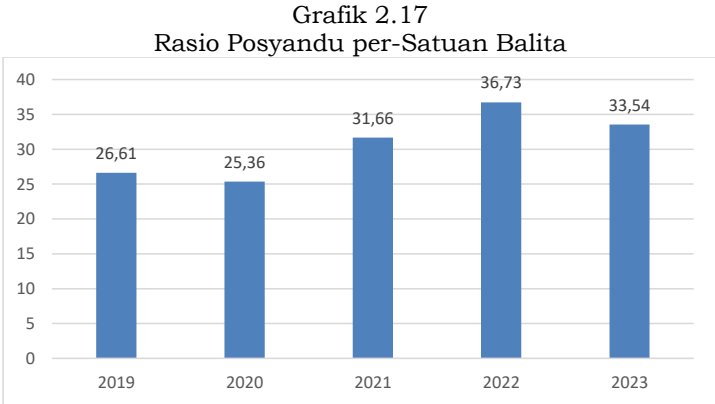


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Sikka pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 15,3 persen. Capaian prevalensi *stunting* pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya.

d. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Rasio Posyandu Per Satuan Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 26,61, Tahun 2020 menjadi sebesar 25,36, pada Tahun 2021 menjadi 31,66, pada Tahun 2022 menjadi sebesar 36,73 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 33,54.

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pemerintah	Swasta	Jumlah
Rumah sakit umum	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Puskesmas Rawat Inap	14		14	14		14	14		14
Puskesmas non Rawat Inap	11		11	11		11	11		11
Puskesmas pembantu	61		61	61		61	61		61
Posyandu	650		650	650		650	650		650

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka tahun pada 2023.

Gambaran perkembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka yang
tersebar di Puskesmas Tahun 2023

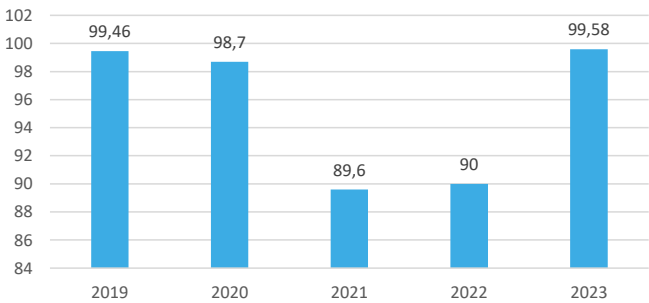
No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Dokter	27
2	Dokter Gigi	5
3	Perawat	592
4	Bidan	716
5	Apoteker	12
6	Asisten Apoteker	35
7	Kesehatan Masyarakat	60
8	Kesehatan Lingkungan	46
9	Gizi	52
10	Analisis Kesehatan	55
11	Terapis Gigi Dan Mulut	53
12	Fisioterapi	9
13	Tenaga Lain	165
Total		1.827

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur NTT No. 42 Tahun 2009 telah membuat kebijakan tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Sikka selama periode tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.18
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan



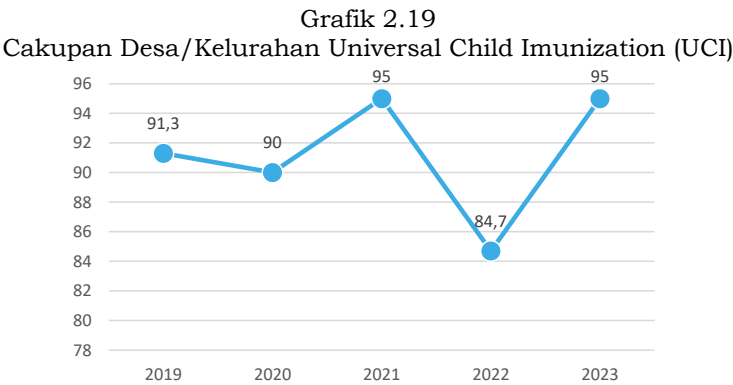
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Grafik di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan sebesar 99,46%, pada Tahun 2020 turun menjadi 98,7%, pada tahun 2021 menjadi sebesar 89,6% dan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 90% sedangkan Tahun 2023 menjadi 99,58%.

g. Imunisasi

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila $\geq 80\%$ bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap.

Pencapaian UCI di Kabupaten Sikka tahun dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



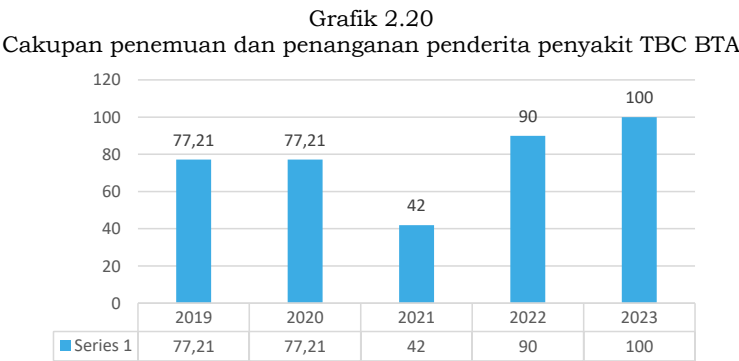
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Penanganan

Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu tahun 2019-2023 kasus gizi kurang yang mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 100% atau semua balita gizi kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (TBC) merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Pada Tahun 2019-2020 sebesar 77,21%, pada Tahun 2021 menjadi 42% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 90% sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 100%.

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes Aegepty atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penderita DBD tahun 2019-2023 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2024

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan luas irigasi kabupaten. Luas irigasi Kabupaten Sikka dalam kondisi baik pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 50,71%, pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 46,25%.

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 68.799 Rumah Tangga sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 35.254 rumah tangga dari total keseluruhan rumah tangga 64.436 rumah tangga.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih adalah penduduk berakses air bersihberbandingdengan jumlah penduduk. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Sikka padaTahun 2019 dan 2020 sebesar 38,36%, pada Tahun 2021 naik menjadi 41,86% , pada Tahun 2022 naik menjadi 53,51% dan pada tahun 2023 naik menjadi 54,71%. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%.

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak adalah jumlah rumah tinggal yang bersanitasi layak berbanding jumlah seluruh rumah tinggal. Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah

atau Sanitasi Layak di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 46,9%, pada Tahun 2020 sebesar 46,9% padaTahun 2021 naik menjadi 49,34%, pada Tahun 2022 naik menjadi 50,97% dan pada Tahun 2023 naik menjadi 51,28%.

d. Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik

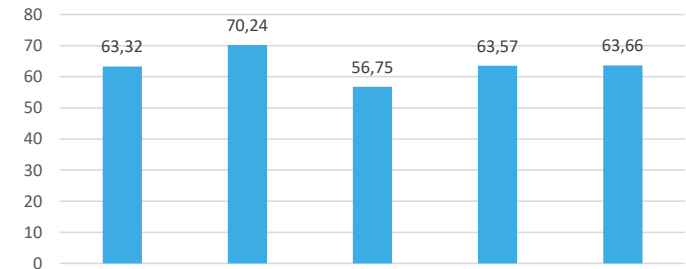
Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik adalah panjang drainase dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh drainase kabupaten. Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 57,53%, pada Tahun 2020 sebesar 57,53% pada Tahun 2021 sebesar 67,67%, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 naik menjadi sebesar 64,94%.

e. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air,serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,dan jalan kabel.

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan merupakan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut.Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.22
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)
Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 63,32%, pada Tahun 2020 naik menjadi 70,24%, Tahun 2021 turun menjadi 56,75% , pada Tahun 2022 naik menjadi 63,57% dan Tahun 2023 naik menjadi 63,66 %.

f. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (Km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 Km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula masyarakat yang dilayani. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.

Rasio Panjang Jalan Kabupaten Per Satuan Penduduk

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Panjang Jalan	Km	844,25	844,25	844,25	844,25	844,25
Jumlah Penduduk	Jiwa	321.765	323.828	324.252	327.000	322.181
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	Km/jiwa	0,002647	0,002624	0,002607	0,00258	0,002620

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 mengalami penurunan disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun sedangkan panjang jalan Kabupaten tetap.

4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Aspek perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama periode tertentu, kita dapat mempertimbangkan beberapa indikator kunci yang mencerminkan kondisi dan perkembangan dalam hal ini. Salah satu indikator penting adalah Rasio Rumah Layak Huni, yang mengukur proporsi rumah di wilayah ini yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Rasio Luas Permukiman Layak Huni adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar luas wilayah yang telah dibangun dengan permukiman yang memadai. Persentase Luas Permukiman Kumuh adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana wilayah ini menderita dari permukiman yang tidak layak. Indikator lain yang relevan adalah Persentase Jaringan Irigasi, yang mencerminkan sejauh mana wilayah ini memiliki infrastruktur penting untuk pertanian dan distribusi air. Selain itu, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak menunjukkan sejauh mana penduduk memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang aman dan sehat. Terakhir, Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik mencerminkan kemampuan wilayah ini dalam mengelola air hujan dan meminimalkan risiko banjir serta dampak lingkungan lainnya.

Melalui pemantauan dan analisis indikator-indikator ini, kita dapat memahami kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka selama periode 2019-2023, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk yang tersedia pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Rumah Layak Huni	1,03	0,37	0,89	0,52	0,52
2	Rasio luas permukiman layak huni	N/A	99,62	99,36	97,59	97,59
3	Persentase Luas Permukiman Kumuh	N/A	0,38	0,64	2,41	2,41
4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	21.175	20.890	20.425	20.004	20.004
5	Persentase Jaringan Irigasi	50,71%	50,71%	46,25%	46,25%	46,25%
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	46,9%	46,9%	49,34%	50,97%	50,97%

7	Persentase Drainase Skala Kota	57,53%	57,53%	67,67%	64,94%	64,94%
8	Jumlah Produksi Listrik	N/A	N/A	N/A	91.854 Kva	91.854 Kva
9	Jumlah Daya Listrik Terpasang	N/A	N/A	89.335 Kva	89.335 Kva	89.335 Kva

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Jika dilihat pada tabel di atas, kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka antara tahun 2019 hingga 2023 mengungkapkan beberapa perubahan yang signifikan. Adanya fluktuasi rasio rumah layak huni. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam rasio ini, yang mungkin mencerminkan tantangan dalam pemeliharaan dan pembangunan perumahan layak huni. Meskipun ada perbaikan di tahun 2021, 2022 dan 2023, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan proporsi rumah layak huni yang lebih besar. Luas permukiman layak huni relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun terdapat penurunan kecil pada tahun 2022 dan 2023, masih sebagian besar wilayah permukiman memenuhi standar kelayakan. Tetapi, perlu tetap memperhatikan pemeliharaan dan perluasan area ini untuk menjaga kualitas perumahan.

Kemudian terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase luas permukiman kumuh dari tahun 2022 hingga 2023. Ini bisa menjadi perhatian serius, karena peningkatan permukiman kumuh dapat mengindikasikan masalah kesejahteraan dan sanitasi di beberapa wilayah. Persentase jaringan irigasi stabil dari tahun 2019 hingga 2020, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tetap rendah pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini dapat mempengaruhi sektor pertanian dan akses air bagi masyarakat. Selanjutnya, adanya peningkatan dalam akses air limbah atau sanitasi layak, yang merupakan perkembangan positif dalam hal kesehatan masyarakat. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2020 , kondisi drainase kota mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 dan 2023. Drainase yang baik penting untuk mengurangi risiko banjir dan masalah lingkungan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tantangan dan pencapaian dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka. Penurunan rasio rumah layak huni dan peningkatan luas permukiman kumuh menjadi perhatian utama yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Selain itu, pengelolaan jaringan irigasi, drainase kota, dan sanitasi juga harus terus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Tingkat kejahatan rendah dan suasana yang aman membuat warga dan pengunjung merasa nyaman beraktivitas. Ketentraman mengacu pada keadaan di wilayah atau masyarakat berada dalam keadaan damai, tenang dan bebas dari gangguan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketidakamanan atau kecemasan. Ketertiban umum mengacu pada keadaan di mana masyarakat mematuhi aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Hal ini seperti perilaku warga yang tidak melanggar norma-norma sosial atau hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur, terkendali dan aman bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan masyarakat merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi keamanan, hak dan kesejahteraan warga dari potensi ancaman atau bahaya baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.21.

Angka Kriminalitas Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	3	1	1	1	1
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	1	4	3	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	1	5	1	5	5
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	21	39	36	54	54
5	Jumlah Kasus Pencurian	4	25	98	41	41
6	Jumlah Kasus Penipuan	10	9	10	1	1
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	39	80	190	286	286
9	Jumlah Penduduk	321.765	321.953	324.252	327.000	327.000
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,00012	0,00024	0,00058	0,00087	0,00087

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi NTT 2019-2024, BPS

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat mayoritas jenis kriminal ada pada kasus penganiayaan dan pencurian. Terjadi kenaikan kasus penganiayaan dari tahun 2020 sebanyak 39 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 21 kasus, hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mencegah kasus penganiayaan. Tahun 2021 mengalami penurunan dalam jumlah kasus penganiayaan, mencapai 36 kasus. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi sosial atau faktor ekonomi. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 sekitar 36 kasus, jumlah kasus penganiayaan masih cukup tinggi. Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus penganiayaan, mencapai 54 kasus. Hal ini memerlukan tindakan serius untuk menganalisis dan mengatasi potensi penyebab peningkatan ini.

Kasus pencurian di Tahun 2019 memiliki tingkat kasus pencurian mencapai 4 kasus. Hal ini merupakan indikasi masalah keamanan di wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kasus pencurian, yaitu ada 25 kasus. Hal ini disebabkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kasus pencurian menjadi 98 kasus, hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperketat tindakan keamanan, tentunya ini merupakan peningkatan yang sangat besar dan membutuhkan tindakan cepat dan serius untuk menanggulangnya. Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan penurunan jumlah kasus pencurian menjadi 41 kasus. Meskipun masih tinggi, tetapi hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kasus pencurian.

Kasus penganiayaan dan pencurian mengalami fluktuasi dalam tingkat kriminalitas selama periode 2019 hingga 2023. Kasus penganiayaan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, sementara kasus pencurian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Keseluruhan Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kriminalitas selama periode 2019 hingga 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan 23 dengan 286 kasus. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat tindakan keamanan dan pencegahan kejahatan di Kabupaten Sikka ini. Pihak berwenang perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi ini dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka. Selanjutnya akan dibahas terkait penegakan perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3.

Tabel 2.22.
Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Selama kurun waktu lima tahun, dari 2019 hingga 2023, Kabupaten Sikka telah mencapai prestasi yang sangat baik dalam hal Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA). Persentase baik dalam Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Persentase Penegakan PERDA selama lima tahun menunjukkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengelola dan mempertahankan standar tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan terhadap aturan hukum setempat. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka.

Selanjutnya pada Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat mengacu pada evaluasi dan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari layanan-layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah dalam rangka melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini meliputi berbagai aspek, termasuk respons terhadap kejadian atau situasi darurat, penanganan kasus-kasus hukum, keamanan umum, serta upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.23
Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 +-Penduduk	116:10.000	N/A	N/A	78:1000	78:1000
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	18 Menit	18 Menit	18 Menit	18 Menit	18 Menit
5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	5.30%	21.69%	21.69%	21.69%	21.69%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Indikator Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), terdapat perlambatan tingkat waktu tanggap yang mencapai 18 menit, yang mana standar yang seharusnya adalah 15 menit. Waktu tanggap merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi kinerja tim pemadam kebakaran dalam merespons situasi darurat. Perlunya upaya untuk memperbaiki respons dan memastikan bahwa tim dapat tiba di lokasi secepat mungkin. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam waktu tanggap dan mengambil tindakan yang tepat, Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dapat memperbaiki kinerja mereka dalam memberikan layanan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat

kebakaran. Lebih lanjut dalam hal Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2019, cakupan pelayanan bencana kebakaran stabil di sekitar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pelayanan terkait kebakaran di Kabupaten Sikka masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun 2020,2021, 2022 dan 2023 menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam cakupan pelayanan bencana kebakaran, mencapai 21,69%. Ini menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kesiapan dan respons terhadap kebakaran.

6. **Urusan Sosial**

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi

Sarana Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 terdiri dari Panti Asuhan sebanyak 9 lembaga, Panti Anak Cacat sebanyak 5 lembaga, Panti Sosial Remaja sebanyak 4 lembaga dan Panti Jompo sebanyak 4 lembaga. Dari total 22 sarana sosial yang ada di Kabupaten Sikka hanya 1 panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan 21 sarana sosial lainnya dikelola oleh pihak swasta (*filantropis*).

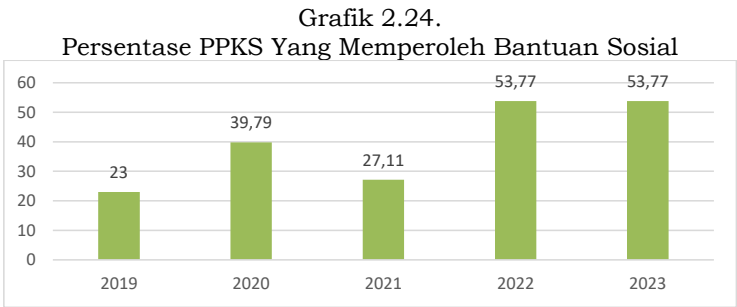
b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sikka menasar kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS sendiri merupakan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, kejahatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.

Dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Sasaran (PMKS), pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Terdapat peningkatan persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, yang meningkat dari 23% pada tahun 2019 menjadi 53,77 persen pada tahun 2023. Sementara itu, persentase PMKS yang ditangani juga mengalami peningkatan dari 55,40 persen pada tahun 2019 menjadi 1,80 persen pada

tahun 2023. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Sikka. Namun, pemerintah daerah belum melaksanakan indikator persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, serta persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, karena belum ada pembangunan panti sosial yang dilakukan.

PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 23%, Tahun 2020 sebesar 39,79%, Tahun 2021 menjadi 27,11% dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 53,77%.

7. **Urusan Tenaga Kerja**

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dipandang sebagai refleksi perekonomian dari wilayah tersebut. Sehingga perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang diantaranya berkaitan dengan masalah pasar kerja di wilayah itu. Kondisi pasar kerja tersebut merupakan elemen penting dalam penentuan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan terhadap barang dan jasa ini selanjutnya akan menentukan permintaan terhadap pekerja yang berarti juga mempengaruhi sisi penawaran pekerja. Selain itu, perubahan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menentukan siapa yang berpotensi masuk dalam pasar kerja, disamping mutu pendidikan juga mempengaruhi pasar kerja. Secara teoritis, ketenagakerjaan (khususnya sisi penawaran tenaga kerja) dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan riil dan distribusinya, angka upah riil, struktur ekonomi, partisipasi dalam sistem pendidikan, kebiasaan atau tradisi peran kerja dan partisipasi kerja. Tanpa penambahan penduduk sekalipun, sebagian besar angkatan kerja di masa mendatang kini sudah lahir.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang

bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Partisipasi angkatan kerja kabupaten sikka dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

N o.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat pengangguran terbuka	3,56	4,00	4,54	4,5	2,62
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,51	73,42	73,92	71,62	74,35
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	122	2166	311	211	93

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas menunjukan Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Sikka sejak tahun 2020 menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan, dimana telah terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 menjadi 2,62. Sementara, berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun keatas dalam angkatan kerja selama periode 2019-2023 mengalami peningkatan yakni dari 65,91 persen pada tahun 2019 menjadi 74,35 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.25.
Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,91	73,42	73,29	68,40	74,35
2	Angka partisipasi angkatan kerja	0,70	0,73	0,73	0,71	
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	67	45	45	55	44
4	Pencari kerja yang ditempatkan	20	5	6	320	93
5	Tingkat pengangguran terbuka	3,56	4,00	4,54	4.51	2,62
6	Keselamatan dan perlindungan	2.286	2.086	2.286	2.486	
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Nakertrans 2024-2026, RPJMD Perubahan Kab. Sikka 2019-2023 dan Sikka Dalam Angka 2020-2024

8. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT berbanding dengan jumlah Rumah Tangga. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT Terhadap Anak dan Terhadap Perempuan Kabupaten

Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.26.
Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

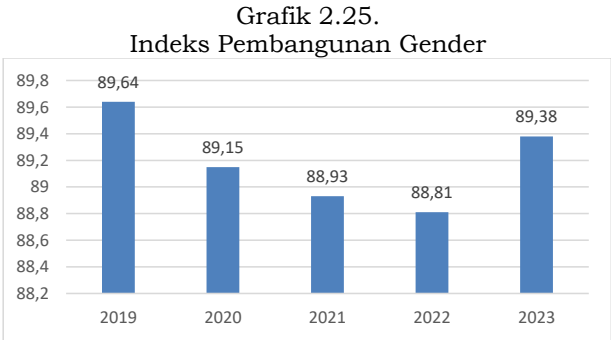
No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio KDRT :	0,13	0,12	0,11	0,10	0,02
2.	Rasio Kekerasan Anak	6,60	6,10	5,60	5,10	12,51

Sumber: Dinas P2KBP3A, 2024

Berdasarkan data tersebut Kondisi di Kabupaten Sikka menunjukkan masih terdapat kasusnya kekerasan pada anak sebanyak 6,60 persen kasus 2019, mengalami penurunan menjadi 6,10 persen kasus 2020, terjadi lagi penurunan di tahun 2021 dan di tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2023 sebesar 12,51 persen kasus kekerasan anak di Kabupaten Sikka.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



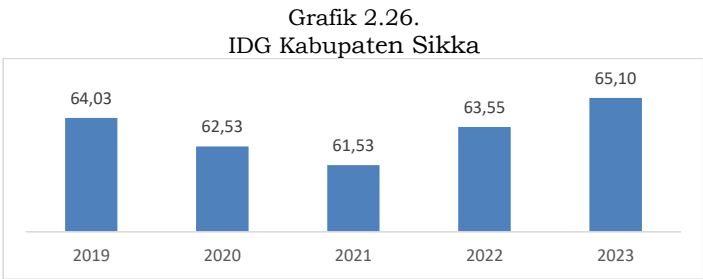
Sumber: BPS 2018-2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 88,64, Tahun 2020 sebesar 89,15, pada Tahun 2021 sebesar 88,93, pada Tahun 2022 sebesar 88,81 dan pada Tahun 2023 sebesar 89,38.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan

perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



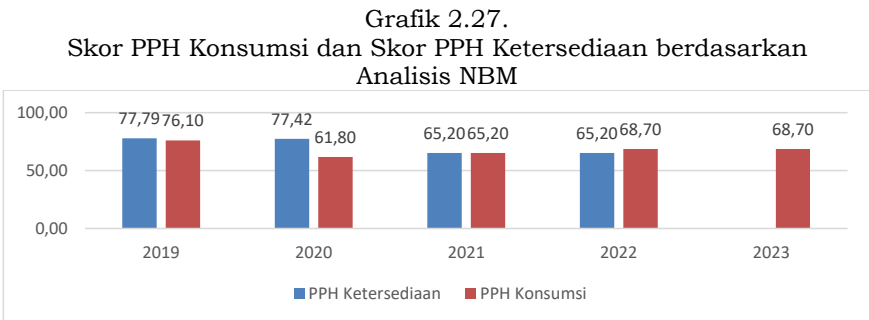
Sumber: BPS 2019-2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IDG Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 64,03, Tahun 2020 sebesar 62,53, pada Tahun 2021 sebesar 61,53, pada Tahun 2022 sebesar 63,55 dan pada Tahun 2023 sebesar 65,10.

9. **Urusan Pangan**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergisi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

Skor PPH konsumsi adalah jenis dan jumlah bahan makanan rata rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan Gizi. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2019-2024 (Badan Ketahanan Pangan) dan BPS 2020-2023

Berdasarkan data di atas, Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Sikka Tahun 2019–2022 mengalami fluktuasi. Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2019 sebesar 77,79, Tahun 2020 sebesar 77,42, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 menjadi sebesar 65,2 pada Tahun 2023 belum dirilis.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 76,10, pada tahun 2020 sebesar 61,80, Tahun 2021 sebesar 65,20, Tahun 2022 menjadi sebesar 68,70 dan untuk Tahun 2023 sebesar 69,70.

10. **Pertanahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang telah ada haknya. Pada Tahun 2019-2023, luas lahan yang telah tersertifikat di Kabupaten Sikka sebesar 340.776.332 m² atau sebanyak 91.469 bidang. Sementara pada Tahun 2020 sebesar 115.645 m² atau 40 bidang dan Tahun 2021 sebesar 230.745 m² atau 54 bidang.

- a. Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan
- Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan adalah jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan berbanding konflik pertanahan yang dilaporkan. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan di Kabupaten Sikka selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.
- b. Sertifikat Hak Milik Pemerintah
- Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Sikka berupa tanah yang diperoleh dari hasil pembelian dan hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Sertifikat Hak Milik Pemerintah Tahun 2023

No	Penggunaan	Asal usul	Keterangan
1	Terminal Darat	Pembelian	Tanah Rencana Terminal Darat (Bidang 1)
2	Terminal Darat	Pembelian	Tanah rencana Terminal Darat (Bidang 2)
3	Jalan akses masuk pelabuhan	Pembelian	Tanah jalan akses masuk pelabuhan
4	Puskesmas Nita	Pembelian	Tanah untuk Bangunan Puskesmas Nita Koreksi luas 2.033 M2 menjadi 1.892 sesuai sertifikat HP 26
5	Rawat Inap Puskesmas Nita	Pembelian	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanh di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 156
6	Bangunan sekolah	Hibah	SDN Nuabari /Koreksi Luas 1.000 Menjadi 1.790/SK.01/HP/BPN.53.07/1/2022
7	Bangunan Sekolah	Pembelian	SDI Wairhubing/Koreksi Luas 2.030 M2 menjadi 1.885 M2 sesuai sertifikat HP 11
8	Bangunan SDI Sapanjawa	Pembelian	SDI Sapanjawa _Koreksi Luas 2.120 M2 menjadi 2.327 M2 sesuai sertifikat HP 04
9	SDI Hagarahu	Pembelian	SDI Hagarahu /Koreksi Luas 2.889 M2 menjadi 1.918 M2 sesuai sertifikat HP 01
10	SDI Ladubewa	Pembelian	SDI Ladubewa /Koreksi Luas 2.289 M2 menjadi 6.425 sesuai sertifikat HP 02
11	Tanah Pemda	Pembelian	Tanah Pemda yang di tempati Hernimus Alo Ruha, Tgl perolehan tdk diketahui dicatat 31 des. 2004_koreksi luas sebelumnya 126 M2 menjadi 133 M2 sesuai sertifikat HP 38
12	Tanah Posyandu	Hibah	Tanah Posyandu Bolatobong di RT 007 / RW 001_Koreksi Luas sebelumnya 88 M2 menjadi 307 sesuai Sertifikat HP 04
13	Tanah Pos Jaga	Hibah	Tanah Pos Jaga di RT.021 / RW.007_koreksi Luas sebelumnya 100 M2 menjadi 99 M2 Sesuai Sertifikat HP 05
14	Tanah MCK Komunal	Hibah	Tanah MCK Komunal di RT 12 / RW.04_Koreksi Luas Sebelumnya 10.30 M2 menjadi 64 M2 sesuai Sertifikat HP 0007
15	Tanah MCK	Hibah	Tanah MCK RT.12 / RW. 04 (Pekarangan Bapak Niko Pele)_koreksi luas sebelumnya 92 M2 menjadi 94 M2 sesuai sertifikat HP 0008
16	Tanah Kosong	Hibah	Tanah Sang Prabu di RT 07 / RW 003_koreksi luas sebelumnya 132 M2 menjadi 155 M2 sesuai sertifikat HP 0009
17	Tanah Eks HGU	Pembelian	Tanah Belakang Askes Samping RD Lanal Eks HGU/SK 301/659/2004_TGL 9/8/2004 (Luas awal 2.445 nilai 489.000.000._Hibah Ke MUI dan Majelis Agama Budha masing -masing luas 400 nilai 80.000.000.-sesuai SK Penghapusan Nomor:443/HK/2021 dari 68

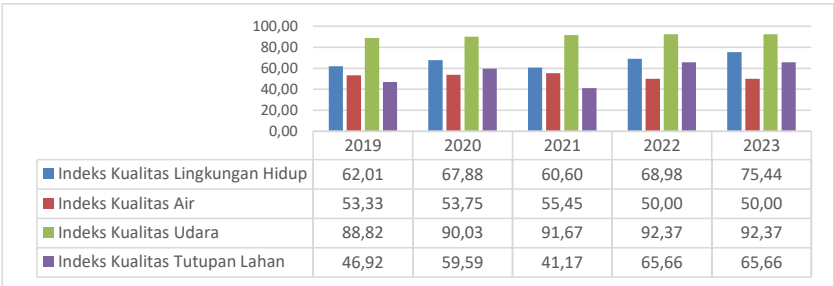
No	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan
18	Tanah Kosong	Pembelian	Keputusan Pemgelolah BMD Nomor ; 86/VIII/2022 _12 Agustus 2022
19	Tanah Kosong	Pembelian	Keputusan Pemgelolah BMD Nomor ; 86/VIII/2022 _12 Agustus 2022
20	Ruang Terbuka Hijau	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 335
21	RTH Jalan Mawar	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 335
22	Fasum	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
23	Fasum/ Depan SMPN 3 Maumere	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
24	Fasum/ Batas Hendrik Kasi dan Goldensius Lerang	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
25	Fasum/ Batas Kanilius Weko, Roberus Lili Noa, Wilh	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
26	Fasum/Batas Kaladin (Poros Maumere - Magepanda)	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
27	Jalan masuk LANAL Tengah	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
28	Disewakan Asianti	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
29	Jalan	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
30	Disewakan oleh Narti	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
31	PAUD/Samping Taman Doa	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
32	RTH Jalan Dahlia	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 355
33	Jalan Samping Masuk LANAL ujung	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
34	Fasum Samping BenyaminJa	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
35	Penyuluh KB	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380
36	Fasum/Posyandu Ona	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380
37	SMPN Reroroja	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380

11. **Urusan Lingkungan Hidup**

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.28.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 sebesar 62,01. Pada Tahun 2020 naik menjadi 67,88, pada Tahun 2021 turun menjadi 60,60, pada Tahun 2022 naik menjadi 68,98 dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 75,44.

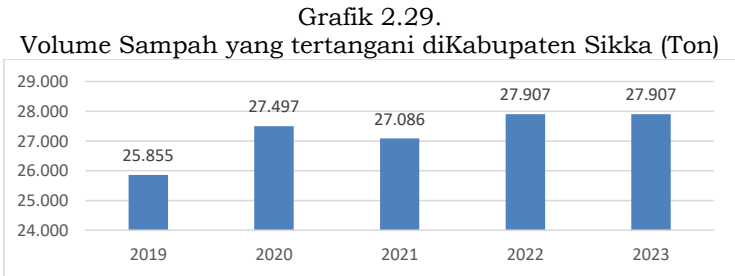
b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 20% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Selain itu ruang terbuka hijau diperlukan bagi aktivitas publik sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka meliputi Taman Tsunami, Lapangan Kota Baru, jalur hijau jalan, taman lingkungan, resapan air dan RTH makam.

c. Volume Sampah yang tertangani

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 25.855 ton. Tahun 2020 sebesar 27.479 ton, Tahun 2021 sebesar 27.086 dan pada Tahun 2022-2023 sebesar 27.907 ton.

- d. Jumlah Sarana Prasana Persampahan
- Jumlah Sarana Prasana Persampahan yang digunakan untuk mengangkut sampah dalam wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari :
- Dump Truck : 8 Unit (Kondisi Baik 5, Rusak 3)
 - Amroll : 4 Unit (Kondisi Baik 3, Rusak 1)
 - Pick Up : 1 Unit
 - Roda 3 : 6 Unit (Kondisi Baik 5, Rusak 1)
 - Gerobak Dorong : 5 Unit (Kondisi Baik 2, Rusak 3)
 - Excavator : 1 Unit
 - Doozer : 1 Unit
 - Container : 41 Unit (Kondisi Baik 40, Rusak 1)
 - TPS : 48 Lokasi
 - TPA : 1 Lokasi

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.28.
Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber KTP	95,97	95,92	94,34	95,5	95,5
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	85,2	85,4	86,04	85,08	85,08
3.	Rasio pasangan berakte nikah	40,79	43,39	49,15	51,62	51,62
4.	Kepemilikan KTP	200.684	207.037	214.290	226.210	226.210
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	439:1000	448:1000	461:1000	464:1000	464:1000
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Jumlah: 1	Jumlah: 1	Jumlah: 1	Jumlah: 1	Jumlah: 1
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data tersebut khususnya pada rasio penduduk ber-KTP pada periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Sikka memiliki rasio penduduk yang memiliki KTP sebesar 95,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah terdaftar dan memiliki dokumen identifikasi resmi, yakni KTP. Meskipun capaian ini sudah cukup baik, masih ada ruang untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki KTP. Selanjutnya pada tahun 2020 rasio penduduk ber-KTP, mencapai 95,92 persen. Capaian ini mencerminkan kesuksesan pihak berwenang dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar dan memiliki KTP sebagai dokumen identifikasi resmi. Kabupaten Sikka pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan rasio penduduk ber-KTP menjadi 94,34 persen. Meskipun ada penurunan, tingkat ini masih tinggi dan menunjukkan bahwa pelayanan kependudukan tetap efektif dalam mendaftarkan dan memproses KTP bagi sebagian besar penduduk, Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, rasio penduduk ber-KTP kembali meningkat

menjadi 95,5 persen. Ini menandakan bahwa pelayanan kependudukan terus berjalan dengan baik dan masyarakat tetap aktif dalam melakukan registrasi dan memperbaharui KTP mereka.

Jika dilihat pada Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019 mencapai angka 200.684 orang. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2020, dengan jumlah kepemilikan KTP mencapai 207.037 orang. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan lanjutan dalam kepemilikan KTP mencapai angka 214.290 orang. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah kepemilikan KTP mencapai 226.210 orang, menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LPMK dan BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPMK dan BPD adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMK menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPMK ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPMK, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPMK. LPMK dan BPD pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan tidak memiliki kelompok binaan. Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan tahun 2023 yaitu 194 lembaga yang terdiri dari 13 LPMK dan 181 BPD.

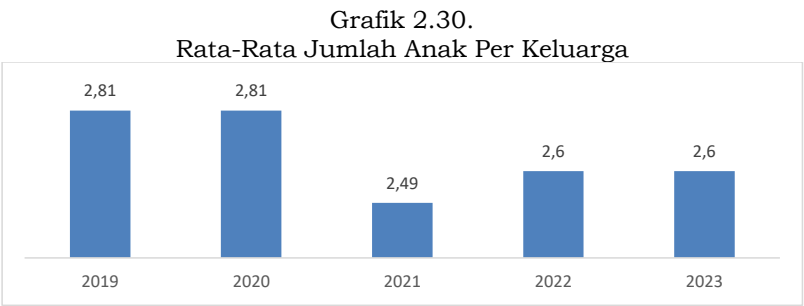
b. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

PKK adalah kegiatan sekelompok kaum perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup yang paling kecil. Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebanyak 169 kelompok yang terdiri dari 1 PKK Tingkat Kabupaten, 21 PKK Tingkat Kecamatan dan 181 PKK Tingkat Desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 2,81, Tahun 2020 sebesar 2,81, Tahun 2021 sebesar 2,49 dan pada Tahun 2022-2023 sebesar 2,60.

b. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.29.
Cakupan peserta KB aktif

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Akseptor KB	1:0,678	1:0,692	1:0,712	1:0,550	1:0,550

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2024

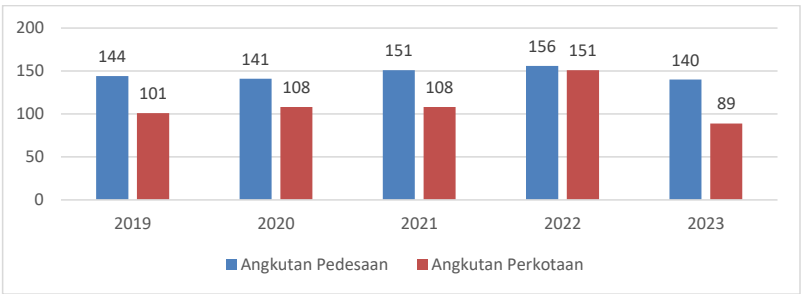
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 1:0,678, Tahun 2020 sebesar 1:0,692, Tahun 2021 sebesar 1:0,712, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 1:0,550.

15. **Urusan Perhubungan**

a. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

Indikator Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah dengan jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.31.
Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

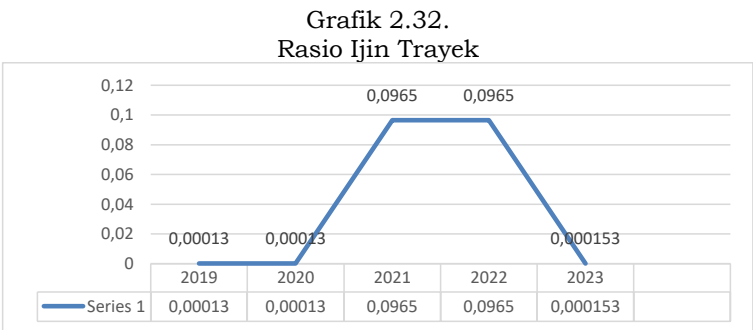


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah Perkotaan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 101 unit, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 108 unit, Tahun 2022 sebanyak 151 unit dan Tahun 2023 sebanyak 89 unit, sedangkan angkutan umum yang melayani wilayah Pedesaan di Kabupaten Sikka 2019 sebanyak 144 unit, Tahun 2020 sebanyak 141 unit, Tahun 2021 sebanyak 151 unit, Tahun 2022 sebanyak 156 unit dan pada Tahun 2023 sebanyak 140 unit.

b. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

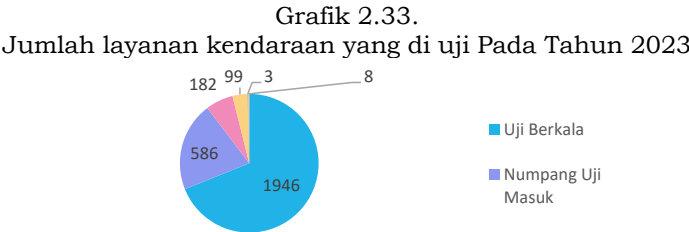


Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

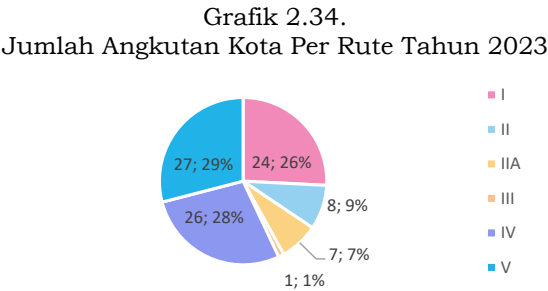
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 0,00013, Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 0,0965 sedangkan Tahun 2023 sebesar 0,000153.

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum selama Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

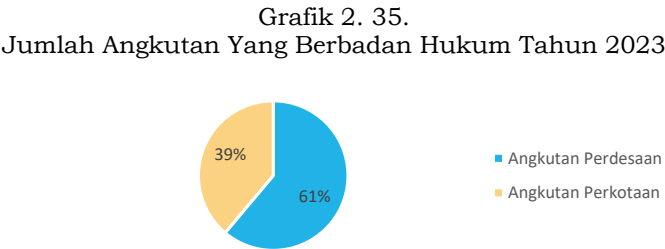


Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kendaraan yang melayani rute masing-masing Lin tidak sama. Paling sedikit pada lin 1 sejumlah 1 unit dan paling banyak pada Lin 5 sebanyak 27 unit.



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Angkutan kota yang telah berbadan hukum pada tahun 2023 sebanyak 89 unit dari jumlah kendaraan 89 unit, Sedangkan angkutan pedesaan yang telah berbadan hukum sebanyak 140 unit dari 140 angkutan pedesaan yang ada pada tahun 2023.

d. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan KIR kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Sikka selama 26 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 3 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 5 menit, penyetoran plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit, pengambilan buku selama 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 26 menit untuk masing-masing kendaraan. Selama tahun 2022 Lamanya pengujian kendaraan bermotor telah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Nomor : Dishub.551.2.21/15/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

e. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus adalah sarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian.

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30.						
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus						
No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bandara Udara	1	1	1	1	1
2	Terminal Angkutan Darat	2	2	2	2	2
3	Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan	5	5	5	5	5
4	Tambatan Perahu	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2022 jumlah pelabuhan udara sebanyak 1 unit, terminal angkutan darat sebanyak 2 unit, dermaga/pelabuhan penyeberangan 5 unit dan tambatan perahu sebanyak 11 unit.

16. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana komunikasi informatika. Capaian kinerjanya dapat dilihat dari Indeks SPBE Kabupaten Sikka mencapai 1,94.

Pemerintah mendorong kemudahan akses telekomunikasi bagi masyarakat, dengan capaian melakukan fasilitasi keberadaan menara telekomunikasi sebanyak 142 tower yang tersebar di 21 Kecamatan, yang dilayani oleh operator Telkomsel, XL Asiatra dan Indosat. Capaian pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran dan indikator program sebagai berikut.

a. Jumlah Media

Jumlah Media yang ada di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA MEDIA	KETERANGAN
1	VICTORY NEWS	ELEKTRONIK / ON LINE DAN CETAK
2	LIPUTAN 6.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
3	CENDANA NEWS.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
4	METRODUNIA.id/METROTIMOR.id	ELEKTRONIK/ON LINE
5	KUMPARAN.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
6	BENTARA.NET	ELEKTRONIK/ON LINE
7	OPOSISI.NEWS	ELEKTRONIK/ON LINE
8	LENTERA POS	ELEKTRONIK/ON LINE
9	TIMEX KUPANG	ELEKTRONIK/ON LINE DAN CETAK
10	SUARA FLORES	ELEKTRONIK/ON LINE
11	TV ONE	ELEKTRONIK/ON LINE
12	TVRI	ELEKTRONIK/ON LINE
13	VOXNTT.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
14	MNC	ELEKTRONIK/ON LINE
15	EKORA NTT	ELEKTRONIK/ON LINE
16	KOMPAS TV	ELEKTRONIK/ON LINE
17	ZONALINE NEWS.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
18	POS KUPANG	ELEKTRONIK / ON LINE DAN CETAK
19	MAUMERE NEWS. COM	ELEKTRONIK/ON LINE
20	RADIO SUARA SIKKA	ELEKTRONIK/ON LINE
21	SUARA SIKKA.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
22	FLORES POS	ELEKTRONIK/ON LINE DAN CETAK
23	MEDIA INDONESIA	ELEKTRONIK/ON LINE
24	PROTOKOL DAN HUMAS	ELEKTRONIK/ON LINE
25	SELATAN INDONESIA	ELEKTRONIK/ON LINE
26	VIVATIMUR.COM	ELEKTRONIK/ON LINE
27	DETAH TERKINICOM	ELEKTRONIK/ON LINE
28	NTT PEDIA.id	ELEKTRONIK/ON LINE
29	FLORESKU	ELEKTRONIK/ON LINE
30	FLORES NEWS	ELEKTRONIK/ON LINE
31	HAK RAKYAT	ELEKTRONIK/ON LINE
32	SUARA BURUH	ELEKTRONIK/ON LINE

b. Jumlah Penyiaran Radio Lokal

Indikator jumlah penyiaran radio lokal adalah jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah.Jumlah penyiaran radio di Kabupaten Sikka berjumlah 1 unit yaitu LPPL Radio Suara Sikka.

c. Website Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Sikka memiliki website yang rutin diisi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yakni www.sikkakab.go.id.Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Dalam pengembangan manajemen sistem informasi untuk menunjang kinerja serta membangun sistem pemerintahan yang akuntabel telah dikembangkan berbagai aplikasi seperti LPSE. Selain itu juga terdapat beberapa website perangkat daerah.

d. Penyediaan Sarana Telekomunikasi

Sarana Telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Sikka berupa menara telekomunikasi sebanyak 140 tower yang tersebar di 21 Kecamatan, yang dilayani oleh operator Telkomsel, XL Asiata dan IM3.

e. Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi

Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi dapat dilihat dari pelayanan perangkat daerah menggunakan aplikasi yang sudah memiliki jaringan internet, antara lain: E-KTP, SIAK, E-KEUR, SIPD, SIMRS, SIMLUTAN, OSS, SANTER, E-Lapak, SIMPEG, E-POSS, SIRUP, SIBARU, SIPKP, JELAJAH MAUMERE.

Data Aplikasi Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

No.	Nama OPD	Aplikasi	Keterangan / Fungsi
1	BPKAD	SIPD	SIPD adalah suatu aplikasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang di sajikan kepada masyarakat
		Aplikasi Barang Milik Daerah	Aplikasi Barang Milik Daerah adalah aplikasi yang digunakan untuk menginventarisasi Brang Milik daerah
2	BAPENDA	Aplikasi Pajak Daerah	Aplikasi Pajak Daerah adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak Parkir
		Smart PBB	aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bea Perolehan Tanah Bangunan
3	Bagian Organisasi	E_Lapor	Aplikasi E_Lapor adalah aplikasi layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang di kelolah oleh PanRB
		Absen Santerkabsikka	Aplikasi Santer kabsikka adalah aplikasi absen dan Kinerja harian ASN Kabupaten Sikka
4	Bagian Hukum	JDIH	Aplikasi JDIH adalah aplikasi yang memuat tentang prodak – prodak hokum Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIMONEV	Simonev atau Sistem Informasi Evaluasi dan Monitoring
		LPSE	Pengorganisasian Barang dan Jasa Secara Elektronik
		eCatalog	Apliakasi e_catalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang dan jasa apliaksi ini menyediakan bebagai macam produk dan pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah
6	BKD	Aplikasi SIPINTER	Aplikasi SIPINTER adalah Sistem Informasi penilaian Mandiri penilaiaan system merit (kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
		MySapk	Aplikasi MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk Profil Pegawai Negeri Sipil
		SAPK	Aplikasi SAPK adalah Sistem Informasi berbasis computer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian
7	Dinas Penanaman Modal	Aplikasi SICANTIK	Aplikasi SICANTIK atau Aplikasi cerdas layanan perizinan dimanfaatkan untuk layanan perizinan berusaha maupun layanan izin lain yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal

No.	Nama OPD	Aplikasi	Keterangan / Fungsi
8	Dinas Perumahan	Aplikasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Aplikasi Rumah Tidak Layak Huni yang di gunakan untuk mengiinventaris rumah tidak layak huni secara keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni
9	Dispenduk	SIAK	Aplikasi SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan teknologi dan Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Aplikasi SISKEUDES	SISKEUDES adalah merupakan aplikasi keuangan Desa yang di gunakan untuk mengawal transparansi keuangan Desa
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Srikandi	Aplikasi umum untuk mewujudkan kearsipan berbasis elektronik
12	Dinas PKO	Dapodik	Memudahkan proses Pelayanan Pendidikan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	SIDEKA – NG	Aplikasi Desa Berbasis Web dan Layanan Administrasi Desa

Pemerintah Kabupaten Sikka juga memberikan layanan gratis internet (Hotspot) sebanyak 10 titik dengan Visat penguat sinyal terdapat di 21 titik. Berikut 10 titik Hotspot yang terdapat di Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

No.	Lokasi	Layanan	Bandwitch
1.	Kantor Suara Sikka	WMS	20 Mbps
2.	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	WMS	20 Mbps
3.	Toko Ban Sebelah Utara Patung Selamat Datang	WMS	20 Mbps
4.	Kios Foto Copy Sebelah BKKBN	WMS	20 Mbps
5.	Kantor Pengurus Taman Tsunami	WMS	20 Mbps
6.	Rumah Paroki Gereja Misir	WMS	20 Mbps
7.	Show Room Moobil Bento	WMS	20 Mbps
8.	Paroki Thomas Morus	WMS	20 Mbps
9.	Pos Satpam TTK Sang Timur	WMS	20 Mbps
10	Kios Kefen	WMS	20 Mbps
11.	Seminari Bunda Segala Bangsa	WMS	20 Mbps
12	Terminal Lokaria	WMS	20 Mbps

Data Visat Tahun 2023

No	Lokasi
1	UPTD. PuskesmasHewokloang
2	UPTD. PuskesmasKewapante
3	R.S ST. Elisabeth Lela
4	R.S T.C Hillers
5	SDI Baokremot
6	Kantor Camat Bola
7	SDK 050 Wailamung
8	SDK 041 Talibura
9	Kantor Kepala Desa Hepang
10	PoliklinikST.Rafael
11	Kantor Desa Nelle Wutung
12	Min Al Iklas Tanjung Darat
13	PuskesmasTandarawa
14	SMPK Bunga Fatima Lela
15	SMP Negeri 1 Waigete
16	SMP Negeri 1 Talibura

No	Lokasi
17	SMP SUPRA Talibura
18	SMP Negeri Werang
19	Kantor BPP Waiblama
20	Kantor BPP Doreng
21	UPTD. Puskesmas Habibola
22	SMPK ST.Antonius Boganatar
23	SMPK Negeri Satap Bloro
24	Puskesmas Mapitara
25	Puskesmas Pembantu Watugong
26	SMP Negeri 1 Nita
27	Puskesmas Boganatar
28	Puskesmas Feondari
29	Akamdemi Keperawatan St.Elisabeth Lela
30	Puskesmas Wolofeo
31	Puskesmas Kota Uneng
32	Pastoral Watubala
33	Kantor Desa Nita
34	Puskesmas Paga
35	Polindes Natakoli
36	Puskesmas Watubaing
37	SMA Negeri Role Delu
38	SMP Negeri 1 Alok Timur
39	SMA Negeri 1 Waigete
40	Kantor Kepala Desa Nirangkliung
41	Kantor Kepala Desa Lela
42	SMA Negeri 1 Bola
43	SMA Negeri Magepanda
44	SMA Katholik Alvarez Paga
45	Kantor Desa Sikka

17. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

a. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah koperasi aktif mencapai 130 unit dan yang koperasi berbadan hukum 187 unit

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2023 terdapat 126 koperasi aktif, yang terdiri dari Koperasi Fungsional sebanyak 57 unit, KUD senyak 3 unit, KOPKAR sebanyak 4 unit, Koperasi Lainnya sebanyak 5 unit, KPN sebanyak 8 unit, KOPDIT/KSP sebanyak 5 unit, Koperasi Pemasaran sebanyak 4 unit, Koperasi Konsumsi sebanyak 3 unit, Koperasi Jasa sebanyak 4 unit, Koperasi Produsn sebanyak 2 unit dan KSU sebanyak 34 unit.

b. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka tahun 2023 mengalami penambahan sebanyak 2.980 UMKM dari 5.025 UMKM di tahun 2022 menjadi 8.005 UMKM di tahun 2023.

18. **Urusan Penanaman Modal**

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 1.478, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebanyak 2.887.

b. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Pelaksanaan urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi kerja sama dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi, yang dapat dilihat dari capaian jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional dan PMA sebesar Rp4.876.600.000,- yang bersumber dari 6 perusahaan.

c. Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 sebanyak 1.635 orang.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian. Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemudabahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik.

20. Urusan Statistik

Statistik berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan dari statistik adalah untuk menyediakan metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan informasi numerik secara sistematis. Berikut Tabel Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tabel 2.31.
Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan	N/A	N/A	N/A	29	29

Sumber: Bidang Litbang pada Bapelitbang Kabupaten Sikka

Pada tiga tahun pertama dari periode 2018-2020, data tidak tersedia yang menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan dan publikasi informasi statistik selama periode tersebut. Tetapi pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang signifikan dalam publikasi dokumen statistik, dengan terbitnya 29 dokumen. Hal ini menunjukkan komitmen dan peningkatan aktivitas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik terkait Kabupaten Sikka. Peningkatan jumlah dokumen statistik yang diterbitkan pada tahun 2021 dan dipertahankan pada tahun 2022 mencerminkan peningkatan kapasitas dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan statistik.

21. Urusan Persandian

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia. Urusan persandian, yang

diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka sedang menyiapkan penerapan tanda tangan elektronik.

22. **Urusan Kebudayaan**

Potensi seni budaya di Kabupaten Sikka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni : keberadaan situs dan benda cagar budaya serta sanggar seni budaya. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 39 jenis cagar budaya dan 111 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sikka. Rincian sebaran jumlah sanggar seni budaya binaan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32.
Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
1	Alok	Lero Bekor	Kota Uneng
2	Alok	Blutuk Lunung Ha	Kabor
3	Alok	Sadang Bui	Kota Uneng
4	Alok	Bekor Bliran	Thomas Morus
5	Alok	Hogor Hini	Kampung Garam
6	Alok	Lunung Kunung	SDI Maumere
7	Alok	Lamalino	Kojadoi
8	Alok	SDI Wairklau	Wairklau
9	Alok	Nian Tana	Kelurahan Madawat
10	Alok	Sigo Siang	SMP Bunda Segala Bangsa
11	Alok	SDI Madawat	Madawat
12	Alok	Sinar kayu Rangka	Desa Gunung Sari
13	Alok	Semparong	Desa Semparong
14	Alok	Sinar Tani	Kelurahan Nangalimang
15	Alok	Napun Hoba	Kelurahan Nangalimang
16	Alok Barat	Benza	Waidoko
17	Alok Barat	Cogo Sanda	Hewuli
18	Alok Barat	Cua Kabe	Hewuli
19	Alok Barat	Songgo Mori	Palue
20	Alok Barat	Sanggar Desa Lidi	Palue Desa Lidi
21	Alok Barat	Sanggar Desa Lado Laka	Palue
22	Alok Timur	Kibo Libok	Kesokuit
23	Alok Timur	Uwun Kloda	SMP Yapenthom II
24	Alok Timur	Sanggar SMPK Vifi	SMPK Vifi
25	Alok Timur	SD Contoh	SD Contoh
26	Alok Timur	SDK Maria Ferari	SDK Ferari
27	Alok Timur	SMPN I Tampil	Kelurahan Nangameting
28	Alok Timur	Moreska	Watugong
29	Alok Timur	Mikael Brai	Watugong
30	Alok Timur	Remaja Mesjid AT. Tagwa	Beru
31	Alok Timur	Baka Likat	SDI Nangameting
32	Alok Timur	Warna 12	Kelurahan nangameting
33	Nita	Mawarane	Nita Tebuk
34	Nita	Rudun Blutuk Lero Bekor	Nita Tebuk
35	Nita	Lala Along	Nirangkliung
36	Nita	Wolon Guut	Nirangkliung
37	Nita	Bao Lero Wulang	Nirangkliung
38	Nita	Orkestra Satu Sikka	Nita
39	Nita	Lado Gahar	Lado Gahar
40	Nita	Nilo Indah	Wuliwutik
41	Nita	Lepo Lorun	Desa Nita
42	Nita	Jero Ni	Desa Nirangkliung

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
43	Nita	Dubi Bui Hagong Nawang	Desa Nita
44	Paga	Begu Lagu	Wolowiro
45	Paga	Tembu Tana Sula Nuwa	Wolowiro
46	Paga	Rawi Ria	Mbengu- Maulo'o
47	Paga	Nusa Koka	Paga
48	Paga	Oro Wolo	Paga
49	Mego	Lodo Fao	Feondari Desa Wolodhesa
50	Lela	Jiro Jaro	Desa Lela
51	Lela	Watu Tedang	Desa Watu Tedang
52	Lela	Suka Maju	Desa Lela
53	Lela	Wuwu Tere	Wukur
54	Lela	Nona Wini	Desa Sikka
55	Lela	Soka Toja	Desa Lela
56	Lela	Kumak Bura	Desa Du
57	Lela	Puan Pliti	Desa Iligai
58	Koting	Sora Raga Regut	Desa Koting D
59	Nelle	Hibir Priti	Desa Nele Wutung
60	Nelle	Sora Dendang	Desa Nele Lorang
61	Nelle	Aurau	Desa Nele Barat
62	Nelle	Orkes Getaran Rimba	Desa Nele Barat
63	Kangae	Seka Dendang	Watuliwung
64	Kangae	Nibon Naitawa	Watuliwung
65	Kangae	Skala Langir	Blatatating
66	Kangae	Blatatating	Desa Blatatating
67	Kangae	Manu Mekeng	Meken Detun
68	Kewapante	Jong Dobo	Desa Ian Tena
69	Kewapante	Wair Koja Menik Meteng	Desa Wairkoja
70	Kewapante	Namang Djawa	Desa Namangkewa
71	Kewapante	Bunga Kelan	Desa Kopong
72	Kewapante	Bang Boler	Desa Waiara
73	Kewapante	Fortes	Desa Waiara
74	Kewapante	Tawa Tana	Desa Waiara
75	Hewokloang	Bliran Sina	Desa Wairkoja
76	Hewokloang	Wolomapa	Desa Wolomapa
77	Hewokloang	Heo Puat Tawa Tana	Desa Heo Puat
78	Hewokloang	Wini Li'in	Desa Hewokloang
79	Hewokloang	Depo Hagong Munerana	Desa Munerana
80	Hewokloang	Mugen Ledun	Desa Munerana
81	Bola	Pesa Lin TunaPeni	Desa Uma Uta
82	Bola	Raga Dara	Desa Hokor
83	Bola	Doka tawa Tana	Desa Uma Uta
84	Bola	Watu Kebar	Desa Ipir
85	Bola	Gawi Mai Lembah Sunyi	Desa Bola
86	Bola	Geke Gole	Desa Bola
87	Talibura	Gong Ilin Puan	Desa Darat Gunung
88	Talibura	Kroa Soa	Desa Hikong
89	Talibura	Bekol Ekan Gere	Desa Wailamung
90	Waigete	Bunga Nukak	Desa Pogon
91	Waigete	PGRI Egon	Desa Wairbleler
92	Waigete	Runut Puhun	Desa Runut
93	Waigete	Gong Gaging Bintang Timur	Desa Wairbleler
94	Waigete	Watu Jajin	Desa Aibura
95	Waigete	Rotan Sese	Desa Wolomapa
96	Palue	Cua Kabe	Desa Kesokoja
97	Palue	Songgo Mori	Desa Reruwairere

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
98	Palue	Desa Lidi	Desa Lidi
99	Palue	Lado Laka	Desa Maluriwu
100	Palue	Roa Rero	Nitung Lea
101	Palue	Roki Role	Roki Role
102	Palue	Tuanggeo	Desa Tuanggeo
103	Palue	Lado Laka II	Desa Ladolaka
104	Doreng	Dala Elat	Desa Kloangpopot
105	Doreng	Jogo Bekor	Desa Wolon Terang
106	Doreng	Jong Sawu Kolit	Kloangpopot
107	Magepanda	Magendero	Magepanda
108	Magepanda	Sinar Watu Klong	Nangarasong
109	Mapitara	Mapitara	Desa Egon
110	Tanawawo	Moa Kolo	Wolofeo Desa Ranggarasi
111	Waiblama	Eba Lewa	Desa Ilin Medo

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

23. Urusan Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 520 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, sekolah dan perpustakaan desa.

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk adalah jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,16, pada tahun 2020 sebesar 0,18, Tahun 2021 sebesar 0,18, Tahun 2022 sebesar 0,05 dan Tahun 2023 sebesar 0,01.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2024

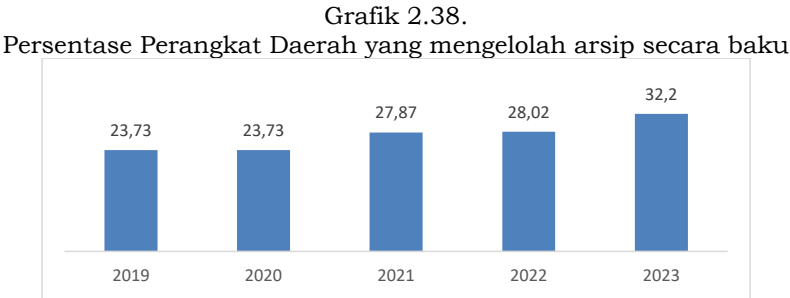
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 25.786 pengunjung, Tahun 2020 sebanyak 15.384 pengunjung, Tahun 2021 sebanyak 3.820 pengunjung, Tahun 2022 sebanyak 3.480 pengunjung dan pada Tahun 2023 sebanyak 3.824 pengunjung.

4. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 21.144 Judul Buku.

24. **Urusan Kearsipan**

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan di Kabupaten Sikka mewajibkan semua perangkat daerah yang menghasilkan dokumen pemerintah dapat menyerahkan dokumennya untuk dijadikan Arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2019Sebesar 23,73%, Tahun 2020 sebesar 23,73%, pada Tahun 2021 sebesar 27,87%, pada Tahun 2022 sebesar 28,02% dan pada Tahun 2023 sebesar 32,20%.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Potensi Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 25.000 ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 5.085 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.985 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 892 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 406 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 1.802 RTP. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.
Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Status Nelayan	Jumlah RTP
1.	Nelayan Penuh	1.985
2.	Nelayan Sambilan Utama	892
3.	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4.	Buruh Nelayan	1.802
	Jumlah	5.085

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Untuk melakukan penangkapan ikan nelayan Kabupaten Sikka menggunakan pancing, jaring ikan hanyut, dan jaring insang tetap. Secara rinci jenis alat tangkap nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.34.
Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1.	Pukat Pantai	644
2.	Pukat Cincin	132
3.	Jaring Isang tetap	463
4.	Jaring Isang hanyut	990
5.	Bagan	153
6.	Longline	3
7.	Huhate	75
8.	Pancing	9.048
9.	Bubu	179
10.	Lain-lain	1171
	Jumlah	12.858

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Armada yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut meliputi: Jukung, Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M, Perahu papan sedang/sampan fiber glass >5 M, perahu papan besar, Motor tempel <5 GT, Motor tempel 5 – 10 GT, Motor tempel 10 – 20 GT, Kapal Motor <5 GT, Kapal Motor 5-10 GT, Kapal Motor 10-20 GT, Kapal Motor 20-30 GT dan Kapal Motor 30-50 GT. Jumlah yang paling banyak digunakan adalah Kapal Motor <5 GT,dengan jumlah sebanyak 1.296 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Jenis Armada yang digunakan Nelayan

No	Jenis Armada	Jumlah(unit)
1.	Jukung	50
2.	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	307
3.	Perahu papan sedang/sampan fiber glass >5 M	255
4.	Motor tempel <5 GT	88
5.	Kapal Motor <5 GT	452

No	Jenis Armada	Jumlah(unit)
6.	Kapal Motor 5-10 GT	102
7.	Kapal Motor 10-20 GT	8
8.	Kapal Motor 20-30 GT	67
9.	Kapal Motor 30-50 GT	1
Jumlah		1.330

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Labuhan Bajo, Bima, Kendari, Sidoarjo, Jepang dan Korea Selatan. Jenis ikan maupun non ikan yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim serta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Padang, Juwana, Banyuwangi, Makasar, Bau-Bau, Kupang dan Labuhan Bajo. Jenis komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka

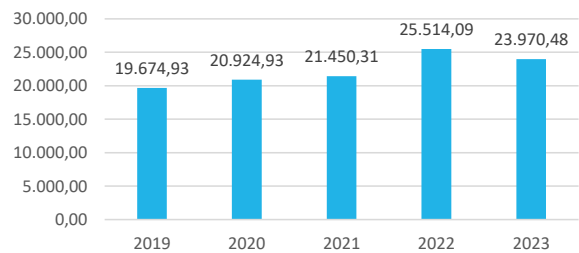
NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH (Kg)	DAERAH TUJUAN
1	Tuna Loin	165.954,0	Denpasar, Makassar, Surabaya, Jakarta, Padang-Minangkabau
2	Ikan Baby Tuna	22.200,0	Jakarta, Juwana-Jawa Tengah, Surabaya
3	Ikan Tuna	18.500,0	Jakarta
4	Tetelan	8.150,0	Jakarta, Denpasar
5	Lobster	4.210,00	Jakarta,Denpasar,Labuan Bajo
6	Gurita	78.700,0	Makassar, Jakarta, Banyuwangi, Indramayu-Jawa Barat
7	Ikan Cakalang	598.322,0	Jakarta, Surabaya, Denpasar
8	Ikan Layang	16.550,0	Jakarta
9	Ikan Meka	1.400,0	Jakarta
10	Cumi/ Sotong	1.636,0	Makassar, Denpasar, Jakarta
11	Ikan Kerapu	3.635,0	Makassar, Denpasar, Kalimantan Timur
12	Ikan Kakatua	1.290,0	Denpasar, Makassar
13	Ikan Sunuk	380,0	Labuan Bajo
14	Ikan Kakap	100,0	Makassar
15	Tenggiri	8.801,0	Makassar
16	Ikan Layur	130,0	Jakarta
17	Udang Ronggeng	1.635,0	Jakarta, Makassar
18	Ikan Tongkol/ Deho	90.040,0	Jakarta, Surabaya
19	Teripang	11,0	Denpasar
20	Kepiting	153,0	Jakarta, Makassar
21	Sirip Hiu Hitam	40,0	Jakarta
22	Ikan Sukang	1.800,0	Bau-Bau
23	Ikan Ande-Ande	50,0	Jakarta
24	Ikan Dasar	80,0	Maros-Makassar
25	Ikan Jaket	400,0	Jakarta
26	Ikan Sori (Kering)	2.500,0	Kupang
JUMLAH		1.026.667,0	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

b. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.39.
Produksi Perikanan



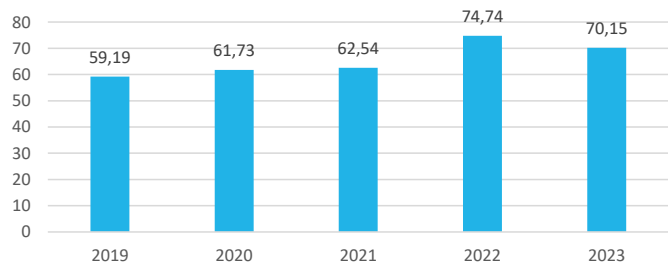
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 19.674.93 ton. Tahun 2020 sebesar 20.924,93 ton, Tahun 2021 menjadi 21.450,31 ton, Tahun 2022 sebesar 25.514,09 dan pada Tahun 2023 sebesar 23.970,40 ton.

c. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.40
Konsumsi Ikan



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 59,19 kg/kapita/tahun. Tahun 2020 sebesar 61,73 kg/kapita/tahun, Tahun 2021 menjadi 62,54 kg/kapita/tahun dan Tahun 2022 sebesar 74,74 kg/kapita/tahun sedangkan Tahun 2023 sebesar 70,15 kg/kapita/tahun.

d. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Kelompok Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengola ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta didalam lingkungan berpengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah berbanding dengan jumlah kelompok nelayan di wilayah tertentu setiap tahunnya. Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 45%. Tahun 2020 sebesar 32,37%, Tahun 2021 menjadi 50% sedangkan Tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

2. Urusan Pariwisata

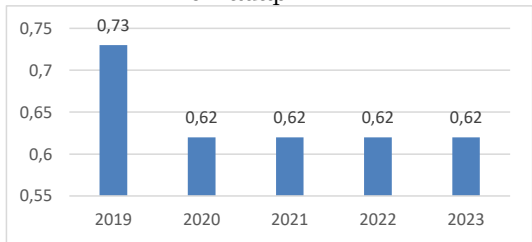
Sektor pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan salah satu sektor yang cukup berpotensi dalam pengembangan. Pariwisata merupakan satu fenomena baru yang bersifat multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan, di mana Pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata juga pengusaha objek dan usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Perkembangan pariwisata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata, dengan demikian pariwisata juga merupakan satu bisnis. Pencapaian kinerja pariwisata dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.42.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

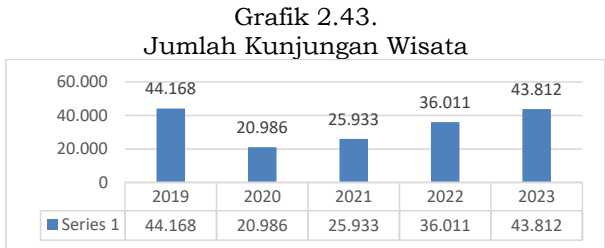


Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,73%, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 0,62%.

b. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sikka. Sektor Pariwisata memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

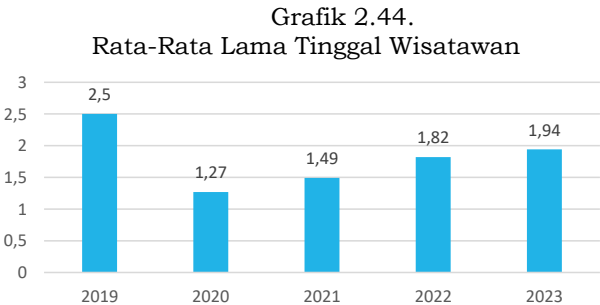


Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 44.168 Wisatawan, Tahun 2020 sebanyak 20.986 wisatawan, Tahun 2021 sebanyak 25.933 wisatawan dan Tahun 2022 sebanyak 36.011 wisatawan sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 43.812 Wisatawan.

c. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di suatu wilayah untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 2,5 hari, Tahun 2020 turun 1,27 hari, Tahun 2021 naik menjadi 1,49 hari dan Tahun 2022 menjadi 1,82 hari sedangkan pada Tahun 2023 menjadi 1.94 hari.

d. Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Sikka terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata.

1) Potensi wisata alam, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Kawasan taman wisata alam gugus pulau teluk Maumere	Memiliki variasi / corak terumbu karang, ikan hias, hutan bakau dan padang lumut
2.	Kawasan hutan wisata Pulau Besar	Memiliki keragaman Flora dan Fauna seperti rusa, babi hutan dan kelelawar
3.	Puncak Buleng	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura
4.	Puncak Kimang	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura
5.	Mata Air Panas Blidit	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80 di dalam kawasan hutan
6.	Air Terjun Tunaohok	Air terjun setinggi 40 meter di Kawasan hutan lindung Egon
7.	Gua alam Patiahu	Gua alam dengan stalaktit dan stalakmit yang menarik dan terdapat banyak kelelawar
8.	Hutan wisata Egon	Memiliki panorama hutan dan berbagai jenis satwa
9.	Gunung api egon	Memiliki panorama kawa vulkanik dan untuk kegiatan hiking
10.	Tebing alam Halar Hawua	Tebing alam yang menarik dan terdapat berbagai jenis tanaman perkebunan
11.	Mata air panas Krenget	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80
12.	Gua alam Keitimu	Gua alam dengan habitat kelelawar kecil
13.	Liang nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
14.	Gua alam Warut	Gua alam dijadikan sebagai benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
15.	Dala Elat	Batu meteor berdiameter 25 cm yang memiliki daya magic dan sakral
16.	Tebing alam Watu Ngesu	Tebing alam yang menarik dengan susunan batu berlapis
17.	Gunung api Rokatenda	Memiliki panorama gunung api dengan kawa vulkanik
18.	Penyulingan uap panas bumi	Penyulingan uap panas bumi secara tradisional untuk kebutuhan air minum
19.	Mata air panas Poha	Mata air panas pada pinggir pantai dengan suhu 75-100 C
20.	Air terjun Lianiki	Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter
21.	Pulau Kondo	Pulau kecil, tidak dihuni, nyaman bagi wisatawan
22.	Tebing alam Natar	Tebing alam yang menarik terdapat tanaman perkebunan di sekitarnya
23.	Mata air panas Liwun Huler	Mata air panas dengan suhu 75-100 C

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

2) Potensi wisata budaya yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Rumah Adat Lepo Kirek	Rumah adat dengan koleksi peninggalan bersejarah seperti gading tua, keramik cina dan artefak lainnya
2.	Rumah Adat Lepo Gete	Peninggalan istana Raja Sikka
3.	Rumah Adat Mbengu	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti kris, perisai, piring cina, peralatan tenun tradisional dan Gong Waning
4.	Rumah Adat Wolo Bela	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti meriam miniatur, piring cina dan peralatan upacara Ka Uwi
5.	Rumah Adat Nuabari	Rumah Adat juga terdapat benda warisan leluhur
6.	Museum Bikon	Museum terbesar di NTT yang dikelola oleh STFK Ledalero

No	Jenis Data	Keterangan
	Blewut	yang menghimpun berbagai koleksi peninggalan purbakala seperti stagedon, berbagai alat musik, mata uang kuno dan berbagai fosil tua
7.	Kubu Batu Nuabari	Warisan Megalitikum yang merupakan situs pekuburan batu tradisional masyarakat setempat
8.	Miniatur Jong Dobo	Warisan budaya Dongson berupa miniatur perahu yang memiliki daya sakral dan magic yang tinggi
9.	Perkampung tradisional Wuring	Perumahan tradisional suku Bajo di atas laut dengan berbagai tata kehidupan tradisional
10.	Regalia Kerajaan Sikka	Warisan pakaian kerajaan yang terbuat dari emas berupa mahkota, kalung, kris, dan tongkat sebagai simbol kebesaran Raja Sikka
11.	Regalia Kerajaan Nita	Warisan kerajaan Nita berupa gading, emas, pakaian, tongkat kerajaan sebagai simbol kebesaran Raja Nita
12.	Regalia kerajaan Kangae	Rumah adat dan terdapat beberapa benda warisan leluhur
13.	Pigang Tawatana	Piring porselin buatan cina terdiri dari pigang zoroni, Lerohae, Retarai, Laueri, Lero Meseng dan Pigang Unu Nereng Tawu Klewak
14.	Rumah adat Watulaki	Rumah adat ukuran 3x4m, terdapat tombak dan perisai
15.	Rumah adat Tubu Kobe	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Tu Teu
16.	Rumah adat Ndeo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
17.	Rumah adat Lei	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
18.	Rumah adat Tomu	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
19.	Rumah adat Cawalo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
20.	Rumah adat Koa	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
21.	Rumah adat Nitung	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
22.	Rumah adat Cua	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
23.	Liang Nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
24.	Megalit Romanduru	Batu besar tempat pemberian sesajen pada leluhur
25.	Liang Nipon Watuliwuwung	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
26.	Utan Beke Hewokloang	Memiliki nilai magic dan sakral
27.	Nua Bharaka Lekebai	Kubur batu tempat disemayamkan tulang belulang leluhur rumpun mego
28.	Pondok Tradisional Wailamung	Pondok dengan konstruksi lokal, tersimpan alba/juba pastor, kaliks emas dan piring keramik peninggalan portugis.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

3) Potensi wisata rohani, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Patung Kristus Raja	Simbol kekatolikan Kabupaten Sikka dan Pelindung Kota Maumere yang diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989
2.	Wisung Fatima Lela, Bangunan Tua dan Gereja Tua Lela	Tempat ziarah umat katolik tertua di Flores dengan arca Bunda Maria Portugis
3.	Tempat Ziarah Nilo	Terdapat patung Bunda Maria Segala Bangsa
4.	Gua Maria Watusoking	Tempat ziarah umat katolik dan terdapat panorama alam
5.	Gua Maria Dian Desa	Tempat ziarah umat katolik dan dapat menikmati panorama pantai
6.	Gua Fatima Hokor	Tempat ziarah umat katolik
7.	Rumah Retret St. Nabi Elia	Pusat Kegiatan Rohani
8.	Pertapaan Kelikeo	Pertapaan Rohani dan memiliki panorama alam pegunungan yang indah dan sejuk.
9.	Gereja Tua Sikka	Gereja dengan arsitek kuno Eropa terdapat salib Senhor, Menino

No	Jenis Data	Keterangan
10.	Gua Maria Kesokoja	Tempat ziarah umat katolik dipuncak bukit terdapat penyulingan uap panas bumi Nuhan Kaju
11.	Gua Maria Krokowolon	Tempat wisata rohani pada pinggir pantai
12.	Wair Nokerua	Sumber air panas di tepi pantai yang keluar dari batu cadas, menurut iman katolik dapat menyembuhkan penyakit karena hasil tancapan tongkat St. Fransiskus Xaverius dalam misi menyebarkan agama katolik di Pulau Flores
13.	Watu Krus Bola	Salib peninggalan Protugis di atas batu karang di kawasan laut.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

4) Wisata Bahari yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.40.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Memiliki keindahan panorama alam bawah laut dengan variasi coral, ikan hias, hutan bakau dan bentangan pantai pasir putih
2.	Pantai Sikka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
3.	Pantai Koka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
4.	Pantai Doreng	Pantai berpasir putih
5.	Pantai Paga	Pantai berpasir putih
6.	Pantai Pulau Besar	Pantai berpasir putih
7.	Pantai Pulau Kambing	Pantai berpasir putih
8.	Pantai Reruwairere	Pantai berpasir putih
9.	Pantai Ngolo	Pantai berpasir putih
10.	Pantai Bangboler	Panorama pantai yang indah
11.	Pantai Ipir	Panorama pantai yang indah
12.	Pantai Pulau Pangabatang	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
13.	Pantai Pulau Babi	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
14.	Pantai Waiara	Pantai berpasir putih, terdapat hotel Sao Wisata dan Pondok Dunia Laut (Sea Word Club)
15.	Pantai Wailiti	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
16.	Pantai Wingawoka	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
17.	Pantai Nangahure	Pantai berpasir putih,hutan bakau dan terdapat hotel Gading Beach
18.	Pantai Waturia	Pantai berpasir
19.	Pantai Nangatobong	Pantai berpasir
20.	Pantai Kajuwulu	Pantai berpasir, hutan bakau dan Puncak Bukit terdapat Salib Besar
21.	Pantai Wailamung	Pantai berpasir dalam kawasan teluk
22.	Pantai Wairterang	Pantai berpasir terdapat Cottage Egon, Cottage Wodong

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2024

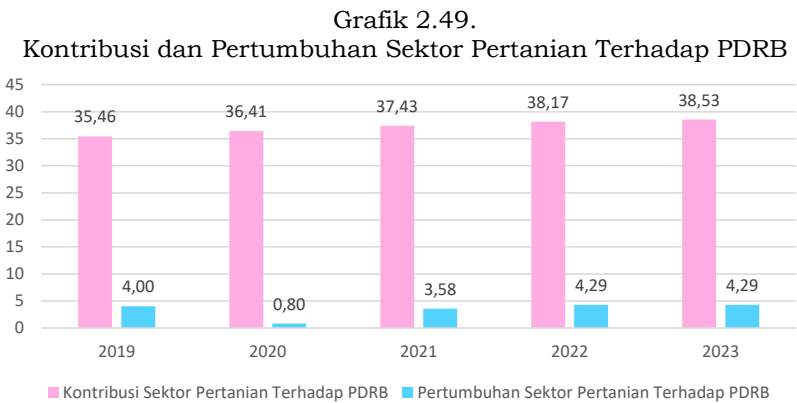
3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan/peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, yang capaian pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

a. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 35,46%, pada Tahun 2020 naik menjadi 36,41%, pada Tahun 2021 naik menjadi 37,43% dan Tahun 2022 sebesar 38,17% dan Tahun 2023 sebesar 38,53%. Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 4,83%, pada tahun 2019 sebesar 4,00%, Tahun 2020 sebesar 0,80 %, Tahun 2021 menjadi 3,58%.

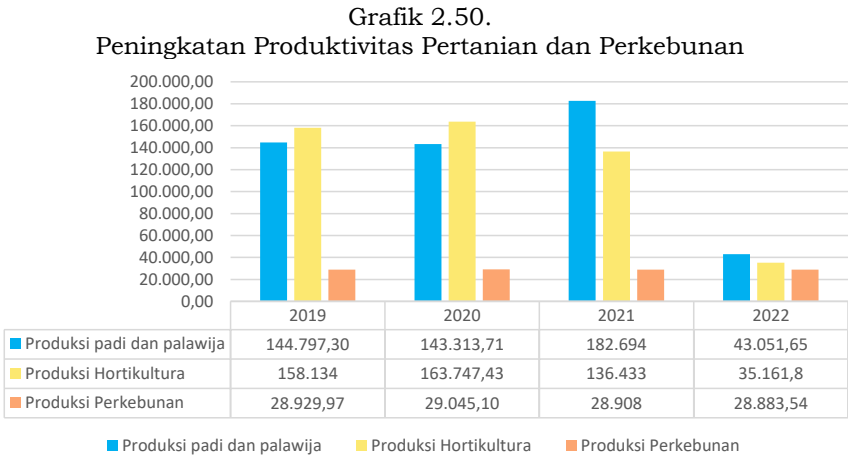
Pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 4,29%. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

b. Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 berdasarkan sub sektor berturut-turut sebagai berikut :

- Produksi Padi dan Palawija Pada Tahun 2019 sebesar 144.797,3 ton, Tahun 2020 sebesar 143.313,71 ton, Tahun 2021 sebesar 182.694 ton dan pada Tahun 2022 sebesar 43.051,65 ton, dan Tahun 2023 sebesar 115.485,50 ton.

- Produksi Hortikultura Pada Tahun 2019 sebesar 158.134 ton, Tahun 2020 sebesar 163.747,43 ton, Tahun 2021 sebesar 136.433 ton dan pada Tahun 2022 sebesar 35.161,8 ton dan tahun 2023 sebesar 151.296,36 ton
- Produksi Perkebunan pada tahun 2019 sebesar 28.929,97 ton, Tahun 2020 sebesar 29.045,10 ton, Tahun 2021 sebesar 28.908 ton dan pada Tahun 2022 sebesar 28.883,54 ton dan tahun 2023 sebesar 28.883,54 ton.

c. Pengembangan Sektor Perkebunan

Untuk sub sektor Perkebunan, komoditi yang mempunyai produksi yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah komoditi Kelapa, Jambu Mete, dan Kakao. Rincan produksi tanamanperkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan

NO	KOMODITI	ATAP 2022						
		LUAS AREAL(Ha)				PRODUK SI (TON)	PRODUKTI VITAS (kg/Ha)	Jml KK
		TBM	TM	TT/TR	Jml			
1	Kelapa	3.578,79	4.350,00	1.157,21	9.086,00	10.574,50	737	29.363
2	Jambu Mete	7.888,00	10.533,00	2.853,00	21.274,00	8.913,85	846	31.823
3	Kopi	87,00	263,00	1.171,00	1.521,00	129,63	493	2.340
4	Kakao	7.835,00	12.191,50	2.462,30	22.488,80	8.015,57	657	34.657
5	Kemiri	506,00	428,00	90,00	1.024,00	194,30	454	1.575
6	Kapuk	43,00	262,00	63,00	368,00	69,60	266	566
7	Cengkeh	552,29	930,00	2,00	1.484,29	461,94	497	2.284
8	Pinang	32,00	70,00	4,00	106,00	36,70	524	163
9	Vanili	463,62	338,00	61,00	862,62	113,79	337	996
10	Lada	37,50	124,00	7,00	168,50	37,75	304	254
11	Asam	151,00	174,00	27,20	352,20	76,10	437	542
12	Jarak Pagar	31,00	155,00	30,50	216,50	1,40	9	333
13	Pala	279,00	257,00	27,00	563,00	94,60	368	866
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	77,00	90,50	-	167,50	37,81	418	129
16	Sirih	36,00	40,00	5,00	81,00	8,00	200	120
17	Lontar	19,00	456,00	15,07	490,07	118,00	259	642
18	Kelor	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	21.616,20	40.662,00	7.975,28	70.253,48	28.883,54	710	106.654

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka, 2024

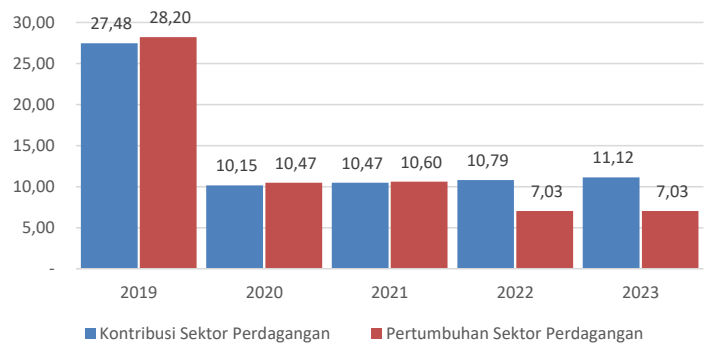
d. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok Tani merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kabupaten Sikka. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

4. Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sikka. Sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Sikka terdiri dari dua sub sektor, yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran dan (2) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.51.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB



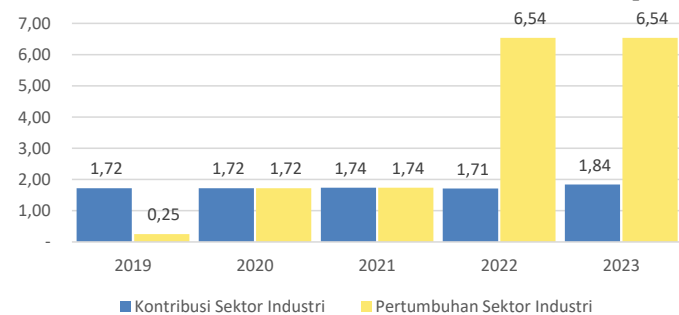
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 27,48%, Tahun 2020 sebesar 10,15%, Tahun 2021 menjadi 10,47% dan Tahun 2022 sebesar 10,79 sedangkan Tahun 2023 sebesar 11,12 Sedangkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2019 sebesar 28,2%, Tahun 2020 sebesar 10,47%, Tahun 2021 menjadi 10,60%. Pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,03%.

5. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan fasilitas industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumber daya/potensi lokal. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.52.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 1,72%. Tahun 2020 sebesar 1,72%, Tahun 2021 menjadi 1,74% , Tahun 2022 sebesar 1,71 dan Tahun 2023 1,84%. Sedangkan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,25%, Tahun 2020 sebesar 1,72%, Tahun 2021 menjadi 1,74%, Tahun 2022 dan 2023 sebesar 6,54%.

6. Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, melalui pemberdayaan warga masyarakat transmigran serta penyediaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi, dan penyediaan lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Sikka.

Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka mengirimkan warga Kabupaten Sikka ke Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 KK.

2.3.3. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen perencanaan yang pro publik serta meningkatkan proporsi serapan anggaran yang memihak pada masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena didalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (DPPMD) Tahun 2024-2026.
- b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pelaksanaan pembangunan dalam periode DPPMD diturunkan kedalam dokumen perencanaan tahunan. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan DPPMD yang telah ditetapkan. Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sebagai berikut :
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2017 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2018 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2019;
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2019 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2021 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2022 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang RKPD Kab.

Sikka Tahun 2024.

2. Keuangan

Keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

a. Pengelolaan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 berdasarkan opini BPK berada pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam proses audit. Gambaran Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka. sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2024

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sikka dan capaian kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.43
Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	2019	21.530.813.226,80	10.096.895.298
2	2020	19.161.863.076,19	9.165.525.046
3	2021	19.494.028.872,90	7.837.377.672
4	2022	19.685.397.337	7.117.817.482
5	2023	21.267.105.601	8.039.856.473

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2024

Tabel 2.44
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
2019	104,401,857,125.00	99,619,556,108.26	95.419
2020	108,613,927,900.59	119,601,046,361.49	110.116
2021	106,431,778,313.00	90,816,311,412.52	85.328
2022	105,724,221,360.00	92,983,642,048.58	87.949
2023	107.640.931.980,00	97.509.756.987.00	90,58

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2024

Tabel 2.45
Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

TAHUN	PAD	Pendapatan	%
2019	99,619,556,108.26	1,239,199,874,138.26	8.04
2020	119,601,046,361.49	1,102,491,657,749.49	10.85
2021	106,431,778,313.00	1,122,667,568,386.52	9.48
2022	105,724,221,360.00	1,075,772,304,642.58	9.83
2023	107.640.931.980,00	1.194.121.598.920,00	9,01

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2023

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 5.154 orang. yang rinciannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Jumlah ASN Kabupaten Sikka
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2023

NO.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	SD	39	8	47
2	SLTP Kejuruan	-	1	1
3	SLTP	42	2	44
4	SLTA	402	423	825
5	SLTA Kejuruan	56	77	133
6	Diploma I	4	26	30
7	Diploma II	40	59	99
8	Diploma III/ Sarjana Muda	217	1.024	1.241
9	Diploma IV	48	53	101
10	S-1 / Sarjana	907	1.634	2.541
11	S-2 / Sarjana	48	44	92
Jumlah		1.803	3.351	5.154

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

No	Golongan ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
GOLONGAN IV				
1.	Pembina, IV/a	178	224	402
2.	Pembina Tk. I, IV/b	137	173	310
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	26	13	39
4.	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	
GOLONGAN III				
1.	Penata Muda, III/a	243	520	763
2.	Penata Muda Tk.I, III/b	263	662	925
3.	Penata, III/c	187	590	777
4.	Penata Tk. I, III/d	397	686	1.083
GOLONGAN II				
1.	Pengatur Muda, II/a	29	11	40
2.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	52	16	68
3.	Pengatur, II/c	125	211	336
4.	Pengatur Tk. I, II/d	140	244	384
GOLONGAN I				
1.	Juru Muda, I/a	-	-	
2.	Juru Muda Tk. I, I/b	2	-	2
3.	Juru, I/c	8	1	9
4.	Juru Tk. I, I/d	16	0	16
Jumlah		1.803	3.351	5.154

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

Tabel 2.48

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	32	4	36
2.	Administrator	150	54	204
3.	Pengawas	166	152	318
4.	Fungsional Umum	604	638	1.242
5.	Fungsional Tertentu	851	2.503	3.354
Jumlah		1.803	3.351	5.154

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

4. Pengawasan

Indikator kinerja pengawasan tergambar dari tindak lanjut hasil temuan. Data tindak lanjut hasil temuan di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan di Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023

NO	APF	TAHUN	REKOMENDASI		REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI		SISA		PERSENTASE CAPAIAN TINDAKLANJUT	
			JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
I	EKSTERNAL									
	BPK RI PERWAKILAN PROV. NTT	2005 - 2020	817	42.507.925.817,71	559	24.570.290.704,72	258	17.937.635.112,99	68,42%	57,80%
		2021	13	147.770.619,00	5	80.150.000,00	8	67.620.619,00	38,46%	54,24%
		2022	32	1.787.152.931,16	11	791.438.832,71	21	995.714.098,45	34,38%	44,28%
		2023	31	179.437.834,90	0	82.281.010,31	31	97.156.824,59	0,00%	45,85%
		s.d 2023	893	44.622.287.202,77	575	25.524.160.547,74	318	19.098.126.655,03	64,39%	57,20%
		2024	0	-	81	555.055.104,16				
		s.d Maret 2024	893	44.622.287.202,77	656	26.079.215.651,90	237	18.543.071.550,87	73,46%	58,44%
II	INTERNAL									
1	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. NTT	s.d 2021		5.407.950.829,35		1.869.289.202,29		3.538.661.627,06		34,57%
		2023	21	-	10		11	-	47,62%	
		s.d Maret 2024	21	5.407.950.829,35	10	1.869.289.202,29	11	3.538.661.627,06	47,62%	34,57%
	Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur									
		s.d Maret 2024	185	31.743.409,00	89	30.000.000,00	96	1.743.409,00	48,11%	94,51%
	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	1990 s.d 2021	357	44.841.484.517,75	253	7.705.620.363,54	104	37.135.864.154,21	70,87%	17,18%
		2022	45	3.615.829.831,71	24	1.399.633.282,54	21	2.216.196.549,17	53,33%	38,71%
		2023	132	5.611.474.188,22	16	1.966.143.417,83	116	3.645.330.770,39	12,12%	35,04%
		2024	10	209.657.740,00	2	100.728.260,00	8	108.929.480,00	20,00%	48,04%
		s.d Maret 2024	544	54.278.446.277,68	295	11.172.125.323,91	249	43.106.320.953,77	54,23%	20,58%

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. 2024

2.4. Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.4.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 (Laporan TW IV 2023)

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100	325.767.001.733	94,56	308.045.135.722	84,18	894.327.406.406
Program Pengelolaan Pendidikan		100	114.404.471.070	92,13	105.404.394.312	77,56	304.097.183.093
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100	68.543.412.805	91,64	62.812.500.324	68,86	175.242.077.555
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Layanan Unit SD untuk Masyakat Kurang Mampu			-	-	-	-
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	1.448.400.000	7	1.292.580.400	12	2.582.454.132
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah,Tata Usaha Sekolah yang Dibangun			-	-	2	423.017.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	4	319.048.000	4	314.021.000	8	630.774.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	2	579.600.000	2	575.769.000	11	2.829.394.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Kebutuhan Unit MCK dan Prasara Penunjang sesuai standar palayanan	59	5.514.127.800	55	4.575.301.385	90	6.542.019.285
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya Rumah Dinas Guru untuk 15 Sekolah di Daerah Terpencil dan Kepulauan						
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas rusak SD/MI direhabilitasi	149	10.004.497.448	145	9.003.830.202	293	24.776.255.520
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru SD Rusak sedang/Berat direhabilitasi	7	664.989.000	7	652.608.200	17	1.743.904.700
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5	525.365.000	5	518.887.400	12	1.270.952.300

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi	12	910.233.600	10	777.489.800	39	2.524.482.700
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru/ Kepsek yang Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Tambahan Meubeler sesuai Ratio Siswa SD			-	-	20	20.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yng disediakan	528	2.378.110.000	302	508.570.000	302	508.570.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah bantuan Peralatan untuk Peserta didik	6.215	2.651.928.000	6.215	2.642.785.550	6.224	2.772.475.550
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dirawat	4	42.325.000	4	41.638.100	4	41.638.100
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terpenuhinya Biaya Operasional sekolah Dasar setiap Tahun	100	33.430.000.000	97	32.535.078.086	99	100.669.077.915
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30	2.232.675.000	30	2.229.278.120	68	6.493.328.120
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	336	14.550.000	336	6.450.000	336	134.111.650
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	336	24.995.000	336	23.145.000	336	176.385.800
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi di bidang MIPA dan Seni di SD	-	-	-	-	100	24.592.500
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya biaya Personil bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Jenjang SD	991	6.734.369.457	962	6.272.295.360	980	20.140.769.562
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	93.906.500	150	76.070.180	270	171.172.180

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah PTK memperoleh Kompetensi Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180	99.980.400	180	90.656.400	180	90.656.400
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah PTK memperoleh Pelatihan Penggunaan Aplikasi Perencanaan dan Penatausahaan standar pembiayaan sekolah	321	75.000.000	321	24.400.000	321	24.400.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan hasil Supervisi dan capaian Layanan standar Pendidikan Dasar	336	124.315.000	336	51.348.541	336	51.348.541
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah mengikuti sosialisasi dan advikasi Kebijakan Pendidikan sekolah dasar	336	75.000.000	336	16.080.000	336	16.080.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah PTK Sekolah Dasar Memperoleh Penikatan Kapasitas Petencanaan Berbasisi data dan Pengembangan Liteasi dan Numerasi	135	99.997.600	135	84.217.600	135	84.217.600
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100	34.701.280.161	93,27	32.366.550.699	99,14	101.735.354.913
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Layanan Unit USB SMP untuk Masyarakat Kurang Mampu	-	-	-	-	1	1.745.539.051
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	1.521.825.000	7	1.101.076.000	9	1.328.043.896
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepsek/ Tata Usaha Sekolah yang Dibangun			-	-	1	289.181.600
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	2	514.846.000	2	461.271.548	2	461.271.548
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Dibangun					4	1.479.922.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun	2	1.115.738.350	2	997.130.079	11	4.859.476.079
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya Rumah Dinas Guru untuk 3 Sekolah di Daerah Terpencil dan Kepulauan						
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	13	926.027.100	10	830.356.900	47	3.331.088.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas rusak SMP/MTs direhabilitasi	40	3.656.329.850	40	3.307.722.638	115	13.636.835.673
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	334.823.000	1	295.958.866	7	1.264.176.866
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat					6	1.118.838.000
Rehabilitasi sedang/ berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium SMP kondisi rusak sedang/berat direhabilitasi			-	-	6	1.198.479.444
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi	2	185.262.000	2	184.968.000	5	404.328.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Biaya Operasional sekolah Menengah Pertama Negeri dalam 1 Tahun	100	20.283.800.000	100	19.665.180.359	100	53.045.175.855
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Tambahan Meubeler sesuai Ratio Siswa SMP					272	247.725.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	41	338.060.000	12	78.624.000	12	78.624.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa	5.656	1.409.021.500	5.653	1.382.327.400	5.653	1.382.327.400
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dirawat	1	156.275.000	1	153.236.000	1	153.236.000
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8	279.955.000	8	278.449.500	14	651.385.500
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya proses belajar dan ujian bagi peserta didik Jenjang SMP/MTs	100	25.000.000	100	25.000.000	100	356.360.765

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya supervisi manajemen dan akademik serta evaluasi dan Pengukuran kinerja penyelenggaraan SMP/MTs	100	25.000.000	100	24.675.000	100	109.605.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi di bidang MIPA dan Seni di SMP					100	4.581.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya Personil bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Jenjang SMP	492	3.430.868.261	492	3.157.069.990	509	14.137.531.517
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenunya layanan pengembang profesi guru	100	190.563.900	100	175.087.560	100	203.205.260
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	85 SMP/MTsI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah						
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh Peningkatan Kompetensi Penggunaan TIK dalam Pembelajaran	110	75.000.000	110	66.942.459	110	66.942.459
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh Peningkatan Kompetensi Pengembangan Konten Digital dalam Pembelajaran	25	25.000.000	12	3.450.000	12	3.450.000
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah memperoleh Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Aplikasi DAPODIK	88	35.000.000	88	19.265.000	88	19.265.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Supervisi Sekolah	88	52.885.200	88	43.345.000	88	43.345.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sekolah Memahami Alur Proses dan Peaporan Dana PIP dan BOSP	88	45.000.000	88	45.000.000	88	45.000.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah memperoleh Bimbingan Tekns Perencanaan Berbasis Data sesuai Rapor Pendidikan	88	75.000.000	88	70.414.400	88	70.414.400
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100	10.510.678.434	91,22	9.588.365.089	77,01	26.190.672.425
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dibangun	14	2.084.131.234	14	1.814.186.700	16	2.049.629.050
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dibangun	19	1.265.650.000	19	1.188.974.200	21	1.223.955.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2	604.270.000	2	500.420.889	11	1.255.404.523
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7	313.249.000	5	270.159.700	6	290.140.500
Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah meubeler satuan PAUD						
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	48	357.568.000	48	308.177.000	48	308.177.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	266	712.375.000	263	695.357.000	271	917.454.200
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terpenuhinya Bantuan Operasional untuk 300 PAUD		5.066.400.000	100	4.734.750.000	100	19.956.235.552
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya proses belajar pada Satuan PAUD	100	10.000.000	100	9.400.000	100	81.900.300
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya supervisi manajemen dan akademik serta evaluasi dan Pengukuran kinerja penyelenggaraan PAUD			-	-	100	40.836.700
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersediaya Biaya Operasional untuk Pendidik PAUD					-	-
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	30	30.035.200	30	19.439.600	30	19.439.600

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Kompetensi dan Kualifikasi						
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	182	47.000.000	130	27.500.000	130	27.500.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100	649.099.670	98,13	636.978.200	97,20	929.078.200
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Biya Operasional Nonformal selama 1 Tahun	100	624.100.000	100	624.100.000	100	866.200.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			-	-	100	50.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10	24.999.670	10	12.878.200	10	12.878.200
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		100	35.200.000	100,00	35.200.000	9,08	84.200.000
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	2	35.200.000	2	35.200.000	2	35.200.000
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	terlaksanannya penyusunan silabus kurikulum muatan lokal			-	-	100	49.000.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Menerapkan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar			-	-	-	-
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		100	85.494.400	-	0	32,51	19.787.700
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meratanya Penyebaran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dan SMP di setiap satuan Pendidikan	100	55.494.400	-	-	100	19.787.700

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	30.000.000	-	-	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		100	22.000.000	76,36	16.800.000	17,51	28.336.500
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100	22.000.000	76,36	16.800.000	17,51	28.336.500
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terukuran kelayan Operasional dan Pendirian PAUD	100	22.000.000	100	16.800.000	100	28.336.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100	3.994.620.800	92,50	3.695.081.284	130,72	7.927.178.484
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		100	3.493.001.100	92,09	3.216.624.684	141,53	6.447.100.784
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	1.004.626.300	96,49	969.394.684	407,49	1.107.550.684
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10	1.004.626.300	10	969.394.684	12	1.107.550.684
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	2.488.374.800	90,31	2.247.230.000	191,54	5.339.550.100
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	8	1.622.825.000	8	1.495.000.000	16	4.095.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	235.550.000	1	200.550.000	1	200.550.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	48	629.999.800	48	551.680.000	96	1.044.000.100
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		100	0	-	0	-	0
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		100	0	-	0	-	0
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tersedianya Lapang Olahraga Rekreasi di tingkat Desa dan satuan Pendidikan			-			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		100	351.619.700	93,41	328.456.600	67,09	880.077.700
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100	351.619.700	93,41	328.456.600	67,09	880.077.700
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Kelompok Pemuda memiliki Dokumen Rencana Pengembangan Pemuda Pelopor Pembangunan		-	-	-	-	-
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda memperoleh Pelatihan Kepemimpinan dan Kepelopran	77	351.619.700	77	328.456.600	165	880.077.700
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	150.000.000	100,00	150.000.000	304,49	600.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100	150.000.000	100,00	150.000.000	304,49	600.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kepanduan Gudep SD dan SMP dalam 1 Tahun	100	150.000.000	100	150.000.000	100	600.000.000
DINAS KESEHATAN							

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			238.515.828.488	2.396	203.957.120.733		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			82.041.334.339	782	66.278.034.009		795
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100	12.401.503.704	69	8.497.542.083	69	69
Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	100	3.183.756.650	68	2.154.619.850	68	68
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	5.377.901.647	61	3.291.747.987	61	61
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	100	447.209.800	88	394.778.100	88	88
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	3.854.253.055	88	3.409.747.584	88	88
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	46.154.755.129	91	41.806.272.693	91	91
Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	100	2.768.503.318	75	2.082.962.453	75	75
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	100	7.564.989.486	58	4.356.549.334	58	58
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	100	183.474.550	90	178.892.950	90	98
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	104.987.000	95	104.920.975	95	100

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			155.791.763.511	1.614	137.098.676.161		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100	3.713.384.400	92	3.412.832.384	92	92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100	207.463.674	98	203.205.591	98	98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100	31.700.000	95	30.200.000	95	95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100	903.664.800	88	790.775.000	88	88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100	648.181.900	94	606.233.942	94	94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	100	619.761.400	66	411.084.400	66	66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	100	1.158.967.000	97	1.127.241.400	97	97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			31.046.000	-	15.850.000		51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			30.646.000	-	13.500.000		44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			493.344.200	-	445.275.000		90
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100	752.519.000	85	639.444.000	85	85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	100	116.000.000	-	95.181.968	-	82

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	406.786.600	40	375.175.000	40	92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis akibat Bencana dan/atau Berpetensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis akibat Bencana dan/atau Berpetensi Bencana	100	2.450.000	-	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	8.126.345.000	85	6.902.916.832	85	85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah Raga	100	86.516.600	84	72.755.896	84	84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	865.435.700	88	760.352.608	88	88
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			386.013.800		329.235.632		85
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	1.113.743.200	67	742.002.592	67	67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100	-	-	-	-	#DIV/0!
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	4.221.226.200	81	3.423.655.014	81	81
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	44.852.767.800	83	37.117.526.522	83	83
Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Terlaksananya Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	100	32.800.000		11.400.000	-	35
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	75.872.944.541	93	70.358.469.893	93	93
Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional	100	10.031.969.896	86	8.616.630.321	86	86

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Puskesmas						
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	963.786.000	-	505.332.166	-	52
Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	3.600.000		3.600.000	-	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	11.125.000	93	10.350.000	93	93
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	58.750.000	100	58.750.000	100	100
Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100	14.624.800	-	13.400.000	-	92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Tuberkulosis Sesuai Standar	100	19.500.000	-	-	-	-
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Malaria	100	14.700.000	-	6.300.000	-	43
Penrbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			682.730.638	-	580.410.563		85
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinann Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinann Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100	-		-		
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah	100	28.337.400	-	-	-	-

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/ Kota						
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	654.393.238	-	580.410.563	-	89
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0		7.728.538.520	156	6.375.161.257		153
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			5.550.998.080	94	5.012.457.020	94	90
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	100	5.312.297.880	94	4.985.357.020	94	94
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	100	238.700.200	11	27.100.000	11	11
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia			2.177.540.440	63	1.362.704.237	63	63
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	2.177.540.440	63	1.362.704.237	63	63
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			354.062.830	256	290.369.375	256	256
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			86.598.000	100	86.598.000	100	100

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	86.598.000	100	86.598.000	100	100
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			116.349.430	91	106.054.600	91	91
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	116.349.430	91	106.054.600	91	91
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			151.115.400	65	97.716.775	65	65
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100	151.115.400	65	97.716.775	65	65
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			2.399.383.400	100	1.190.449.156	100	150
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.395.383.400	100	1.186.449.156	100	50

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	2.395.383.400	91	2.186.449.156	91	91
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia			4.000.000	-	4.000.000	-	100
Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	100	4.000.000	100	4.000.000	100	100
			340.585.937.367	3.337	301.545.169.839		
RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE							
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	24.695.488.717	92,84	22.928.403.243	92,84	22.928.403.243
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit	100	24.695.488.717	92,84	22.928.403.243	92,84	22.928.403.243
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		251 Org	7.150.011.360	251 Org	5.521.286.730	251 Org	5.521.286.730
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada BLUD RSUD dr.T.C Hillers Maumere	251 Org	7.150.011.360	251 Org	5.521.286.730	251 Org	5.521.286.730

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota							
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada BLUD RSUD dr.T.C Hillers Maumere	12 Bln	75.872.944.541	12 Bln	65.468.962.988	12 Bln	65.468.962.988
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang Dilaksanakan	100	282.540.800	64,61	182.540.800	0,00	0,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kab/Kota	100	262.541.000	61,91	162.541.000	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	100	100.000.000	0,00	0	0,00	0,00
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	100	162.541.000	100,00	162.541.000	0,00	0,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	19.999.800	100,00	19.999.800	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100	19.999.800	100,00	19.999.800	0,00	0,00

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
						0,00	0,00
						SR	SR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	100	31.466.332.639	82,02	25.808.160.066	51,12	51,12
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prsentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	100	31.466.332.639	82,02	25.808.160.066	51,12	51,12
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	100	17.908.201.642	77,01	13.791.894.762	77,01	77,01
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100	6.138.692.982	96,23	5.907.075.542	96,23	96,23
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM Perdesaan	100	7.419.438.015	82,34	6.109.189.762	82,34	82,34
						51,12	51,12
						R	R
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang Terbangun	100	7.131.626.400	79,08	5.637.101.200	67,79	39,54
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah di Daerah Kab/Kota	100	7.131.626.400	79,08	5.637.101.200	67,79	39,54
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	100	10.000.000	56,51	5.651.200	56,51	
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	100	7.121.626.400	79,08	5.631.450.000	79,08	79,08
						67,79	39,54
						S	SR

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase drainase dalam kondisi baik	100	237.130.500	100,00	237.130.500	33,33	33,33
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	237.130.500	100,00	237.130.500	33,33	33,33
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	100	237.130.500	100,00	237.130.500	100,00	100,00
						33,33	33,33
						SR	SR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	100	170.499.500	4,61	75.033.000	1,54	1,54
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	100	170.499.500	4,61	75.033.000	1,54	1,54
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggarannya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	100	70.499.500	99,90	70.427.800	99,90	99,90
Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	100	100.000.000	4,61	4.605.200	4,61	4,61
						1,54	1,54
						SR	SR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun	100	41.756.882.810	78,49	32.775.017.659	59,50	59,50
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Jalan dan Jembatan Terbangun	100	41.756.882.810	78,49	32.775.017.659	59,50	59,50

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	100	730.924.900	98,43	719.437.340	98,43	98,43
Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	100	38.904.676.287	79,85	31.065.023.375	79,85	79,85
Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	100	1.848.922.910	42,23	780.808.693	42,23	42,23
Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	100	272.358.713	77,01	209.748.251	77,01	77,01
						59,50	59,50
						R	R
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan	100	20.000.000	99	19.850.000	99,25	99,25
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yg dilaksanakan	100	20.000.000	99	19.850.000	99,25	99,25
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100	20.000.000	99	19.850.000	99,25	99,25
						99,25	99,25
						ST	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	505.403.500	38,90	196.586.060	61,83	123,66
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		100	485.403.500	36,38	176.586.060	23,66	23,66
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	100	200.917.500	30,32	60.909.080	30,32	30,32

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	100	284.486.000	40,66	115.676.980	40,66	40,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan	100	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100,00
						30,91	61,83
						SR	R
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN							
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman	100	150.000.000	12,27	36.806.800		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		100	150.000.000	24,54	36.806.800		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100	150.000.000	24,54	36.806.800		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	100	3.285.542.700	45,20	2.105.697.710		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman kumuh (dibawah 10ha) yang ditingkatkan	100	3.285.542.700	45,20	2.105.697.710		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	3.285.542.700	45,20	2.105.697.710		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	8.663.906.203	42,20	6.145.267.577		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	100	8.663.906.203	42,20	6.145.267.577		
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	100	8.663.906.203	42,20	6.145.267.577		
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100	50.000.000	39,61	19.802.800		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan	100	50.000.000	39,61	19.802.800		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	50.000.000	39,61	19.802.800		
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan dan santunan	100	930.000.000	102,48	953.729.720		
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang disediakan untuk pembangunan	100	930.000.000	102,48	953.729.720		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	100	930.000.000	102,48	953.729.720		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		100	15.850.042.481	72,37	11.471.065.084		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			4.895.836.441	95	4.670.230.814		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	111.899.800	99	111.099.800	49	561.169.800
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah	100	111.899.800	99	111.099.800	24	258.634.800
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	78.300.000	99	77.500.000	55	302.535.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan	12 Kali	33.599.800	100	33.599.800	47	258.634.800
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		100	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan	1 Org	0	0	0	0	0
						63	409.902.300
						R	ST
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	100	82.800.000	100	82.800.000	138	296.728.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Persentase Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penanganan Bahan Beracun	100	82.800.000	100	82.800.000	138	296.728.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran						
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penanganan Pencegahan Kebakaran	100	82.800.000	100	82.800.000	138	296.728.000
						138	296.728.000
						ST	ST
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penagnanan Bencana	100	805.447.350	-	382.710.021		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	109.072.200	-	49.581.560		
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	250	109.072.200	200	49.581.560		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	302.173.900	5	191.617.631		
Pengelolaan resiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen kajian Resiko Bencana	1	157.174.000	-	48.997.600		
Penaganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	terlaksananya penagnanan Pasca bencana	21	144.999.900	5	142.620.031		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	394.201.250	7	141.510.830		
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana	3	193.796.600	2	103.784.950		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yan mendapat disrtibusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban	12	200.404.650	9	37.725.880		
			3.547.729.344	-	2.848.019.124		
DINAS SOSIAL							

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial		55.081.798		40.531.303		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		55.081.798		40.531.303		
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	23 Org	5.929.998		5.628.300		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan		-		0		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	1 Paket	49.151.800		34.903.003		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		5.000.000		4.047.600		
Pemulangan Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		5.000.000		4.047.600		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25 Org	5.000.000		4.047.600		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial		139.773.700		132.696.160		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta		139.773.700		132.696.160		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial	Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar						
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		13.823.900		13.717.900		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu		16.050.000		12.298.500		
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial		99.999.800		96.873.960		
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum	25 Org	9.900.000		9.805.800		
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial		-		0		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan		-		0		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sosial						
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		-		0		
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial		-		0		
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial		-		0		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial		1.148.435.800		1.044.285.000		
Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		-		0		
Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar		-		0		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutahiran Data Fakir Miskin		1.148.435.800		1.044.285.000		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2 Dokumen	94.021.400		88.773.600		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KPM	1.054.414.400		955.511.400		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan		48.797.000		48.339.600		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana		-		0		
Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang		-		0		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	mendapatkan bantuan Makanan						
Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Sandang	1 Paket	-		0		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		48.797.000		48.339.600		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Reaksi Cepat TAGANA dalam Penanganan Korban Bencana dan Penguataan Kapasitas TAGANA	1 Paket	48.797.000		48.339.600		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			4.000.000		2.731.000		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			4.000.000		2.731.000		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			4.000.000		2.731.000		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	TERSELENGGARANYA PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100	2.504.638.740	-	2.297.603.640	100	12.599.256.040
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	100	2.504.638.740	200	2.297.603.640	300	12.599.256.040
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100	1.569.639.100	100	1.435.992.400	200	11.737.644.800
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100	-	-	-	100	-
Prengadaan Sarana peletihan kerja kabupaten /kota	Jumlah pengadaan sarana pelatihan kerja	100	934.999.640	100	861.611.240	200	861.611.240
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	TERSELENGGARANYA		26.203.800	-	15.039.700	100	692.164.800

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
KERJA	PENEMPATAN TENAGA KERJA	100					
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan tenaga kerja	100	12.000.000	-	10.938.900	100	10.938.900
Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	100	12.000.000	100	10.938.900	200	10.938.900
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	100	9.999.800	-	300.000	100	300.000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	100	5.000.000	-	-	100	-
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	100	4.999.800	25	300.000	125	300.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan tenaga kerja	100	4.204.000	-	3.800.800	100	680.925.900
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	100	4.204.000	100	3.800.800	200	680.925.900
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	TERSELENGGARANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL	100	556.330.600	-	389.394.160	100	424.393.860
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hubungan industrial	100	-	-	-	-	9.999.800
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100	-	-	-	100	9.999.800
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase hubungan industrial	100	556.330.600	-	389.394.160	100	414.394.060

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Kabupaten/Kota							
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	36.331.200	25	36.059.560	125	61.059.460
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100	519.999.400	25	353.334.600	125	353.334.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	16.945.800	-	16.120.000	100	20.120.000
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	100	16.945.800	-	16.120.000	100	20.120.000
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	100	4.999.800	100	4.949.000	200	4.949.000
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	100	11.946.000	100	11.171.000	200	15.171.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	48.471.600	-	48.388.903	100	48.388.903
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	100	48.471.600	-	48.388.903	100	48.388.903
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	48.471.600	-	48.388.903	100	48.388.903
PROGRAM PENGEMBANGAN	TERSELENGGARANYA		1.375.000	-	1.375.000	100	17.024.900

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
KAWASAN TRANSMIGRASI	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100					
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	100	1.375.000	-	1.375.000	100	17.024.900
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	100	1.375.000	-	1.375.000	100	17.024.900
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Desa/Kel yang memiliki PUG dan Anak		45.997.450	4	45.397.450		
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota		11.999.800	3	11.999.800		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koorinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1	11.999.800	3	11.999.800		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		33.997.650	1	33.397.650		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan	1	33.997.650	1	33.397.650		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota		215.799.595	12	93.012.329		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindubngan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota		215.799.595	12	93.012.329		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenagan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	215.799.595	12	93.012.329		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Kota		249.999.800	12	34.192.100		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota		249.999.800	12	34.192.100		
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatkan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapat pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender	12	249.999.800	12	34.192.100		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Sistem data Gender dan Anak		10.000.000	12	6.519.000		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Dearah Kab/Kota	Cakupan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah		10.000.000	12	6.519.000		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Terkumpulnya Data Gender dan Anak	12	10.000.000	12	6.519.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Ketersediaan Sistem data Gender dan Anak		15.398.350	12	5.625.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Memerlukan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah		15.398.350	12	5.625.000		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Terkumpulnya Data Gender dan Anak	12	15.398.350	12	5.625.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.594.823.007	96	7.343.091.134		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		96.000.000	12	0		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		96.000.000	12	0		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21	96.000.000	12	0		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		5.123.486.267	72	3.309.654.259		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		1.050.989.800	24	888.642.300		
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21	580.989.800	12	418.642.300		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	12	470.000.000	12	470.000.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD/sub PPKBD yang mendapat pelatihan pengelolaan KKBPK		745.839.960	24	602.905.084		
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	160	62.000.000	12	62.000.000		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	160	683.839.960	12	602.905.084		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan dan pelayanan KB		3.326.656.507	24	1.818.106.875		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	38	2.162.667.507	12	752.134.325		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Meningkatnya Pelayanan KB	38	1.163.989.000	12	1.065.972.550		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		3.375.336.740	12	2.418.843.610		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru		3.375.336.740	12	2.418.843.610		
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	21	3.375.336.740	12	2.418.843.610		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)						
DINAS KETAHANAN PANGAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.458.156.237	-	2.076.276.709	-	4.430.299.100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100	195.421.070	3,00	60.417.000	103,00	60.417.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Tertanganinya Daerah Terkena atau Termasuk Daerah Rawan Pangan yang ditangani Sesuai Standar yang Berlaku	100	24.998.300	-	24.998.300	-	24.998.300
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksanya Pematauan Stok Harga Pangan	100	17.998.300	3,00	17.998.300	3,00	17.998.300
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	100	7.000.000		7.000.000		7.000.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Terwujudnya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	100	170.422.770	-	35.418.700	-	35.418.700
Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terlaksananya Sistem Informasi Pasar					7,00	17.825
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Prosentase jenis pangan segar yang layak dikonsumsi				9.800		238.545
Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Lokasi Pemanfaat pekarangan untuk pengembangan pangan	5	170.422.770	10,00	35.418.700	20,00	35.418.700
							15.125.614
						SR	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Tertanganinnya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang	100	130.013.600	-	128.240.550	100,00	383.814.074

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	ditangani sesuai standar yang berlaku						
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya jumlah lokasi penanganan daerah rawan pangan	100	130.013.600	-	128.240.550	17.250,00	383.814.074
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1	24.400.000	-	23.489.800	-	23.489.800
Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerwananan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah belanja persediaan beras rawan pangan	1	105.613.600		104.750.750		360.324.274
						100,00	100.186.909
						SR	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan pangan segar Daerah	100	24.998.400	-	24.743.700	100,00	24.743.700
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Pangan		24.998.400	-	24.743.700	-	24.743.700
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan penguatan kelembagaan pangan segar daerah	2	24.998.400	-	24.743.700	-	24.743.700
						-	78.503.846
						SR	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	499.999.800	0,00%	-		623.771.700
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	12	499.999.800	0,00%	0		623.771.700
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	12	499.999.800	0,00%	0		623.771.700

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12	24.949.600	99,52%	24.831.010		74.830.810
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka			22.349.600	99,92%	22.331.010		40.730.810
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Ari, Tanah, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12	22.349.600	99,92%	22.331.010		40.730.810
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12	-	0,00%	0		-
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.600.000	96,15%	2.500.000		34.100.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	12	2.600.000	96,15%	2.500.000		34.100.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI			14.971.200	100,00%	14.971.200		14.971.200
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka			14.971.200	100,00%	14.971.200		14.971.200
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola		14.971.200	100,00%	14.971.200		14.971.200
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola		-		0		-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN			10.000.000	98,50%	9.850.000		9.850.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000	98,50%	9.850.000		9.850.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			0	0,00%	0		-
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000	98,50%	9.850.000		9.850.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Prosentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHK) yang terkait dengan PPLH	0	-	0,00%	-		-
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		-	0,00%	0		-
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0	-	0,00%	0		-
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			79.999.400		79.894.316		79.894.316

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota			79.999.400		79.894.316		79.894.316
Pendampingan Gerakan Peduli Lingk.Hidup			39.999.600		39.937.600		39.937.600
Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup			39.999.800		39.956.716		39.956.716
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		7.000.000	99,29%	6.950.000		6.950.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		7.000.000	99,29%	6.950.000		6.950.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola		7.000.000	99,29%	6.950.000		6.950.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		100	889.984.450	100,00%	889.983.116		1.595.260.516
Pengelolaan Sampah			889.984.450	100,00%	889.983.116		1.595.260.516
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3	889.984.450	100,00%	889.983.116		1.470.749.516
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	3	0	0,00%	0		124.511.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Jakstrada						
			7.733.695.770	90,53%	7.001.424.138	(474.051.800)	13.883.495.784
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100%	261.429.400	198	228.451.500		228.451.500
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dan KIA		228.932.600	9	216.001.500		216.001.500
Pendataan Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	21	6.743.400	9	6.400.000		6.400.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000	156.109.500	0	153.801.500		153.801.500
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			56.079.700		55.800.000		55.800.000
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	75000	10.000.000		-		0
Penataan Pendaftaran Penduduk			30.496.800	189	10.500.000		10.500.000
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	275	30.496.800	189	10.500.000		10.500.000
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2.000.000	0	1.950.000		1.950.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21000	2.000.000	0	1.950.000		1.950.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan Sipil bagi masyarakat	70,50%	462.304.100		379.902.180		379.902.180
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen dan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan		167.191.800		145.716.600		145.716.600
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100	44.491.800		37.037.200		37.037.200
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil		75.000.000		74.800.000		74.800.000
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terkumpulnya, Analisis, dan Diseminasi data pencatatan Sipil		32.700.000		18.879.400		18.879.400
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan tersedia		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Penyelenggara Pencatatan sipil	Persentase jumlah dokumen dan pelayanan pencatatan sipil		184.992.800		148.695.400		148.695.400
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten /Kota dan pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk Yang beragama Islam		2.400.000		0		0

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten /Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing instansi vertikal dan UPT Dinas		9.995.000		400.000		400.000
Koortdinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban pelayanan pencatatan Sipil		6.600.000		3.960.000		3.960.000
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil peristiwa penting terkait pencatatan sipil		80.000.000		79.900.000		79.900.000
Fasilitasi Terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil failitasi pencatatn sipil		24.000.000		23.400.000		23.400.000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil		9.997.800		3.439.400		3.439.400
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil		52.000.000		37.596.000		37.596.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah ASN yang diberikan Bimbingan Teknis		110.119.500		85.490.180		85.490.180
Bimbingan Teknis Tekait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		110119500		85.490.180		85.490.180
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	90%	695.591.700		425.562.075		425.562.075

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat dan memadai		633.704.300		397.044.875		397.044.875
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	564.855.500		353.091.025		353.091.025
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8	53.871.200		32.253.850		32.253.850
Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		14.977.600		11.700.000		11.700.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbentuknya sistem koneksi NIK		51.887.400	0	28.517.200,00		28.517.200
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban Pengelolaan informasi Adminduk		11.250.000		8.350.000,00		8.350.000
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50	40.637.400		20.167.200,00		20.167.200
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Tersedianya Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		0				0
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		10.000.000				0
Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuidukan	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		0				0
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan		10.000.000				0

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendayagunaan Data Kependudukan						
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya data informasi kependudukan yang valid dan akurat		24.999.700		5.896.700		5.896.700
Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya buku laporan dan profil kependudukan		24.999.700		5.896.700		5.896.700
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan informasi kependudukan yang disediakan		4.999.800				0
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2	19.999.900		5.896.700		5.896.700
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN PENATAAN DESA		-		-		
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa		-		-		
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah dokumen Penamaan dan Kode Desa		-		-		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN		-		-		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-		-		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-		-		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE CAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT		128.977.137	96	123.920.780		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	HUKUM ADAT YANG DILAKSANAKAN						
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan		128.977.137	96	123.920.780		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		63.977.137	92	58.920.780		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		65.000.000	100	65.000.000		
DINAS PERHUBUNGAN							
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN		100	7.068.831.335	157,20	4.443.136.403		
PROGRAM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	TERSELENGGARANYA LALU LINTAS ANGGKUTAN JALAN	100	1.354.158.922	150,18	775.846.887		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota		100	29.999.900		-		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabuoaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dok	29.999.900		-		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100	986.866.358	134,44	480.757.287		
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10 unit	12.468.000	6,00	12.429.502		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	125 unit	974.398.358	53,00	468.327.787		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100	61.004.700	175,41	39.716.502		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2 unit	61.004.700	2,00	39.716.502		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100	153.340.274	207,10	138.487.600		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		12 ln	153.340.274	12,00	138.487.600		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	109.098.790	232,85	109.053.000		
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 cs	50.000.000	1.385			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 unit	59.098.790	9,00	59.053.002		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100	476.000	181,93	456.000		
Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12 lap	476.000	7,00	456.000		
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100	5.893.100	24,52	1.445.000		
Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan pemantuan sistem manajemen	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	6 lap	5.893.100	1,00	1.445.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	7.479.800	101,69	7.478.000		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 lap	7.479.800	6,00			
				317	284.144.459		
				ST	ST		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PELAYARAN	100	1.926.078.803	4,89	87.127.500		
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		100	1.926.078.803	7,15	87.127.503		
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 lap	139.695.893	6,00	87.127.503		
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		100	1.926.078.803	2,63	45.862.503		
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	2 unit	1.926.078.803	1,00	45.862.503		
				21,67	132.990.006		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
				SR	ST		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.981.441.246		2.823.691.370		
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	78.874.420	92,66	73.086.500		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa yang melakukan penyebaran informasi publik	2	78.874.420	1,85	73.086.500		
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	4.999.700	0,91	4.549.700		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8	32.242.320	7,63	30.754.400		
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	26.632.600	0,86	22.782.600		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2	14.999.800	2,00	14.999.800		
Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	3,33	36.400.000	3,00	32.775.000		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e- government (SPBE) di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sikka yang tersedianya	2	36.400.000	1,80	32.775.000		
Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	18.900.000	0,86	16.225.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan rincian :	3	17.500.000	0,86	16.550.000		
	1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)						
	2. Pembangunan Tower						
	3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)						
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65	77.526.600	64,62	77.076.600		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	65	77.526.600	64,62	77.076.600		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	34.999.800	0,99	34.549.800		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	67	42.526.800	67,00	42.526.800		
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	100	31.150.000	87,80	27.350.000		
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	30	31.150.000	26,34	27.350.000		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	6.150.000	0,38	2.350.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	25.000.000	1,00	25.000.000		
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH							
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	100	24.999.800	50	6.650.000	50,00	6.650.000
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	100	16.931.700	39,28	6.650.000	39,28	6.650.000
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumkah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten atau Kota	45	16.931.700	39,28	6.650.000	39,28	6.650.000
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	100	8.068.100	72,51	5.850.000	72,51	5.850.000
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wiayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	8.068.100	72,51	5.850.000	72,51	5.850.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Mreningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi	100	49.999.600	70,14	35.070.800	170,14	67.470.800

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi	100	49.999.600	70,14	35.070.800	70,14	67.470.800
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	49.999.600	70,14	35.070.800	158,14	67.470.800
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya SDM Perkoperasian	21,54	515.246.830	92,28	475.491.970	192,28	1.010.431.970
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Perkoperasian	21,54	515.246.830	92,28	475.491.970	192,28	1.010.431.970
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SFM yang memahami pengetahuan perkoperasian	40	515.246.830	92,28	475.491.970	192,28	1.010.431.970
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100	25.417.300	97,57	24.800.000	97,57	24.800.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		25.417.300	97,57	24.800.000	97,57	24.800.000
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Tersedianya Peralatan Tukang Bagi Masyarakat, Tersedianya Sarana dan Peralatan Bengkel Motor bagi Masyarakat	100	617.300	-	-	-	-

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	100	24.800.000	100	24.800.000	100	24.800.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	100	1.075.050.000	78	838.137.000	177,96	1.478.687.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	100	1.075.050.000	78	838.137.000	177,96	1.478.687.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	100	1.075.050.000	78	838.137.000	177,96	1.478.687.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100	327.749.800	86,13	282.277.540	186,13	719.164.840
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100	210.000.000	98,54	206.931.200	198,54	643.818.500
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100	210.000.000	99	206.931.200	198,54	643.818.500
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100	117.749.800	64	75.346.340	63,99	75.346.340
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		117.749.800	64	75.346.340	63,99	75.346.340
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	100	459.931.800	88,09	405.158.400	188,09	580.241.800
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	140.568.000	72,13	101.398.400	172,13	253.460.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	lainnya						
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	49.991.800	94,10	47.044.000	102,10	122.143.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	24.996.000	72,05	18.010.000	120,05	71.949.900
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	65.580.200	55,42	36.344.400	123,42	59.366.200
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	100	319.363.800	95,11	303.760.000	195,11	326.781.800
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak pada satu kabupaten/kota	11	319.363.800	95,11	303.760.000	163,11	326.781.800
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100	607.014.700	79,14	480.420.500	179,14	769.706.100
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100	607.014.700	79,14	480.420.500	179,14	769.706.100
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera ulang	1	579.021.700	78,20	452.820.500	79,20	689.720.300
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	1	27.993.000	99	27.600.000	108,60	79.985.800
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya PemanfaatanSumberdaya	100	77.999.020	19,23	15.000.000	119,23	1.293.026.800

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Industri Daerah dengan mendukung sektor Industri tahun 2021						
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pemanfaatan Sumberdaya Industri Daerah demi Mendukung Sektor Industri Tahun 2021	100	77.999.020	19,23	15.000.000	119,23	1.293.026.800
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Peralatan Produksi Moke yang terbiayai, Tersedianya Bahan Tenun Ikat Bagi Masyarakat, Tersedianya Bantuan Bagi Masyarakat, Tersedianya Galery Tenun Ikat yang terbangun, Tersedianya Mesin Gurinda bagi Masyarakat, Tersedianya Mesin Jahit Bagi Masyarakat, tersedianya Modal Usaha UBSP	100	77.999.020	19,23	15.000.000	39,23	1.293.026.800
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri	100	20.281.000	9,86	2.000.000	9,86	2.000.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri	100	20.281.000	9,86	2.000.000	9,86	2.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis, Perijinan berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk Bidang usaha dengan risiko usaha menengah dan Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	100	20.281.000	9,86	2.000.000	9,86	2.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN							

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	1 Kali	49.999.795	0%	29.861.730	0%	59.914.930
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 Kali	49.999.795	0%	49.964.125	0%	80.017.325
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lamanya waktu pengurusan ijin	30 Ijin	103.407.798	30 Ijin	29.067.790	30 Ijin	192.285.890
		5 Hari		100%	29.067.790	100%	29.067.790
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	2150 Ijin	103.407.798	2150 Ijin	103.200.392	2150 Ijin	266.418.492
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	40%	604.574.799	40%	58.635.464	40%	502.097.364
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Perusahaan	604.574.799	35 Perusahaan	416.080.660	35 Perusahaan	859.542.560
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar	100%	24.996.100	100%	19.000.000	100%	49.967.100
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	3 Dok	24.996.100	3 Dok	22.296.100	3 Dok	53.263.200
			5.414.019.566		4.905.629.611		
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			802.559.100,00		791.798.100,00		
	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100.00 %					
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah			332.453.600,00		332.453.600,00		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Kabupaten/Kota							
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	100.00 %	332.453.600,00		332.453.600,00		
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			470.105.500,00		459.344.500,00		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.00 %	470.105.500,00	97,71	459.344.500,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			15.000.000,00		12.020.000,00		
	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100.00 %					
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00		12.020.000,00		
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terselenggaranya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	100.00 %	15.000.000,00	80,13	12.020.000,00		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.00 %	437.828.600,00		437.528.600,00		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			124.598.600,00		124.598.600,00		
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.00 %	124.598.600,00	100,00	124.598.600,00		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			313.230.000,00		312.930.000,00		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	100.00 %	290.930.000,00	100,00	290.930.000,00		
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.00 %	22.300.000,00	98,65	22.000.000,00		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PEMASARAN PARIWISATA	100.00 %	33.000.000,00		31.638.937,00		
				95,88			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			33.000.000,00		31.638.937,00		
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100.00 %	3.000.000,00	54,64	1.639.137,00		
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100.00 %	30.000.000,00	100,00	29.999.800,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.00 %	2.800.931.200,00	97,87	2.741.333.560,00		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			765.831.200,00	97,73	756.185.960,00		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100.00 %	139.448.800,00		136.286.880,00		
				98,96			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100.00 %	626.382.400,00		619.899.080,00		
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			2.035.100.000,00		1.985.147.600,00		
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		100.00 %	2.035.100.000,00	97,55	1.985.147.600,00		
					6.968.300.951,00		
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sekolah Desa/kelurahan yang dibina	100,00	2.623.747.372	83,77	2.197.979.667	83,77	83,77
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		9.997.600	100,00	9.997.600	100,00	100,00
Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		9.997.600	100,00	9.997.600	100,00	100,00
Kegiatan Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	100,00	2.613.749.772	83,71	2.187.982.067	83,71	83,71
Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran	100,00	29.999.200	99,96	29.986.900	99,96	99,96

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	2.583.750.572	83,52	2.157.995.167	83,52	83,52
						41,89	41,89
						SR	SR
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100,00	93.572.200	95,07	88.961.200	95,07	95,07
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	100,00	59.298.800	92,22	54.687.800	92,22	92,22
Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		31.299.600		26.688.600	85,27	85,27
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		13.999.400		13.999.400	100,00	100,00
Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip		13.999.800		13.999.800	100,00	100,00
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.299.800	100,00	5.299.800	100	100,00
Sub Kegiatan Akuisisi ,Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Lokus Kebudayaan Kegemaran	100,00	5.299.800		5.299.800		
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	28.973.600	100,00	28.973.600	100	100,00
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Tingkat Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Kebudayaan Kegemaran	100,00	28.973.600		28.973.600		
						31,69	31,69
						SR	SR
DINAS PERIKANAN							

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	100	3.885.715.036	98,12	3.747.329.704	157,82	29.786.341.217
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	100	902.930.036	98,12	885.922.400	157,82	26.662.286.413
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	100	902.930.036	98,12	885.922.400	157,82	26.662.286.413
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan	100	2.982.785.000	95,93	2.861.407.304	124,99	3.124.054.804
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	100	2.982.785.000	95,93	2.861.407.304	124,99	3.124.054.804
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100	30.000.000	100,00	30.000.000	112,23	584.179.868
Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	100	30.000.000	100,00	30.000.000	112,23	110.224.000
Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	100	30.000.000	100,00	30.000.000	112,23	110.224.000
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	0		0		473.955.868
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	0		0		473.955.868
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	1.124.315.400	64,42	724.262.400	132,65	8.486.262.251
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri untuk mendukung pengoperasian pabrik es	100%	1.124.315.400	64,42	724.262.400	132,65	8.486.262.251

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	1.124.315.400	64,42	724.262.400	132,65	8.486.262.251
						66	4.243.131.126
						S	ST
DINAS PERTANIAN							
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		479	21.979.394.694	479	20.828.539.336	5.878	150.285.783.388
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		479	21.979.394.694	479	20.828.539.336	5.878	150.285.783.388
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	TERSELENGGARANYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16	3.361.221.281	16	3.156.158.423	3.536	41.156.158.423
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1	847.465.245	1	776.750.010	5	8.576.750.010
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,0	847.465.245	1	776.750.010	5	8.576.750.010
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		2	793.275.000	2	702.606.800	10	4.102.606.800
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2	793.275.000	2	702.606.800	10	4.102.606.800
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	199.999.700	2	199.487.584	6	999.487.584
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2	199.999.700	2	199.487.584	6	999.487.584

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		11	1.520.481.336	11	1.477.314.029	3.515	27.477.314.029
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	10	407.903.842	10	376.804.335	3.510	20.376.804.335
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	1.112.577.494	1	1.100.509.694	5	7.100.509.694
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	TERSELENGGARANYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	62	225.344.200	62	101.015.000	346	5.601.015.000
Pengembangan Prasarana Pertanian		61	223.344.200	61	99.015.000	305	5.499.015.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	61	223.344.200	61	99.015.000	305	5.499.015.000
Pembangunan Prasarana Pertanian		1	2.000.000	1	2.000.000	41	102.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi	1	2.000.000	1	2.000.000	41	102.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	42	779.371.670	42	757.322.858	210	3.757.322.858
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		42	779.371.670	42	757.322.858	210	3.757.322.858
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	21	438.222.000	21	417.196.847	105	2.017.196.847
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah	21	341.149.670	21	340.126.011	105	1.740.126.011

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota						
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	TERSELENGGARANYA PENYULUHAN PERTANIAN	11	1.171.307.666	11	1.167.316.558	46	6.167.316.558
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		11	1.171.307.666	11	1.167.316.558	46	6.167.316.558
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	6	241.447.800	6	241.358.550	21	1.241.358.550
Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	5	929.859.866	5	925.958.008	25	4.925.958.008
SEKRETARIAT DAERAH							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	3.598.478.400	86,25	2.833.949.644		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			2.875.451.900		2.163.216.304		
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100	2.698.384.000	100,00	2.025.861.304		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	123.560.700	100,00	111.810.000		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	100	53.507.200	50,00	25.545.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						
Administrasi Tata Pemerintahan			24.983.900		24.982.700		
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terfasilitasinya Administrasi Kewilayahan	100	24.983.900	100,00	24.982.700		
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			673.055.000		627.480.640		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100	274.767.000	100,00	270.792.560		
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	100	274.112.000	100,00	257.879.420		
Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100	124.176.000	70,00	98.808.660		
Fasilitasi Kerjasama Daerah			24.987.600		18.270.000		
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	24.987.600	70,00	18.270.000		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	TERSELENGGARANYA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100	310.127.424	34,91	300.308.140		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			38.090.400		37.937.400		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100	7.440.400	100,00	7.365.400		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100	30.650.000	100,00	30.572.000		
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			101.891.024		98.591.000		
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	60.500.000	100,00	57.200.000		
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100	24.686.024	100,00	24.686.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	16.705.000	100,00	16.705.000		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			125.146.000		119.079.740		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	98.215.000	100,00	95.846.420		
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	26.931.000	85,00	23.233.320		
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			45.000.000		44.700.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100	15.000.000	100,00	14.700.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	100	15.000.000	100,00	15.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	100	15.000.000	100,00	15.000.000		
				70,77	20.276.535.863		
SEKRETARIAT DPRD							
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100	6.959.796.960	349	5.626.114.443	349	81

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
DPRD	DPRD						
Pembentuka Pembangunan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	1.208.897.560	4	937.960.500	353	78
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	266.490.000	3	15.000.000	306	6
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	942.407.560	4	922.960.500	366	98
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan urusan pemerintahan bidang Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	0	3	0	300	#DIV/0!

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya alam	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	0	3	0	300	#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	1	2.340.149.600	4	2.321.396.943	369	99
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	2.340.149.600	4	2.321.396.943	369	99
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	1	3.341.250.000	3	2.356.333.000	333	71
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	326.600.000	3	326.600.000	325	100
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1	3.014.650.000	3	2.029.733.000	334	67
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	1	69.499.800	3	10.424.000	315	15
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	69.499.800	3	10.424.000	315	15
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	1.617.773.620	100%	1.395.239.900		
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	1.073.188.500	100%	957.706.960		
Koordinasi Pelaksanaan Forum	Jumlah Berita Acara Forum	1 B.A.	21.947.400	1 B.A.	21.930.100		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
SKPD/Lintas SKPD	Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah						
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 B.A.	167.450.800	1 B.A.	167.410.710		
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	105 Usulan	65.296.900	105 Usulan	65.218.800		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	818.493.400	3 Dokumen	703.084.350		
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen/ Buku	115.677.320	4 Dokumen/ Buku	115.070.000		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	54.664.020	3 Dokumen	54.568.200		
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Buku	61.013.300	1 Buku	60.501.800		
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Laporan	428.907.800	7 Laporan	322.462.940		
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	179.428.400	2 Laporan	164.786.240		
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	249.479.400	5 Laporan	158.076.700		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	977.703.700	100%	866.244.926		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	388.579.900	100%	342.352.996		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	8 Dokumen	121.221.800	8 Dokumen	97.306.926		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	8 Laporan	22.554.900	8 Laporan	18.406.700		
'Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan evaluasi	6 Laporan	15.747.400	6 Laporan	12.664.900		
'Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	62 Dokumen	151.321.200	62 Dokumen	148.835.810		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	62 Dokumen	38.867.300	62 Dokumen	35.053.900		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	31 Laporan	38.867.300	31 Laporan	30.084.760		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	296.812.900	100%	269.450.230		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang	14 Dokumen	75.453.500	14 Dokumen	74.189.170		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian yang dihasilkan						
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	14 Laporan	45.445.800	14 Laporan	35.073.660		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	14 Laporan	92.872.800	14 Laporan	86.585.700		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dihasilkan	4 Dokumen	18.768.600	4 Dokumen	15.958.000		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang diasistensi	4 Laporan	13.642.000	4 Laporan	10.067.200		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dimonitoring dan evaluasi	4 Laporan	50.630.200	4 Laporan	47.576.500		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	292.310.900	100%	257.596.700		
'Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	99.232.200	20 Dokumen	88.907.300		
'Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20.518.600	20 Laporan	19.612.360		
'Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	20 Laporan	44.480.600	20 Laporan	40.101.800		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	136 Dokumen	45.243.800	136 Dokumen	38.848.640		
'Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	136 Laporan	20.206.600	136 Laporan	14.591.200		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	136 Laporan	25.812.000	136 Laporan	21.156.300		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	34 Laporan	36.817.100	34 Laporan	34.379.100		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	2.102.189.576	100%	2.061.368.310		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan direkomendasikan	100%	963.719.000	100%	942.038.797		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	73.750.000	1 Laporan	73.317.043		
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	815.950.000	1 Laporan	794.940.275		
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	74.019.000	1 Laporan	73.781.479		
Penelitian dan Pengembangan Bidang		100%	150.000.000	100%	142.345.060		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Sosial dan Kependudukan							
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	142.345.060		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dan Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	500.000.000	100%	499.340.960		
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	499.340.960		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%	488.470.576	100%	477.653.493		
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Laporan	333.999.576	1 Laporan	331.863.742		
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	88.081.000	1 Laporan	87.466.660		
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	33.390.000	1 Laporan	33.117.391		
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	25.205.700		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
PROGRAM 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	973	2.746.679.220	972	2.473.982.328,00	3.531	7.352.202.510,00
Kegiatan 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan Anggaran Daerah yang	251	1.515.321.320	251	1.341.546.979,00	928	4.164.376.886,00

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah	dihasilkan						
Sub Kegiatan 2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	96.786.300,00	2	93.298.200,00	6	232.050.873,00
Sub Kegiatan 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	95.226.300,00	2	56.622.800,00	6	209.732.150,00
Sub Kegiatan 2.1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di verifikasi	50	31.999.800,00	50	31.833.000,00	204	89.165.000,00
Sub Kegiatan 2.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang di verifikasi	65	29.999.600,00	65	25.565.800,00	237	82.332.800,00
Sub Kegiatan 2.1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	50	84.309.600,00	50	83.357.000,00	204	238.780.000,00
Sub Kegiatan 2.1.65.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan DPA yang di verifikasi	50	74.099.600,00	50	63.543.000,00	204	221.836.000,00
Sub Kegiatan 2.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	2	542.150.200,00	2	505.398.499,00	6	1.539.461.817,00
Sub Kegiatan 2.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2	517.499.700,00	2	442.657.180,00	6	1.410.588.546,00
Sub Kegiatan 2.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan yang dihasilkan	12	-	12	0,00	15	39.376.200,00
Sub Kegiatan 2.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja yang dilaksanakan	16	43.250.220,00	16	39.271.500,00	40	101.053.500,00
Kegiatan 2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perbendaharaan daerah yang dihasilkan	700	469.267.000,00	700	449.405.593,00	2.542	1.360.513.218,00
Sub Kegiatan 2.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Kas Daerah yang disusun	552	152.999.700,00	552	152.524.493,00	2.048	455.980.758,00

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan 2.2.2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Kas dan SPD yang disusun	144	222.099.300,00	144	205.833.900,00	486	723.668.360,00
Sub Kegiatan 2.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan Penerimaan dan pengeluaran kas dan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang disusun	4	94.168.000,00	4	91.047.200,00	8	180.864.100,00
Kegiatan 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	22	762.090.900,00	21	683.029.756,00	61	1.827.312.406,00
Sub Kegiatan 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18	229.799.900	18	218.491.200,00	54	680.296.630,00
Sub Kegiatan 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	3	352.131.600	3	336.865.547,00	6	917.369.387,00
Sub Kegiatan 2.3.3 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperbup standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan	1	180.159.400	4	127.673.009,00	5	229.646.389,00
						20	
PROGRAM 3. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel	283	873.068.320	366	797.674.954,00	758	2.180.795.841,00
Kegiatan 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	283	873.068.320	366	797.674.954,00	758	2.180.795.841,00
Sub Kegiatan 3.1.1 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	2	94.749.800	2	90.708.300,00	4	354.606.290,00
Sub Kegiatan 3.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah yang	2	100.537.100	2	88.797.800,00	4	217.314.330,00

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah	disusun						
Sub Kegiatan 3.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	5	90.199.200	5	88.019.000,00	10	353.377.198,00
Sub Kegiatan 3.1.4 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	1	133.350.000	1	124.049.300,00	1	53.713.000,00
Sub Kegiatan 3.1.5 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yg diamankan	70	202.282.800	70	175.347.224,00	140	547.681.881,00
Sub Kegiatan 3.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang disusun	202	185.549.920	285	164.506.430,00	597	410.105.492,00
Sub Kegiatan 3.1.7 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	66.399.500	1	66.246.900,00	2	173.661.350,00
						1.572	
			57.367.173.257		39.600.767.955,00		
BADAN PENDAPATAN DAERAH							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Upaya Pajak (Tax Effort)	100%	1.038.306.034	0,70	976.644.134	69,81	94,06
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.038.306.034	0,70	976.644.134	69,81	94,06
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	567.195.334	0,93	530.149.934	93,47	93,47
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	20.142.600	1,00	20.065.300	99,62	99,62
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	209.999.700	0,99	207.228.700	98,68	98,68
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	1	217.968.400	0,95	207.700.200	95,29	95,29

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah						
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	23.000.000	0,50	11.500.000	50,00	50,00
						69,81	94,06
						S	ST
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			2.559.764.900	2164	2.376.587.510		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian & Informasi Kepegawaian Daerah		297.258.900	150	228.588.420		
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	300 Orang	277.259.300	150	217.219.020		
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	19.999.600		11.369.400		
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN		125.909.800	1500	108.267.910		
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500	125.909.800	1500	108.267.910		
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		2.038.940.700	257	1.973.916.600		
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	9	485.000.000	7	485.000.000		
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	250	1.553.940.700	250	1.488.916.600		
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			97.655.500	3	65.814.580		
Pengelolaan Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100 Orang	32.164.400		19.389.180		
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	65.491.100	3	46.425.400		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			499.364.928	1	399.954.600		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		499.364.928	-	399.954.600		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1 Dok	499.364.928		399.954.600		
			5.530.813.514	5.024.515.191			
INSPEKTORAT DAERAH							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	339.137.200	97,08	330.034.380		800.764.980
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa	100%	280.557.500	94,15	271.454.680		691.155.280
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	1 Laporan	9.118.900	100,00	9.118.720	101,00	23.512.920
Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	2 Laporan	17.039.400	74,91	12.764.160	76,91	35.078.760
Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	17.485.800	99,14	17.335.400	104,14	34.821.500
Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	30.548.500	99,51	30.398.500	106,51	60.947.100

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	162.451.100	99,38	161.449.100	115,38	397.200.900
Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22 Dokumen	43.913.800	91,97	40.388.800	113,97	139.594.100
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	58.579.700	100,00	58.579.700	108	109.609.700
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	58.579.700	100,00	58.579.700	108,00	109.609.700
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	336.293.800	100,00	336.293.800		649.601.900
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan	100%	125.311.400	100,00	125.311.400		211.923.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 Rek	125.311.400	100,00	125.311.400	107,00	211.923.000
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan	100%	210.982.400	100,00	210.982.400		437.678.900
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	208 PD	210.982.400	100,00	210.982.400	308,00	437.678.900
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	63.868.300	83,20	53.138.300		71.106.800
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang	100%	63.868.300	83,20	53.138.300		71.106.800

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengawasan	Pengawasan						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	51 Rek	63.868.300	83,20	53.138.300	134,20	71.106.800
		100%	4.205.549.863	96,23	4.047.045.339		8.767.257.978
KECAMATAN ALOK							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	49.949.100	42,24	35.011.400		70.022.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	100	49.949.100	42,24	35.011.400		70.022.800
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /sinergi peencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait		49.949.100	42,24	35.011.400		70.022.800
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	30	39.950.000	69,21	32.750.000		65.500.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	30	9.999.100		2.261.400		4.522.800
						70,09415585	
						S	

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	893.833.696	99,69	876.353.500		20.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	10.000.000	99,69	10.000.000		20.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10.000.000	99,69	10.000.000		20.000.000
Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	883.833.696	99,69	866.353.500		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21.999.700	99,69	21.894.800		38.884.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	5.000.000		4.905.000		4.905.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	6.999.800		6.999.800		13.999.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	4.999.900		4.990.000		9.980.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	5.000.000		5.000.000		10.000.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		797.233.996	99,69	780.058.700		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	200.000.000		200.000.000		400.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	200.000.000		198.990.000		397.980.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	189.934.396		173.769.100		346.498.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	207.299.600		207.299.600		414.599.200
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		64.600.000	99,69	64.400.000		
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	9.600.000		9.600.000		19.200.000
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	20.000.000		20.000.000		35.500.000
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	18.000.000		17.900.000		30.800.000
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	17.000.000		16.900.000		28.900.000
						98,04	
						ST	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	100	7.000.000	49,71	3.925.000		7.445.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	7.000.000	49,71	3.925.000		7.445.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	3	7.000.000	49,71	3.925.000		7.445.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Peraturan Kepala Desa						
KECAMATAN ALOK BARAT							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	59.400.000	100,00	59.400.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			59.400.000	100,00	59.400.000		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	59.400.000	100,00	59.400.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	944.222.900	97,57	921.311.700		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.900.000	100,00	9.900.000,00		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan	9.900.000	100,00	9.900.000,00		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			934.322.900	97,55	911.411.700		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Kegiatan	17.388.800	71,25	12.389.000		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		857.334.100	98,49	844.422.700		
Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan		59.600.000	91,61	54.600.000		
			4.608.881.478	93,69	4.318.203.746		
KECAMATAN ALOK TIMUR							

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.850.000	12	21.850.000	12	93.800.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		21.850.000	12	21.850.000	72	93.800.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	21.850.000	12,0	21.850.000	72	93.800.000
						12	93.800.000
						SR	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.084.866.000	12	1.076.479.850	12	2.141.453.650
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13.535.200	12	13.535.000	12	28.084.800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	13.535.200	12,0	13.535.000	12	28.084.800
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.071.330.800	-	1.062.944.850		44.083.700
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	19.988.800	100,0	19.988.800	100	44.083.700
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	986.892.000	99,2	979.356.050	99	1.891.835.150
Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	100	64.450.000	98,7	63.600.000	99	177.450.000
						100	14.694.567

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
						ST	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	10.200.000	100,0	10.200.000		27.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	10.200.000	100,0	10.200.000	100	27.600.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	10.200.000	100,0	10.200.000	100	27.600.000
						100	27.600.000
						ST	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1.395.000	10	1.395.000	42	4.995.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1.395.000	10	1.395.000	42	4.995.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	1.395.000	10,0	1.395.000	42	4.995.000
						42	4.995.000
			5.291.477.622		5.115.616.858	96,7	
						ST	SR
KECAMATAN BOLA							
Kecamatan			1.371.307.812		1.220.181.814		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	48.600.000		36.450.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		48.600.000		36.450.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	24 Kali	48.600.000,00		2.600.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	9.995.200		9.995.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	11 Desa	9.995.200		9.995.000		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipasi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	11 Desa	9.995.200,00		9.995.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.800.000		3.900.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		7.800.000		3.900.000		
Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7.800.000,00		3.900.000		
KECAMATAN DORENG							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	13.550.000		7.875.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	13.550.000		7.875.000		
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	13.550.000		7.875.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	9.999.900		9.300.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	9.999.900		9.300.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	100%	9.999.900		9.300.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	7.450.000		-		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	7.450.000		-		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	7.450.000		-		
KECAMATAN HEWOKLOANG							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00%	54.000.000				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00%	54.000.000	99,72	53.850.000		
Koordinasi/sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180 lprn	54.000.000	99,72	53.850.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00%	10.550.000	100	10.550.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100,00%	10.550.000	100	10.550.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 desa	10.550.000	100	10.550.000		
KECAMATAN KANGAE							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	36.600.000		26.850.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	36.600.000		26.850.000		
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	12 bulan	36.600.000		26.850.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	9.999.600		9.999.500		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	9.999.600		9.999.500		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Fasilitas untuk Kegiatan Musyarah tingkat Desa	1 kegiatan	9.999.600		9.999.500		
KECAMATAN KEWAPANTE							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.000.000				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			39.000.000				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	41 laporan	39.000.000		36950000,00		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Instansi Vertikal Terkait	pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000.000				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 paket	10.000.000		8.150.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11.462.100				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			11.462.100				
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	0	11.462.100		11.150.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	12.000.000	57,5	6.900.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	12.000.000	57,5	6.900.000		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	12.000.000	57,5	6.900.000		
			1.436.277.265				
KECAMATAN MAGEPANDA							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	20.000.000		20.000.000		20.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	20.000.000				

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	100	20.000.000				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000		9.995.000		9.995.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	10.000.000				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	12.000.000		6.450.000		6.450.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12.000.000				
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	12.000.000				
						100	100
			1.432.224.801		0	33	33
						SR	SR
KECAMATAN MAPITARA							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			77.575.000				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			77.575.000				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	12 laporan	77.575.000		66.600.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	daerah dan instansi vertikal terkait						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.980.000				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.980.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 paket	10.980.000		10.500.000		
			88.555.000		1.066.454.486		
KECAMATAN NELLE							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	9.750.000	100,00	9.750.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	9.750.000	100,00	9.750.000		
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	9.750.000	100,00	9.750.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	9.682.000	100,00	9.682.000		
Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	100%	9.682.000	100,00	9.682.000		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan	1 Kegiatan	9.682.000	100,00	9.682.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan di Desa						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	41.846.000	95,32	39.887.500		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	41.846.000	95,32	39.887.500		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	41.846.000	95,32	39.887.500		
KECAMATAN NITA							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.000.000				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			39.000.000				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	41 laporan	39.000.000		36.950.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000.000				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 paket	10.000.000		8.150.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11.462.100				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			11.462.100				

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	0	11.462.100		11.150.000		
KECAMATAN PAGA							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	13.550.000		7.875.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	13.550.000		7.875.000		
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	13.550.000		7.875.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	9.999.900		9.300.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	9.999.900		9.300.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	100%	9.999.900		9.300.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	7.450.000		-		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	7.450.000		-		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	7.450.000		-		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
KECAMATAN PALUE							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	49.999.400	45.328.000	91		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.999.400	45.328.000	91		
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	39.999.600	39.118.000	98		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	9.999.800	6.210.000	62		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	9.999.700	9.920.000	99		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.999.700	9.920.000	99		
Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	9.999.700	9.920.000	99		
KECAMATAN TALIBURA							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		38.900.000	100	38.900.000		359.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		38.900.000		38.900.000		359.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	12	38.900.000	12	38.900.000		359.000.000

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		9.999.800	0	9.999.800		38.149.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		9.999.800	0	9.999.800		38.149.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	9.999.800	1	9.999.800		38.149.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan		10.000.000	3	10.000.000		10.000.000
KECAMATAN TANA WAWO							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	1.458.055.968		1.173.465.321		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	8.400.000		8.400.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	10 Dokumen	8.400.000		8.400.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.240.626.291		1.173.465.321		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang ASN	1.218.066.291		1.150.905.321		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.560.000		22.560.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor	12 Bulan	34.817.600		34.221.500		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.000.000		972.100		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.256.600		2.253.100		
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	2.500.000		1.940.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.000.000		4.999.700		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Kegiatan	24.061.000		24.056.600		
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	62.619.317		-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	6.998.997		6.998.997		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	55.620.320		55.308.320		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	111.592.760		110.071.463		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	110.592.760		109.071.463		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit	1.000.000		1.000.000		
			1.458.055.968		1.173.465.321		
KECAMATAN WAIBLAMA							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	20.000.000	100	20.000.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	20.000.000	100	20.000.000		
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	20.000.000	100	20.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	10.000.000	100	10.000.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 LSM	10.000.000	100	10.000.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	6 LSM	10.000.000	100	10.000.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	12.000.000	100	12.000.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	12.000.000	100	12.000.000		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	12.000.000	100	12.000.000		
KECAMATAN WAIGETE							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	21.200.000		21.160.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		21.200.000		21.160.000		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	24 Kali	21.200.000		21.160.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.659.600		7.650.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	11 Desa	7.659.600		7.650.000		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipasi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	11 Desa	7.659.600		7.650.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	8.000.000		8.000.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	8.000.000		8.000.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Desa	8.000.000		8.000.000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	100	4.800.000		4.800.000		
Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	4.800.000		4.800.000		
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	11 Desa	4.800.000		4.800.000		
KECAMATAN MEGO							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	13.550.000		7.875.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	13.550.000		7.875.000		
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	13.550.000		7.875.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	9.999.900		9.300.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	9.999.900		9.300.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	100%	9.999.900		9.300.000		

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	7.450.000		-		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	7.450.000		-		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	7.450.000		-		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100	18.360.000	100,00%	18.360.000	35,54%	53.309.800
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		18.360.000	100,00%	18.360.000	35,54%	53.309.800
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	18.360.000	100,00%	18.360.000	35,54%	53.309.800
				100	18.360.000	35,54	53.309.800
				ST		SR	ST
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	100	16.075.474.957	4,98%	800.699.957	11,75%	1.877.714.127

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		16.075.474.957	4,98%	800.699.957	11,75%	1.877.714.127
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11	735.005.957	100,00%	735.005.957	249,77%	1.812.020.127
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	15.340.469.000	0,43%	65.694.000	0,43%	65.694.000
				4,98	800.699.957	11,75	1.877.714.127
				SR		SR	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	84.999.800	99,99%	84.995.200	256,56%	218.073.860
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ketahanan Ekonomi,		84.999.800	99,99%	84.995.200	256,56%	218.073.860

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosial dan Budaya						
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	100	84.999.800	99,99%	84.995.200	256,56%	218.073.860
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	100	0		0	0,00%	0
				99,99	84.995.200	257	218.073.860
				ST		ST	ST
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	2.183.162.800	85,43%	1.865.014.591	703%	3.671.557.021
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	21	2.183.162.800	85,43%	1.865.014.591	703%	3.671.557.021
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	100	177.170.000	0,00%	0	0%	0

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/OPD dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21	2.005.992.800	92,97%	1.865.014.591	1063%	3.671.557.021
				85,43		703%	3.671.557.021
				T		SR	ST

2.4.2Capaian Pelaksanaan SPM

Capaian Penerapan StandarPelayanan Minimal Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

1. Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini	100%	64,28%
2.	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama	Persentase Anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan Dasar	100%	99,92 %
		Persentase Anak Usia 12–15 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan Menengah Pertama	100%	98,13 %
3.	Pendidikan Kesenjangan	Persentase Anak Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Kesenjangan	100%	16,71%

Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
Belum meratanya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Akses PAUD	Pemerataan Layanan akses PAUD melibatkan Pemerintah wilayah Desa untuk pelaksanaan Akses Pendidikan PAUD
Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana akses mutu dan adanya penyebaran penduduk yang belum terkonsentrasi pada wilayah tersedianya prasarana aksesnya pendidikan	Pemerataan Layanan akses pendidikan dan penerapan program dan kegiatan yang menunjang standar pelayanan minimal pendidikan
Belum Aktif Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Setiap Kecamatan	Advokasi Dukungan Operasional Untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Setiap Kecamatan

2. Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.345 orang	3.541 orang atau 66,24%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan	5.102 orang	4.306 orang atau 84,4%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.859 orang	4.217 orang atau 86,8 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan kesehatan Balita	23.936 orang	20.259 orang atau 84,6 %
5.	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	59.837 orang	11.022 orang atau 18,4%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Produktif	207.049 orang	59.892 orang atau 28,9%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Lanjut	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Lanjut	21.972 orang	26.564 orang atau 122,3%
8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	83.473 orang	7.221 orang atau 8,7%

9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melytus	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melytus	2.504 orang	960 orang atau 38,3 %
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	1.093 orang	959 orang atau 87,7%
11.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Terduga Tuberculosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuber Culosis	4.035 orang	5.031 orang atau 124,7%
12.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	6.276 orang	6.309 orang atau 100,5%

Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
Minimnya Pembiayaan Kegiatan Pelayanan Ibu Hamil	Perlunya Peningkatan Anggaran
Kurangnya Dukungan Logistik Kesehatan Bagi Kurangnya Dukungan Sarana Pelayanan	Perlunya Peningkatan Sarana Peningkatan Anggaran Pembiayaan
Minimnya Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Balita Akibat Adanya Refocusing Anggaran Pencegahan Covid-19	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Balita
Minimnya Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan
Minimnya Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat Usia Produktif	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Warga Usia Produktif
Minimnya Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat Usia Lanjut	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Warga Usia Lanjut
Minimnya logistik kesehatan pendukung pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Minimnya logistik kesehatan pendukung pelayanan kesehatan penderita diabetes melytus	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Minimnya logistik kesehatan pendukung pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa Berat	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan
Minimnya logistik kesehatan pendukung pelayanan kesehatan penderita orang dengan terduga tuberculosis	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan
Minimnya Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh	Perlunya Peningkatan Logistik Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	55,96 %	54,71
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	47,20 %	51,28 %

Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
- ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan air minum yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan - keterbatasan sumber air minum bersih baik itu sumber air permukaan maupun sumber air dalam sehingga menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air minum - Perencanaan untuk air bersih belum dilaksanakan secara sinergi antara PDAM dan Pemkab - Data base terkait pengguna air minum belum ada	- Perlu adanya dukungan dana untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur jaringan air minum sesuai kebutuhan dan standar teknis yang ditetapkan - Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran untuk memelihara hutan sebagai wilayah tangkap air dan perlu dilakukan penelitian yang akurat tentang potensi sumber air tanah di wilayah Kabupaten Sikka - Perlu adanya koordinasi antar lembaga Pengelola Air Minum (PDAM) dengan Pemerintah Daerah - Perlu dilakukannya pendataan terkait pengguna air minum bersih di Kabupaten Sikka
- Ketersediaan dan kualitas infrastruktur sanitasi belum sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan - Peran dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah pemukiman - Data base terkait kepemilikan sanitasi belum ada	- Perlu adanya dukungan dana untuk membiayai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sesuai kebutuhan dan standar teknis yang ditetapkan - Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga - Perlu dilakukannya pendataan terkait ketersediaan sanitasi di Kabupaten Sikka

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	34,67 %	27,33%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemda.	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemda.	20 %	0

Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
- Tidak ada laporan dari pihak lain untuk data penanganan rumah korban bencana - Jumlah rumah Kabupaten Sikka tidak dapat diintervensi dengan Jumlah Anggaran - Direncanakan tapi tidak pernah dianggarkan - Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan SPM	Perlunya Peningkatan Anggaran Pembiayaan Kegiatan

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	93,10 %
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	250	309
4.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	309	309
5.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Dokumen	2 Dokumen

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
▪ Kurangnya jumlah Personil Penegak Perda. ▪ Terbatasnya Kapasitas Sdm Aparatur ▪ Terbatasnya Sarana Dan Prasaranan Pelayanan Publik ▪ Rendahnya Pemahamann Masyarakat ttg Pentingnya Menciptakan Rasa Aman dan Tertib	▪ Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM aparatur2. pemenuhan sarana dan Prasarana Pelayanan Publik ▪ Melakukan Koordinasi lintas Sektor Melakukan sosialisasi edukasi dan simulasi ▪ Penyediaan Anggaran yg memadai
▪ Kurangnya disiplin dan profesionalisme aparatur ▪ Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas ▪ Terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan beberapa program/ kegiatan di bidang penanggulangan bencana ▪ Kurangnya peralatan kerja dan SDM yang berkompeten dan penanganan bencana ▪ Belum adanya dokumen kajian Risiko Bencana atau dokumen wajib Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	▪ Perlu diberikan pembinaan disiplin terhadap aparatur yang kurang disiplin dalam bekerja ▪ Perlu diberikan pelatihan – pelatihan atau bimtek kepada aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ▪ Perlu ditingkatkan atau dibangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas – tugas ▪ Pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana perlu dianggarkan secara khusus (prioritas) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kabupaten Sikka ▪ Perlu dilakukan penambahan personil dengan kualifikasi teknis dan computer sesuai kebutuhan bencana ▪ Perlu ditingkatkan Fasilitas Gedung, Ruang Kerja sarana penunjang operasional dan penanganan bencana

6. Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	2,74 %	3,40 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	4,45 %	2,41 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	4,69 %	0
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti	-	0
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	100 %	100 %

Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
▪ Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pemulung belum valid ▪ Alokasi anggaran untuk penerapan pencapaian spm tidak ada/sangat terbatas	▪ Diharapkan untuk memberikan data valid terkait data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pemulung ▪ Mengalokasikan anggaran untuk penerapan pencapaian SPM

2.4.3 Capaian Pelaksanaan SDGs

1. Tujuan 1 adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun dengan target untuk penurunan angka kemiskinan, perlindungan jaminan sosial (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan), serta pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, energi, dan ketahanan terhadap bencana sosial maupun alam).

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan				
Sasaran : Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%.	12,61	12,56
Sasaran : Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan				
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%.	75	62
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerjaan informal.	75,89	78,6

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 3.1 : Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100% Tahun dasar 2020:90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%.	53,51	54,71
Sasaran 4 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kajadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.				
Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data:RPJMN 2020-2024)		435
Jumlah Kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah Kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen		2

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan bencana dan pasca bencana	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan bencana dan pasca bencana	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana)		-
Sasaran 5 : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baaik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan si semua dimensi.				
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif. Tahun dasar 2019:15,54% (Sumber data:Kementerian Keuangan)		0%

2. Tujuan 2 adalah Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan target-target untuk menghilangkan kelaparan, menjamin akses pangan, aman, bergizi; menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi; menggandakan produktivitas pertanian. Pencapaian target tujuan 2 difokuskan pada: (1) Prevalensi Stunting, Kesehatan Ibu dan Anak; (2) Kualitas Konsumsi Pangan; dan (3) Nilai Tambah Pertanian.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, mencapai Ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan				
Sasaran 2: Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 encapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%.	13,8	15,3
prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita	prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita	Menurunnya prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%.	9,9	10,5
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2%.	77,42	69,7

3. Tujuan 3 adalah Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan target-target untuk mengurangi rasio kematian; mengakhiri penyakit menular dan tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat-zat adiktif; mengurangi resiko kematian dan cedera dari kecelakaan lalu lintas; menjamin akses universal terhadap layanan Kesehatan seksual dan reproduksi; cakupan jaminan Kesehatan; serta distribusi tenaga kesehatan.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia				
Sasaran 1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.				
Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015).	166	69
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87, 91 % (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	89,5	
Sasaran 2: Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berysaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Keahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.				
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017: 24 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	14	9
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017: 15 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	4,6	5

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		2,98	0,2
Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		118	132
Jml kab/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah Desa yang mencapai eliminasi malaria.		160	0
Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase desa yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.		82,97	160
Jml provinsi dengan eliminasi kusta	Jml Desa dengan eliminasi kusta		160	0
Jml kab/kota dgn eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).		160	0
Sasaran 4: Pada Tahun 2030, menguranginya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan				
persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun			19,71
Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi.			79.497
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.			35,4

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalagunaan zat, termasuk penyalagunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan				
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		0
Sasaran 3.6 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.				
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		38,48
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		12,1
Total Fertility Rate (TFR).		Total Fertility Rate (TFR).		2,6
Sasaran 3.7 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang				
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		73,2
Sasaran 3.8: Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di eluruh negara sebagai langkah yang tepat				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
persentase merokok pada penduduk usia 10-18		persentase merokok pada penduduk usia 10-18		19,71
Sasaran 3.9 : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan				
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	95.0	84,7
persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial		persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	90	100
Sasaran 3.10: Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		256,2/190,4
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 4.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pebelajaran yang relevan dan efektif.				
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur ≥ 15 tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/ sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/ sederajat menjadi sebesar 93,33%, dan SMA/ sederajat menjadi 71,71%. Tahun dasar 2020:SD/ sederajat 96,00%; SMP/ sederajat 87,89%; SMA/ sederajat 63,95 (Sumber data:survei Sosial Ekonomi Nasional)	8,67	9,18
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka Melek Huruf Usia ≥15 tahun		94,15	94,98
Sasaran 4.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.				
Persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Menigkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik. sebesar 0,77: dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28	46,88	32,6

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik		72,27	33,36

4. Tujuan 4 adalah Pendidikan berkualitas
 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan target-target untuk menjamin semua anak usia sekolah mendapatkan layanan dan fasilitas pendidikan.

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, Font color: Auto, Character scale: 100%

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua				
Sasaran 4.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pebelajaran yang relevan dan efektif.				
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur ≥ 15 tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/ sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/ sederajat menjadi sebesar 93,33%, dan SMA/ sederajat menjadi 71,71%. Tahun dasar 2020:SD/ sederajat 96,00%; SMP/ sederajat 87,89%; SMA/ sederajat 63,95 (Sumber data:survei Sosial Ekonomi Nasional)	8,67	9,18

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka Melek Huruf Usia ≥15 tahun		94,15	94,98
Sasaran 4.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.				
Persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	Menigkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik. sebesar 0,77: dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28	46,88	32,6
	Persentase pendidik pada jenjang SekolahMenengah Pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik		72,27	33,36

5. Tujuan 5 adalah Kesetaraan Gender

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
Sasaran 5.1 Mengakhiri segala bentuk Diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Menguatkan kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	-	-
Sasaran 5.2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta bernagai jeis eksploitasi lainnya.				
Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksua, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Meningkatnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	109	116
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan sia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016 : 9,4% (Sumber data:Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016)	97	109
Sasaran 5.3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa. Serta sunat perempuan.				
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74%. Tahun dasar 2020: 10,35% (Sumber data:Survei Sosialisasi Ekonomi Nasional)	NA	NA

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 5.4 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambil keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.				
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/ Kota menjadi 17%.	31,8	31,8
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	88,93	88,81
Sasaran 5.5 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.				
Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif	Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.	24,8	49,02
Sasaran 7: Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.				
Jumlah pelanggan Telepon	Jumlah pelanggan Telepon	Meningkatnya proporsi individu yang menguasai /memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020:57,48% (sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	1.537	7.124

6. Tujuan 6 yaitu Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Tujuan 6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan target-target pencapaian untuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya air, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Pencapaian target tujuan 6 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Cakupan pelayanan air minum aman dan sanitasi layak; (2) desa/ kelurahan yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); serta (3) Pengendalian pemanfaatan air tanah.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua				
Sasaran 6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.				
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%.	53,51%	74,8
Sasaran 6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman.)	50,97	51,28
Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	umlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman /kota/regional (SR) sebesar 3,9 juts sambungan. Tahun dasar 2019: ±2,2 juta sambungan rumah	160	160
Jumlah desa / keluran yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Persetanse rumah tangga yang masih mempraktekan Buang Air Besar Sembarangan (BAB) di tempat terbuka sebesar 0	79	96
Sasaran 6.3: Pada Tahun2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan perlepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019:52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021)	50	60

7. Tujuan 7 yaitu energi bersih dan terjangkau

Tujuan 7 adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, dengan target untuk mejamin akses layanan energi untuk semua. Pencapaian target tujuan 7 Kabupaten Sikka difokuskan pada : (1) Akses Layanan Energi Yang Terjangkau; dan (2) Mengembangkan Alternatif Sumber Energi Non Fosil.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua				
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.				
Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100%. Tahun dasar 2020:99,20%	95,42	95,6
Konsumsi Listrik Perkapita	Konsumsi Listrik Perkapita	Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.400 KWh. Tahun dasar 2020:10,38 KWh	2.209	2.413
Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji	Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas elpiji	Tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga.	0,88	0,88
Sasaran 7.2: Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.				
Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	Bauran energi terbarukan menuju 19,50%.		

8. Tujuan 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua dengan target untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai produktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta pariwisata yang berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 8 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; (2) Penyediaan Lapangan Pekerjaan Untuk Mengurangi Angka Pengangguran; serta (3) Meningkatkan Pendapatan dari Sektor Pariwisata.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua				
Sasaran 8.1: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.				
Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkapita	Meningkatnya Gross Nayional Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar 2020: USD 3.870 (Sumber data: Work Bank)	3,36	3,77
Sasaran 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang mmberi nilai tambah tinggi dan padat karya				
PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningnkat menjadi 3,7 - 4,5%. Tahun dasar 2020: - 1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik)	17.259	18.472
Sasaran 8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetep dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sma nilainya.				
Persentase Tingkat pengangguran terbuka	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,6-4,3%. Tahun dasar 2020: 7,07% (Sumber data: Badan Pusat Statistik)	4,51	2,62

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 8.9: Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.				
Persentase PDRB dari sektor pariwisata	Persentase PDRB dari sektor akomodasi	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB. Tahun dasar 2020:4,0% (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	0,62	0,62
Jumlah wisatawan manca negara.	Jumlah wisatawan manca negara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16-17 juta. Tahun dasar 2020:4,05 juta (Sumber data: Badan Pusat Statistik)59/2017)	1.329	4.568
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2020: 198,24 juta (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	36.041	43.812

9. Tujuan 9 adalah Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi

Pembangunan berkelanjutan industri, inovasi dan infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infratruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi				
Sasaran 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas atas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 97%. Tahun dasar 2020:92% (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)		
Jumlah Bandara	Jumlah Bandara	Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019:15 (Sumber data:Kementerian Perhubungan)	1	1
Jumlah Dermaga Penyeberangan	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Meningkatnnya jumlah lokasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 36 unit. Tahun dasar 2019:24 ((Sumber data:Kementerian Perhubungan)	5	5
Sasaran 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Thaun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	6,54	6,54
		menjadi 8,1%. Tahun dasar 2020: - 2,93%. (Sumber data: Badan Pusat Statistik)		
Sasaran 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar				
Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	10,79	11,12
Sasaran 9.7 Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.				
Persentase penduduk yang mengakses internet	Persentase penduduk yang mengakses internet	Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani mobile broadband menjadi 100%. Tahun dasar 2020:97,5% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)		51,06

10. Tujuan 10 yaitu Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- Tujuan 10 adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Mengurangi ketidaksetaraan, kebijakan harus bersifat universal, memperhatikan kebutuhan populasi kurang beruntung dan terpinggirkan, selain itu mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan target untuk mempertahankan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pencapaian target tujuan 10 Kabupaten Sikka difokuskan pada: Mengurangi ketimpangan pendapatan melalui desa mandiri

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara		Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara		
Sasaran 10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
Koefisien Gini.	Koefisien Gini	Menurunnya koefisiensi gini menjadi 0,376 - 0,378. Tahun dasar 2020 : 0,247 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	0,342	0,326
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,0. Tahun dasar September 2020:13,12% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	12,61	12,56
Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019:19.152 (Sumber data: Indeks Desa)	45	47

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Menigkatnya Desa Mandiri menjadi 6.4444 desa. Tahun dasar 2019:1.4444 (Sumber data: Indeks Desa)	0	3

11. Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan,
- Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan target untuk perumahan yang layak, sistem transportasi, dan resiko bencana.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan				
Sasaran 11.1: Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh				
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%.	46,59%	24,37%
Sasaran 11.2: Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sitem tansportasi ayang aman, terjangkau, mudah diaaakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempaun, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019:1 kota (Sumber data:RPJMN 2020-2024)	76,67%	76,67%
Sasaran 11.4: Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansil mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.				
Jumlah korban bencana di daerah rawan bencana	Jumlah korban bencana di daerah rawan bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	1.718 KK	435
Jml kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jml kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (sumber data:RPJMD 2020-2024)	1.354.287.000	1.354.287.000
Sasaran 11.5: Pada Tahun 2030, menngurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.				
Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019:86,57 (Sumber data:Rencana Kerja Pemerintah 2021)	92,37	93,3

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 11.6: Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplemantasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.				
Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019:183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	-	-

12. Tujuan 12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan target yang diukur melalui target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 12.8 : Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisiensi yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.				
Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 19,3 GW. Tahun dasar 2019: 10,2 GW (Sumber data:RPJMN 2020-2024)	1.681.287	1.684.787

13. Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak
- Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi namun juga memberikan pengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Aktivitas manusia dalam mencapai kesejahteraan memicu terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab pemanasan global. Kejadian cuaca ekstrim hingga bencana akibat iklim (bencana hidrometeorologi) merupakan akibat dari pemanasan global atau perubahan iklim. Secara nasional Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menangani perubahan iklim dengan mengadopsi Paris Agreement melalui kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) karena tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak				
Sasaran 13.3: Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.				
Jumlah Komunitas Peduli Lingkungan	Jumlah Komunitas Peduli Lingkungan	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebnayak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	26	26

14. Tujuan 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target melestarikan wilayah pesisir, menghentikan penangkapan ikan secara illegal, dan memberikan perlindungan untuk nelayan. Pencapaian target tujuan 14 Kabupaten Sikka Tengah difokuskan pada: (1) Peningkatan luas Kawasan konservasi perairan; (2) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perairan dan perikanan; serta (3) Peningkatan perlindungan terhadap nelayan.

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan				
Sasaran 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Volume sampah yang terbuang ke laut	Volume sampah yang terbuang ke laut	Tercapainya persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline sebesar 60%.	NA	NA
Sasaran 14.3 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang lebih dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologis.				
proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ≤100%	proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ≤100%	Terjaganya proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ≤100% (proporsi (0%) = produksi perikanan tangkap laut/JTB).	NA	NA
Sasaran 14.4 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsistensi dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.				
Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Meningkatnya jumlah luas kawasan konservasi laut/perairan seluas 26,9 juta ha. Tahun dasar 2020:24,11 juta ha (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021;RPJMN 2020-2024)	71.956,74	71.956,74

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaaran 14.5 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.				
Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Terkendalinya Illegal, Unreported, Underegulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 98%. Tahun dasar 2020: 94,76% (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan)	0	0
Target 14.6 Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fisher) terhadap sumber daya laut dan pasar.				
		Meningkatnya akses pendanaan untuk kelautan dan perikanan skala kecil kepada pelaku usaha	NA	NA

15. Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs Kabupaten Sikka	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.				
Sasaran 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basa, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional				
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya luas tutupan hutan secara nasional mencapai 420.000 ha per tahun. Tahun dasar 2020: 366.000 ha (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	75,52	75,52
Sasaran 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan restorasi secara global.				
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Meningkatnya jumlah Kesaatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang termasuk dalam kategori maju. Tahun dasar 2020: 10 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	20	15

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs Kabupaten Sikka	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.				
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Sikka	Tercapainya luas lahan hutan dan lahan yang direhabilitasi sebesar 20.000 hektar. Tahun dasar 2020: 56.000 hektar (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	13,76	13,76

16. Tujuan 16 yaitu Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.				
Sasaran 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun				
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian menjadi >60%. Tahun dasar 2019:53,32% (Sumber data: Surevei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos, Badan Pusat Statistik)	3	0

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Sasaran 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.				
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tahun dasar 2018: 61,7% untuk anak laki-laki dan 62% untuk anak perempuan (Sumber data: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	0,61	0,12

17. Tujuan 17 adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, dukungan pengembangan kapasitas data statistik

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.				
Sasaran 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				

INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	SASARAN TPB 2024 (PERPRES 111/2022)	2022	2023
			REALISASI	REALISASI
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4 - 12,0 persen PDB (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2023). Tahun dasar 2020: 10,68% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Audited)	95%	95%
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41-8,87% (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022). Tahun dasar 2020: 8,33% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Audited)	106%	100%

2.4.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Kabupaten Sikka Tahun 2023
terdapat 27 Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,5	69,41
2	Indeks Pendidikan	Indeks	12	12,57
3	Angka Harapan Hidup	Angka	67,38	73,97
4	Prevelensi Stunting	%	0	15,3
5	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,695	0,6288
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,2	3,77
7	Pendapatan Perkapita	Rp	15.587.620	18.472.000
8	Angka Kemiskinan	Angka	11,6	12,56
9	Angka Pengangguran	Angka	1470	4.642
10	Indeks Gini	Indeks	0,215	0,326
11	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	36,32	38,53
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	30,05	11,12
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	1,82	1,84
14	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	1,17	0,62
15	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Indeks	3	2,96
16	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	%	90	63,66
17	Persentase Rumah Layak Huni	%	54,38	74,8
18	Presentase Layanan Perhubungan	%	100	83,33
19	Indeks Kebahagiaan	Indeks	75,8	75,07
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	102,71	138,81
21	Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah	%	40	*
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,25	88,81
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	CC
24	Nilai LPPD	Nilai	31.395	**
25	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
26	Nilai SAKIP	Nilai	A	B

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Sikka 2024
* Belum dirilis
** Belum dilakukan penilaian

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indikator makro merupakan salah satu indikator kunci daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah. Inti dari upaya meningkatkan daya saing yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas harga, dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteraan. PDB menunjukkan ukuran perekonomian. Stabilitas harga memberikan informasi kepastian bagi pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Adanya ketidakstabilan akan mengurangi akumulasi sumber daya manusia, hal ini juga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laju pertumbuhan yang rendah akan mempengaruhi permintaan agregat dan menimbulkan banyaknya sumberdaya yang tidak produktif.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 3.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor	Kontribusi (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,58	35,46	36,41	37,43	38,17	38,53
2	Pertambangan dan Penggalian	1,16	1,11	1,14	1,12	1,09	1,04
3	Industri Pengolahan	1,71	1,75	1,75	1,7	1,71	1,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
6	Konstruksi	5,2	5,19	4,74	4,76	4,71	4,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,52	10,74	10,48	10,36	10,79	11,12
8	Transportasi dan Pergudangan	6,35	6,59	5,15	5,06	5,39	5,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,73	0,62	0,62	0,62	0,62
10	Informasi dan Komunikasi	5,86	5,85	6,25	6,3	6,19	5,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,7	3,6	3,86	3,92	3,95	3,75
12	Real Estate	2,16	2	1,94	1,91	2	2,06

No	Sektor	Kontribusi (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,2	0,18	0,18	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,75	12,83	13,22	12,86	12,08	11,55
15	Jasa Pendidikan	10,38	10,3	10,63	10,17	9,65	9,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	1,99	2,16	2,24	2,14	2,19
17	Jasa lainnya	1,4	1,38	1,24	1,16	1,13	1,11
PDRB		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Sikka Dalam Angka 2023

Berdasarkan data persentase kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi paling besar, yaitu 38,53 persen pada tahun 2023. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 11,55 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,12 persen menempati urutan berikutnya; Jasa Pendidikan sebesar 9,41 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,96 persen; Transportasi dan Perdagangan sebesar 5,57 persen; Konstruksi sebesar 4,85 persen; sedangkan sepuluh lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi dengan nilai antara 0,09 persen - 3,75 persen.

Berdasarkan kontribusi sektor ini dapat dilihat bahwa perekonomian kabupaten Sikka masih sangat bercorak agraris, industri pengolahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi menuju perekonomian yang berkarakter industri masih sangat rendah. Sektor jasa yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat, yakni sektor pariwisata juga belum berkembang. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum yang masih sangat rendah (kurang dari 1 persen). Sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan juga informasi dan komunikasi memiliki kontribusi yang cukup besar, namun dari informasi FGD sektor sektor ini hanya dikuasai oleh sedikit penduduk. Dari sektor jasa justru sektor pemerintahan dan pendidikan yang memiliki dominasi sangat kuat. Angka angka ini mengirimkan pesan bahwa perekonomian kabupaten Sikka juga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pemerintahan. Artinya perekonomian kabupaten Sikka tingkat kemandiriannya masih rendah, dengan tingkat kemandirian yang rendah maka daya saing perekonomian daerah juga menjadi rendah.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 3.2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.108.692,65	1.153.031,09	1.162.265,78	1.203.838,17	1.255.464,77	1.309.050,00
2	Pertambangan dan Penggalian	42.597,77	44.224,63	44.796,23	45.765,52	46.792,06	47.770,00
3	Industri Pengolahan	52.706,14	56.092,90	54.264,11	54.780,10	58.362,76	62.760,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.957,73	3.979,22	4.326,75	4.591,35	4.670,87	5.200,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.109,46	3.348,58	3.488,46	3.757,46	3.788,48	3.850,00
6	Konstruksi	177.181,74	184.939,98	168.823,53	173.110,78	174.588,89	188.310,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	350.179,06	376.573,52	357.056,81	362.122,77	387.588,56	409.900,00
8	Transportasi dan Pergudangan	108.015,08	211.850,68	175.100,96	178.803,10	186.938,10	191.300,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.673,36	23.849,50	20.213,73	20.946,90	22.067,05	23.530,00
10	Informasi dan Komunikasi	264.210,60	281.967,15	302.298,42	315.765,87	331.317,48	344.760,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	101.909,73	104.200,13	111.956,04	113.940,61	114.825,90	115.747,00
12	Real Estate	68.384,67	68.446,05	66.857,53	68.829,71	71.260,99	73.690,00
13	Jasa Perusahaan	8686,89	9057	6243,02	5611,22	5772,34	6.120,00

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	380.364,53	409.694,69	426.643,91	426.170,20	427.024,36	427.570,00
15	Jasa Pendidikan	275.982,31	286.689,13	288.754,74	284.115,88	283.636,58	292.000,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64.698,11	67.563,09	69.519,82	72.695,28	73.963,49	75.470,00
17	Jasa lainnya	46.304,56	48.669,43	43.060,78	41.186,00	41.761,91	43.800,00
	PDRB	3.169.654,39	3.334.176,78	3.305.670,65	3.376.030,93	3.489.820,00	3.620.860,00

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp3.169.654,39, pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp3.334.176,78 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp3.305.670,65. Pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp3.376.030,93, pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3.489.820.00 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi Rp3.620.860,00.

3.1.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada berikut:

Tabel 3.3.

Distribusi PDRB per Lapangan Usaha

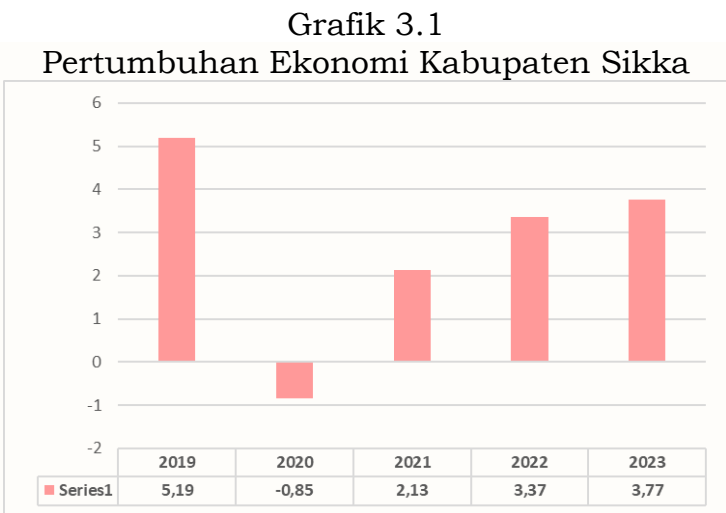
No	Sektor	Kontribusi (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,58	35,46	36,41	37,43	38,17	38,53
2	Pertambangan dan Penggalian	1,16	1,11	1,14	1,12	1,09	1,04
3	Industri Pengolahan	1,71	1,75	1,75	1,7	1,71	1,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
6	Konstruksi	5,2	5,19	4,74	4,76	4,71	4,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,52	10,74	10,48	10,36	10,79	11,12
8	Transportasi dan Pergudangan	6,35	6,59	5,15	5,06	5,39	5,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,73	0,62	0,62	0,62	0,62
10	Informasi dan Komunikasi	5,86	5,85	6,25	6,3	6,19	5,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,7	3,6	3,86	3,92	3,95	3,75
12	Real Estate	2,16	2	1,94	1,91	2	2,06
13	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,2	0,18	0,18	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,75	12,83	13,22	12,86	12,08	11,55
15	Jasa Pendidikan	10,38	10,3	10,63	10,17	9,65	9,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	1,99	2,16	2,24	2,14	2,19
17	Jasa lainnya	1,4	1,38	1,24	1,16	1,13	1,11
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 38,53 sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08.

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 5,19%, pada Tahun 2020 turun menjadi -0,85% dan pada Tahun 2021 naik menjadi 2,13%. Pada 2022 meningkat menjadi sebesar 3,37% dan pada Tahun 2023 naik menjadi 3,77%. Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4	0,8	3,58	4,24	4,32
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,82	1,29	2,16	2,24	2,1
3.	Industri Pengolahan	6,43	-3,62	0,95	6,54	7,53
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	8,73	6,12	1,73	11,28
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,69	4,18	7,71	0,83	1,73
6.	Konstruksi	4,38	-8,71	2,54	0,85	7,86
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	-5,18	1,42	7,03	5,71
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,99	-17,35	2,11	4,5	2,33
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	5,19	-15,24	3,63	5,35	6,19
10.	Informasi dan Komunikasi	6,72	7,21	4,46	4,93	4,06
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	7,44,	1,77	0,78	0,79
12.	Real Estate	0,09	-2,32	2,95	3,53	3,41
13.	Jasa Perusahaan	4,26	-31,07	-10,12	2,87	6,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,71	4,14	-0,11	0,2	0,13
15.	Jasa Pendidikan	3,88	0,72	-1,61	-0,17	2,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	2,9	4,57	1,74	2,04
17.	Jasa Lainnya	5,11	-11,52	-4,35	1,4	4,87
	Total	5,19	-0,85	2,13	3,37	3,77

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

3.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar Rp298.357 terus meningkat menjadi Rp428.352 pada tahun 2023. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yang dirilis BPS dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.
Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk miskin	44.02	44.32	42.18	43.09	40.87	40.81
2	Persentase penduduk miskin (%)	13,82	13,53	13,12	13,35	12,61	12,56
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1,61	2,11	1,89	1,26	1,80	1,58
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,29	0,47	0,38	0,21	0,40	0,29
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	298.357	301.994	324.775	354.234	389.455	428.352

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 12,56% turun 0,05% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 12,61%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan Kabupaten Sikka berada pada urutan kedua terendah setelah kota Kupang. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	28.51	28.29	28.17	28.39	27.47	27.17
Sumba Timur	30.13	30.02	29.65	29.68	28.22	28.08
Kupang	23.10	23.03	22.77	22.98	21.70	21.78
Timor Tengah Selatan	28.06	27.87	27.49	26.64	25.45	25.18
Timor Tengah Utara	22.31	22.45	22.28	22.62	21.50	21.85
Belu	15.70	15.54	15.37	15.68	14.84	14.3
Alor	21.63	21.59	21.09	21.09	20.25	19.97
Lembata	26.45	26.30	26.14	26.21	25.18	24.78
Flores Timur	11.05	10.90	10.84	10.19	10.75	11.77
Sikka	13.82	13.53	13.12	13.35	12.61	12.56
Ende	24.20	23.18	23.76	24.13	23.00	22.86
Ngada	12.94	12.48	12.51	12.58	11.93	12.06
Manggarai	20.83	20.55	20.34	20.48	19.84	19.69

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rote Ndao	28.08	27.95	27.54	28.08	27.45	27.05
Manggarai Barat	18.14	18.01	17.71	17.92	17.15	16.82
Sumba Tengah	34.85	34.62	34.49	34.27	32.51	31.78
Sumba Barat Daya	28.88	28.06	28.00	28.08	27.16	27.48
Nagekeo	12.98	12.85	12.61	12.91	12.05	12.33
Manggarai Timur	26.50	26.49	26.52	26.50	25.35	25.06
Sabu Raijua	30.83	30.52	30.18	30.13	28.73	28.37
Malaka	16.34	16.12	16.04	16.33	15.26	14.42
Kota Kupang	9.61	9.22	8.96	9.17	8.61	8.61
Nusa Tenggara Timur	21.35	21.09	20.90	20.99	20.05	19.96

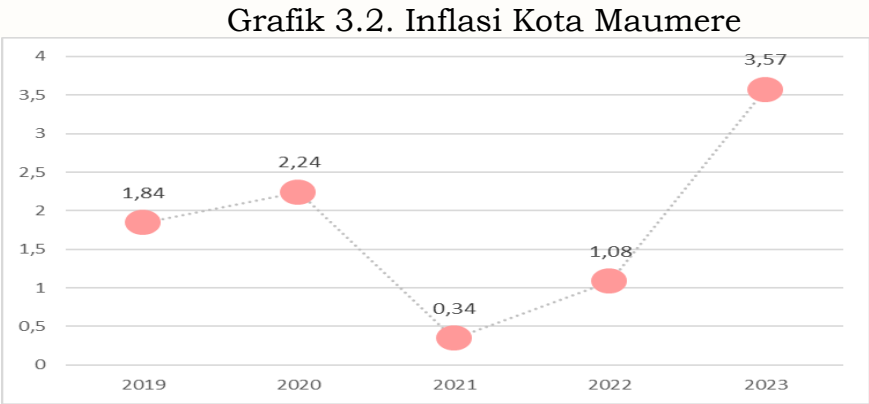
Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 2022

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

3.1.5. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun. (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun. (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : BPS Kabupaten Sikka. 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2019-2023 terus terkendali. Laju inflasi Kota Maumere Tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 1.84%, dan pada Tahun 2020 naik menjadi 2.24%. Tahun 2021 turun menjadi 0.34% dan pada Tahun 2022 naik menjadi 1.08%, dan pada Tahun 2023 naik

menjadi 3.57%.

3.2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sikka, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Sikka.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Sikka, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber pendapatan primadona bagi Kabupaten Sikka. Sedangkan Pajak Reklame masih harus ditingkatkan lagi upaya pencapaiannya sesuai potensi yang terukur yang dapat dicapai. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk

pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan sesuai kriteria dan persyaratan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung capaian RPJMN yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pusat dan provinsi diupayakan melalui upaya meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal DBH. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis Pendapatan Daerah yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali berbagai potensi sumber-sumber penerimaan dan upaya untuk mendapatkannya adalah PAD. Sedangkan jenis Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sangat bergantung pada kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Komponen pembentuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari DBH dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak Atas

- Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak Reklame. Pajak Air Tanah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak Sarang Burung Walet. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- b. Retribusi Daerah
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah. Retribusi Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Retribusi Jasa Usaha. dan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni PT. Bank NTT dan Perumda Mawarani. Sedangkan Perumda Air Minum Wair Puan belum memberikan kontribusi terhadap PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rata-rata kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 66.23% berdasarkan keputusan RUPS PT. Bank NTT dan laba yang diterima hasil audit Kantor Akuntan Publik setiap tahun anggaran. Dengan proporsi rata-rata hanya sebesar 2% dari total Pendapatan Daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Jasa Giro. Pendapatan Bunga Bank. Tuntutan Ganti rugi. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan. Pendapatan BLUD. dll.

Tabel 3.7.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.619.556.108.26	119.601.046.361.49	86.021.344.041.33	96.165.854.550.58	105.869.332.988
4.1.1	Pajak Daerah	21.530.813.226.80	19.161.863.076.19	19.329.069.532.90	21.715.997.250.00	35.847.445.100
4.1.2	Retribusi Daerah	10.096.895.298.00	9.165.525.046.00	7.774.169.774.00	8.256.039.482.00	16.100.605.548
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.611.859.299.00	2.602.950.139.00	2.694.036.222.00	1.707.467.340.00	1.707.467.340
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.379.988.284.46	88.670.708.100.30	56.224.068.512.43	64.486.350.478.58	52.213.815.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Tahun 2023

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 7.02%, dengan rincian pertumbuhan realisasi Pendapatan Pajak Daerah rata-rata sebesar 8.68%. Hasil Retribusi Daerah rata-rata sebesar 2.91%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar 3.79% dan Lain-lain PAD yang Sah rata-rata sebesar -7.69%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka nilainya mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar Rp119.601.046.361.49, namun menurun pada tahun 2021 dan 2022 sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 dan pada tahun 2023 sebesar Rp115.790.415.208.

Perkembangan PAD menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan juga mengindikasikan pada pemulihan ekonomi terutama pada 1 tahun terakhir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka tahun 2019-2023, masih didominasi oleh Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp114.71 milyar dan pada tahun 2021 meningkat tipis menjadi sebesar Rp120.64 milyar. PAD terbesar selanjutnya adalah Retribusi Daerah yang berada di rata-rata Rp4.81 milyar dalam rentang tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp4.63 Milyar yang kemudian menjadi sebesar Rp5.17 milyar di tahun 2021. Terakhir adalah penerimaan dari pos Lain-lain PAD yang sah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp17.41 milyar lebih, dimana terdapat cukup peningkatan menjadi Rp21.01 milyar pada tahun 2021.

3.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Dana Transfer meliputi Transfer Pusat; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa serta Transfer Antar Daerah; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer ke Daerah terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
Besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah ditentukan oleh Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Yang menentukan alokasi dasar adalah gaji PNS di daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas Fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, serta besarnya belanja daerah. Kapasitas Fiskal adalah penjumlahan PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA
- c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.
DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana

ini lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Dalam kurun waktu sebelum tahun 2019 nomenklatur Dana Penyesuaian menampung alokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru PNS. Tambahan Penghasilan Guru PNS. Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan sejak Tahun 2019 Tunjangan Profesi Guru PNS. Tambahan Penghasilan Guru PNS menjadi bagian dari alokasi DAK Non Fisik sedangkan Dana Desa dan DID berdiri sendiri dalam kode rekening masing-masing.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Insentif Daerah yang disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan dasar yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

Selama kurun waktu 2019-2023. Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 27.73% per tahun. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

No	Uraian	2019	2020	Tahun 2021	2022	2023
1.2	DANA PERIMBANGAN					
	Anggaran	916.408.690.000.00	776.489.330.098.00	1.006.121.716.000.00	1.018.403.908.640.00	900.155.636.000
	Realisasi	896.834.859.563.00	765.074.025.024.00	978.946.525.981.00	941.013.591.802.00	858.711.463.145
	%	97.86	98.53	97.30	92.40	95
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak					
	Anggaran	10.629.312.000.00	14.060.583.098.00	10.125.141.000.00	12.765.221.279.00	8.307.929.000
	Realisasi	7.486.535.849.00	9.106.704.168.00	14.788.653.458.00	12.244.361.554.00	9.630.929.065
	%	70.43	64.77	146.06	92.40	116
1.2.2	Dana Alokasi Umum					
	Anggaran	647.862.407.000.00	590.110.914.000.00	579.691.529.000.00	579.933.112.000.00	619.573.611.000
	Realisasi	647.862.407.000.00	586.220.258.000.00	579.691.529.000.00	579.230.812.000.00	619.573.611.000
	%	100.00	99.34	100.00	99.88	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus					
	Anggaran	257.916.971.000.00	172.317.833.000.00	236.844.973.000.00	246.917.619.786.00	272.274.096.000
	Realisasi	241.485.916.714.00	169.747.062.856.00	205.006.270.523.00	140.466.946.205.00	229.506.923.080
	%	93.63	98.51	86.56	56.89	84
2.4	Dana Insentif Daerah (DID)					
	Anggaran			26.695.841.000.00	3.222.886.000.00	
	Realisasi			26.695.841.000.00	14.806.884.000.00	
	%			100.00	459.43	
2.5	Dana Desa					
	Anggaran			152.764.232.000.00	141.334.007.000.00	132.561.787.000
	Realisasi			152.764.232.000.00	133.195.363.680.00	136.087.827.000
	%			100.00	94.24	103

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. 2023

Dari sisi Dana Perimbangan. nilainya mengalami peningkatan yang cukup besar hingga 35.9% di tahun 2021 setelah mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 8.8%. Tahun 2020 Dana Perimbangan sebesar Rp591.92 milyar dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp804.34 milyar. Sedangkan dari pos lain-lain pendapatan yang sah. rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 1.5%.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mengalami fluktuasi. dengan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Sikka tahun 2019-2020 sebesar -0.19% dan tahun 2020-2023

sebesar 2.98% per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Secara keseluruhan, total Dana Transfer/Perimbangan dan Dana Bagi Hasil masih memberikan proporsi yang sangat dominan bagi sumber pendapatan Kabupaten Sikka yaitu sebesar 84.86%. Sedangkan PAD memberikan kontribusi 15.14% dari total pendapatan di Tahun 2023.

Dalam kurun waktu 2021-2023, sumber utama Dana Transfer ke Daerah berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU sebesar 59.73%; diikuti Dana Desa sebesar 15.14%; kemudian DAK Fisik dan Non Fisik sebesar 9.86% dan 9.56%; DID sebesar 2.12%; dan DBH sebesar 1.45%. Proporsi sumber Dana Transfer ke Daerah dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 terdiri dari DAU sebesar 61.55%; Dana Desa sebesar 15.02%; DAK Fisik sebesar 9.41%; DAK Non Fisik sebesar 8.95%; DID sebesar 1.57%; dan DBH sebesar 1.42%.

3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah. Dana Darurat. DBH Pajak dari Provinsi. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dana Desa dan DID. DBH Pajak dari Provinsi dalam kurun waktu 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.09% namun berkurang sebesar Rp2.639.191.049.00 pada Tahun 2023.

Tabel 3.9.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2019-2023

No		Uraian	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	Anggaran		224.924.452.875.00	208.696.742.001.41	30.916.252.063.00	47.532.370.000.00	19.532.181.437
	Realisasi		242.745.458.467.00	217.816.586.364.00	30.724.580.000.00	41.775.070.792.00	14.504.954.838
	%		107.92	104.37	99.38	87.89	74
1.3.1	Pendapatan Hibah						
	Anggaran		25.913.200.000.00	25.913.200.000.00	30.916.252.063.00	29.531.900.000.00	
	Realisasi		44.381.455.281.00	38.635.990.000.00	30.724.580.000.00	30.863.250.051.00	
	%		171.27	149.10	99.38	104.51	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya						
	Anggaran		28.170.795.875.00	30.019.310.001.41	36.870.253.624.00	34.231.062.575.00	56.587.480.355
	Realisasi		27.523.546.186.00	26.420.615.646.00	22.180.150.993.00	19.537.143.465.00	38.439.047.849
	%		97.70	88.01	60.16	57.07	68
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
	Anggaran		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Realisasi		0.00	0.00	0.00	0.00	
	%		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.6	Dana Desa						
	Anggaran		151.300.419.000.00	152.764.232.000.00	152.764.232.000.00	141.334.007.000.00	132.561.787.000
	Realisasi		151.300.419.000.00	152.759.980.718.00	152.764.232.000.00	141.334.007.000.00	136.087.827.000
	%		100.00	100.00	100	100	103
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)						
	Anggaran		19540038000	0.00	26.695.841.000.00	3.222.886.000.00	
	Realisasi		19540038000	0.00	26.695.841.000.00	14.806.884.000.00	
	%		100.00	0.00	100	459.43	

No	Uraian	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Anggaran	0.00	0.00	30.916.252.063.00	47.532.370.000	19.532.181.437
	Realisasi	0.00	0.00	30.724.580.000.00	41.775.070.792	14.502.954.838
	%	0.00	0.00	99.38	87.89	74

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. 2024

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2025. Kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- 2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
- 3) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 4) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 5) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah dengan memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- 7) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta;
- 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- 9) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- 10) Meningkatkan koordinasi. kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah pengelolaan pendapatan daerah;
- 11) Meningkatkan evaluasi. monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- 12) Meningkatkan partisipasi dan peran Pihak Ketiga untuk penyediaan biaya pembangunan daerah;
- 13) Khusus untuk Pajak Daerah. peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak. *one-stop service*. *samsat keliling*. peningkatan efektivitas *drive thru*. penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan *fiscus*; dan
 - f) Penegakan Perda tentang Pajak Daerah melalui pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	1.192.350.000.000	1.242.230.832.450	1.203.983.696.000
4:01	Pendapatan Asli Daerah	105.869.332.988	113.394.343.700	122.120.331.614
4:01:01	Pajak Daerah	35.847.445.100	35.847.445.100	43.627.527.255
4:01:02	Retribusi Daerah	16.100.605.548	16.100.604.900	16.943.304.708
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.707.467.340	1.707.467.340	1.698.073.291
4:01:04	Lain-Lain PAD Yang Sah	52.213.815.000	59.738.826.360	59.851.426.360
4:02	Pendapatan Transfer	1.066.948.485.575	1.108.327.698.250	1.061.354.573.886
4:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.032.717.423.000	1.066.189.267.000	1.022.163.211.000
4:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.231.062.575	42.138.431.250	39.191.362.886
4:03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.532.181.437	20.508.790.500	20.508.790.500
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19.532.181.437	20.508.790.500	20.508.790.500

Sumber : Data Olahan Bapelitbang. 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 1,203,983,696,000 yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.122.120.331.614, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.061.354.573.886 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 20.508.790.500. Dari target tersebut belum mengalokasikan penadapatan dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025.

Rincian pendapatan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	TARGET PENDAPATAN
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.627.527.255
2	DINAS KESEHATAN	26.518.790.500
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.500.000.000
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	146.524.164
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.026.000.000
6	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.827.400.000
7	DINAS PERIKANAN	3.000.000.000
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.610.453.835
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	320.500.000
10	DINAS PERTANIAN	949.000.000
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	250.000.000
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	265.500.000
13	SEKRETARIAT DAERAH	238.815.000
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.000.000
15	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	54.338.611.360
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1.061.354.573.886

Tabel 3.12.
 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan
 Komponen Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2025
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.227.221.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	612.120.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.145.210.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	109.330.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	129.093.750
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	52.078.125
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.500.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	518.316.307
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	33.162.500
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.401.830.800
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	70.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	31.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.334.664.773
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.500.000.000
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	12.926.000.000
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	-
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.510.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.503.024.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	910.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	634.220.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	330.684.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	807.096.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	420.768.384
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	765.109.774
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	86.773.550
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	3.850.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	417.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	5.400.000
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	22.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.146.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	95.050.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	24.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	2.613.281.000
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.500.000
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.698.000
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	500.000.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	21.700.000

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2025
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	265.500.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.698.073.291
4.1.04.01.05.0052	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	64.000.000
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	125.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	238.815.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	10.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	75.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.000.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.546.695.965
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	4.651.862.030
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	140.053.365
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	510.255.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.235.871.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	464.644.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	147.328.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	206.325.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	655.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.769.160.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	540.629.062.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	19.921.887.000
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	69.294.295.000
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.765.289.000
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	14.197.105.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.538.800.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.205.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.480.941.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.524.130.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	17.394.738.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.812.600.000

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2025
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	751.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	39.475.258.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	427.331.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.747.585.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	585.147.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	153.023.305.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.771.353.242
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.800.558.416
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.905.156.059
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.392.298
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.710.902.871
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.508.790.500

Permasalahan dalam Pendapatan Daerah yang diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi; Dana Perimbangan yang lebih bersifat terberikan (*given*) dari Pemerintah Pusat; Ekstensifikasi pendapatan daerah belum optimal; Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah; Monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif; Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan perangkat daerah pengelola PAD dalam kondisi kurang terawat; Kurangnya apresiasi perangkat daerah pengelola PAD dalam upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya. sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar. urusan wajib bukan pelayanan dasar. urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri. pejabat negara. dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam

rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS;
- 2) Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;
- 3) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- 4) Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai;
- 5) Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
- 6) Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;
- 7) Belanja Uang Lembur PNS;
- 8) Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
- 9) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
- 10) Pembayaran uang vakasi;
- 11) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- 12) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dipergunakan untuk :

- 1) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
 - a) Belanja keperluan perkantoran;
 - b) Belanja pengadaan bahan makanan;
 - c) Belanja penambah daya tahan tubuh;
 - d) Belanja bahan;
 - e) Belanja pengiriman surat dinas;
 - f) Honor yang terkait dengan operasional Satker;
 - g) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon, dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
 - h) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
 - i) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
 - j) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan

- k) Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- 2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
- a) Honor yang terkait dengan output kegiatan;
 - b) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor. antara lain biaya paket rapat/pertemuan. ATK. uang saku. uang transportasi lokal. biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
 - c) Belanja jasa konsultan;
 - d) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
 - e) Belanja jasa profesi;
 - f) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
 - g) Belanja jasa;
 - h) Belanja perjalanan;
 - i) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
 - j) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
 - k) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
 - l) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.
- 3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
- 4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.
- c. Belanja Bunga
- Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*). baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain :
- 1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bunga Obligasi Negara. Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Bunga Pinjaman Program. Bunga Pinjaman Proyek. dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman;
 - 2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
 - 3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption*. Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (*buyback*) dengan *carrying value* SUN. *Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.
 - 4) Pembayaran diskon SBSN; dan

- 5) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (*restitusi*). pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
- d. Belanja Subsidi
- Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi menjual mengeksport atau mengimpor barang dan jasa. yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari:
- 1) Energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
 - 2) Non Energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
- e. Belanja Hibah. merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain. organisasi internasional. BUMN/D. dan Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela. tidak wajib. tidak mengikat. dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang. barang. atau jasa termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.
- 3) Belanja Bantuan Sosial. dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan. keagamaan. dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu. kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu. keluarga. kelompok. dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial. krisis ekonomi. krisis politik. fenomena alam. dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Kriteria Belanja Bantuan Sosial adalah:
- a) Tujuan penggunaan

Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain :

(1) Belanja Rehabilitasi Sosial

Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Belanja Pemberdayaan Sosial

Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Belanja Perlindungan Sosial

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Belanja Penanggulangan Bencana

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

(5) Belanja Jaminan Sosial

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk kategori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(6) Belanja Penanggulangan Kemiskinan

Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(7) Pemberi bantuan

Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(8) Persyaratan penerima bantuan

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

(9) Masa berlaku pemberian bantuan

Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

4) Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :

- a) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan.
- b) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas. peningkatan standar kinerja. atau volume aset.
- c) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin. batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000.-
 - (2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000.-
- d) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. yang terdiri dari :

a) Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian. balik nama. pengosongan. penimbunan. perataan. pematangan tanah. pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian. biaya pengangkutan. biaya instalasi. serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi. termasuk biaya pengurusan IMB. notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d) Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan. irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan. irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang

- meningkatkan masa manfaat. menambah nilai aset. dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan. irigasi dan jaringan.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah. Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan. Jaringan (Jalan. Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*). pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*). barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum. serta hewan ternak. buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.
- 5) Belanja Tak Terduga
Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi. di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat. yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- b. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Gambaran Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2023 sesuai struktur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. dan Proporsi Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
5	BELANJA DAERAH	1.112.256.100.953.75	1.221.146.017.900.00	1.304.979.359.282
5.1	BELANJA OPERASI	757.035.729.662.00	821.503.735.347.00	905.771.996.978
5.1.1	Belanja Pegawai	459.111.201.374.00	466.312.239.092.00	489.434.963.409

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291.974.368.131.00	332.274.528.654.00	353.980.691.578
5.1.3	Belanja Bunga	-	10.154.661.544.00	12.543.068.834
5.1.5	Belanja Hibah	4.380.475.157.00	8.546.106.057.00	45.731.905.157
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.569.685.000.00	4.216.200.000.00	4.081.368.000
5.2	BELANJA MODAL	126.329.007.697.75	192.587.248.790.00	197.056.430.017
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.732.618.030.00	3.085.098.903.00	760.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.367.133.269.00	43.082.003.350.00	79.090.849.239
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.212.047.561.00	45.944.541.953.00	54.049.879.588
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.837.248.837.75	99.963.899.584.00	62.229.746.190
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.960.000.00	511.705.000.00	925.955.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.754.138.057.00	3.544.191.397.00	3.507.645.287
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.754.138.057.00	3.544.191.397.00	3.507.645.287
5.4	BELANJA TRANSFER	215.137.225.537.00	203.510.842.366.00	198.643.287.000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.544.000.000.00	1.735.232.000.00	3.327.000.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	212.593.225.537.00	201.775.610.366.00	195.316.287.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka. 2022

Selama kurun waktu dua tahun dari tahun 2021-2023. Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 5.44%. dengan rincian Belanja Operasi meningkat 2.60%. Belanja Modal meningkat sebesar 49.62%. Belanja Tidak Terduga menurun sebesar 74.23% dan Belanja Transfer menurun sebesar 5.40%.

Kebijakan Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan. pelaksanaan. penatausahaan. pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas. efisiensi. transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah. yang dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional. efisien dan efektif yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah. terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan. kesehatan. pengembangan wilayah. penciptaan lapangan kerja. peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan.
3. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan. keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Optimalisasi program/kegiatan
Belanja program/kegiatan diupayakan untuk mendukung tercapainya

- tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja program/kegiatan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat. sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi program/kegiatan untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Transparansi dan Akuntabel**
 Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi menyangkut pula proses. keluaran dan hasil.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
 Proyeksi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Uraian	REALISASI 2023	TARGET 2024	PROYEKSI BELANJA DAERAH 2025
5	BELANJA DAERAH	1.356.500.000.000	1.329.475.124.082	1.275.305.614.882
5:01	Belanja Operasi	971.422.173.512	1.015.879.672.921	969.111.432.131
5:01:01	Belanja Pegawai	561.150.364.708	593.671.901.867	588.566.696.929
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	347.966.842.250	339.258.853.978	360.636.568.217
5:01:03	Belanja Bunga	13.972.163.397	11.430.328.307	10.368.852.331
5:01:05	Belanja Hibah	44.191.435.157	70.018.588.769	6.509.814.654
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	4.141.368.000	1.500.000.000	3.029.500.000
5:02	Belanja Modal	182.644.790.188	86.506.990.401	72.822.798.834
5:02:01	Belanja Modal Tanah	845.000.000	1.079.080.000	537.300.000
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.231.698.083	24.272.240.809	23.892.999.035
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.930.209.334	35.059.105.359	32.398.168.669
5:02:04	Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi	66.637.882.771	25.451.564.233	15.849.131.130
5:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	525.000.000	145.200.000
5:02:06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	120.000.000	-
5:03	Belanja Tidak Terduga	2.541.749.300	2.000.012.692	3.000.000.000
5:03:01	Belanja Tidak Terduga	2.541.749.300	2.000.012.692	3.000.000.000
5:04	Belanja Transfer	199.891.287.000	225.088.448.068	230.371.383.917
5:04:01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	3.327.000.000	3.105.688.268	3.135.672.397
5:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	196.564.287.000	221.982.759.800	227.235.711.520

Sumber : Data Olahan Bapelitbang. 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 sebesar Rp 1,275, 305.614.882,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 969.111.432.131. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.000.000.000 dan Belanja Transfer ke pemerintahan Desa sebesar Rp230.371.383.917.

Belanja Operasi sebesar Rp 969.111.432.131 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 588.566.696.929, Pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 360.636.568.217 Belanja Bunga sebesar Rp10.368.852.331, Belanja Hibah sebesar Rp. 6.509.814.654 bantuan sosial sebesar Rp 3.029.500.000,-

Belanja Transfer ke pemerintahan Desa sebesar Rp 230.371.383.917 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 3,135,672,397 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 227,235,711,520 mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar Rp221.982.759.800 digunakan untuk pengalokasian ADD APBD bagi 34 Desa Defenitif dan pelaksanaan pilkades pada tahun 2025.

3.3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh dalam hal terjadi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sikka selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah. Selama kurun waktu Tahun 2019-2023, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari Pinjaman Daerah.

Peningkatan modal yang disetor pada BUMD dalam kurun waktu tahun 2019-2023 tidak diikuti dengan kenaikan deviden. Pada tahun 2022 persentase deviden terhadap modal yang disetorkan hanya sebesar 2.63% dan menjadi yang terendah dalam kurun waktu lima tahun sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kinerja BUMD.

Tabel 3.15.
 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka
 Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Pembiayaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.034.755.661.68	68.023.868.104.57	93.305.736.418.47	236.613.347.620.00	98.252.239.758
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.017.421.661.68	68.023.868.104.57	39.242.033.168.47	97.193.095.249.00	98.252.239.758
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	54.063.703.250.00	139.420.252.371.00	
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	17.334.000.00	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.500.000.000.00	9.250.000.000.00	6.525.071.404.05	11.500.000.000.00	17.900.380.476
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	1.500.000.000.00	9.250.000.000.00	-	0.00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	6.125.000.000.00	11.500.000.000.00	
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	400.071.404.05	0.00	17.900.380.476
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0.00	-	

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka. 2024

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019–2023, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 disusun dengan berbasis pada asumsi :

1. Kondisi pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh berkisar 5% – 5.5%.
2. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah. Proyeksi PAD dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2019-2023.
3. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang dikontrol oleh pemerintah Pusat. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2024-2026 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan akibat kebutuhan pemenuhan alokasi dasar (Gaji ASN) yang meningkat.
4. Pendapatan Transfer dari DAK diasumsikan sesuai dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2024-2026, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas setiap kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai melalui sumber pendanaan DAK.
5. Lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari hibah diproyeksikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada
6. Asumi Inflasi Kabupaten Sikka yang digunakan untuk proyeksi adalah 1%–2%.
7. Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2024-2026 naik sebesar 5%-5.5% per tahun.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow priority program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I dan II mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran dalam DPPMD Kabupaten Sikka 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- 1) **Prioritas I.** untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- 2) **Prioritas II.** untuk membiayai belanja pencapaian tujuan dan sasaran

- pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi prioritas Pembangunan tahun 2024-2026 dan pemenuhan penerapan pelayanan dasar. termasuk akomodasi terhadap hasil reses DPRD dan aspirasi Musrenbang;
- 3) **Prioritas III.** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16.
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Uraian	REALISASI 2023	TARGET 2024	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH			110.864.390.708
6:01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	172.200.000.000	120.991.615.140	110.864.390.708
6:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	172.200.000.000	120.991.615.140	110.864.390.708
6:01:04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
6:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6:02	Pengeluaran Pembiayaan	8.050.000.000	33.747.323.508	39.542.471.708
6:02:01	Pembentukan Dana Cadangan	-		
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000
6:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.050.000.000	32.247.323.508	36.042.471.708
6:02:04	Pemberian Pinjaman Daerah	-		

Sumber: Data Olahan Bapelitbang. 2024

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar **Rp 110.864.390.708** yang diperkirakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan Sebesar **Rp 39,542,471,708 yang terdiri dari** Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT sebesar **Rp.2.500.000.000**, PDAM sebesar **Rp1.000.000.000** dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar **Rp36,042,471,708.**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sikka tidak terlepas dari pelaksanaan desentralisasi yang juga mengacu pada Tujuan, sasaran dan kebijakan Pembangunan Tahun 2025 baik Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Mengacu pada Tema RKP Tahun 2025 **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	: 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	: 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini	: 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM)	: 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan	: 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Emisi GRK	: 38,6%.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Kewilayahan dan Provinsi dengan Target kontribusi PDRB dalam rancangan RKP pada tahun 2025 terdiri atas :

- Kontribusi Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 78,6%;
- Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%;
- Indeks Williamson (IW) sebesar 0,712; serta
- Stok Infrastruktur (SI) terhadap PDB menggunakan perkiraan sementara

sebesar 46,8%.

Untuk Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%; yang terdiri dari Bali-Nusa Tenggara dengan tema “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”, dilaksanakan dengan target:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,4 – 6,2%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 2,2-2,7%

Implementasi prioritas nasional didukung dengan penerapan kebijakan umum untuk setiap wilayah yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

1. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

- a. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission*
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
- c. Penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multi-aktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
- d. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya
- e. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
- f. Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital

2. Infrastruktur dan Layanan Dasar

- a. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA), SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/MA/ sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah
- b. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola
- c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- d. Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
- e. Pengembangan konektivitas dasar (*komersial dan non komersial*) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi
- f. Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air

- g. Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
- h. Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
- i. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- j. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas akses sumber daya pembangunan diarahkan pada prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Intervensi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yakni:

1. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi

- a. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan
- b. Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
- c. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan.
- d. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- e. Pemerintah daerah agar memberikan perhatian ataupun dukungan kepada daerah afirmasi misalnya Kawasan perbatasan maupun daerah tertinggal/Kawasan lambat tumbuh melalui strategi kewilayahan skala daerah yaitu antaranya pusat pertumbuhan dan daerah afirmasi dan kebijakan kewilayahan lainnya.

2. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

- a. Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting
- c. Penuntasan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan *carry over* proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025 adalah:

1. Tujuan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan sosial, dengan *sasaran* :
 - a. Pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah Pertumbuhan (PDRB % : 4.55-5.35)
 - b. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian dengan (Kontribusi pariwisata pada PDRB (%): 7,7) dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta): 85.119,30
 - c. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan dengan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta): 85.119,30
 - d. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran terbuka (%): 2,51-2,35
 - e. Meningkatkan daya beli masyarakat Pengeluaran per kapita (Rp 000) :7.762
 - f. Menurunnya kemiskinan masyarakat dengan Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 19,35-18,85
 - g. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat daerah dengan Indeks Gini (Poin): 0,337-0,335
 - h. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan dengan Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%): 25,8
 - i. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi social dengan Indeks Pembangunan Gender (%): 94
 - j. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan dengan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin): 68,25
2. Tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing:
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin):66,5-67
 - Rata-rata lama sekolah (Poin): 7,93
 - Harapan lama sekolah (Poin): 14,6
 - b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan
 - Usia Harapan Hidup (Poin): 68
 - Prevelensi Stunting (%): 01-9,5
3. Tujuan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan mempertahankan aspek Lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana, dengan *sasaran* :
 - a. mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
 - Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) : 100:
 - Ratio Elektrifikasi (%) : 84
 - b. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) : 73,95
 - c. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim:Indeks Resiko Bencana (Poin) : 138
4. Tujuan mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntansi, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan *sasaran* : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dengan indikator :
 - Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)64-65
 - OPINI BPK : WTP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat) : A
 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor): 2,5
 - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (nilai): 90

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin): 90
- Indeks Demokrasi Indonesia (Poin): 82,5

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, maka Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 diarahkan pada :

1. SDM Berkualitas / SDM Berdaya Saing dan Produktif
Transformasi Sosial
 - Penetapan wajib Belajar 13 tahun
 - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
 - Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting
 - Penetapan Penggunaan Reg Sosek dan pemanfaatannya untuk
 - Perlindungan Sosial Adaptif
 - Peningkatan Partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM
 - berkualitas
 - Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system
 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - Penetapan Kebijakan penguatan karakter dan jati diri Bangsa (missal : Pendidikan Budi Pekerti)
2. Infrastruktur Berkualitas
Infrastruktur Untuk Peningkatan Produktivitas
Transformasi Ekonomi :
 - Penetapan hubungan laut dan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan Ekonomi
 - Penguatan Infrastruktur Digital
 - Penegembangan Infrastruktur transisi Energi
 - Percepatan Infrastruktur IKN
 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
 - Penetapan Reformasi Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :
 - Penguatan sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - Pengembangan skema graduasi bansos
 - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, Penyandang Disabilitas ,perempuan dan Penduduk rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - Peningkatan Keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
 - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - Peningkatan Produksi industri Pengolahan
 - Dukungan regulasi penciptaan iklim akan investasi yang kondusif
 - Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) antara lain:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya empat prioritas daerah tersebut disinergikan dengan tiga

prioritas nasional sebagai berikut:

- PD 1 : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
 - PN 3 : Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
- PD 2 : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
 - PN1 : SDM Berkualitas / SDM Berdaya Saing dan Produktif Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- PD 3 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
 - PN 2 : Infrastruktur Berkualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Produktivitas Transformasi Ekonomi, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- PD 4 : Reformasi Birokrasi
 - PN 1 : SDM Berkualitas / SDM Berdaya Saing dan Produktif Penetapan Kebijakan penguatan karakter dan jati diri Bangsa

Keempat prioritas daerah tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis yang belum terselesaikan yang merupakan isu strategis pembangunan dalam RKPD 2025 antara lain:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT triwulan IV-2023 dibandingkan dengan triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 4,14 persen (yoy), namun angka tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional yaitu 5,04 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ini dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,39 persen, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,73 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,57 persen. Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,32 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 67,48 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,8 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.11,47 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata rata nasional.

Selanjutnya, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000- an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km² atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1,141,110 orang pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan dengan tahun 2022 yaitu

1,131,620 orang, namun secara presentase menurun dari 20,05 menjadi 19,96 tahun 2023. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Kelompok Rentan (RAD PD), anak, perempuan, PD

4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencanabencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim.

Sejumlah ancaman dan risiko tersebut sudah menjadi pengalaman empiris NTT dari tahun ke tahun. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops PB) Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTT mencatat sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2023 ada 100 kejadian di seluruh NTT. Kejadian bencana alam yang mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Korban meninggal sebanyak 15 jiwa, hilang 2 jiwa, luka-luka 9 orang dan korban terdampak sebanyak 21.737 orang. Masyarakat NTT memiliki pengalaman terbaru terkait bencana yaitu Siklon Seroja pada 4 April 2021 yang dampaknya dirasakan di 21 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota. Bencana ini menyebabkan 182 orang meninggal dunia, 115 luka-luka, 47 orang hilang, 56,652 rumah rusak, 3,508 fasilitas publik rusak serta kerusakan lahan pertanian dan peternakan.

Bencana tersebut selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan karena terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim. Selanjutnya, penanggulangan bencana juga harus memperhatikan Kelompok yang paling rentan terkena dampak bencana seperti penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak dalam penanggulangan bencana tidak memperburuk kondisi rentan yang sudah dialami dalam kondisi tidak ada bencana. Sebagai contoh, Seorang bapak sedang mempersiapkan bendera berwarna merah, kuning dan hijau, sebagai petunjuk tingkatan air di Kali Siumate dalam simulasi kesiapsiagaan menghadapi banjir. Penggunaan bendera berbeda warna adalah upaya masyarakat memastikan informasi peringatan dini banjir bisa dipahami oleh warga yang tuli.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2023 IPM NTT telah mencapai 66,68. Angka ini meningkat sebesar 0,78 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2022 sebesar 65,90. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,21 menjadi 13,22 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,70 tahun menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 371 ribu rupiah (4,71 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 74,39% tahun 2023 dan juga masih menjadi urutan ke 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi, organisasi, peniadaan, tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama

pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah:

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Angka Pengangguran
 - d. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
 - e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah
 - g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Menurunnya Angka kemiskinan
 - c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
3. Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dengan *sasaran* :
 - a. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial
 - b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Terwujudnya pengurangan risiko bencana
4. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - c. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik
 - d. Meningkatnya Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025, maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan Kerja sama, penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan kerjasama, Penguatan partisipasi dan jaringan informasi kesehatan.
3. Menurunnya Angka Pengangguran, melalui strategi Peningkatan kesempatan kerja melalui pendidikan vokasi.
4. Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga, melalui strategi Peningkatan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga.
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan dan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
6. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah, melalui strategi Peningkatan kualitas penelitian.
7. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga, melalui strategi Peningkatan Peran serta pemuda dan prestasi olah raga.
8. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, melalui strategi Optimalisasi pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata, perdagangan, perindustrian dan Investasi.
9. Menurunnya Angka kemiskinan, melalui strategi Pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga.
10. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui strategi Peningkatan Layanan PPKS.
11. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan
12. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial, melalui strategi Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar di Wilayah Kecamatan untuk menunjang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan melalui pendekatan kebijakan lokal dan keswadayaan masyarakat.
13. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup, melalui strategi Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat.
14. Terwujudnya pengurangan resiko bencana, melalui strategi Pengurangan resiko bencana.
15. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan, melalui strategi Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
16. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui strategi Optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan dan BMD.
17. Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, melalui strategi Optimalisasi penggunaan data dan informasi berbasis TIK dalam penyelenggaraan pemerintah.
18. Meningkatnya Pelayanan Publik, melalui strategi Peningkatan pelayanan Publik berbasis TIK.

4.1. Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan / Sasaran	Program
Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	• Pengembangan Kurikulum • Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pengendalian Perizinan Pendidikan

Tujuan / Sasaran	Program
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Menurunnya Angka Pengangguran	• Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Penempatan Tenaga Kerja • Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	• Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Penanganan Kerawanan Pangan
Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	• Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	• Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Promosi Penanaman Modal • Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Pendapatan Daerah • Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Standardisasi dan Perlindungan Konsumen • Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Perencanaan dan Pembangunan Industri • Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Pengembangan UMKM • Pengelolaan Perikanan Tangkap • Pengelolaan Perikanan Budidaya • Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tujuan / Sasaran	Program
	• Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Penyuluhan Pertanian • Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Pemasaran Pariwisata • Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Pengembangan Kebudayaan • Pengembangan Kesenian Tradisional • Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Pengembangan Kebudayaan • Pengembangan Kesenian Tradisional • Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Menurunnya Angka Kemiskinan	• Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Pengembangan Transmigrasi
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	• Pemberdayaan Sosial • Rehabilitasi Sosial • Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Penanganan Bencana
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	• Penataan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Administrasi Pemerintahan Desa
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	
d. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	• Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Tujuan / Sasaran	Program
	• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Penataan Bangunan Gedung • Penyelenggaraan Jalan • Pengembangan Jasa Konstruksi • Penyelenggaraan Penataan Ruang • Pengembangan Perumahan • Kawasan Permukiman • Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Pengelolaan Pelayaran
e. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	• Perencanaan Lingkungan Hidup • Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Pengelolaan Persampahan
f. Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Penanggulangan Bencana
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	• Kepegawaian • Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Penyelenggaraan Pengawasan • Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi • Administrasi Umum
b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Meningkatnya kualitas kebijakan publik	• Informasi dan Komunikasi Publik • Aplikasi Informatika • Penyelenggaraan Statistik Sektor • Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi • Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Tujuan / Sasaran	Program
	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya • Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial • Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Perekonomian dan Pembangunan • Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD • Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
d. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Barang Milik Daerah
e. Meningkatnya Pelayanan Publik	• Pendaftaran Penduduk • Meningkatnya Pelayanan Publik • Pencatatan Sipil • Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Pengelolaan Profil Kependudukan • Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran • Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik • Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rekapitulasi Pagu Anggaran per Unit per PD Tahun 2025

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU ANGGARAN
1	SMP NEGERI 1 MAUMERE	45.246.544
2	SMP NEGERI 2 MAUMERE	46.878.548
3	SMP NEGERI 4 MAUMERE	35.096.400
4	SMP NEGERI 1 NITA	41.299.930
5	SMP NEGERI 2 NITA	38.891.012
6	SMP NEGERI 1 TALIBURA	40.034.756
7	SMP NEGERI 2 TALIBURA	38.872.717
8	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE	46.270.078
9	SMP NEGERI 1 PAGA	40.052.173
10	SMP NEGERI 2 PAGA	38.889.946
11	SMP NEGERI 1 MEGO	38.886.612
12	SMP NEGERI 1 LELA	40.053.737
13	SMP NEGERI 1 BOLA	40.693.060
14	SMP NEGERI 2 BOLA	38.894.300
15	SMP NEGERI 2 MEGO	38.084.700
16	SMP NEGERI 3 PAGA	33.687.518
17	SMP NEGERI 1 WAIGETE	40.100.000
18	SMP NEGERI 1 PALUE	38.889.210
19	SMP NEGERI KEWAPANTE	44.810.527
20	SMP NEGERI ALOK TIMUR	45.004.339
21	SMP NEGERI 2 WAIGETE	38.828.210
22	SMP NEGERI REROROJA	38.835.600
23	SMP NEGERI MAPITARA	37.898.300
24	SMP NEGERI NUBA ARAT	38.898.200
25	SMP NEGERI PRUDA	38.879.948
26	SMP NEGERI ALOK	46.009.660
27	SMP NEGERI PIGANG	38.699.200
28	SMP NEGERI HEBAR	38.885.132
29	SMP NEGERI HAMAR	38.878.616
30	SMP NEGERI WERANG	38.811.200
31	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG	35.838.341
32	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT	37.882.746
33	SMP NEGERI 3 WAIGETE	34.923.900
34	SMP NEGERI TANAH MERAH	34.089.091
35	SMP NEGERI HENGA	34.611.599
36	SMP NEGERI PEMANA	35.097.156
37	SMP NEGERI SATAP PAGA	35.821.700
38	SMP NEGERI SATAP BLORO	35.253.189
39	SMP NEGERI SATAP WARA	33.687.519
40	SMP NEGERI SATAP SUKUN	33.845.600
41	SMP NEGERI SATAP MORO	33.696.704
42	SMP NEGERI 46 NANGAHLE	35.097.245
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	320.081.651.716
44	SMP NEGERI 3 MAUMERE	44.074.400
45	SMP NEGERI KOLISIA	38.893.250
46	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG	38.883.572
47	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA	33.687.400
48	SMP NEGERI 47 OJANG	33.617.519
49	PUSKESMAS BOGANATAR	1.223.988.140

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU ANGGARAN
50	PUSKESMAS WATUBAING	1.730.840.100
51	PUSKESMAS WAIGETE	2.483.252.586
52	PUSKESMAS TANARAWA	1.385.140.992
53	PUSKESMAS HEWOKLOANG	1.199.375.437
54	PUSKESMAS BERU	1.778.681.900
55	PUSKESMAS KOPETA	1.828.116.829
56	PUSKESMAS WOLOMARANG	1.506.102.094
57	PUSKESMAS MAGEPANDA	1.484.234.412
58	PUSKESMAS NELLE	1.192.883.150
59	PUSKESMAS KOTING	1.068.844.500
60	PUSKESMAS NITA	2.046.366.074
61	PUSKESMAS NANGA	1.230.752.180
62	PUSKESMAS PAGA	1.569.874.269
63	PUSKESMAS LEKEBAI	1.299.746.060
64	PUSKESMAS WOLOFEO	1.323.228.749
65	PUSKESMAS FEONDARI	1.130.442.324
66	PUSKESMAS BOLA	1.445.584.201
67	PUSKESMAS HABIBOLA	1.474.610.866
68	PUSKESMAS MAPITARA	1.478.251.400
69	PUSKESMAS TELUK	1.197.143.780
70	PUSKESMAS PALUE	1.178.618.800
71	PUSKESMAS TUANGGEO	1.010.784.100
72	PUSKESMAS WAIPARE	1.639.384.223
73	PUSKESMAS KEWAPANTE	1.467.848.210
74	DINAS KESEHATAN	144.845.602.130
75	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	95.748.999.233
76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.547.197.951
77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15.246.696.437
78	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.897.672.474
79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.969.102.471
80	DINAS SOSIAL	5.495.558.342
81	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.949.899.498
82	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.008.321.889
83	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.181.570.787
84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.189.158.990
85	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.986.099.656
86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.217.203.951
87	DINAS PERHUBUNGAN	10.325.543.009
88	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.671.246.714
89	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.377.836.662
90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.792.857.952
91	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.747.108.003
92	DINAS PERIKANAN	21.205.724.985
93	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.320.267.447
94	DINAS PERTANIAN	27.157.626.658
95	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.285.757.411
96	BAGIAN PEMERINTAHAN	345.709.200
97	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.996.518.760
98	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	590.372.160
99	BAGIAN PEREKONOMIAN	572.691.900
100	BAGIAN HUKUM	1.328.909.800
101	BAGIAN ORGANISASI	790.829.800
102	BAGIAN UMUM	10.619.384.616

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU ANGGARAN
103	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	404.935.460
104	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	741.541.360
105	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	11.786.028.183
106	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	36.311.311.347
107	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	13.295.786.322
108	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.496.969.292
109	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	243.740.236.248
110	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.998.978.169
111	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	6.480.167.328
112	INSPEKTORAT DAERAH	7.911.756.208
113	KELURAHAN MADAWAT	450.758.681
114	KELURAHAN KABOR	450.904.840
115	KELURAHAN NANGALIMANG	406.246.770
116	KELURAHAN KOTA UNENG	439.467.608
117	KELURAHAN WURING	456.922.660
118	KELURAHAN HEWULI	391.700.768
119	KELURAHAN WAILITI	397.227.420
120	KELURAHAN WOLOMARANG	450.294.240
121	KELURAHAN WAIOTI	432.043.648
122	KELURAHAN NANGAMETING	457.876.578
123	KELURAHAN WAIROTANG	400.216.890
124	KELURAHAN BERU	422.268.700
125	KELURAHAN KOTA BARU	435.432.039
126	KECAMATAN ALOK	4.209.260.789
127	KECAMATAN ALOK BARAT	3.841.041.560
128	KECAMATAN ALOK TIMUR	4.598.043.802
129	KECAMATAN BOLA	1.817.465.074
130	KECAMATAN DORENG	1.593.574.446
131	KECAMATAN HEWOKLOANG	1.681.297.279
132	KECAMATAN KANGAE	2.412.011.243
133	KECAMATAN KEWAPANTE	2.045.281.395
134	KECAMATAN KOTING	1.725.944.025
135	KECAMATAN LELA	2.006.984.332
136	KECAMATAN MAGEPANDA	1.667.285.708
137	KECAMATAN MAPITARA	1.504.003.633
138	KECAMATAN NELLE	1.569.081.509
139	KECAMATAN NITA	2.132.830.281
140	KECAMATAN PAGA	1.663.752.904
141	KECAMATAN PALUE	1.958.981.725
142	KECAMATAN TALIBURA	2.025.717.424
143	KECAMATAN TANA WAWO	1.652.194.754
144	KECAMATAN WAIBLAMA	1.780.090.324
145	KECAMATAN WAIGETE	1.885.472.759
146	KECAMATAN MEGO	1.888.266.960
147	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.206.485.115
	Jumlah	1.275.305.614.882

5.2.Rincian Program, kegiatan, Sub Kegiatan per Unit, Per PD serta Pendanaan Tahun 2025.

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					SMP NEGERI 1 MAUMERE					45.246.544,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					45.246.544,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					45.246.544,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	45.246.544,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	16.539.400,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	16.539.400,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.110.000,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.078.800,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.070.600,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	740.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.570.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	4.298.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	5.352.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	8.597.144,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	8.597.144,00
					SMP NEGERI 2 MAUMERE					46.878.548,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					46.878.548,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					46.878.548,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	46.878.548,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	21.782.700,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.999.900,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.522.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	13.260.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	13.695.848,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	13.695.848,00
					SMP NEGERI 4 MAUMERE					35.096.400,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.096.400,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.096.400,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	35.096.400,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	14.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	14.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	19.496.400,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.016.400,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.080.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	17.400.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.200.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.200.000,00
					SMP NEGERI 1 NITA					41.299.930,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					41.299.930,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					41.299.930,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	41.299.930,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	25.099.930,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	13.199.930,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	11.900.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.800.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.800.000,00
					SMP NEGERI 2 NITA					38.891.012,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.891.012,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.891.012,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.891.012,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	25.091.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	8.115.700,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.068.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	3.157.300,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12.750.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.400.012,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.400.012,00
					SMP NEGERI 1 TALIBURA					40.034.756,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					40.034.756,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					40.034.756,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	40.034.756,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	21.340.600,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.520.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.329.800,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Paket	2.905.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.271.200,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material				12 Paket	2.134.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	9.180.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	7.294.156,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7.294.156,00
					SMP NEGERI 2 TALIBURA					38.872.717,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.872.717,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.872.717,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.872.717,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	25.050.700,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	8.821.900,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	828.400,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	1.800.400,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	13.600.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.422.017,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.422.017,00
					SMP NEGERI 1 KEWAPANTE					46.270.078,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					46.270.078,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					46.270.078,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	46.270.078,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.776.200,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.776.200,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	24.785.900,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	6.647.100,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.988.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	16.150.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	9.707.978,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9.707.978,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					SMP NEGERI 1 PAGA					40.052.173,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					40.052.173,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					40.052.173,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	40.052.173,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	21.093.300,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	6.133.300,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.960.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	7.558.873,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7.558.873,00
					SMP NEGERI 2 PAGA					38.889.946,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.889.946,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.889.946,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.889.946,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	24.500.200,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.140.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.010.200,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.350.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.989.746,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
					SMP NEGERI 1 MEGO					38.886.612,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.886.612,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.886.612,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.886.612,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	27.486.612,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	2.986.812,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.139.800,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.360.000,00
					SMP NEGERI 1 LELA					40.053.737,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					40.053.737,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					40.053.737,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	40.053.737,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	26.253.900,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.985.600,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	6.691.200,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.537.100,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.840.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10.200.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.399.837,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.399.837,00
					SMP NEGERI 1 BOLA					40.693.060,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					40.693.060,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					40.693.060,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	40.693.060,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	26.295.400,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	9.860.600,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.134.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	15.300.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.997.660,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.997.660,00
					SMP NEGERI 2 BOLA					38.894.300,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.894.300,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.894.300,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.894.300,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	24.294.300,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.144.300,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.150.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	3.200.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	3.200.000,00
					SMP NEGERI 2 MEGO					38.084.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.084.700,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.084.700,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.084.700,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.787.600,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.787.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	22.193.100,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	5.538.200,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.681.400,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	523.500,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.450.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.104.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.104.000,00
					SMP NEGERI 3 PAGA					33.687.518,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.687.518,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33.687.518,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.687.518,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	19.450.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	5.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.450.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.837.518,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.837.518,00
					SMP NEGERI 1 WAIGETE					40.100.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					40.100.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					40.100.000,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	40.100.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.799.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.799.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	23.799.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	8.529.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.500.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	13.770.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.502.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.502.000,00
					SMP NEGERI 1 PALUE					38.889.210,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.889.210,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.889.210,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.889.210,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.028.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.028.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	25.463.070,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.011.870,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.101.200,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	20.350.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.398.140,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.398.140,00
					SMP NEGERI KEWAPANTE					44.810.527,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					44.810.527,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					44.810.527,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	44.810.527,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	13.080.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	13.080.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.570.600,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.896.800,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.349.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2.124.800,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	2.440.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	9.760.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	11.159.927,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	11.159.927,00
					SMP NEGERI ALOK TIMUR					45.004.339,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					45.004.339,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					45.004.339,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	45.004.339,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	27.605.300,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.898.900,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	9.540.200,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1.590.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0			0 0	1.526.200,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	11.050.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	5.999.039,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	5.999.039,00
					SMP NEGERI2 WAIGETE					38.828.210,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.828.210,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.828.210,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.828.210,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	25.037.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	10.247.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.790.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.391.210,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.391.210,00
					SMP NEGERIREROROJA					38.835.600,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.835.600,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.835.600,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.835.600,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	22.435.600,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	10.535.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	11.900.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	5.000.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	5.000.000,00
					SMP NEGERIMAPITARA					37.898.300,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					37.898.300,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					37.898.300,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	37.898.300,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.719.200,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.719.200,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	24.429.100,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.873.500,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.932.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	1.853.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	13.770.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.750.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.750.000,00
					SMP NEGERI NUBA ARAT					38.898.200,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.898.200,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.898.200,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.898.200,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	13.800.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	13.800.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	18.297.200,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	8.157.200,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10.140.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	6.801.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.801.000,00
					SMP NEGERI PRUDA					38.879.948,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.879.948,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.879.948,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.879.948,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	15.600.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	15.600.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	23.279.948,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	2.998.548,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.790.600,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.360.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	15.130.000,00
					SMP NEGERI ALOK					46.009.660,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					46.009.660,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					46.009.660,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	46.009.660,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	24.208.400,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	13.487.600,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2.950.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	7.770.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	10.401.260,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	10.401.260,00
					SMP NEGERI PIGANG					38.699.200,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.699.200,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.699.200,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.699.200,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.538.700,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	6.907.100,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.131.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10.500.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	6.760.500,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.760.500,00
					SMP NEGERI HEBAR					38.885.132,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.885.132,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.885.132,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.885.132,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	12.030.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12.030.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	18.513.800,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	10.013.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	8.500.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	8.341.332,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	8.341.332,00
					SMP NEGERI HAMAR					38.878.616,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.878.616,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.878.616,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.878.616,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	13.500.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	13.500.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	22.781.300,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.011.300,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	2.620.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	16.150.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.597.316,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.597.316,00
					SMP NEGERI WERANG					38.811.200,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.811.200,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.811.200,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.811.200,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	14.460.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 bulan Dokumen	14.460.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.777.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Dokumen Paket	307.400,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.712.700,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	581.400,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	3.075.700,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12.100.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	3.574.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	3.574.000,00
					SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG					35.838.341,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.838.341,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.838.341,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	35.838.341,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	15.230.600,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	5.200.600,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	580.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	9.450.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	9.207.741,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9.207.741,00
					SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT					37.882.746,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					37.882.746,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					37.882.746,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	37.882.746,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	24.489.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.912.300,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	8.313.700,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	385.200,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	788.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	13.090.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.992.946,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.992.946,00
					SMP NEGERI 3 WAIGETE					34.923.900,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					34.923.900,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					34.923.900,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	34.923.900,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	18.899.900,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.429.900,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	15.470.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.624.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.624.000,00
					SMP NEGERI TANAH MERAH					34.089.091,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					34.089.091,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					34.089.091,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	34.089.091,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	17.690.400,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	916.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	932.400,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	921.300,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.920.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.998.691,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.998.691,00
					SMP NEGERI HENGA					34.611.599,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					34.611.599,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					34.611.599,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	34.611.599,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.040.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.040.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	19.371.600,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	995.900,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.475.700,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	700.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10.200.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.199.999,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.199.999,00
					SMP NEGERI PEMANA					35.097.156,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.097.156,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.097.156,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	35.097.156,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	17.083.200,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	230.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	2.453.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.649.600,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12.750.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	6.613.956,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.613.956,00
					SMP NEGERI SATAP PAGA					35.821.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.821.700,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.821.700,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	35.821.700,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.730.600,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.730.600,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.411.100,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	997.800,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.783.300,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	700.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	13.930.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	3.680.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	3.680.000,00
					SMP NEGERI SATAP BLORO					35.253.189,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.253.189,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.253.189,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	35.253.189,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	19.101.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.221.300,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	999.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10.880.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.752.089,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	4.752.089,00
					SMP NEGERI SATAP WARA					33.687.519,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.687.519,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33.687.519,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.687.519,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	19.020.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.551.200,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	2.628.800,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	8.840.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	3.267.519,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	3.267.519,00
					SMP NEGERI SATAP SUKUN					33.845.600,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.845.600,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33.845.600,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.845.600,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	18.375.500,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.118.800,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	2.850.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	1.146.700,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	11.260.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4.070.100,00
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	4.070.100,00
					SMP NEGERI SATAP MORO					33.696.704,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.696.704,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33.696.704,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.696.704,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.970.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.970.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	19.508.600,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	2.483.600,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	3.915.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	2.400.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	10.710.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.218.104,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.218.104,00
					SMP NEGERI 46 NANGHALE					35.097.245,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.097.245,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.097.245,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	35.097.245,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	14.800.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	14.800.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	17.898.700,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	2.618.700,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	1.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.280.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.398.545,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.398.545,00
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					320.081.651.716,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					317.729.229.516,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					317.729.229.516,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	259.638.237.634,00
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	69.344.200,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	16.668.000,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	2.579.700,00
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	5.200.500,00
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	2.250.000,00
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	30.646.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	12.000.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	258.861.474.694,00
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2734 Orang/bulan	258.741.522.694,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	119.952.000,00
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	91.796.800,00
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4 Dokumen	71.496.800,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			420 Orang	7.800.000,00
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			420 Orang	12.500.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	212.047.300,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.143.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	45.303.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	17.070.000,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	19.908.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	39.998.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			4 Paket	11.655.200,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	72.970.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	161.447.840,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	59.998.400,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	101.449.440,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	242.126.800,00
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	51.902.600,00
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	190.224.200,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	100 %		100 %	57.868.726.682,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Sekolah Dasar	-		100 %	33.416.647.121,00
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			5 Ruang	1.113.850.000,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			4 Ruang	313.060.000,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			6 Ruang	1.481.480.400,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			7 Unit	1.084.821.200,00
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	231.309.600,00
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6 Ruang	699.238.000,00
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Ruang	184.328.000,00
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Ruang	811.686.000,00
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat			5 Unit	461.041.300,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			12 Paket	2.896.996.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			48 Peserta Didik	33.499.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			877 Orang	5.514.042.720,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			200 Orang	250.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			336 Satuan Pendidikan	74.924.600,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			336 Satuan Pendidikan	173.400.000,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			336 Orang	71.274.300,00
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			150 Orang	144.874.500,00
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			150 Konten Digital	207.387.400,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			6 Dokumen	208.800.700,00
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			2 Dokumen	77.684.700,00
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			21 Komunitas	88.375.200,00
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			2 Kegiatan	75.834.500,00
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			0 Buku	0,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			6 Ruang	1.442.130.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			8 Unit	1.040.382.800,00
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			180 Orang	351.227.200,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			336 Satuan Pendidikan	99.203.800,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			120 Ruang	11.999.401.101,00
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			12 Paket	2.286.393.400,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	18.566.850.830,00
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			1 Unit	1.703.324.800,00
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			4 Ruang	1.262.232.400,00
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			6 Ruang	1.257.166.800,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			6 Ruang	2.052.744.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	215.490.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			4 Unit	324.620.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			21 Ruang	2.778.162.600,00
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	268.800.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Unit	121.644.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			20 Paket	846.867.500,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			28 Peserta Didik	29.900.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			379 Orang	2.434.634.280,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			150 Orang	180.000.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			86 Satuan Pendidikan	25.017.800,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			86 Orang	35.216.400,00
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			86 Orang	138.983.500,00
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			3 Konten Digital	131.667.500,00
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			4 Dokumen	122.093.850,00
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			2 Dokumen	31.124.500,00
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			8 Komunitas	35.077.400,00
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			2 Kegiatan	41.407.700,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			86 Satuan Pendidikan	74.844.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			11 Ruang	3.354.610.000,00
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			86 Orang	194.934.800,00
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			0 Buku	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	274.392.000,00
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			8 Paket	631.895.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-		-	5.030.927.931,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			4 Unit	724.200.000,00
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			20 Paket	817.132.950,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			16 Orang	96.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			82 Orang	187.644.900,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			270 Satuan Pendidikan	50.400.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			270 Orang	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			270 Orang	125.000.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			4 Dokumen	67.704.500,00
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			1 Dokumen	75.000.000,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1 Ruang	153.200.000,00
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			12 Kegiatan	75.000.000,00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			45 Paket	648.802.900,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 Unit	587.273.761,00
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia			8 Paket	389.075.000,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			270 Satuan Pendidikan	75.000.000,00
1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			3 Ruang	313.060.000,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 Ruang	596.433.920,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-		-	854.300.800,00
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			15 Orang	95.000.000,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			270 Satuan Pendidikan	35.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			4 Dokumen	83.281.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			1 Dokumen	133.283.600,00
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			0 Buku	0,00
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			0 Ruang	0,00
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			10 Paket	87.900.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			695 Peserta Didik	343.843.500,00
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			32 Paket	75.992.500,00
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun			0 unit	0,00
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			0 Paket	0,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-		-	73.125.200,00
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-		-	73.125.200,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya			40 Orang	73.125.200,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-		-	113.950.000,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-		-	113.950.000,00
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3 Dokumen	49.825.800,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3 Laporan	64.124.200,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-		-	35.190.000,00
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-		-	24.990.000,00
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 Dokumen	24.990.000,00
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-		-	10.200.000,00
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 Dokumen	10.200.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.352.422.200,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.352.422.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-		-	54.568.900,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-		-	54.568.900,00
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda			28 Orang	54.568.900,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-		-	2.147.853.300,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	262.466.300,00
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			2 Unit	262.466.300,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.788.698.600,00
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			12 Kegiatan	1.428.000.000,00
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota			48 Orang	360.698.600,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	96.688.400,00
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga			28 Orang	50.000.000,00
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			48 Orang	46.688.400,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-		-	150.000.000,00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-		-	150.000.000,00
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			1 Laporan	150.000.000,00
					SMP NEGERI 3 MAUMERE					44.074.400,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					44.074.400,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					44.074.400,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	44.074.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.753.400,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1Dokumen	11.753.400,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	23.806.500,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.420.400,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.000.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	4.986.100,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	8.400.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	8.514.500,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1Laporan	8.514.500,00
					SMP NEGERI KOLISIA					38.893.250,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.893.250,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.893.250,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.893.250,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	27.493.250,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.887.550,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	5.645.700,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.960.000,00
					SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG					38.883.572,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					38.883.572,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.883.572,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.883.572,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.970.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.970.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	21.255.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	460.800,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	4.839.100,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.050.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	2.580.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	1.616.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10.710.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	5.657.672,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	5.657.672,00
					SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA					33.687.400,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.687.400,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33.687.400,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.687.400,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	11.400.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	11.400.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.407.200,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	6.127.200,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	14.280.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.880.200,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.880.200,00
					SMP NEGERI 47 OJANG					33.617.519,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.617.519,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33.617.519,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.617.519,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	15.510.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 bulan Dokumen	15.510.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	11.990.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1.300.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	1.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	9.690.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	6.117.519,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.117.519,00
					PUSKESMAS BOGANATAR					1.223.988.140,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.223.988.140,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.223.988.140,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.215.938.140,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentase penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentase penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	52.301.900,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			3 Unit	13.178.000,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			18 Unit	1.169.300,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			16 Unit	707.300,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			0 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			80 Paket	37.247.300,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.163.636.240,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			122 Orang	17.400.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	15.864.800,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			896 Orang	61.800.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3611 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			376 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1451 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			44 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			33 Orang	8.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			88 Orang	10.520.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			137 Orang	2.200.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	243.911.200,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	13.200.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	80.840.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	147.726.800,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	411.833.440,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	1.100.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			7 Orang	4.400.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			5 Orang	7.800.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			5 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	13.620.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	122.620.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	0,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	8.050.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	8.050.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	8.050.000,00
					PUSKESMAS WATUBAING					1.730.840.100,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.730.840.100,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.730.840.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.727.640.100,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	156.691.900,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			4 Unit	19.334.600,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			15 Unit	6.618.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			7 Unit	13.389.600,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			44 Paket	117.349.700,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.570.948.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			352 Orang	21.500.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			347 Orang	7.380.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			340 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1490 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3470 Orang	62.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			11770 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1228 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4716 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			142 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			57 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			321 Orang	17.200.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			417 Orang	8.600.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5 Dokumen	424.025.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3 Dokumen	5.150.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			7 Dokumen	41.519.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	174.930.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	609.654.200,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.850.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6 Orang	2.150.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			27 Orang	4.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			5 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	28.850.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			4 Dokumen	161.040.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	0,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	3.200.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	3.200.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	3.200.000,00
					PUSKESMAS WAIGETE					2.483.252.586,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.483.252.586,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.483.252.586,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	2.474.852.586,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	608.489.300,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			118 Unit	64.442.300,00
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			92 Unit	192.985.200,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			33 Paket	351.061.800,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.866.288.886,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			490 Orang	9.240.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			498 Orang	7.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			485 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2330 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4400 Orang	122.680.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			16229 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1772 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6666 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			199 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			60 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			318 Orang	38.800.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			533 Orang	7.760.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			9 Dokumen	407.602.400,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5 Dokumen	10.270.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	55.051.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	226.580.000,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	750.145.486,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			6 Laporan	15.540.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			12 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			0 Unit	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			42 Orang	15.520.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			22 Orang	15.840.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			0 Tatanan	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	39.020.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	145.240.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	74.400,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	74.400,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	8.400.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12 Dokumen	0,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			12 Dokumen	0,00
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat			0 Keluarga	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	8.400.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5 Dokumen	8.400.000,00
					PUSKESMAS TANARAWA					1.385.140.992,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.385.140.992,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.385.140.992,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.369.545.992,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	109.097.600,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			7 Unit	26.634.600,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			44 Unit	26.232.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			5 Paket	56.231.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.244.933.192,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			181 Orang	34.720.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			177 Orang	40.870.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			170 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			726 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1745 Orang	34.726.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2419 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			64 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			45 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			20 Orang	27.440.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			20 Orang	1.680.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			36 Dokumen	306.624.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			28 Dokumen	24.540.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			21 Dokumen	43.800.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			250 Dokumen	144.020.400,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12Dokumen	435.732.792,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			21 Laporan	1.470.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			2 Orang	11.760.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			7 Orang	10.080.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			9 Dokumen	56.840.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			294 Dokumen	70.630.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	15.515.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	15.515.200,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	15.595.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	15.595.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0			0 0	15.595.000,00
					PUSKESMAS HEWOKLOANG					1.199.375.437,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.199.375.437,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.199.375.437,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.192.165.437,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	125.523.506,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			9 Unit	34.051.410,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	24.305.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			22 Unit	2.321.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			4 Paket	64.845.696,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.065.066.701,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			162 Orang	23.380.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			155 Orang	11.100.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1733 Orang	57.800.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			153 Orang	11.480.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			155 Orang	3.920.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	192.120.970,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	4.410.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	63.460.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	136.450.800,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	388.454.931,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	5.390.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20 Orang	7.560.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			15 Orang	2.940.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	27.560.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	129.040.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	1.575.230,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	1.575.230,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	7.210.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	7.210.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	7.210.000,00
					PUSKESMAS BERU					1.778.681.900,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.778.681.900,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.778.681.900,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.744.751.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	222.347.100,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			13 Unit	49.730.600,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			25 Unit	14.680.200,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			80 Paket	157.936.300,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.449.142.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			465 Orang	35.200.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			456 Orang	10.315.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7026 Orang	92.190.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			458 Orang	11.080.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			647 Orang	3.360.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12Dokumen	340.675.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6 Dokumen	19.200.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10 Dokumen	56.926.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			38 Dokumen	155.250.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	567.815.300,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4 Dokumen	7.050.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0 Laporan	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			50 Orang	9.520.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			92 Orang	1.260.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	4.480.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			10 Dokumen	134.820.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	73.262.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	73.262.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	33.930.600,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	33.930.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			13 Dokumen	33.930.600,00
					PUSKESMAS KOPETA					1.828.116.829,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.828.116.829,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.828.116.829,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.823.096.829,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	320.662.551,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			45 Unit	129.489.620,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			60 Unit	61.564.831,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			152 Paket	129.608.100,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.433.990.858,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			494 Orang	9.200.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			434 Orang	21.920.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			410 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1850 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4645 Orang	70.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			18185 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1821 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4827 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			145 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			99 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			387 Orang	7.280.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			583 Orang	6.720.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	370.080.780,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	13.080.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	98.400.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			4 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	157.876.800,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	550.783.278,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen	11.250.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	2.240.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			387 Orang	6.720.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			583 Orang	2.800.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	8.120.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	97.520.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	68.443.420,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	68.443.420,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	5.020.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	5.020.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	5.020.000,00
					PUSKESMAS WOLOMARANG					1.506.102.094,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.506.102.094,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.506.102.094,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.482.702.094,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	153.664.550,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			5 Unit	41.116.500,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			3 Unit	25.136.900,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatanyang disediakan			79 Paket	87.411.150,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.329.037.544,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			470 Orang	18.240.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			436 Orang	46.240.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4525 Orang	36.120.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			357 Orang	6.720.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			647 Orang	9.240.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			7 Dokumen	353.706.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6 Dokumen	10.500.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5 Dokumen	129.440.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			23 Dokumen	139.720.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	475.931.544,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			0 Unit	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.120.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			40 Orang	4.480.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			47 Orang	4.480.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1.680.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			6 Dokumen	91.420.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	0,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	23.400.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	23.400.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2 Dokumen	23.400.000,00
					PUSKESMAS MAGEPANDA					1.484.234.412,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.484.234.412,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.484.234.412,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.424.354.412,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	143.191.900,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			28 Unit	34.480.900,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			62 Unit	19.751.100,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			29769 Paket	88.959.900,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.281.162.512,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0			217 0	18.880.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-			-	27.720.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			186 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1054 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2625 Orang	29.120.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			8806 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			905 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3526 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			106 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			17 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			192 Orang	9.520.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			246 Orang	2.240.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-			-	390.296.880,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Bulan Dokumen	18.060.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 dokumen Dokumen	97.150.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			12241 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	134.820.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			12 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	401.145.632,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0			0 0	0,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			8 Laporan	1.120.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			9 Orang	6.720.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			22 Orang	700.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			12241 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			8 Dokumen	24.200.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	119.470.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	59.880.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	59.880.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8 Dokumen	59.880.000,00
					PUSKESMAS NELLE					1.192.883.150,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.192.883.150,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.192.883.150,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.108.774.150,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	108.251.400,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			3 Unit	24.808.400,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	17.741.100,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			14 Unit	6.416.200,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			65 Paket	59.285.700,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.000.522.750,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			81 Orang	19.050.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			78 Orang	61.222.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			78 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			413 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1292 Orang	51.450.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3956 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			427 Orang	48.300.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1744 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			52 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			9 Orang	12.740.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			65 Orang	3.220.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			92 Orang	3.010.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			7 Dokumen	97.015.480,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5 Dokumen	18.340.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9 Dokumen	74.885.520,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			28 Dokumen	126.560.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			34 Dokumen	417.599.750,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			30 Laporan	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			11 Orang	5.600.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			10 Orang	280.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			5 Dokumen	11.350.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			7 Dokumen	45.700.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	84.109.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	78.109.000,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			11 Dokumen	78.109.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	6.000.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2 Dokumen	6.000.000,00
					PUSKESMAS KOTING					1.068.844.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.068.844.500,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.068.844.500,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.060.180.500,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	114.899.400,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			22 Unit	46.766.200,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			66 Unit	21.701.100,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0			0 0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			78 Paket	46.432.100,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	945.231.100,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			93 Orang	22.540.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			83 Orang	65.600.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			638 Orang	20.020.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			78 Orang	8.820.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			106 Orang	5.880.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			6 Dokumen	85.274.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4 Dokumen	5.600.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10 Dokumen	99.260.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			40 Dokumen	158.760.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			23 Dokumen	388.287.100,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	980.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			4 Orang	8.400.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			7 Orang	2.520.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			3 Dokumen	31.990.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			7 Dokumen	41.300.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	50.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	50.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	8.664.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	8.664.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	8.664.000,00
					PUSKESMAS NITA					2.046.366.074,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.046.366.074,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.046.366.074,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	2.010.331.074,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	275.801.200,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			17 Unit	47.966.900,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			63 Unit	31.361.900,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			12 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			120 Paket	196.472.400,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.734.509.474,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			299 Orang	37.600.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			285 Orang	36.200.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			269 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1411 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4806 Orang	159.400.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			14402 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1535 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6207 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			187 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			110 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			217 Orang	37.200.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			328 Orang	6.200.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	373.899.300,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	16.360.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	82.096.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			110 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			10 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	176.055.200,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	707.888.974,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	8.460.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			12 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20 Orang	9.300.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			50 Orang	6.200.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			5 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			50 Tatanan	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	6.200.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	71.450.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	20.400,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	20.400,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	36.035.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	36.035.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	36.035.000,00
					PUSKESMAS NANGA					1.230.752.180,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.230.752.180,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.230.752.180,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.222.992.180,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	147.124.200,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			9 Unit	41.309.400,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2 Unit	33.215.500,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			51 Paket	72.599.300,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.075.867.980,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			143 Orang	10.440.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			137 Orang	35.440.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			811 Orang	61.320.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			0 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			88 Orang	19.740.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			156 Orang	8.820.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5 Dokumen	169.532.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3 Dokumen	9.030.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9 Dokumen	61.512.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	157.543.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	393.090.980,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	2.520.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			11 Orang	9.240.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			13 Orang	4.760.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			8 Dokumen	66.780.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			8 Dokumen	66.100.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	7.760.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	7.760.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	7.760.000,00
					PUSKESMAS PAGA					1.569.874.269,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.569.874.269,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.569.874.269,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.557.284.669,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	162.001.100,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			2 Unit	9.217.600,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			5 Unit	5.081.800,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			3 Unit	3.359.300,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			73 Paket	144.342.400,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.383.283.569,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			245 Orang	11.760.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			236 Orang	84.014.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			235 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1100 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3453 Orang	65.380.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			10401 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1151 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4445 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			133 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			33 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			172 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			293 Orang	11.760.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	205.746.800,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	36.120.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	127.520.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	191.212.800,00
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			12 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1 Unit	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	474.909.969,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	1.680.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			16 Orang	5.600.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			12 Orang	4.900.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			1 Tatanan	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	16.800.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	124.880.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	12.000.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	12.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	12.589.600,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	12.589.600,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	12.589.600,00
					PUSKESMAS LEKEBAI					1.299.746.060,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.299.746.060,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.299.746.060,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.292.046.060,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	72.465.700,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			2 Unit	6.145.200,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			77 Paket	58.633.200,00
1	02	02	2.01	0026	DistribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			53 Paket	7.687.300,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.218.043.920,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			121 Orang	18.180.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			119 Orang	17.845.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1570 Orang	95.280.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			46 Orang	12.680.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			134 Orang	8.910.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			30 Dokumen	232.300.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20 Dokumen	5.500.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8 Dokumen	39.885.200,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			26 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			26 Dokumen	194.116.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			20 Dokumen	455.127.720,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			7 Laporan	990.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6 Orang	3.120.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			9 Orang	3.960.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			10 Dokumen	24.210.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			8 Dokumen	105.940.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	1.536.440,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1.536.440,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	7.700.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	7.700.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2 Dokumen	7.700.000,00
					PUSKESMAS WOLOFEO					1.323.228.749,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.323.228.749,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.323.228.749,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.318.028.749,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	96.035.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			6 Unit	26.182.100,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			21 Unit	10.611.800,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2 Unit	5.769.500,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatanyang disediakan			4 Paket	53.472.400,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.221.337.749,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			154 Orang	26.200.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			145 Orang	63.160.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1472 Orang	26.160.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			71 Orang	15.722.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			164 Orang	6.200.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	211.792.400,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	17.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	89.560.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	158.160.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	485.333.349,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			2 Laporan	450.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			5 Orang	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			4 Orang	5.400.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	4.600.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	106.700.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmasyangmengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	655.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	655.200,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	5.200.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	5.200.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	5.200.000,00
					PUSKESMAS FEONDARI					1.130.442.324,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.130.442.324,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.130.442.324,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.114.292.324,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	51.930.900,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			3 Unit	9.559.200,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			12 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			12 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			12 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			34 Paket	34.866.700,00
1	02	02	2.01	0026	DistribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			24 Paket	7.505.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.062.145.824,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			87 Orang	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			84 Orang	32.575.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			80 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			677 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1018 Orang	26.880.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2977 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			316 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1190 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			36 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			13 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			52 Orang	9.800.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			94 Orang	8.400.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			8 Dokumen	196.156.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	18.900.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10 Dokumen	108.300.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			12 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			12 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	141.840.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	383.274.824,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			5 Orang	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			12 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			12 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	31.940.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			8 Dokumen	62.680.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	215.600,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	215.600,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	16.150.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	16.150.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	16.150.000,00
					PUSKESMAS BOLA					1.445.584.201,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.445.584.201,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.445.584.201,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.437.984.201,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	116.454.600,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 PAKET Unit	32.519.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 PAKET Unit	8.500.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1 PAKET Paket	75.435.600,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.321.529.601,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			130Orang	61.920.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			122 Orang	49.580.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1828 Orang	30.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			65 Orang	16.870.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			144 Orang	15.840.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen Dokumen	147.535.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen Dokumen	5.250.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	42.160.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen Dokumen	194.240.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen Dokumen	597.234.601,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 laporan Laporan	700.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			65 Orang	2.640.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			144 Orang	5.280.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen Dokumen	47.640.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen Dokumen	104.640.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	7.600.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	7.600.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen Dokumen	7.600.000,00
					PUSKESMAS HABIBOLA					1.474.610.866,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.474.610.866,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.474.610.866,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.466.052.866,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	112.885.000,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			6 Unit	18.118.500,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			6 unit Unit	14.841.400,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			75 Paket	79.925.100,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.353.067.866,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			232 Orang	41.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			230 Orang	4.125.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2312 Orang	31.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			120 Orang	20.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			248 Orang	10.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			4 Dokumen	239.374.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	7.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8 Dokumen	42.660.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			27 Dokumen	207.050.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	580.058.866,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	200.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			8 Orang	10.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			2 Dokumen	8.300.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			6 Dokumen	147.100.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	100.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	100.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	8.558.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	8.558.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2 Dokumen	8.558.000,00
					PUSKESMAS MAPITARA					1.478.251.400,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.478.251.400,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.478.251.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.468.451.400,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	108.379.100,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			11 Unit	48.404.000,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			6 Unit	2.236.100,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1814 Unit	31.941.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			10 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			29 Paket	25.798.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.336.183.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			118 Orang	16.640.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			110 Orang	33.020.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			97 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			462 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1159 Orang	75.440.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4533 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			465 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1822 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			55 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			11 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			65 Orang	10.240.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			130 Orang	6.960.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			6 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5 Dokumen	223.414.700,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5 Dokumen	17.420.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			3 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6 Dokumen	92.200.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			2 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			31 Dokumen	147.030.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			2 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	616.598.800,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			2 Laporan	1.400.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			10 Orang	1.400.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			3 Orang	7.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			6 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			3 Dokumen	35.820.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			10 Dokumen	51.600.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	23.888.800,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	23.888.800,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	9.800.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	9.800.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	9.800.000,00
					PUSKESMAS TELUK					1.197.143.780,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.197.143.780,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.197.143.780,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100% 88 persen 100 Persen 0,8 Indeks 0,8 Indeks 100% 0,8 Indeks 100% 100% 0,8 Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.197.143.780,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	81.788.460,00
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			12 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			58 Unit	12.439.000,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			12 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			37 Unit	2.062.660,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			20 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan			69 Paket	67.286.800,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			12 Keluarga	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.115.314.720,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			186 Orang	29.120.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			183 Orang	46.140.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			180 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			967 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2135 Orang	53.220.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7083 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			726 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2753 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			83 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			36 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			126 Orang	18.800.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			202 Orang	3.760.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			2 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			2 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			4 Dokumen	161.367.600,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4 Dokumen	13.460.000,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			7 Dokumen	71.400.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			36 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			24Dokumen	156.248.800,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	406.098.320,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			14 Laporan	26.320.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			11 Orang	13.160.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			2 Orang	140.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			369 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			1 Tatanan	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			5 Dokumen	29.040.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			8 Dokumen	87.040.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	40.600,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	40.600,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	0,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12 Dokumen	0,00
					PUSKESMAS PALUE					1.178.618.800,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.178.618.800,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.178.618.800,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.173.058.800,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	87.508.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			24 Unit	25.980.200,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			110 Unit	17.887.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			25 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatanyang disediakan			69 Paket	43.641.700,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0 Keluarga	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.085.449.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			51 Orang	27.040.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			49 Orang	20.100.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			48 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			295 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			807 Orang	43.732.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2772 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			314 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1240 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			38 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			7 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			71 Orang	9.120.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			63 Orang	3.040.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			5 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5 Dokumen	133.168.800,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	5.900.000,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11 Dokumen	75.960.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			7 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			12 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			20 Dokumen	182.980.800,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			12 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12Dokumen	423.447.900,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	9.120.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			3 Orang	6.080.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 Orang	3.040.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			100 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			5 Tatanan	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			3 Dokumen	9.400.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			9 Dokumen	133.320.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	100.400,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	100.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	5.560.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	5.560.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	5.560.000,00
					PUSKESMAS TUANGGEO					1.010.784.100,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.010.784.100,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.010.784.100,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	990.984.100,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	92.314.900,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			8 Unit	34.165.100,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			49 Unit	8.856.300,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			26 Paket	49.293.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	886.669.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			57 Orang	9.360.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			52 Orang	7.500.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			46 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			313 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			638 Orang	15.540.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2926 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			333 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1311 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			40 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			13 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			55 Orang	28.880.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			65 Orang	3.840.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	141.269.200,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	34.180.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	24.940.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	174.954.400,00
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			1 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	341.885.600,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	560.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			9 Orang	11.520.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			4 Orang	7.280.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	19.320.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	65.640.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	12.000.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	12.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	19.800.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	19.800.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	19.800.000,00
					PUSKESMAS WAIPARE					1.639.384.223,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.639.384.223,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.639.384.223,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.631.435.823,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	308.027.000,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			2 Unit	77.550.500,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			53 Unit	21.959.600,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			12 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			4 Paket	208.516.900,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.323.112.823,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			257 Orang	21.240.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			255 Orang	5.310.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			251 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1163 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3173 Orang	78.480.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			11689 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1263 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5007 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			150 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			41 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			250 Orang	5.460.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			324 Orang	5.040.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	267.494.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	4.900.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	91.106.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			41 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			100 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			21 Dokumen	186.430.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			12 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	485.152.823,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	140.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			456 Orang	2.520.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			60 Orang	1.680.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	37.440.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			2 Dokumen	130.720.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	296.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	296.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	7.948.400,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	7.948.400,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			21 Dokumen	7.948.400,00
					PUSKESMAS KEWAPANTE					1.467.848.210,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.467.848.210,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.467.848.210,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	1.413.153.410,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	203.043.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			44 Unit	56.584.900,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			8 Unit	2.298.100,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatanyang disediakan			75 Paket	144.160.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.209.936.410,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			241 Orang	42.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			237 Orang	3.200.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			189 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			850 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2604 Orang	112.350.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4500 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2350 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			670 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			104 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			85 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			2500 Orang	12.880.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			270 Orang	2.520.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			12 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	266.304.800,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	8.120.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	104.140.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			85 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	165.150.000,00
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			4350 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1200 Dokumen	402.419.610,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			6 Laporan	630.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			19 Orang	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			120 Orang	2.800.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	6.900.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	76.322.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	174.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	174.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	54.694.800,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	54.694.800,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	54.694.800,00
					DINAS KESEHATAN					144.845.602.130,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					144.845.602.130,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					144.845.602.130,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100% 100% 100%		100 %	71.842.600.265,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		100 Persen	252.545.600,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			78 Dokumen	107.427.000,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	10.741.600,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	134.377.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-		100 Persen	69.582.361.954,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4175 Orang/bulan	69.116.281.954,00
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	466.080.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	-		100 Persen	95.653.600,00
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	18.402.800,00
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Dokumen	33.340.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	29.599.200,00
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			250 Orang	14.311.600,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-		100 Persen	807.049.200,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	9.982.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			18 Paket	125.540.400,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			81 Paket	114.863.800,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	37.008.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28 Laporan	519.655.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	-		100 Persen	20.770.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			79 Unit	20.770.000,00
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0,00
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-		100 Persen	204.124.683,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	179.174.683,00
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			77 Laporan	24.950.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	-		100 Persen	880.095.228,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			48 Unit	599.348.700,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	280.746.528,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8Indeks 100% 88persen 100Persen 0,8Indeks 0,8Indeks 100% 0,8Indeks 100% 100% 0,8Indeks		0,7 Indeks 100 % 100 Persen 87 persen	64.446.025.485,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-		64 Persen 100 Persen 85 persen 85 Persen	9.397.065.500,00
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			5 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			25 Unit	24.100.000,00
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			30 Unit	24.100.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			100 Unit	107.854.200,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			600 Paket	8.774.035.700,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			30000 Keluarga	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			10 Paket	466.975.600,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	54.711.115.485,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5452 Orang	137.330.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5204 Orang	130.995.394,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4956 Orang	98.165.900,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24415 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			61034 Orang	13.248.400,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			211190 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22411 Orang	16.511.200,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			85142 Orang	6.200.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2554 Orang	526.446.800,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			1115 Orang	38.086.400,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			4116 Orang	961.059.900,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			6402 Orang	116.019.500,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			7 Dokumen	28.700.000,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	798.425.600,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2 Dokumen	29.915.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5 Dokumen	1.893.211.100,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2 Dokumen	373.910.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	10.660.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	390.214.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			100 Orang	56.341.200,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			10 Orang	97.741.400,00
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			12 Dokumen	58.404.800,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	1.034.535.600,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12 Dokumen	46.182.237.491,00
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			45 Paket	53.207.400,00
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			12 Dokumen	132.382.000,00
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25 Unit	0,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen	593.295.300,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			25 Unit	227.560.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	20.700.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			12 Dokumen	39.704.500,00
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 Unit	15.994.700,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			477 Orang	45.247.400,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			74 Orang	26.839.600,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			100 Orang	175.349.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			15 Tatanan	40.659.200,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan SinkronisasiPenerapan SPM Bidang KesehatanKabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	341.815.600,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmasyangmengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	-		12 Bulan	0,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasepuskesmas yangmenerapkan BLUD PersentaseRumah Sakit yang mendapat izin operasional	-		0 Persen 100 Persen	337.844.500,00
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			1 Unit	0,00
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			9 Unit	115.308.700,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			25 Unit	222.535.800,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	100% 30% 100% 100% 100% 30%		100 % 25 %	6.872.996.980,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuaistandar	-		100 Persen	4.736.608.580,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			350 Orang	4.596.587.780,00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			12 Dokumen	140.020.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	-		25 Persen 25 Persen	2.136.388.400,00
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			607 Orang	2.136.388.400,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman	100 %		100 %	427.330.400,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	-		100 Persen	90.499.600,00
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			47 Dokumen	90.499.600,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	-		100 Persen	137.911.600,00
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			70 Dokumen	137.911.600,00
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	-		100 Persen	198.919.200,00
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			137 Unit	198.919.200,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %		50 %	1.256.649.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	-		70 Persen	1.167.534.200,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12 Dokumen	1.167.534.200,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			1 Dokumen	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-		80 Persen	89.114.800,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	89.114.800,00
					RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE					95.748.999.233,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					95.748.999.233,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					95.748.999.233,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	38.314.387.873,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	38.314.387.873,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			7266 Orang/bulan	38.314.387.873,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	0,00
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-		-	54.338.611.360,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	54.338.611.360,00
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			12 Dokumen	54.338.611.360,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-		-	3.096.000.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-		-	3.096.000.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			29 Orang	3.096.000.000,00
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					34.297.197.951,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					34.297.197.951,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					34.297.197.951,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR	100 %		100 %	8.637.852.421,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	-		100 %	93.980.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	49.500.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	44.480.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	-		100 %	5.507.230.221,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			61 Orang/bulan	5.378.150.221,00
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	129.080.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR	-		100 %	341.735.700,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.082.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	29.453.100,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	12.500.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	8.745.600,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5 Laporan	288.955.000,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			1.978.511.650,00
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	875.000.000,00
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			1 Unit	464.499.100,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	193.539.050,00
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			6 Unit	241.934.800,00
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	203.538.700,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-		100 %	465.136.900,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	98.201.500,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	366.935.400,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	251.257.950,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	99.715.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			2 Unit	50.444.100,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	7.900.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	93.197.950,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	100 %		100 %	366.184.200,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	366.184.200,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.8 KM	225.090.000,00
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			2 Dokumen	141.094.200,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100 %		100 %	3.847.784.400,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	3.847.784.400,00
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			50 Liter/Detik	3.297.784.400,00
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			20 Liter/Detik	550.000.000,00
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-		-	0,00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			1 Ton/hari	0,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah	100 %		100 %	24.000.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	24.000.000,00
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun			10 M³/Hari	0,00
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			1 Dokumen	24.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase	100 %		100 %	650.000.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	650.000.000,00
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			20 M	650.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100 %		100 %	93.478.400,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-		100 %	93.478.400,00
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			30 Dokumen	93.478.400,00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-		-	2.500.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	2.500.000.000,00
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			1 Kawasan	2.500.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penanganan Jalan	100 %		100 %	17.925.665.430,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-		100 %	17.925.665.430,00
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			3 Dokumen	637.410.900,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			6 KM	11.270.125.300,00
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			2.5 KM	2.160.907.830,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			1 Jembatan	3.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			100 KM	357.221.400,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100 %		100 %	100.320.200,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-		100 %	56.983.700,00
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan			1 Dokumen	5.106.900,00
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			30 Orang	51.876.800,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	18.458.400,00
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			1 Dokumen	18.458.400,00
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-		100 %	24.878.100,00
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha			15 Badan Usaha	18.048.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun			1 Dokumen	6.829.400,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100 %		100 %	151.912.900,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-		100 %	103.828.600,00
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.			5 Laporan	103.828.600,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	19.019.800,00
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			20 Layanan	19.019.800,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	29.064.500,00
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	29.064.500,00
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					15.246.696.437,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.660.341.637,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.660.341.637,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	2.898.166.887,00
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-		100 % 100 %	22.259.700,00
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	22.259.700,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Tugas dan Fungsi DPKPP	-		100 %	2.429.996.091,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	2.385.824.091,00
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	44.172.000,00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP	-		100 %	34.024.400,00
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.111.000,00
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	8.318.400,00
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	15.595.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP	-		100 %	351.367.496,00
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	56.578.076,00
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	294.789.420,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP	-		100 %	60.519.200,00
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	59.519.200,00
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.000.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %		100 %	418.084.100,00
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		100 %	398.730.800,00
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			12 Unit Rumah	236.084.000,00
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			2 Unit Rumah	162.646.800,00
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Atau Rumah Khusus	-		100 %	19.353.300,00
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan	19.353.300,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman	100 %		100 %	413.078.100,00
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Kwalitas Kawasan Permukiman Kumuh	-		100 %	413.078.100,00
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			9 Unit Rumah	413.078.100,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %		100 %	4.167.192.250,00
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	4.167.192.250,00
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			30 Unit Rumah	4.167.192.250,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %		100 %	6.763.820.300,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	-		100 %	6.763.820.300,00
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			21 Lokasi	6.763.820.300,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					586.354.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					586.354.800,00
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %		100 %	11.564.800,00
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-		100 %	11.564.800,00
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Berita Acara	11.564.800,00
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %		100 %	574.790.000,00
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			574.790.000,00
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	574.790.000,00
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					6.897.672.474,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.897.672.474,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.897.672.474,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	6.101.473.574,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	15.767.500,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	15.767.500,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	3.438.102.389,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan	3.397.358.189,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 Dokumen	40.744.200,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	654.304.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	14.154.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	552.960.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	10.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	77.190.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	405.810.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	376.678.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	29.132.800,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.371.039.485,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	20.856.285,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.350.183.200,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	216.449.400,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	216.449.400,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	359.760.600,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	283.498.600,00
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			1 Dokumen	33.599.000,00
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			75 Orang	51.899.600,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	JumlahLaporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			12 laporan	198.000.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		-	76.262.000,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNSPenegak Perda			2 Laporan	76.262.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-		-	436.438.300,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	389.683.500,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			1 Dokumen	159.012.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			6 Unit	230.671.500,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-		-	46.754.800,00
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			13 Desa/Kelurahan	46.754.800,00
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					3.969.102.471,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.969.102.471,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.969.102.471,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100 % 6 Dokumen	3.204.574.471,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	-		6 Dokumen	19.851.400,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	19.851.400,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.422.151.803,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang/bulan	2.339.362.603,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	82.789.200,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	218.929.500,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.976.600,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 Paket	12.952.900,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	14.920.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	13.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	174.080.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	34.343.400,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	11.924.800,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	22.418.600,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	64.497.768,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	34.960.608,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	29.537.160,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	444.800.600,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	419.961.200,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	10.800.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	14.039.400,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-		-	764.528.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-		-	265.719.200,00
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			400 Orang	110.060.000,00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1 Dokumen	155.659.200,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		-	348.809.100,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			3 Dokumen	199.999.800,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100 Orang	148.809.300,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		-	149.999.700,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			12 Kegiatan	149.999.700,00
					DINAS SOSIAL					5.495.558.342,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.495.558.342,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.495.558.342,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	3.809.481.432,00
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	15.029.200,00
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	15.029.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	2.489.962.912,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/bulan	2.436.562.912,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4 Dokumen	53.400.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	189.729.913,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.563.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	23.137.600,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	15.950.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	21.249.313,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	840.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	123.990.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		0 UNIT	65.890.200,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	19.915.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	45.975.200,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	921.397.707,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1.150.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	36.772.067,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	883.475.640,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	127.471.500,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5 Unit	102.161.400,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11 Unit	9.250.000,00
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8 Unit	16.060.100,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Bekerja Sama dalam Penanganan PPKS	100 %		100 %	404.751.500,00
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			5.684.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			10 Dokumen	5.684.800,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	-		71,24 %	399.066.700,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			21 Orang	36.786.300,00
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			70 Keluarga	58.890.600,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Lembaga	303.389.800,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 %		100 %	28.216.100,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	-		100 %	28.216.100,00
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Orang	28.216.100,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %		100 %	536.094.310,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	-		2,56 %	536.094.310,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	75.858.500,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Orang	51.949.500,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			300 Orang	8.574.700,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			355 Orang	296.665.710,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			50 Orang	22.778.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	62.667.700,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Orang	17.600.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %		100 %	561.649.300,00
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-		100 %	21.431.100,00
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			75 Orang	21.431.100,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-		100 %	540.218.200,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			34673 Keluarga	370.218.600,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			48924 Keluarga	169.999.600,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan	100 %		100 %	135.399.100,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	-		100 %	135.399.100,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			54 Orang	135.399.100,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-		-	19.966.600,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-		-	19.966.600,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			2 Makam	19.966.600,00
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					7.949.899.498,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.829.698.398,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.829.698.398,00
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.125.859.024,00
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	37.280.900,00
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	37.280.900,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.793.393.044,00
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	2.749.320.044,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7 Dokumen	44.073.000,00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	89.288.900,00
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			35 Paket	16.498.900,00
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	15.390.000,00
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			16 Paket	15.000.000,00
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5 Laporan	42.400.000,00
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	16.956.200,00
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	16.956.200,00
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	118.999.980,00
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	39.000.000,00
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	79.999.980,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	43.000.000,00
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	40.000.000,00
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit	3.000.000,00
2	07	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	26.940.000,00
2	07	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			12 Dokumen	26.940.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-		-	4.436.526.500,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-		-	4.370.281.900,00
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			64 Orang	4.195.282.400,00
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			7 Lembaga	174.999.500,00
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-		-	16.666.600,00
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			10 Lembaga	16.666.600,00
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-		-	49.578.000,00
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			35 Perusahaan	49.578.000,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-		-	192.313.574,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	120.499.674,00
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			75 Orang	20.500.000,00
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			40 Orang	99.999.674,00
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-		-	30.284.200,00
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			1 Dokumen	9.860.000,00
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			50 Orang	9.999.300,00
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			50 Orang	10.424.900,00
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	41.529.700,00
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			25 Orang	24.079.800,00
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			20 Orang	17.449.900,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-		-	74.999.300,00
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	19.999.700,00
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			5 Laporan	19.999.700,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	54.999.600,00
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			10 Perkara	24.999.800,00
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			30 Perkara	29.999.800,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					120.201.100,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					120.201.100,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-		-	31.895.200,00
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	31.895.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5 Laporan	25.965.200,00
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			2 Lokasi	5.930.000,00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-		-	88.305.900,00
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-		-	88.305.900,00
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			20 Kepala Keluarga	88.305.900,00
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.008.321.889,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.008.321.889,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					572.922.700,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	100 Indeks		100 Indeks	47.499.900,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Pemahaman dan Koordinasi antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-		100 % 100 %	47.499.900,00
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			10 Lembaga	15.500.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			40 Orang	31.999.900,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan	100 %		100 %	403.577.300,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapat Advokasi dan sosialisasi Kebijakan Program dan koordinasi LintasSektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-		100 %	30.000.400,00
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Perangkat Daerah	30.000.400,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	-		100 %	58.582.800,00
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			30 Orang	28.582.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Layanan	30.000.000,00
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan tingkat Kab/kota	-		100 %	314.994.100,00
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	314.994.100,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	100 %		100 %	41.546.700,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Kepala Keluarga Miskin Perempuan	-		100 %	41.546.700,00
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			21 Perangkat Daerah	41.546.700,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100 %		100 %	42.999.200,00
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	-		100 %	42.999.200,00
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			20 Organisasi	42.999.200,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus terhadap anak	100 %		100 %	37.299.600,00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan program dan koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan lingkup daerah kabupaten	-		100 %	37.299.600,00
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu			10 Kegiatan	37.299.600,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.435.399.189,00
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	4.114.319.175,00
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		100 %	6.913.100,00
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	6.913.100,00
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	-		100 %	3.637.757.365,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	3.552.252.165,00
2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	85.505.200,00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	163.909.300,00
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	65.184.900,00
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	19.500.000,00
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	9.074.400,00
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	70.150.000,00
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		100 %	113.024.310,00
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	39.637.230,00
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	73.387.080,00
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		100 %	192.715.100,00
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			40 Unit	85.975.000,00
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.350.000,00
2	14	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	105.390.100,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	100 %		100 %	96.000.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lokasi Pendataan Pengelolaan Datadn Informasi KB	-		100 %	96.000.000,00
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			1 Dokumen	96.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	100 %		100 %	3.718.911.514,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	-		100 %	1.020.334.550,00
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			1 Dokumen	579.999.600,00
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			21 Organisasi	440.334.950,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD /Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK Cakupan PPKBD/Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK	-		100 % 100 %	928.758.872,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			640 Orang	928.758.872,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan serta Pelaksanaan dan Pelayanan KB	-		100 %	1.769.818.092,00
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	108.961.600,00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			3811 Orang	1.500.000.200,00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			10 Unit	160.856.292,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan kualitas keluarga (KS)	100 %		100 %	2.506.168.500,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru	-		100 %	2.506.168.500,00
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			1 Laporan	2.506.168.500,00
					DINAS KETAHANAN PANGAN					4.181.570.787,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.181.570.787,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.181.570.787,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		100 %	2.675.604.457,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		13 Laporan	14.904.000,00
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13 Laporan	14.904.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	-		100 %	2.423.116.841,00
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19 Orang/bulan	2.368.105.241,00
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	55.011.600,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	-		100 %	93.359.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	15.129.300,00
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	5.000.000,00
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	4.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	69.230.000,00
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	26.400.800,00
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	26.400.800,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	-		36 Laporan	44.852.116,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	18.597.156,00
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	26.254.960,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		25 Unit	72.971.400,00
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	66.971.100,00
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	1.000.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	5.000.300,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	1.351.194.400,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	-		53 %	61.611.500,00
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan			4 Unit	17.470.000,00
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			3 Laporan	14.349.800,00
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis			2 Laporan	21.126.900,00
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			1 Dokumen	8.664.800,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Daerah Yang Dikelola	-		35 %	306.980.000,00
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			16,6 Ton	306.980.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	-		100 %	982.602.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			1 Dokumen	18.382.000,00
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			3 Laporan	940.158.500,00
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			1 Laporan	24.062.400,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100 %		100 %	56.534.800,00
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan	-		1 Dokumen	31.970.000,00
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			1 Dokumen	31.970.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	-		100 %	24.564.800,00
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizikabupaten/kota			12 Laporan	24.564.800,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %		100 %	98.237.130,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	98.237.130,00
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	53.467.600,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			1 Dokumen	44.769.530,00
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP					12.189.158.990,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.189.158.990,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					12.189.158.990,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	100 %		100 %	3.809.407.850,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	-		100 %	12.072.100,00
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	318.800,00
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	318.800,00
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	318.800,00
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	318.800,00
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	318.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	10.478.100,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	-		100 %	3.323.323.338,00
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 / 12 Orang/bulan	3.229.102.938,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	37.392.000,00
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7 Dokumen	56.828.400,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	-		100 %	102.637.400,00
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			35 Paket	24.837.400,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	12.600.000,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5 Laporan	65.200.000,00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	-		100 %	82.659.100,00
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	43.873.400,00
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	38.785.700,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	-		100 %	170.788.912,00
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	34.899.512,00
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	135.889.400,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DLH	-		100 %	117.927.000,00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	115.877.000,00
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	2.050.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%		100 %	24.999.500,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	-		1 Dokumen	24.999.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			12 Dokumen	24.999.500,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	239.526.560,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-		100 %	185.354.560,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			12 Dokumen Dokumen	185.354.560,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-		60 Laporan	54.172.000,00
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			60 Laporan	54.172.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %		100 %	1.750.865.040,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		70 dan 0,6108 Anakan dan Ha	1.750.865.040,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			0,6108 Ha	938.796.340,00
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			4 Orang	56.880.000,00
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			7 Unit	400.000.000,00
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Unit	355.188.700,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	100 %		100 %	24.687.900,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	-		100 %	24.687.900,00
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			1 Dokumen	24.687.900,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %		100 %	56.828.200,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		60 Usaha dan/atau kegiatan	56.828.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			55 Badan Usaha	56.828.200,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	330.943.300,00
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		12 Kelompok	330.943.300,00
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			11 Dokumen	211.246.300,00
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			12 Orang	80.943.100,00
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			2 Lembaga	38.753.900,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	51.830.500,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota	-		25 Kasus	51.830.500,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			25 Pengaduan	39.390.900,00
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota			15 Perkara	12.439.600,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100 %		100 %	5.900.070.140,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani	-		81,08 %	5.900.070.140,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			28 Kelompok	41.227.400,00
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			4 Unit	1.768.304.700,00
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			15.350,4 Ton	4.090.538.040,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.986.099.656,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.986.099.656,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.986.099.656,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	4.831.175.002,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	31.800.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			22 Laporan	31.800.000,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	3.844.288.412,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	3.713.950.412,00
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	130.338.000,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	13.580.000,00
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1 Orang	13.580.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	128.243.200,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			691 Paket	43.698.800,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			600 Paket	27.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			25637 Paket	10.259.600,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	47.284.800,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	569.038.790,00
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20 Laporan	3.483.600,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	115.896.010,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	449.659.180,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	244.224.600,00
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	29.970.100,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	15.700.000,00
2	12	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	198.554.500,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-		-	275.858.700,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	257.762.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			1 Dokumen	5.090.000,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			1 Dokumen	97.437.500,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			4 Laporan	155.234.800,00
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	9.496.800,00
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			7 Dokumen	9.496.800,00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	8.599.600,00
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	8.599.600,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-		-	188.686.800,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-		-	125.862.600,00
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			6 Dokumen	9.999.700,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			6 Layanan	110.852.900,00
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			1150 Dokumen	5.010.000,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	62.824.200,00
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			2 Laporan	6.055.000,00
2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			2 Laporan	3.070.000,00
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			2 Laporan	6.760.000,00
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			56 Laporan	39.233.600,00
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			6 Laporan	7.705.600,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-		-	667.407.154,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-		-	548.491.254,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			12 Dokumen	482.909.754,00
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			15 Dokumen	48.758.400,00
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			1 Laporan	16.823.100,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-		-	54.158.000,00
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 Laporan	10.917.500,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 Laporan	33.338.000,00
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan			1 Dokumen	9.902.500,00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-		-	64.757.900,00
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			62 Laporan	29.613.200,00
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			6 Laporan	35.144.700,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-		-	22.972.000,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-		-	22.972.000,00
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	5.500.000,00
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			1 Dokumen	17.472.000,00
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.217.203.951,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.217.203.951,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.217.203.951,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.070.987.801,00
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	24.769.500,00
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	24.769.500,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.538.646.715,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang/bulan	2.460.046.715,00
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	78.600.000,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	212.764.400,00
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.998.400,00
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	39.996.000,00
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	30.780.000,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	30.000.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6 Laporan	109.990.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	57.169.200,00
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	57.169.200,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	168.990.186,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	23.757.806,00
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	7.300.000,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	137.932.380,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	68.647.800,00
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	55.465.600,00
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1.050.200,00
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	4.952.000,00
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	5.000.000,00
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2.180.000,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-		-	50.000.000,00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-		-	50.000.000,00
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			10 Desa	50.000.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	2.895.084.400,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-		-	2.895.084.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			918 Dokumen	49.999.900,00
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			2 Dokumen	266.085.200,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			181 Dokumen	123.999.700,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			181 Dokumen	124.999.800,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			132 Laporan	2.329.999.800,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-		-	201.131.750,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	201.131.750,00
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			30 Dokumen	71.131.900,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			23 Dokumen	129.999.850,00
					DINAS PERHUBUNGAN					10.325.543.009,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.325.543.009,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					10.325.543.009,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	100 %		100 %	5.401.191.394,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	-		100 %	25.382.200,00
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	11.869.200,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Dok Laporan	13.513.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	-		100 %	3.498.913.328,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	3.429.013.328,00
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	69.900.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	28.970.000,00
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	28.970.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi Umum Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	-		100 %	328.140.700,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.115.300,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	55.289.800,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	17.900.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	33.045.600,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	216.790.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan yang diadakan	-		2 unit	669.030.200,00
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	639.556.000,00
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			26 Unit	29.474.200,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terbayarkan	-		100 %	592.264.766,00
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			40 Laporan	2.000.000,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	75.321.286,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	514.943.480,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	258.490.200,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			13 Unit	256.890.200,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	1.600.000,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	0,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah PenyelenggaraLalulintas Angkutan Jalan yang Dilaksanakan	100 %		100 %	4.786.523.549,00
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Induk LLAJ	-		0 dok	84.704.600,00
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0,00
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Dokumen	84.704.600,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten/kota	-		100 %	3.829.212.329,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			40 Unit	2.563.156.732,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			1389 Unit	1.266.055.597,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang terpelihara	-		2 unit	71.158.600,00
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			2 Unit	71.158.600,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Porsentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-		100 %	461.471.820,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			24 Laporan	461.471.820,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan wajib Uji	-		100 %	189.787.100,00
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2000 Dokumen	0,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			9 Unit	189.787.100,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-		35 kali	90.433.600,00
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			6 Laporan	90.433.600,00
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase berkurangnya pelanggaran berlalulintas	-		100 %	28.649.000,00
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			1 Laporan	28.649.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersediannya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang	-		100 %	31.106.500,00
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	31.106.500,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pertumbuhan Penumpang pada Lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota	100 %		100 %	137.828.066,00
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintasan yang di tetapkan	-		5 lintasan	137.828.066,00
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	137.828.066,00
X					NON URUSAN					0,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					0,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	0,00
X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	0,00
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.671.246.714,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.671.246.714,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.303.813.614,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	100%		100 %	3.870.884.214,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	-		6 Dok	24.143.900,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	0,00
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	24.143.900,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	-		12 Bulan	2.860.741.605,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	2.786.528.505,00
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			8 Dokumen	36.961.200,00
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15 Dokumen	37.251.900,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	-		0 %	0,00
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	0,00
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang	0,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	-		100 %	220.084.500,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.971.100,00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	144.894.400,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.600.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	6.924.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0 Dokumen	0,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Laporan	60.695.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	-		0 %	199.517.300,00
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0 Unit	0,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 Unit	0,00
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	199.517.300,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	-		100 %	507.705.909,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6 Laporan	1.160.000,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	198.291.789,00
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Laporan	12.858.000,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	295.396.120,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	-		100 %	58.691.000,00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	32.940.000,00
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 Unit	0,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	18.450.000,00
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	7.301.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	5 Media		5 Media	254.043.400,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-		5 Media	254.043.400,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			1 Laporan	65.651.100,00
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			10 Komunitas	48.560.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			1 Permohonan	15.383.600,00
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			1 Rekomendasi	31.941.800,00
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			5 Media	61.333.000,00
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun			1 Dokumen	21.073.300,00
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik			0 Konten	0,00
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan			15 Orang	10.099.800,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Aplikasi Berbasis SPBE	53,3 %		53,3 %	178.886.000,00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain	-		0 Dok	0,00
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			0 Dokumen	0,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	-		2 OPD	178.886.000,00
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			1 Laporan	40.983.800,00
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			13 Aplikasi	137.902.200,00
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			0 Perangkat Daerah	0,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					235.344.000,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	235.344.000,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan data satatistik sektoral di setiap OPD	-		100 %	235.344.000,00
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik			102 Orang	51.243.300,00
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan			100 Persentase	57.295.500,00
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			50 Persentase	75.387.600,00
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadada			1 Dokumen	17.446.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik			3 Dokumen	33.971.300,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					132.089.100,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Data dan Konten Informasi Pemerintah Daerah yang Tersedia	70 %		70 %	132.089.100,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	-		70 %	132.089.100,00
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			1 Dokumen	12.712.200,00
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	71.591.600,00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	31.528.000,00
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			7 Perangkat Daerah	16.257.300,00
					DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					10.377.836.662,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					872.527.500,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					872.527.500,00
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-		-	24.953.900,00
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	18.027.800,00
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			40 Unit Usaha	18.027.800,00
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	6.926.100,00
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			12 Unit Usaha	6.926.100,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-		-	81.458.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	81.458.200,00
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			40 Unit Usaha	81.458.200,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-		-	0,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	0,00
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			40 Orang	0,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-		-	472.101.700,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-		-	472.101.700,00
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			50 Unit Usaha	38.082.700,00
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			100 Unit Usaha	101.609.900,00
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			680 Unit Usaha	253.639.500,00
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			8 Unit Usaha	34.183.800,00
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			45 Orang	44.585.800,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-		-	294.013.700,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-		-	294.013.700,00
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi			170 Orang	124.572.200,00
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			50 Unit Usaha	169.441.500,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.505.309.162,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.795.349.662,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	6.059.922.462,00
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	61.748.500,00
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16 Dokumen	51.748.500,00
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6 Dokumen	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	4.223.608.034,00
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Orang/bulan	4.152.214.034,00
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	71.394.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	131.556.500,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			60 Paket	59.986.500,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60 Paket	4.995.000,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	12.600.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6 Laporan	53.975.000,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.493.011.928,00
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	132.942.328,00
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.360.069.600,00
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	149.997.500,00
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 Unit	149.997.500,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-		-	2.362.188.200,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-		-	2.172.555.000,00
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			2 Unit	2.172.555.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-		-	189.633.200,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			12 Dokumen	189.633.200,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-		-	127.837.500,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		-	127.837.500,00
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			12 Laporan	56.971.300,00
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			12 Laporan	20.871.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			12 Laporan	49.994.800,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-		-	245.401.500,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-		-	245.401.500,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			12 Unit	133.339.000,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			50 Orang	112.062.500,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					709.959.500,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-		-	709.959.500,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-		-	709.959.500,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	709.959.500,00
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					5.792.857.952,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.792.857.952,00
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.792.857.952,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPMPSTP	100 %		100 %	4.884.430.084,00
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	-		100 %	160.084.970,00
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	125.084.970,00
2	18	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			1 Dokumen	35.000.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-		100 %	3.073.164.362,00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 Orang/bulan	2.974.914.362,00
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	98.250.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	74.360.000,00
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	74.360.000,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentaseadministrasi umumyang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	-		100 %	224.334.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.824.400,00
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	21.200.200,00
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	5.628.400,00
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	25.950.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15.000.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	151.731.800,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasepengadaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	-		0 %	590.666.900,00
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			71 Unit	590.666.900,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	-		100 %	428.432.361,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	307.159.121,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	121.273.240,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	-		100 %	259.286.691,00
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	47.742.691,00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			57 Unit	25.900.000,00
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	185.644.000,00
2	18	01	2.13		Penataan Organisasi	Presentase terlaksananya penataan organisasi	-		100 %	74.100.000,00
2	18	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			12 Dokumen	74.100.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi	-		100 %	44.999.800,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang di fasilitasi / insentif di bidang Penanaman Modal	-		15 Investor	44.999.800,00
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			35 Dokumen	44.999.800,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100 %		100 %	48.998.460,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	-		100 %	48.998.460,00
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			1 Dokumen	48.998.460,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jenis Ijin yang diterbitkan	30 Ijin		30 Ijin	88.052.748,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	-		100 %	88.052.748,00
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2250 Pelaku Usaha	46.999.748,00
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			6 Pelaku Usaha	41.053.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	40 %		40 %	596.141.880,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-		100 %	596.141.880,00
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			13 Kegiatan Usaha.	87.771.000,00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			60 Pelaku Usaha	321.831.750,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			35 Kegiatan Usaha	186.539.130,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin yang sesuai standar	100 %		100 %	130.234.980,00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	-		100 %	130.234.980,00
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			3 Dokumen	130.234.980,00
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					4.747.108.003,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.747.108.003,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					860.352.200,00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-		-	860.352.200,00
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	531.391.100,00
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			23 Perpustakaan	174.555.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			19 Perpustakaan	19.999.800,00
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30 Orang	95.660.300,00
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan			2 Dokumen	41.077.700,00
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			4000 Eksemplar	140.200.000,00
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			100 Eksemplar	30.000.000,00
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK			4 Perpustakaan	29.898.300,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	328.961.100,00
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya			1 Orang	166.504.500,00
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan			17 Perpustakaan	81.755.200,00
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			400 Orang	9.999.800,00
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			84 Lokus	70.701.600,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.886.755.803,00
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.269.848.003,00
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	18.720.000,00
2	24	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	18.720.000,00
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.914.763.099,00
2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	2.846.857.899,00
2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	67.905.200,00
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	94.836.100,00
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.996.800,00
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	17.447.000,00
2	24	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	6.468.300,00
2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15.124.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	840.000,00
2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18 Laporan	49.960.000,00
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	182.201.604,00
2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	84.352.164,00
2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	97.849.440,00
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	59.327.200,00
2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	52.827.200,00
2	24	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			16 Unit	6.500.000,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-		-	563.748.600,00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	274.351.800,00
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			1000 Berkas	69.368.100,00
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			1240 Berkas	74.431.300,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			68 Laporan	130.552.400,00
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	6.450.000,00
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			3 Arsip	6.450.000,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-		-	282.946.800,00
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			3 Laporan	282.946.800,00
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-		-	53.159.200,00
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-		-	25.812.300,00
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			100 Berkas	11.418.700,00
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			100 Arsip	14.393.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-		-	27.346.900,00
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			3 Daftar	27.346.900,00
					DINASPERIKANAN					21.205.724.985,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					21.205.724.985,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN					21.205.724.985,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusanpemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	100 %		100 %	5.315.667.185,00
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	-		12 Laporan	30.000.000,00
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	30.000.000,00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasikeuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	-		12 dokumen	2.897.874.440,00
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			29 Orang/bulan	2.827.874.440,00
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	70.000.000,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah	-		3 kegiatan	130.979.100,00
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	24.999.100,00
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	20.000.000,00
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13 Laporan	85.980.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatanpenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		3 kegiatan	2.154.821.145,00
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.085.991.485,00
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	3.830.700,00
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.064.998.960,00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		2 kegiatan	101.992.500,00
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	94.998.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	6.994.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	100 %		100 %	14.873.781.900,00
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan	-		130 Orang	14.873.781.900,00
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			150 Orang	14.873.781.900,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %		100 %	38.467.400,00
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		3 kelompok	38.467.400,00
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			3 Kelompok	38.467.400,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 %		100 %	977.808.500,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pabrik es yang mendukung ketersediaan ikan	-		3 unit	977.808.500,00
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 Ton	977.808.500,00
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					8.320.267.447,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.417.074.900,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.417.074.900,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	70 persen		70 persen	1.233.554.900,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	-		100 persen	67.259.700,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			2 Objek	45.884.700,00
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			30 Orang	21.375.000,00
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	-		100 persen	1.166.295.200,00
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			4 Objek	884.686.600,00
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			5 Laporan	281.608.600,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %		100 %	183.520.000,00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	-		100 persen	183.520.000,00
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			1 Objek	82.080.000,00
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			16 Objek	101.440.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					6.903.192.547,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.903.192.547,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	100 %		100 %	4.073.751.563,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	-		100 persen	22.500.000,00
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	22.500.000,00
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	-		100 persen	3.587.238.064,00
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/bulan	3.535.161.664,00
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10 Dokumen	48.315.000,00
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	3.761.400,00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	-		100 persen	107.725.900,00
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	2.549.700,00
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	8.571.200,00
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	7.050.000,00
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	10.000.000,00
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	79.555.000,00
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	-		100 persen	39.654.200,00
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	12.420.500,00
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	27.233.700,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	259.722.399,00
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6 Laporan	230.000,00
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	81.046.879,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	178.445.520,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	56.911.000,00
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	47.881.300,00
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	3.000.000,00
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	6.029.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	90 %		90 %	1.276.673.914,00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	-		100 persen	52.065.330,00
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 Lokasi	52.065.330,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikelola	-		100 persen	1.158.183.404,00
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Dokumen	64.349.960,00
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			4 Lokasi	123.397.320,00
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			5 Unit	365.908.250,00
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4 Laporan	604.527.874,00
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-		100 persen	66.425.180,00
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi			348 Usaha	66.425.180,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan Jaringan dan Metode Pemasaran Pariwisata	85 %		85 %	149.539.750,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	-		100 persen	149.539.750,00
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Dokumen	85.493.250,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Kegiatan	52.423.100,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			5 Promosi	11.623.400,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	80 %		80 %	1.403.227.320,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-		100 persen	663.768.810,00
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			83 Orang	286.512.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			90 Orang	260.296.500,00
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			600 Orang	116.960.310,00
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	739.458.510,00
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			250 Orang	739.458.510,00
					DINAS PERTANIAN					28.101.003.948,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					28.101.003.948,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					28.101.003.948,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100 %	20.026.516.588,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		100 %	92.883.700,00
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	34.223.700,00
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	58.660.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan keuangan perangkat daerah	-		100 %	18.163.518.713,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			282 Orang/bulan	18.059.823.163,00
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	103.695.550,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase peningkatan pelayanan umum perangkat daerah	-		100 %	115.437.500,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	15.237.500,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	20.200.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Laporan	80.000.000,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	46.758.400,00
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			9 Unit	7.681.500,00
3	27	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			7 Unit	39.076.900,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa penunjang umum pemerintah daerah Presentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	1.439.772.885,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	95.091.015,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.344.681.870,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	168.145.390,00
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	154.667.390,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	3.978.000,00
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			40 Unit	9.500.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %		100 %	5.402.636.800,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-		186.365,92 Ton/Ha/Tahun	1.448.398.200,00
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			7 Laporan	424.314.800,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			2 Laporan	1.024.083.400,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), tumbuhan dan mikororganisme kewenangan Kabupaten / Kota Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), Tumbuhan dan Mikororganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 % 100 %	3.954.238.600,00
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			2 Dokumen	3.367.939.900,00
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			2 Varietas Unggul Baru (VUB)	586.298.700,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %		100 %	1.652.619.200,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-		1000 %	1.652.619.200,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			1 Laporan	1.652.619.200,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %		100 %	403.870.860,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		100 %	403.870.860,00
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan			21 Wilayah	207.260.480,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewanmenular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			21 Laporan	196.610.380,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap Petani	100 %		100 %	615.360.500,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	-		100 %	615.360.500,00
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			200 Unit	447.494.600,00
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			2 Unit	167.865.900,00
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					1.285.757.411,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.285.757.411,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					1.285.757.411,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi	100% 100% 100% 100%		100 %	1.285.757.411,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	42.920.920,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	42.920.920,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	900.232.200,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	8.047.600,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	111.700.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	10.720.600,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	769.764.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	44.137.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	44.137.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	85.338.191,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	11.951.111,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	73.387.080,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	69.342.100,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			2 Unit	68.842.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	2 Unit	500.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	10.500.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4 Orang	10.500.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	133.287.000,00
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	12 Laporan	44.655.000,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	12 Laporan	88.632.000,00
					BAGIAN PEMERINTAHAN					345.709.200,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					345.709.200,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					345.709.200,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	236.735.900,00
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	72.123.000,00
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	6 Laporan	72.123.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	25.339.700,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	12 Dokumen	25.339.700,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	103.742.300,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12 Paket	103.742.300,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	7.860.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Laporan	7.860.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	27.670.900,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	2 Unit	27.670.900,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	108.973.300,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	61.509.400,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	1 Dokumen	61.509.400,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	47.463.900,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	12 Dokumen	47.463.900,00
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.996.518.760,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					5.996.518.760,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					5.996.518.760,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	265.322.360,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	34.602.600,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	34.602.600,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	78.626.800,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	8.339.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	6.547.800,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6 Laporan	63.740.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	7.860.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7.860.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	94.257.960,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit	1.600.000,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	87.157.960,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit	5.500.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	49.975.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Laporan	49.975.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-		-	5.731.196.400,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-		-	5.731.196.400,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12 Dokumen	3.195.418.000,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			3 Dokumen	130.702.600,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			24 Dokumen	2.405.075.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					590.372.160,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					590.372.160,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					590.372.160,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	226.978.560,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	24.650.500,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 bulan Dokumen	24.650.500,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	60.624.100,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100% Paket	7.123.700,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 bulan Paket	2.750.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 bulan Paket	6.394.400,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 laporan Laporan	44.356.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	91.243.260,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 bulan Laporan	62.478.000,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 bulan Laporan	28.765.260,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	50.460.700,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	45.260.700,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	5.200.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	363.393.600,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-		-	363.393.600,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			2 dokumen Dokumen	24.439.500,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12 bulan Laporan	269.400.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12 laporan Laporan	69.554.100,00
					BAGIAN PEREKONOMIAN					572.691.900,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					572.691.900,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					572.691.900,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	183.323.100,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	32.933.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	32.933.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	77.649.900,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.689.900,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.060.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	61.900.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	16.501.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	16.501.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	7.860.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7.860.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	48.379.200,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	44.979.200,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit	3.400.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	389.368.800,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-		-	389.368.800,00
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2 Dokumen	59.519.200,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			12 Laporan	279.849.800,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	49.999.800,00
					BAGIAN HUKUM					1.338.814.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.338.814.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					1.338.814.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	413.990.600,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	22.800.000,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36 Dokumen	22.800.000,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	125.000.000,00
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	125.000.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	44.106.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	12.571.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	31.535.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	169.915.500,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			61 Unit	158.389.500,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	11.526.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	9.360.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	9.360.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	42.809.100,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	37.799.100,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	5.010.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-		-	924.823.400,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		-	924.823.400,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			20 Dokumen	357.761.300,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			6 Kasus	404.142.200,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			20 Dokumen	162.919.900,00
					BAGIAN ORGANISASI					790.829.800,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					790.829.800,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					790.829.800,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	790.829.800,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	36.660.000,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5 Dokumen	36.660.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	67.940.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	12.010.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	55.930.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	19.994.600,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	19.994.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	39.333.300,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			13 Laporan	32.860.000,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Laporan	6.473.300,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	35.303.700,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	31.353.700,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	3.950.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	591.598.200,00
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			5 Dokumen	240.351.500,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Laporan	51.049.200,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	77.149.900,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3 Dokumen	144.898.000,00
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			7 Dokumen	78.149.600,00
					BAGIAN UMUM					10.619.384.616,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					10.619.384.616,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					10.619.384.616,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	10.619.384.616,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	172.082.900,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			24 Dokumen	172.082.900,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	24.999.400,00
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6 Dokumen	24.999.400,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	453.710.500,00
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	121.785.100,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	63.444.100,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	86.346.500,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	78.374.800,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			60 Dokumen	4.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	99.560.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	4.407.505.000,00
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 Unit	2.414.546.000,00
4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1.494.990.000,00
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			172 Unit	497.969.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.589.881.216,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	771.562.656,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 Laporan	1.818.318.560,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	747.680.900,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			22 Unit	542.578.600,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	18.323.000,00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	125.779.300,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	61.000.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		-	95.050.200,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			3 Paket	95.050.200,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-		-	2.128.474.500,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			3 Paket	1.136.905.700,00
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			5 Paket	991.568.800,00
					BAGIAN SUMBER DAYA ALAM					404.935.460,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					404.935.460,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					404.935.460,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	219.737.960,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	22.716.000,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	22.716.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	81.305.700,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	32.265.700,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan Laporan	49.040.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	50.074.300,00
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit Unit	30.501.800,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	19.572.500,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	7.810.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7.810.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	57.831.960,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	57.831.960,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	185.197.500,00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	185.197.500,00
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			3 Dokumen	61.870.000,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			2 Dokumen	62.160.000,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			2 Dokumen	61.167.500,00
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					741.541.360,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					741.541.360,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					741.541.360,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	394.301.360,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	22.470.600,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36 Dokumen	22.470.600,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	58.887.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	16.737.800,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 Laporan	37.150.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	36.586.700,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	36.586.700,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	244.859.560,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	214.547.200,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	30.312.360,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	31.496.700,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	24.296.700,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	7.200.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	347.240.000,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	347.240.000,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			12 Dokumen	208.095.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1 Dokumen	13.820.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			25 Orang	125.325.000,00
					BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					11.786.028.183,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					11.786.028.183,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					11.786.028.183,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	11.786.028.183,00
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	65.648.600,00
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	65.648.600,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	10.882.163.083,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			126 Orang/bulan	10.768.367.083,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	113.796.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	105.007.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	11.347.500,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	19.280.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	7.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16 Laporan	67.380.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	86.392.900,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	62.500.600,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	23.892.300,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	70.890.600,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	66.240.600,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	4.650.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		-	575.925.500,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	175.925.500,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	400.000.000,00
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					36.311.311.347,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					36.311.311.347,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD					36.311.311.347,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	27.519.936.507,00
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			160.704.800,00
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3Dokumen	43.790.800,00
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	116.914.000,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	2.894.611.205,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32 Orang/bulan	2.792.761.205,00
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	101.850.000,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 %	469.140.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12 Dokumen	203.040.000,00
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12 Orang	266.100.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	1.235.283.300,00
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	15.000.400,00
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	111.415.000,00
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	615.937.900,00
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	58.280.000,00
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	4.200.000,00
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Laporan	430.450.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		1 unit	202.986.800,00
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 Unit	0,00
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 Unit	0,00
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			71 Unit	202.986.800,00
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0,00
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0,00
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan JasaPenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	538.366.442,00
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	0,00
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	272.142.842,00
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	266.223.600,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	563.522.400,00
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	523.022.400,00
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 Unit	0,00
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	40.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	0,00
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	0,00
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	0,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-		100 %	17.866.696.760,00
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			35 Orang/Bulan	17.219.196.760,00
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			1 Paket	525.000.000,00
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			35 Orang	122.500.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase capaian kegiatan Layanan dan Administrasi DPRD	-		100 %	3.588.624.800,00
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			140 Laporan	2.312.729.800,00
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			3 Paket	1.275.895.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %		100 %	8.791.374.840,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	-		100 %	1.698.394.200,00
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			4 Dokumen	1.698.394.200,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	-		100 %	394.599.600,00
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	10.432.000,00
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1 Dokumen	192.172.000,00
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1 Dokumen	191.995.600,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-		100 %	4.032.931.040,00
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			3 Dokumen	3.716.369.800,00
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			9 Orang	279.561.240,00
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			1 Dokumen	37.000.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-		100 %	2.665.450.000,00
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			42 Laporan	329.610.000,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			35 Dokumen	2.335.840.000,00
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					13.295.786.322,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					13.295.786.322,00
5	01				PERENCANAAN					9.160.121.522,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	5.333.338.722,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	34.105.800,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	7.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	20.106.300,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	6.999.500,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	3.880.368.403,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan	3.784.663.503,00
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			260 Dokumen	95.704.900,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	8.534.100,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			95 Dokumen	8.534.100,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	410.827.550,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	10.996.350,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	59.999.700,00
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	116.252.700,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			15 Paket	30.231.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	50.002.800,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	143.345.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	-		100 %	98.821.000,00
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			19 Unit	98.821.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	684.118.259,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	267.352.579,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	416.765.680,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	216.563.610,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			19 Unit	97.170.440,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	5.455.600,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	51.924.070,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	50.013.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20 Unit	12.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-		-	2.424.127.700,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-		-	1.357.681.300,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			1 Berita Acara	25.118.600,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	322.549.700,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			105 Usulan	149.473.600,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			3 Dokumen	860.539.400,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-		-	79.543.100,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			1 Buku	79.543.100,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-		-	623.641.300,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			2 Laporan	398.216.700,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			5 Laporan	225.424.600,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-		-	363.262.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1 Dokumen	363.262.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-		-	1.402.655.100,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-		-	639.638.900,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			3 Dokumen	119.924.900,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			3 Laporan	19.472.600,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			3 Laporan	50.489.900,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	35.458.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			6 Dokumen	307.747.200,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			6 Laporan	35.383.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			6 Laporan	21.162.500,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	50.000.100,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-		-	380.534.400,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			7 Dokumen	41.845.300,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			2 Laporan	91.679.600,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1 Laporan	58.842.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	31.994.700,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	40.323.300,00
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			2 Laporan	27.641.400,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1 Laporan	57.812.600,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			1 Laporan	30.395.500,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-		-	382.481.800,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			5 Dokumen	86.414.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			5 Laporan	27.517.800,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			5 Laporan	65.517.700,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	35.916.300,00
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			34 Dokumen	44.410.300,00
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			34 Laporan	19.310.400,00
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			2 Laporan	58.574.800,00
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			1 Laporan	44.819.800,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.135.664.800,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-		-	4.135.664.800,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-		-	1.498.621.600,00
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			5 Laporan	994.936.100,00
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			2 Laporan	118.685.500,00
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			3 Laporan	195.000.000,00
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			7 Laporan	190.000.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-		-	775.000.000,00
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			1 Dokumen	200.000.000,00
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			1 Dokumen	575.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-		-	1.255.043.900,00
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			1 Dokumen	350.000.000,00
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			3 Dokumen	905.043.900,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-		-	606.999.300,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	333.999.300,00
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			1 Laporan	150.000.000,00
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	50.000.000,00
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			1 Laporan	43.000.000,00
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1 Laporan	30.000.000,00
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					62.496.969.492,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					62.311.004.492,00
5	02				KEUANGAN					62.311.004.492,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	57.470.611.672,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	39.000.000,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	39.000.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	56.270.581.282,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/bulan	55.839.075.782,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	271.505.600,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	144.999.900,00
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	15.000.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	20.000.000,00
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			50 Orang	20.000.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	150.997.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	14.997.900,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	70.000.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	65.999.800,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	18.307.100,00
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	18.307.100,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	840.927.214,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			108 Laporan	14.999.200,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	209.999.994,00
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	64.999.600,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	550.928.420,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	130.798.376,00
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			19 Unit	64.999.876,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			19 Unit	10.900.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	14.900.000,00
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	39.998.500,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	100 %		100 %	3.522.599.700,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	-		11365 Dokumen 222 Dokumen 222 Dokumen	1.844.999.800,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	99.999.900,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	99.999.900,00
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			50 Dokumen	70.000.000,00
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			50 Dokumen	70.000.000,00
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			50 Dokumen	80.000.000,00
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			50 Dokumen	80.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	620.000.000,00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	620.000.000,00
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			2 Dokumen	27.000.000,00
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			12 Dokumen	78.000.000,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-		-	567.099.900,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			950 Dokumen	185.000.000,00
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			9500 Dokumen	382.099.900,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-		-	1.110.500.000,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			18 Laporan	350.000.000,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			2 Laporan	460.500.000,00
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	300.000.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-		-	1.317.793.120,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-		-	1.317.793.120,00
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	192.793.700,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	129.999.700,00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			3 Laporan	274.000.000,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	0,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			70 Laporan	322.000.000,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			202 Dokumen	205.999.720,00
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			5 Laporan	193.000.000,00
X					NON URUSAN					185.965.000,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					185.965.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	185.965.000,00
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	185.965.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			86 Laporan	185.965.000,00
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)					243.740.236.248,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					243.740.236.248,00
5	02				KEUANGAN					243.740.236.248,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-		-	243.740.236.248,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		-	243.740.236.248,00
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			12 Laporan	10.368.852.331,00
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			12 Laporan	230.371.383.917,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 Laporan	3.000.000.000,00
					BADAN PENDAPATAN DAERAH					9.374.508.769,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.374.508.769,00
5	02				KEUANGAN					9.374.508.769,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	7.003.254.669,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-		12 Bulan	36.524.400,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	36.524.400,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	6.249.191.399,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			59 Orang/bulan	6.120.256.399,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	128.935.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN	-		100 %	35.010.000,00
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	35.010.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		1 Tahun	207.336.700,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 Paket	5.894.900,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			59 Paket	25.950.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			33 Paket	25.526.800,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan	149.965.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor	-		1 Tahun	20.200.000,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			25 Unit	3.130.000,00
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	6.828.000,00
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	10.242.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor	-		1 Tahun	391.049.170,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	747.500,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	83.718.410,00
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	136.812.400,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	169.770.860,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor	-		1 Tahun	63.943.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	51.019.300,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			39 Unit	11.150.000,00
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	1.773.700,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,89 %		10,89 %	2.371.254.100,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas PAD	-		100 %	2.371.254.100,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			4 Dokumen	34.827.600,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			4 Dokumen	87.622.100,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			9 Laporan	58.701.700,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			16 Unit	274.445.100,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			12 Laporan	392.792.100,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			12 Laporan	697.984.600,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			300 Obyek Pajak	124.545.500,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			12 Dokumen	79.999.500,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			12 Dokumen	349.909.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			12 Dokumen	28.121.800,00
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			12 Dokumen	142.305.500,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 Laporan	49.999.400,00
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			2 Laporan	50.000.000,00
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					6.480.167.328,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6.480.167.328,00
5	03				KEPEGAWAIAN					6.120.307.328,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.069.251.328,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	35.355.500,00
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5 Dokumen	14.999.800,00
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	20.355.700,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.701.197.804,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	2.657.698.004,00
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2 Dokumen	43.499.800,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	36.260.000,00
5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			296 Orang	36.260.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	133.482.500,00
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	998.100,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	19.989.400,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	15.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	12.000.000,00
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	840.000,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7 Laporan	84.655.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	49.962.100,00
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	49.962.100,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	49.997.264,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	19.997.304,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	29.999.960,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	62.996.160,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	60.996.160,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	1.000.000,00
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	1.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	100 %		100 %	3.051.056.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan, kompetensi manajerial dan fungsional	-		79 % 85 %	344.999.700,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1 Dokumen	324.999.700,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	20.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-		-	100.000.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Dokumen	100.000.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-		-	2.571.049.500,00
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			74 Orang	747.500.000,00
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			1 Dokumen	1.823.549.500,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-		-	35.006.800,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			5 Orang	14.445.400,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			2 Laporan	20.561.400,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					359.860.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-		-	359.860.000,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-		-	359.860.000,00
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			1 Dokumen	359.860.000,00
					INSPEKTORAT DAERAH					7.911.756.208,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.911.756.208,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH					7.911.756.208,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	5.807.038.108,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	35.968.800,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	21.000.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	14.968.800,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	3.880.167.378,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			44/14 Orang/bulan	3.841.227.978,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	4.739.400,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	34.200.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 %	1.185.300.489,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			44 Orang	709.995.639,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			212 Orang	475.304.850,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	67.902.100,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.816.600,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	8.803.500,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	1.350.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10000000 Paket	4.000.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	49.932.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan KebutuhanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	489.711.199,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			60 Unit	93.316.000,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			51 Unit	396.395.199,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	40.598.496,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	37.908.954,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.900.242,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	789.300,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	107.389.646,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	75.421.246,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.000.000,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	30.968.400,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100 %		100 %	1.223.687.300,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang disusun	-		100 %	1.030.174.500,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			4 Laporan	51.870.200,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			12 Laporan	103.594.600,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			9 Laporan	32.445.000,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			65 Laporan	136.800.500,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			70 Laporan	496.310.400,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			50 Dokumen	209.153.800,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan PenyelenggaraanPengawasanDengan Tujuan Tertentu yang disusun	-		100 %	193.512.800,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			27 Laporan	193.512.800,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100 %		100 %	881.030.800,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Yang Dirumuskan	-		100 %	395.235.500,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			152 Rekomendasi	135.814.100,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			6 Rekomendasi	259.421.400,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan Di Bidang Pengawasan yang di susun	-		100 %	485.795.300,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			232 perangkat daerah	485.795.300,00
					KELURAHAN MADAWAT					450.758.681,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					450.758.681,00
7	01				KECAMATAN					450.758.681,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD	100%		100 % 100 persentase	198.704.781,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	21.672.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	21.672.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	35.069.100,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	3.860.800,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7.538.300,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.400.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	6.340.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12.930.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	19.061.500,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	19.061.500,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	109.264.940,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9.902.400,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	99.362.540,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	13.637.241,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	6.924.232,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	6.213.009,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		100 %	24.984.700,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	24.984.700,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12Laporan	24.984.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	227.069.200,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	227.069.200,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12 Lembaga Kemasyarakatan	8.540.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	12.404.200,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5 Pokmas / Ormas	198.585.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	7.540.000,00
					KELURAHAN KABOR					450.904.840,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					450.904.840,00
7	01				KECAMATAN					450.904.840,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD	100%		100 % 100 persentase	225.815.240,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	19.680.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	19.680.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	44.227.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7.371.200,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	8.525.800,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	25.330.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	32.435.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	19.915.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100 Unit	12.520.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	113.049.240,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	15.199.800,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	97.849.440,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	16.424.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	14.274.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	2.150.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		100 %	25.090.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	25.090.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	25.090.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	199.999.600,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	199.999.600,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10 Lembaga Kemasyarakatan	5.480.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			6 Unit	15.729.600,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	164.650.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			15 Laporan	14.140.000,00
					KELURAHAN NANGALIMANG					406.246.770,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					406.246.770,00
7	01				KECAMATAN					406.246.770,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD	100%		100 % 100 persentase	187.325.770,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	20.280.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	20.280.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	46.431.100,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	750.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	37.358.500,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	998.800,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2.328.800,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	4.995.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	31.330.300,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	31.330.300,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	82.940.960,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	9.553.880,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36 Laporan	73.387.080,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	6.343.410,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	6.343.410,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		100 %	11.221.800,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaseKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	11.221.800,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	11.221.800,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	207.699.200,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	207.699.200,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10 Lembaga Kemasyarakatan	7.699.400,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	12.322.800,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	187.677.000,00
					KELURAHAN KOTA UNENG					439.467.608,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					439.467.608,00
7	01				KECAMATAN					439.467.608,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	155.877.908,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	20.280.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	20.280.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	20.175.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	499.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.874.600,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.937.800,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	8.862.800,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	20.505.400,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	20.505.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	89.417.208,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	16.030.128,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	73.387.080,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	5.500.300,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	5.000.300,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	11.989.700,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	11.989.700,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			100 Laporan	11.989.700,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	271.600.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	269.270.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			100 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	216.600.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			132 Laporan	47.670.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	2.330.000,00
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			1 Unit	2.330.000,00
					KELURAHAN WURING					456.922.660,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					456.922.660,00
7	01				KECAMATAN					456.922.660,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	189.366.660,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	-		100 Persentase	32.250.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	32.250.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	-		100 Persentase	35.634.900,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	799.600,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	14.381.900,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.453.400,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	15.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	19.696.200,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	19.696.200,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	84.542.160,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	684.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	10.471.080,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	73.387.080,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	17.243.400,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	15.593.400,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	1.650.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase		100 Persentase	36.400.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100 Persentase	36.400.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			150 Laporan	36.400.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase		100 Persentase	231.156.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 Persentase	231.156.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			100 Lembaga Kemasyarakatan	10.850.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			30 Unit	3.756.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			156 Pokmas / Ormas	216.550.000,00
					KELURAHAN HEWULI					391.700.768,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					391.700.768,00
7	01				KECAMATAN					391.700.768,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	124.248.168,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	-		100 Persentase	18.819.800,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			24 Dokumen Dokumen	18.819.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	-		100 Persentase	13.519.900,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 Paket	1.006.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	7.363.900,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	5.150.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	30.412.900,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	30.412.900,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	57.715.168,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	8.790.448,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	48.924.720,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	3.780.400,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	2.480.400,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	1.300.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase		100 Persentase	267.452.600,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 Persentase	267.452.600,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5 Lembaga Kemasyarakatan	7.514.600,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	15.197.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			115 Pokmas / Ormas	223.446.200,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			35 Laporan	21.294.200,00
					KELURAHAN WAILITI					397.227.420,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					397.227.420,00
7	01				KECAMATAN					397.227.420,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	167.774.920,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	-		100 Persentase	32.925.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen	32.925.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	-		100 Persentase	49.596.800,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	2.987.100,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	34.762.100,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			15 Paket	5.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	6.347.600,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	18.549.400,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	18.549.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	58.341.320,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	2.922.500,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.494.100,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	48.924.720,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	8.362.400,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	4.662.400,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	3.700.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase		100 Persentase	229.452.500,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 Persentase	229.452.500,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6 Lembaga Kemasyarakatan	8.904.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			215 Pokmas / Ormas	200.547.800,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			30 Laporan	20.000.000,00
					KELURAHAN WOLOMARANG					450.294.240,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					450.294.240,00
7	01				KECAMATAN					450.294.240,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	223.544.140,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	-		100 Persentase	35.008.800,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen Dokumen	35.008.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	-		100 Persentase	29.019.400,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	1.679.500,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	14.436.700,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	5.903.200,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	30.554.700,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	30.554.700,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	114.587.640,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 paket Laporan	171.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan Laporan	16.567.200,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	97.849.440,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	14.373.600,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	12.173.600,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	2.200.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase		100 Persentase	226.750.100,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		100 Persentase	226.750.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 Pokmas / Ormas	209.950.100,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			133 Laporan	16.800.000,00
					KELURAHAN WAIOTI					432.043.648,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					432.043.648,00
7	01				KECAMATAN					432.043.648,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	174.373.648,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	17.048.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	17.048.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	14.466.400,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	0,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	2.971.400,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2.195.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5 Laporan	6.300.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	10.014.400,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	10.014.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	107.845.548,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9.996.108,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	97.849.440,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	24.999.300,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	14.455.900,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	4.593.200,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	5.950.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	40.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	40.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	40.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	207.750.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	207.750.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	2.150.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	205.600.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	9.920.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	9.920.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			15 Orang	9.920.000,00
					KELURAHAN NANGAMETING					457.876.578,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					457.876.578,00
7	01				KECAMATAN					457.876.578,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100% 100% 100% 100%		100 %	185.064.871,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	22.676.928,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	22.676.928,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	26.363.440,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	1.612.500,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.748.540,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			9 Paket	4.242.400,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	5.760.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	22.176.600,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	22.176.600,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	91.895.923,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	17.927.643,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	73.968.280,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	21.951.980,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	20.301.980,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	1.650.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	39.945.500,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaseKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	39.945.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	39.945.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	226.386.207,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	226.386.207,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	10.969.060,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	19.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas / Ormas	185.741.400,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	10.675.747,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	6.480.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerrintahan Umum	-		100 % 100 %	6.480.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6 Laporan	6.480.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					KELURAHAN WAIROTANG					400.216.890,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					400.216.890,00
7	01				KECAMATAN					400.216.890,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100% 100% 100% 100%		100 %	126.432.390,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	20.082.600,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4 Dokumen	20.082.600,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	14.737.100,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	967.600,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	4.552.300,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2.847.200,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17 Laporan	2.870.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	24.353.200,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	24.353.200,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	64.054.890,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	14.000.470,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	50.054.420,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	3.204.600,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	2.204.600,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	1.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	56.720.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaseKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	56.720.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			34 Laporan	56.720.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	217.064.500,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	217.064.500,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga Kemasyarakatan	8.979.300,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	30.135.200,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11 Pokmas / Ormas	168.010.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			17 Laporan	9.940.000,00
					KELURAHAN BERU					422.268.700,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					422.268.700,00
7	01				KECAMATAN					422.268.700,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	100 %		100 %	158.851.870,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	25.213.700,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14 Dokumen	25.213.700,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	37.059.770,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.866.600,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	8.071.970,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	7.960.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	6.001.200,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	11.160.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	15.494.700,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	15.494.700,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	61.159.620,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	10.892.400,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	50.267.220,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	19.924.080,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	9.823.200,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	8.250.880,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	1.850.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	52.967.900,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaseKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	52.967.900,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	52.967.900,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %		100 %	210.448.930,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	210.448.930,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	12.702.490,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	19.915.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10 Pokmas / Ormas	167.331.440,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			18 Laporan	10.500.000,00
					KELURAHAN KOTA BARU					435.432.039,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					435.432.039,00
7	01				KECAMATAN					435.432.039,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100% 100% 100% 100%		100 %	178.594.139,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	26.780.600,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14 Dokumen	26.780.600,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	24.009.100,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	672.900,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.931.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	3.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	4.205.200,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 Laporan	10.200.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	30.384.600,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	30.384.600,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	85.888.369,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	11.504.789,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	74.383.580,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	11.531.470,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	7.721.670,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	3.159.800,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	650.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	19.887.900,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	19.887.900,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3 Laporan	19.887.900,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	236.950.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	-		100 %	236.950.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4 Pokmas / Ormas	233.800.000,00
					KECAMATAN ALOK					4.209.260.789,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.209.260.789,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01				KECAMATAN					4.209.260.789,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD	100%		100 % 100 persentase	3.998.038.589,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	-		100 %	13.800.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10 Laporan	13.800.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	3.836.391.815,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			44 Orang/bulan	3.807.681.815,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15 Dokumen	28.710.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	21.221.400,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.032.400,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	9.122.400,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	8.225.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2.841.600,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	19.778.600,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	9.515.200,00
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	10.263.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	69.912.616,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36Laporan	19.998.996,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	49.913.620,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	36.934.158,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	26.449.358,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	9.484.800,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		100 %	155.895.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaseKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	155.895.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			30 Laporan	155.895.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	10.290.800,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PersentaseKoordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-		100 %	10.290.800,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10 Lembaga Kemasyarakatan	10.290.800,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	26.690.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 %	26.690.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	26.690.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	18.346.400,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	-		100 %	18.346.400,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3 Dokumen	18.346.400,00
					KECAMATAN ALOK BARAT					3.841.041.560,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.841.041.560,00
7	01				KECAMATAN					3.841.041.560,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	3.726.841.160,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persentase	18.437.500,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	18.437.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	-		100 Persentase	3.506.619.540,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan	3.465.969.540,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	40.650.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	-		100 Persentase	16.842.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	506.500,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	7.729.300,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	3.046.600,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	5.560.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	81.777.700,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			115 Unit	36.668.800,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	45.108.900,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	64.896.220,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1.197.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	14.774.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	48.924.720,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	38.267.800,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	34.967.600,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.050.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	2.250.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase		100 Persentase	101.732.800,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100 Persentase	101.732.800,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14 Dokumen	101.732.800,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase		100 Persentase	12.467.600,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 Persentase	12.467.600,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			22 Lembaga Kemasyarakatan	12.467.600,00
					KECAMATAN ALOK TIMUR					4.598.043.802,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.598.043.802,00
7	01				KECAMATAN					4.598.043.802,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100% 100% 100% 100%		100 %	4.406.748.202,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	-		100 %	9.370.500,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14 Laporan	9.370.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	4.199.348.170,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 Orang/bulan	4.162.988.170,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			13 Dokumen	36.360.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	34.986.900,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.143.900,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	12.034.200,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.200.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	6.008.800,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	5.600.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	33.615.800,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	2.548.400,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	31.067.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	49.436.872,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	21.413.012,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	28.023.860,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		100 % 100 %	79.989.960,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	63.460.760,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	3.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	13.029.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	129.174.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	129.174.200,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8 Laporan	129.174.200,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	19.431.400,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-		100 %	19.431.400,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8 Lembaga Kemasyarakatan	19.431.400,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	25.290.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 %	25.290.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerrintahan Umum			100 %	25.290.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %		12 Dokumen	25.290.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 %	17.400.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	17.400.000,00
					KECAMATAN BOLA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	17.400.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			3 Dokumen	17.400.000,00
7	01				KECAMATAN					1.817.465.074,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.817.465.074,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100%		100 %	1.573.484.474,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		100 %	13.092.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	13.092.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-		100 % 100 %	1.454.668.474,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	1.429.710.874,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	24.957.600,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	12.946.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1.086.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	4.934.000,00
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			40 Paket	456.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	6.470.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	7.397.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	7.397.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		100 % 100 % 100 %	36.225.920,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	7.065.360,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Laporan	1.098.200,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	28.062.360,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		100 % 100 % 100 %	49.155.080,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5 Unit	10.158.780,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	36.496.300,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	2.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%		100 %	173.826.300,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100 %	115.337.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	115.337.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	-		100 %	58.488.800,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2 Laporan	58.488.800,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		100 %	10.901.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		100 %	10.901.500,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5 Lembaga Kemasyarakatan	10.901.500,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%		100 %	31.082.800,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pengangan konflik sosial ketentuan peraturan perundangan - undangan	-		100 % 100 %	31.082.800,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			12 Laporan	15.822.800,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	15.260.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%		100 %	28.170.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		100 % 100 % 100 %	28.170.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			8 Dokumen	12.020.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8 Dokumen	13.600.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			2 Dokumen	2.550.000,00
					KECAMATAN DORENG					1.593.574.446,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.593.574.446,00
7	01				KECAMATAN					1.593.574.446,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	1.434.551.646,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		12 laporan	12.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	12.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2 Kegiatan	1.265.125.429,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13 Orang/bulan	1.238.139.529,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 Dokumen	26.985.900,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		5 Kegiatan	12.793.100,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	694.400,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.898.700,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.600.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	2.550.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100%	23.355.400,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 Unit	6.260.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	17.095.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100%	28.820.893,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	3.199.033,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	25.621.860,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		6 unit	92.456.824,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	87.716.824,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	3.740.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100%	131.204.600,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase layanan publik dan kecamatan	-		100%	131.204.600,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	131.204.600,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		100%	15.258.200,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			15.258.200,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			100% Lembaga Kemasyarakatan	15.258.200,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%	10.560.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		100%	10.560.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			100% Dokumen	10.560.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%	2.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-		100%	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			100% Dokumen	1.000.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			100% Dokumen	1.000.000,00
					KECAMATAN HEWOKLOANG					1.681.297.279,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.681.297.279,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01				KECAMATAN					1.681.297.279,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100Persentase		100 Persentase	1.475.739.279,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persentase	10.348.500,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	10.348.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persentase	1.287.827.337,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	1.251.708.937,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10 Dokumen	36.118.400,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persentase	18.292.500,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	6.817.300,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	7.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	4.475.200,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persentase	32.582.100,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	9.104.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7 Unit	23.478.100,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	31.840.182,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	6.304.922,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			16 Laporan	25.535.260,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persentase	94.848.660,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	83.648.960,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.200.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	9.999.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100Persentase		100 Persentase	165.378.300,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 Persentase	165.378.300,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			228 Laporan	131.040.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	34.338.300,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100Persentase		100 Persentase	10.649.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 Persentase	10.649.500,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7 Lembaga Kemasyarakatan	10.649.500,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100Persentase		100 Persentase	9.730.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 Persentase	9.730.000,00
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			50 Orang	9.730.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100Persentase		100 Persentase	19.800.200,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 Persentase	19.800.200,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			14 Dokumen	19.800.200,00
					KECAMATAN KANGAE					2.412.011.243,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.412.011.243,00
7	01				KECAMATAN					2.412.011.243,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Koordinasi dan penyusunan laporan capaina kinerja dan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan SKPD	1000%		100% %	2.177.011.543,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PersentaseHasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	-		100% %	12.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	12.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Keuangan Perangkat Daerah PersentaseKeuangan PerangkatDaerah	-		100% % 100% %	1.681.701.383,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18/14 Orang/bulan	1.656.501.383,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	25.200.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah PersentaseHasil AdministrasiUmum PerangkatDaerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		100% % 100% % 100% %	22.357.200,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			17 Paket	1.316.600,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			38 Paket	2.699.900,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	2.698.700,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			40 Paket	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			9258 Paket	4.042.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	9.600.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	33.630.100,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	23.630.100,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PersentasePenyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	-		100% % 100% %	66.382.220,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	27.655.860,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12.315.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	26.411.360,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasehasil Pemeliharaan barangmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100% %	360.940.640,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	29.662.360,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	30.328.600,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	950.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	299.999.680,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Preentase Layanan Publik Kecamatan	100%%		100% %	175.999.900,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaseHasil Kegiatandi tingkatKecamatan	-		100% %	116.732.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	116.732.000,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	17.520.800,00
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta			1 Unit	17.520.800,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	41.747.100,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	41.747.100,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%%		100% %	9.999.800,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan di tingkat Desa	-		100% %	9.999.800,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.800,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	100%%		100% %	26.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	-		100% %	26.000.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			12 Laporan	13.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	13.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentae Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%%		100% %	23.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-		100% %	23.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			9 Dokumen	5.780.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9 Dokumen	5.580.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			7 Dokumen	11.640.000,00
					KECAMATAN KEWAPANTE					2.045.281.395,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.045.281.395,00
7	01				KECAMATAN					2.045.281.395,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1.856.867.795,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	22.292.724,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	22.292.724,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	1.623.848.411,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	1.593.078.431,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	30.769.980,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	30.030.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3.544.900,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	17.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	8.985.600,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	41.881.200,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	31.881.200,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	67.740.460,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	17.475.500,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	18.534.900,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	31.730.060,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	71.074.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	53.136.600,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	5.800.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	3.849.100,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	8.288.800,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	135.200.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	-	-		-	135.200.000,00
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	133.680.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			13 Dokumen	1.520.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	18.654.600,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	18.654.600,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1 Lembaga Kemasyarakatan	18.654.600,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	3.400.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	3.400.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2 Dokumen	3.400.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	31.159.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-		-	31.159.000,00
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12 Dokumen	31.159.000,00
					KECAMATAN KOTING					1.725.944.025,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.725.944.025,00
7	01				KECAMATAN					1.725.944.025,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1.617.032.625,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	16.500.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	16.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	1.448.425.472,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			16 Orang/bulan	1.425.306.272,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	23.119.200,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	36.614.500,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7.637.100,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	24.527.400,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	4.450.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	23.910.200,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0			1 0	3.995.200,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	19.915.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	36.524.993,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	10.997.733,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	25.527.260,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	55.057.460,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	48.773.960,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	5.783.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	80.172.600,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	80.172.600,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	80.172.600,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	10.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	9.650.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	9.650.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0 Dokumen	9.650.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	9.088.800,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	9.088.800,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	9.088.800,00
					KECAMATAN LELA					2.006.984.332,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.006.984.332,00
7	01				KECAMATAN					2.006.984.332,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1.780.753.532,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	16.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30 Laporan	16.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	1.630.597.912,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19 orang Orang/bulan	1.598.741.312,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	31.856.600,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	17.839.400,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	1.256.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.608.400,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	6.300.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	4.675.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	9.999.800,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	9.999.800,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	39.284.460,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	13.749.200,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	25.535.260,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	67.031.960,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	67.031.960,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	174.866.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	108.146.700,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			482 Laporan	97.471.100,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	10.675.600,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	66.719.500,00
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta			7 Unit	66.719.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	9.999.100,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	9.999.100,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.100,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	23.671.200,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	23.671.200,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	23.671.200,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	17.694.300,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	17.694.300,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	17.694.300,00
					KECAMATAN MAGEPANDA					1.667.285.708,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.667.285.708,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01				KECAMATAN					1.667.285.708,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	1.435.286.188,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	6.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	1.296.437.198,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	1.265.237.198,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	31.200.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	6.822.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.090.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5.732.500,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	19.249.300,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	9.275.200,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	9.974.100,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	6.066.030,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.066.030,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100.711.160,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	98.987.360,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	1.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	723.800,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	169.999.520,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-		100 % 100 %	42.738.300,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	42.738.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang terlaksana	-		100 %	127.261.220,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	127.261.220,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	10.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 %	10.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	32.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 % 100 % 100 %	32.000.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			12 Laporan	16.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	16.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	20.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dana Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 %	20.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	10.000.000,00
					KECAMATAN MAPITARA					1.504.003.633,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.504.003.633,00
7	01				KECAMATAN					1.504.003.633,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	1.356.256.433,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	18.378.500,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	18.378.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	1.167.791.925,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang/bulan	1.141.223.925,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	26.568.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	11.757.200,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	455.600,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4.094.800,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1.206.800,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			31.750.700,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	9.275.200,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	22.475.500,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	26.662.860,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	2.200.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	24.462.360,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	99.915.248,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	98.591.448,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	600.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	723.800,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	114.462.700,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	114.462.700,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	114.462.700,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	14.584.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 %	14.584.500,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4 Lembaga Kemasyarakatan	14.584.500,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	6.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 %	6.800.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	6.800.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	11.900.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 %	11.900.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12 Dokumen	11.900.000,00
					KECAMATAN NELLE					1.569.081.509,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.569.081.509,00
7	01				KECAMATAN					1.569.081.509,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1.372.432.409,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	7.200.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan Laporan	7.200.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	1.176.951.189,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			11 orang Orang/bulan	1.146.351.189,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen Dokumen	30.600.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	10.761.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket Paket	879.200,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket Paket	1.121.500,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket Paket	5.760.800,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	24.411.100,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 Unit Unit	6.260.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit Unit	18.151.100,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	88.817.260,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan Laporan	966.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan Laporan	15.430.740,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan Laporan	72.419.620,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	64.291.360,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit Unit	59.572.360,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit Unit	1.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit Unit	3.719.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	147.849.400,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	118.329.400,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan Laporan	77.790.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12 Dokumen Dokumen	40.539.400,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	29.520.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan Laporan	29.520.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	10.999.700,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	0,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan Laporan	0,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	10.999.700,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	10.999.700,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	25.230.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	25.230.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen Dokumen	25.230.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	12.570.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-		-	12.570.000,00
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5Dokumen Dokumen	12.570.000,00
					KECAMATAN NITA					2.132.830.281,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.132.830.281,00
7	01				KECAMATAN					2.132.830.281,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1.963.490.581,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	58.883.700,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	28.818.100,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12Laporan	30.065.600,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	1.721.671.535,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	1.692.522.735,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	29.148.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	32.190.400,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1.443.400,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	5.931.200,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	15.645.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	9.170.800,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	2.048.400,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	2.048.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	39.624.086,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	520.600,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	14.641.126,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	24.462.360,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	109.072.460,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	101.122.260,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	7.950.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	114.592.100,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	58.248.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15 Laporan	34.490.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			15 Dokumen	23.758.500,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	29.739.600,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			2 Dokumen	29.739.600,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	26.604.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3 Laporan	26.604.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	9.999.600,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	9.999.600,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.600,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	44.748.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	44.748.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15 Dokumen	4.414.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			15 Dokumen	8.784.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			15 Dokumen	18.308.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			15 Dokumen	4.414.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15 Dokumen	4.414.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			15 Dokumen	4.414.000,00
					KECAMATAN PAGA					1.663.752.904,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.648.452.904,00
7	01				KECAMATAN					1.648.452.904,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota	6Laporan		6 Laporan	1.485.527.804,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TersedianyaDokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		17 dokumen/laporan	2.142.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	2.142.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji/Tunjangan ASN dan terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	-		13 org / 14 blnDokumen	1.183.649.674,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13/14 Orang/bulan	1.158.449.674,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10 Dokumen	25.200.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		6 paket	87.974.700,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	928.800,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	27.201.300,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	4.779.600,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	12.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	7.545.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	35.520.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	9.957.500,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	9.957.500,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		27 Laporan	61.951.870,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	399.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	12.528.150,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36 Laporan	49.024.720,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		4 paket	139.852.060,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	116.310.560,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	23.541.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27 Laporan		27 Laporan	113.884.300,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		24 dokumen	82.364.900,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	38.415.800,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12 Dokumen	43.949.100,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	-		3 Laporan	31.519.400,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			12 Dokumen	31.519.400,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	1Dokumen		1 Dokumen	16.481.400,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	16.481.400,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			14 Laporan Lembaga Kemasyarakatan	16.481.400,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60 Dokumen		60 Dokumen	10.379.400,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		60 dokumen	10.379.400,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	10.379.400,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Laporan		18 Laporan	22.180.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		18 Laporan	22.180.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			14 Dokumen	9.580.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			10 Dokumen	12.600.000,00
X					NON URUSAN					15.300.000,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					15.300.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota	6Laporan		6 Laporan	15.300.000,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TersedianyaDokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		17 dokumen/laporan	15.300.000,00
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	15.300.000,00
					KECAMATAN PALUE					1.958.981.725,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.958.981.725,00
7	01				KECAMATAN					1.958.981.725,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhnya Layanan Kesekretariatan	100 %		100 %	1.778.783.925,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya perencanaan, dan evaluasikinerja perangkat daerah	-		12 dokumen	13.454.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	13.454.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terselenggaranya pelkasanaanadministrasi keuanganyang baik	-		17 orang	1.455.491.085,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 Orang/bulan	1.424.457.885,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			24 Dokumen	31.033.200,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah admnistrasu umum perangkat daerahyang dilaksanakan	-		12 bulan	43.660.900,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.906.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	8.488.900,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	7.950.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	3.096.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7 Laporan	22.220.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	42.780.200,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	9.980.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	32.800.200,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-		12 bulan	103.469.440,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	5.620.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	97.849.440,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-		12 bulan	119.928.300,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	15.809.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	7.454.400,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	96.664.900,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		100 %	120.308.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	-		8 desa	64.238.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	52.238.500,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12 Dokumen	12.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	41.479.500,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			5 Dokumen	18.879.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	22.600.000,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	14.590.000,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4 Dokumen	14.590.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	9.999.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	9.999.800,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.800,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		100 %	26.060.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-		8 desa	26.060.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8 Laporan	17.910.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			6 Dokumen	8.150.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tersedianya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		100 %	23.830.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	-		8 desa	23.830.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			8 Dokumen	9.190.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8 Dokumen	14.640.000,00
					KECAMATAN TALIBURA					2.025.717.424,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.025.717.424,00
7	01				KECAMATAN					2.025.717.424,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100 %	1.792.219.124,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		100 %	12.226.500,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10 Laporan	12.226.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-		100 %	1.634.096.196,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 Orang/bulan	1.603.889.396,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	30.206.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	31.724.400,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	852.800,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11.038.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	9.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	5.083.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	5.750.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	37.441.400,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			29 Unit	37.441.400,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	48.102.228,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	266.700,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12.138.768,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	35.696.760,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	28.628.400,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	26.378.400,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	2.250.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%		100 %	151.008.300,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 % 100 % 100 %	133.457.900,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	133.457.900,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	17.550.400,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	17.550.400,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100% 100%		100 %	10.800.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 %	10.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100% 100%		100 %	36.030.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- 100 %		100 % 100 %	36.030.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	36.030.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%		100 %	35.660.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- 100 %		100 % 100 %	35.660.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			20 Dokumen	35.660.000,00
					KECAMATAN TANA WAWO					1.652.194.754,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.652.194.754,00
7	01				KECAMATAN					1.652.194.754,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	1.514.719.154,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	12.600.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	12.600.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	1.184.094.524,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	1.158.894.524,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen	25.200.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	58.648.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	1.161.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	12.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	7.095.200,00
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			0 Paket	991.800,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	37.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	74.286.500,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	9.980.400,00
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	64.306.100,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	83.069.730,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	3.594.150,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Laporan	6.088.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	73.387.080,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	102.020.400,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0 Unit	94.900.400,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	7.120.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	100 %		100 %	118.202.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	103.523.700,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0 Laporan	56.175.800,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0 Dokumen	47.347.900,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	14.678.500,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0 Dokumen	14.678.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	19.273.400,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 %	19.273.400,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			0 Lembaga Kemasyarakatan	19.273.400,00
					KECAMATAN WAIBLAMA					1.780.090.324,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.780.090.324,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01				KECAMATAN					1.780.090.324,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100 %	1.616.845.324,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		100 %	8.880.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9 Laporan	8.880.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-		100 %	1.338.848.331,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	1.303.248.331,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	35.600.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor	-		100 %	25.664.900,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.729.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	12.695.900,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72 Laporan	6.240.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	63.999.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			30 Unit	16.091.800,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			63 Unit	47.907.200,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	58.877.424,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6.352.704,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	52.524.720,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	120.575.669,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	89.485.469,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	750.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	30.340.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		100 %	106.292.300,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %	92.896.300,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7 Laporan	65.825.900,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	27.070.400,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	13.396.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	13.396.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		100 %	10.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 %	10.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100 %	21.272.700,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 %	21.272.700,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1 Laporan	12.750.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	8.522.700,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasann Pemerintahan Desa	100%		100 %	25.680.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 %	25.680.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7 Dokumen	9.150.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7 Dokumen	9.850.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			5 Dokumen	6.680.000,00
					KECAMATAN WAIGETE					1.885.472.759,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.885.472.759,00
7	01				KECAMATAN					1.885.472.759,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota	100 %		100 %	1.702.129.459,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		8 Dokumen	8.880.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9 Laporan	8.880.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2 Kegiatan	1.430.035.487,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	1.394.455.487,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	35.580.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	-		6 Kegiatan	34.336.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.526.200,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	10.585.300,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.025.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	16.200.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		3 Kegiatan	78.402.200,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	7.419.400,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	70.982.800,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		3 Kegiatan	59.708.472,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7.183.752,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	52.524.720,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		3 Paket	90.766.800,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	82.837.600,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	1.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	6.929.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		100 %	125.733.300,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-		100 %	108.880.700,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	73.073.500,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	35.807.200,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-		100 %	16.852.600,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	16.852.600,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	10.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	10.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	20.620.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-		100 %	20.620.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1 Laporan	11.560.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	9.060.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	26.990.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-		11 Desa	26.990.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			11 Dokumen	9.350.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11 Dokumen	9.860.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			7 Dokumen	7.780.000,00
					KECAMATAN MEGO					1.888.266.960,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.888.266.960,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01				KECAMATAN					1.888.266.960,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya layanan kesekretariatan	100 Persentase		100 Persentase	1.760.271.060,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teesusunnya dokumen perangkat daerah	-		100 Persentase	8.400.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12Laporan	8.400.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	1.587.631.950,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 Orang/bulan	1.561.997.450,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	25.634.500,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	-		1 Paket	9.561.400,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	9.561.400,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	6.260.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 Unit	6.260.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	64.060.220,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	5.138.600,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	58.921.620,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	84.357.490,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	80.619.690,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	3.737.800,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100Persentase		100 Persentase	107.995.900,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-		100 Persentase	107.995.900,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Laporan	107.995.900,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		100 %	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		100 %	10.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana	100Persentase		100 Persentase	10.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana	-		100 Persentase	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	10.000.000,00
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.206.485.115,00
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					5.206.485.115,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.206.485.115,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	2.824.991.711,00
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	25.283.200,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	25.283.200,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.589.382.211,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	2.510.554.211,00
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	78.828.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	102.601.900,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	20.939.300,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.800.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	13.397.600,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3 Laporan	57.465.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	55.343.560,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	20.101.400,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	35.242.160,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	52.380.840,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	38.471.240,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	8.000.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	5.909.600,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %		100 %	460.314.150,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PersentaseKebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan PersentaseKebijakan Teknis kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		100 Persentase 100 Persentase	460.314.150,00
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			20 Orang	18.544.300,00
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			50 Keluarga	74.279.600,00
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka			78 Orang	367.490.250,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-		-	848.061.954,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-		-	848.061.954,00
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			11 Dokumen	810.914.654,00
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			12 Orang	37.147.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-		-	126.187.600,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-		-	126.187.600,00
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			50 Orang	126.187.600,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-		-	94.373.000,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-		-	94.373.000,00
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			5 Dokumen	94.373.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-		-	852.556.700,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-		-	852.556.700,00
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			45 Orang	852.556.700,00
J U M L A H										1.276.384.427.172,00

Catatan : Uraian secara rinci dan lengkap dapat dilihat pada Aplikasi SIPD Tahun 2025

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran keberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. IKU daerah Kabupaten Sikka tahun dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SIKKA

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Target Kikerja Tahun 2025
1	IPM	Indeks	67.00
2	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,97
3	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,51
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00
5	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68,02
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45
7	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89,20
8	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62,57
9	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,58
10	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.53
11	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00
14	Presentase pemuda pelopor	%	70.00
15	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,04
17	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	222,000,000,000
18	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10,89
19	Persentase penduduk miskin	%	11.69
20	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57,95
21	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65
22	Perbedaan (Defiasi) Persentase Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00
23	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61
24	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71.70
25	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Target Kikerja Tahun 2025
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C
27	SAKIP	Nilai	B
28	Opini BPK	Opini	WTP
29	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2.18
30	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3,5

6.2. Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome (sasaran), yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU PD Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2025
I	IPM	67.00
I.1	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	8,97
	HLS (Harapan Lama Sekolah)	15,51
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	99.48
2	Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	110.25
3	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	96.84
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	0.25
5	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	33.45
6	Persentase SD Terakreditasi	97.73
7	Persentase Kelulusan SD /MI	100
8	Angka Kelulusan (AL) SD /MI	99.56
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99.99
10	Ratio Guru siswa SD/MI	0.06
11	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	2.19
12	Rata-RataKemampuan Numerasi SD	2.05
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	97.86
14	Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	109.45
15	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	85.39
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.44
17	Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	31.40
18	Persentase SMP/MTs Terakreditasi	93.05
19	Persentase Kelulusan SMP/MTs	100.00
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.19
21	Ratio Guru siswa SMP/MTs	1 : 28

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2025
22	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	2.25
23	Rata-RataKemampuan Numerasi SMP	2.19
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47.82
25	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	29.93
26	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	32.61
27	Angka Melek Huruf (AMH)	94.33
28	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15.52
I.2	UHH (Usia Harapan Hidup)	68,02
1	Jumlah kematian ibu	4.00
2	Angka Kematian Bayi	7.00
3	Insidensi HIV	0.18
4	Annual Paracite Incidence (API)	-
5	Succes Rate TB (BTA +)	95.00
6	Incidence Rate (IR) DBD	70.00
7	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21.18
8	Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	80.00
9	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	80.00
10	Prevalensi Wasting	7.60
11	Prevalensi Stunting	6.00
I.3	Persentase Penduduk Miskin	
I.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,04
1	Persentase Angkatan Kerja yang mendaftar yang ditempatkan	0,05
2	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	98.14%
3	Persentase penempatan tenaga kerja	99.35%
I.5	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	89,02
	IDG (Indeks Development Gender)	62,57
	TFR (Total Fertility Rate)	2,58
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	0,08
2	Rasio KDRT	4,10
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,58
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,19
5	TFR	17,5
6	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	61,75
7	Partisipasi PUS menjadi Akseptor	61,75
8	Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	28
9	Kampung KB	
I.6	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	0.53
1	Ketersediaan energi dan protein per kapita	3,411
2	Penguatan cadangan pangan	35
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	3
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	12

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2025
5	Skor pola pangan harapan	69
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	19
7	Penanganan daerah rawan pangan	15
I.7	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	70
1	Indeks Inovasi Daerah	60,1
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65
3	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100
I.8	Presentase pemuda pelopor	65
	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	6
	Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	28
	Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan	2
II	Pengeluaran Per Kapita	1,015,646.17
	Pertumbuhan Ekonomi	4,04
II.1	PDRB	3,891,009,700,000
1	Jumlah investor berskala nasional PMA	11
2	Jumlah investor berskala nasional PMDN	140
3	Jumlah inovasi	1
4	Promosi Investasi	2
5	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	10,41
6	Jumlah Barang Masuk dan Keluar	2,897,090
7	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1,73
8	Jumlah IKM Baru	120
9	Jumlah IKM Industri Pengolahan	1,428
10	Persentase Koperasi yang sehat	39.28
11	Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK	38
12	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	11,5
13	Persentase UMKM yang terkurasi	10,23
14	Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	1,867
15	Jumlah UMKM yang diberdayakan	1,655
16	Kontribusi PDRB dari Sektor Perikanan	12.33
17	Produksi perikanan (ton/tahun)	26,806
18	Nilai produksi perikanan (Rp /Tahun)	407,819,207,770
19	Pendapatan nelayan (Rp/Tahun)	20,050,109
20	Tingkat Konsumsi ikan (Kg/ kapita /tahun)	78.53
21	Kontribusi sektor pertanian dalam PDR	44,27%
22	Produksi tanaman pangan	179,756.70
23	Produksi tanaman Holtikultura	158,471.31
24	Produksi tanaman perkebunan	29,004.27
25	Produksi ternak besar	27,464
26	Produksi ternak kecil	156,136
27	Produksi ternak unggas	769,148
28	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	0.68
29	Jumlah Kunjungan Wisata	38,041
30	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1.94
31	Jumlah belanja wisatawan	77
32	Jumlah pelestarian dan pengembangan budaya	4
33	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2025
34	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2
35	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	67
II.2	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	57,95
1	Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	3.58
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Bekerjasama Dengan Dinas Sosial	42.86
3	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	100.00
II.3	IDM (Indeks Desa Membangun)	0.65
1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	-
2	Jumlah Desa Tertinggal	25
3	Jumlah Desa Berkembang	89
4	Jumlah Desa Maju	31
5	Jumlah Desa Mandiri	2
III.	Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah	13.00
III.1	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	46.56
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46.56
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	54.86
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	51.88
4	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	69.11
5	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik	65.64
6	IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)	47.47
7	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	7.50
8	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	76.54
9	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	98.51
10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	79.11
11	Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	30.61
12	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	31.56
13	Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	24.78
14	Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	100
15	Persentase konflik pertanahan yang ditangani	100
16	Persentase lahan yang disediakan untuk pembangunan	100
17	IKUH (Indeks Kualitas Urusan Perhubungan)	88.07
18	Cakupan layanan transportasi	76.69
19	Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi standar Keselamatan	82.48
20	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum	66.02
21	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	100
22	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	12.03
III.2	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71.70
1	Indeks Kualitas Air	53
2	Indeks Kualitas Udara	95
3	Indeks Tutupan Lahan	69
4	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	81
III.3	Indeks Resiko Bencana	123.38

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2025
1	Fisik	2,500,000,000
2	Ekonomi	120.840.000.000
3	Lingkungan	60.157,93
4	Jumlah Dokumen	5
5	Jumlah Regulasi	1
6	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100
7	Jumlah Desa Tanggu Bencana	10
IV.	Indeks Reformasi Birokrasi	C
IV.1	SAKIP	B
1	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	375
2	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	2,000
3	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15
4	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1
5	Indeks Kualitas perencanaan	100
6	Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017	100
7	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab: 70%	100
8	Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)	100
9	Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	100
IV.2	Opini BPK	WTP
1	Tingkat Maturitas SPIP	3
2	Tingkat Kapabilitas APIP	3
3	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	52
4	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu
5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	> 20
6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	> 10
7	Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	≥25%
8	Persentase Penyerapan Anggaran	100
9	Persentase MCP Pengelolaan BMD	100
IV.3	Indeks Kualitas kebijakan Publik	2.18
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1
2	Kebijakan internal SPBE	14
3	Tata Kelola SPBE	8
4	Manajemen SPBE	-
5	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100
6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	100
7	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100
8	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100
9	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	100
IV.5	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3,5
1	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan Yang Berkualitas	98.87
2	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	97
3	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	98
4	Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	70

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2025
5	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	95
6	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	95
7	Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	100
8	Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	1,500
9	Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	65
10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	20 OPD
11	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	5
12	Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pada ruang :	-
	Pelayanan Gawat Darurat	89%
	Pelayanan Rawat Jalan	94%
	Pelayanan Rawat Inap	94%
	Pelayanan Bedah Central	89%
	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	89%
	Pelayanan Intensif	89%
	Pelayanan Radiologi	89%
	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	94%
	Pelayanan Farmasi	89%
	Pelayanan Instalasi Gizi	89%
	Pelayanan Transfusi Darah	89%
	Pelayanan GAKIN	89%
	Pelayanan Rekam Medik	89%
	Pelayanan PROGNAS	89%

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.97
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.51
3	APM SD/MI	Angka	96.84
4	APM SMP/MTs	Angka	85.39
5	APK SD/MI	Angka	110.25
6	APK SMP/MTs	Angka	109.45
7	Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	1:32
8	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio	1:28
9	Angka Melek Huruf	Angka	94.33
10	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	99.48
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka	0.25
12	Persentase Pendidik Pada Jenjang SD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	33.45
13	Persentase SD yang terakreditasi	%	97.73
14	Persentase Kelulusan SD/MI	%	100
15	Angka Kelulusan SD/MI	Angka	99.56
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	99.99
17	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD		2.19
18	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD		2.05
19	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	97.86
20	Angka Putus Sekolah SMP/Mts		0.44

No	Indikator	Satuan	Target 2025
21	Persentase Pendidik Pada Jenjang SMP/Mts yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	31.4
22	Persentase SMP/Mts terakreditasi	%	93.05
23	Persentase Kelulusan SMP/Mts	%	100
24	Angka Kelulusan SMP/Mts	Angka	98.19
25	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47.82
26	Persentase Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana Bidang PAUD, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru PAUD	%	29.93
27	Persentase Satuan PAUD terakreditasi	%	32.61
28	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	15.52
	Kesehatan		
1	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	7
2	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	4
3	Insidensi HIV	Angka	0,18
4	Annual Paracite Incidence (API)	/1000 penduduk	0
5	Succes Rate TB (BTA +)	%	95
6	Incidence Rate (IR) DBD	100.000 penduduk	70
7	Prevalensi Wasting	%	7,6
8	Prevelensi Stunting	%	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	
2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	46.56
3	Persentase Drainase Skala Kota Dalam Kondisi Baik	%	69.11
4	Prsentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	%	51.88
5	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan (IKPU)	Indeks	57.61
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	54.86
	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar		
2	Indeks Kualitas Urusan Permukiman	%	47,47%
3	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%	7,50%
4	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	%	76,54%
5	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	%	98,51%
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	%	79,11%
7	Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	%	30,61%
8	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	%	31,56%
9	Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	%	24,78%
10	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	%	100
11	Persentase Konflik Pertanahan yang ditangani	%	100
12	Persentase Lahan Yang disediakan untuk pembangunan	%	100
1	Jumlah Regulasi Daerah yang Ditegakkan	Angka	7
2	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel		76.5
3	Jumlah SOP	SOP	4
4	Jumlah Inovasi	buah	1
	Sosial		
1	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57,95

No	Indikator	Satuan	Target 2025
2	Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	3,58
3	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	%	100
	Tenaga Kerja		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	0.05
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	%	1,9
2	Persentase Angka prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate/mCPR)	%	42
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	24,50
4	Rasio KDRT Terhadap Anak	Rasio	3,60
5	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Rasio	2,08
6	Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama
	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.70
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	52.53
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.51
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	68.98
5	Persentase Penanganan Sampah	%	81.08
	Kependudukan Catatan Sipil		
1	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	%	98.87
2	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	%	97
3	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga(KK)	%	98
4	Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak(KIA)	%	70
5	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	%	95
6	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	%	60
7	Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	%	31
8	Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	%	100
9	Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	duku	150
10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	OPD	12
11	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	MOU	5
12	Persentase Pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	2
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Penurunan Jumlah desa sangat tertinggal	Desa	1
2	Penurunan Jumlah desa tertinggal	Desa	10
3	Penurunan Jumlah desa berkembang	Desa	5
4	Penurunan Jumlah desa Maju	Desa	5
5	Penurunan Jumlah desa Mandiri	Desa	1
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.649
	Perhubungan		
1	Indeks Kualitas Urusan Perhubungan	Indeks	88,07
2	Cakupan Layanan Transportasi	%	76,69
3	Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	82,48
4	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	%	66,02
5	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	100,00
6	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	12,03
	Komunikasi dan Informatika		

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.18
2	Kebijakan Internal SPBE		1
3	Tata Kelola SPBE		14
4	Manajemen SPBE		8
	Koperasi dan UKM		
1	Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Koperasi	unit	50
2	Jumlah Koperasi Sehat	unit	15
3	Jumlah UMKM yang terkurasi	unit	2814
	Penanaman Modal		
1	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	237,000,000,000
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Unit	11
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Unit	140
4	Promosi Investasi	kali	2
	Pemuda dan Olahraga		
1	Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	orang	28
2	Jumlah Pemuda Memperoleh Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan	orang	300
	Kebudayaan		
1	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah	1
2	Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1
	Perpustakaan		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	27,56
2	Nilai tingkat kegemaran membaca	Indeks	29,36
	Kearsipan		
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	%	55,55
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan	%	55,55
	Urusan Pilihan		
	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi Perikanan	ton	26,805.74
2	Konsumsi Ikan	Kg/kapita	78.53
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	13
4	Nilai Produksi Perikanan	Nilai	407,819,207,770
5	Pendapatan Nelayan	Rp	20,050,109
	Pariwisata		
1	Kontribusi Sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0.68
2	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	38,041
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.94
4	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/Tahun	77
	Pertanian		
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	38.23
2	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	158,471.31
3	Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	29,004.27
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	186,365.92
5	Produksi Ternak Besar	Ekor	27,464
6	Produksi Ternak Kecil	Ekor	156,136
7	Produksi Ternak Unggas	Ekor	769,148
	Perdagangan		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,81
2	Jumlah barang masuk dan keluar	Ton	3.817.308
	Perindustrian		
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,73

No	Indikator	Satuan	Target 2025
2	Jumlah Industri pengolahan	unit	1424
3	Jumlah IKM	unit	120
Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas			
	SETWAN/SETDA		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	%	100
3	Nilai SAKIP	Nilai	B
	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah		32.6
	Persentase Layanan Administrasi		83.5
	Perencanaan		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen RKPD	Dokumen	2
3	Indeks Kualitas Perencanaan		77
	Litbang		
1	Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Untuk Kebijakan Pembangunan Daerah	%	75
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	A (70)
4	Jumlah Penelitian		4
5	Jumlah Inovasi		26
	Keuangan		
1	Capaian Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan regulasi	%	100
2	Penetapan APBD tepat waktu	%	Tepat Waktu
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	> 20
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	>10
5	Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	%	> 25
6	Persentase Penyerapan Anggaran	%	100
7	Persentase MCP Pengelolaan BMD	%	100
	Pendapatan		
1	Derajat fiskal daerah		10,89
2	Persentase Peningkatan PAD		1,50
	Kepegawaian		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	50.18
	Inspektorat		
1	Tingkat Maturitas		3
2	Tingkat Kapabilitas APIP		3
3	Persentase Hasil Temuan Yang ditindaklanjuti		51
	Kesbangpol		
1	Persentase Peran serta masarakat ang ikut Pemilu	%	88
2	Cakupan Partai Politik ang di bina	%	100
3	Persentase Penurunan Konflik konflik sosial	%	88.24

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RKPD ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan tahunan teknokratik yang menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan pendekatan berbasis kinerja.